



Many Faces of Political Islam

in the Middle East

Arah Baru Gerakan Politik Islam
Pasca-Arab Spring

Editor:
Nostalgawan Wahyudhi

Penulis:
Nostalgawan Wahyudhi • M. Fakhry Ghafur
Dhurorudin Mashad • M. Hamdan Basyar

“The publication of *Many Faces of Political Islam in the Middle East: The New Direction of the Post-Arab Spring Islamic Political Movement* is very timely to deepen the meaning of the latest trends of the current political movement in the Middle East. Starting from the assumption that the ideology and work of the Islamic movement is not monolithic and homogeneous, the chapters in this book — the result of a study by Indonesian researchers — highlight the similarities and differences between the experiences of Islamic movements in the Middle East through the Arab Spring. This book will be the main reference application of the post-Islamism perspective in understanding the dynamics of Islamic politics in the Middle East. This work is suitable for reference by scientists, students, foreign policy makers and also general readers who want to delve into the post-Arab Spring political developments.”

—**Ishtiaq Hossein**

Assoc. Professor of
International Relations
International Islamic University Malaysia
(IIUM)



Many Faces of Political Islam

in the Middle East

Arah Baru Gerakan Politik Islam
Pasca-Arab Spring



Buku ini tidak diperjualbelikan.

Dilarang mereproduksi atau memperbanyak seluruh atau sebagian dari buku ini dalam bentuk atau cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

All Rights Reserved

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Many Faces of Political Islam in the Middle East

Arah Baru Gerakan Politik Islam
Pasca-Arab Spring

Editor:

Nostalgawan Wahyudhi

Penulis:

Nostalgawan Wahyudhi | M. Hamdan Basyar
Dhurorudin Mashad | M. Fakhry Ghafur

LIPI Press

Buku ini tidak diperjualbelikan.

© 2020 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Pusat Penelitian Politik

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Many Faces of Political Islam in the Middle East: Arah Baru Gerakan Politik Islam Pasca-Arab Spring/Nostalgia Wahyudhi (Ed.)—Jakarta: LIPI Press, 2020.

xi hlm. + 252 hlm.; 14,8 × 21 cm

ISBN 978-602-496-170-1 (cetak)
978-602-496-151-0 (e-book)

1. Politik Islam
3. Arab

2. Demokrasi

297.272

Copy editor : Fadly Suhendra dan Tantri Dwi A.
Proofreader : Noviasuti Putri Indrasari
Penata isi : Rahma Hilma Taslima
Desainer sampul : D.E.I.R. Mahelingga
Keterangan : Foto sampul milik Nostalgia Wahyudhi.
Foto merupakan bagian latar dalam Masjid Besar Imam Malik,
Carthage, Tunisia. Diambil 15 April 2018 waktu
setelah shalat maghrib.

Cetakan Pertama : Oktober 2020



Diterbitkan oleh:
LIPI Press, anggota Ikapi
Gedung PDDI LIPI, Lantai 6
Jln. Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta 12710
Telp.: (021) 573 3465
E-mail: press@mail.lipi.go.id
Website: lipipress.lipi.go.id

 LIPI Press
 @lipi_press

Buku ini merupakan karya buku yang terpilih
dalam Program Akuisisi Pengetahuan Lokal 2020
Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press),
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



PENGANTAR PENERBIT	vii
PRAKATA	ix
Bab 1 Politik Islam di Timur Tengah Pasca- <i>Arab Spring</i> <i>Nostalgiawan Wahyudhi & M. Fakhry Ghafur</i>	1
Bab 2 Politik Islam di Negara yang Tidak Terdampak <i>Arab Spring</i> : Aljazair, Sudan, Maroko, Somalia, dan Lebanon <i>Dhurorudin Mashad</i>	27
Bab 3 Politik Islam di Negara yang Sedikit Terdampak <i>Arab Spring</i> : Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab dan Kuwait <i>Nostalgiawan Wahyudhi</i>	77
Bab 4 Politik Islam di Negara yang Terdampak Arab Spring: Tunisia, Mesir, dan Libya <i>M. Hamdan Basyar</i>	117
Bab 5 Politik Islam di Negara Masih Berkemelum: Suriah dan Yaman <i>M. Fakhry Ghafur</i>	167
Bab 6 Arah Baru Politik Islam? Sebuah Refleksi Pasca- <i>Arab Spring</i> <i>Nostalgiawan Wahyudhi, M. Hamdan Basyar, Dhurorudin Mashad, & M. Fakhry Ghafur</i>	195

Buku ini tidak diperjualbelikan.

LAMPIRAN	235
DAFTAR SINGKATAN	243
INDEKS.....	247
BIOGRAFI PENULIS	251



Sebagai penerbit ilmiah, LIPI Press mempunyai tanggung jawab untuk terus berupaya menyediakan terbitan yang berkualitas. Upaya tersebut merupakan salah satu perwujudan tugas LIPI Press untuk turut serta mewujudkan sumber daya manusia unggul dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Penerbitan buku ini telah melalui proses *peer review* sebagai salah satu upaya penjaminan mutu publikasi ilmiah. Buku ini merupakan intisari hasil penelitian panjang dari para peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI sejak 2013–2018, khususnya mengenai gerakan politik Islam di kawasan Timur Tengah pasca *Arab Spring*. Buku ini menunjukkan bagaimana sikap negara-negara di kawasan Timur Tengah dalam menghadapi pengaruh dan tantangan perilaku politik yang senantiasa berubah pasca *Arab Spring*. Secara komprehensif, para penulis menggambarkan berbagai wajah politik Islam di kawasan Timur Tengah pasca *Arab Spring* dari perspektif Indonesia.

Semoga buku ini dapat menjadi referensi, khususnya bagi peminat kajian Timur Tengah atau Dunia Arab, politik Islam, dan demokrasi. Dengan demikian, diharapkan dapat mendorong

Buku ini tidak diperjualbelikan.

peningkatan kajian komparatif tentang politik Islam dan transisi menuju demokrasi dengan Indonesia yang sama-sama berpenduduk mayoritas Muslim.

LIPI Press

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Arab Spring membawa perubahan besar pada politik Timur Tengah. Banyak yang berharap bahwa *Arab Spring* bukan hanya revolusi Arab jilid dua setelah revolusi Iran pada tahun 1979, melainkan era baru kebangkitan demokratisasi di Timur Tengah yang akan memberi ruang bagi gerakan politik Islam untuk berpartisipasi secara terbuka di ranah publik. Sarjana-sarjana studi Islam beranggapan bahwa *Arab Spring* merupakan jembatan menuju *Islamist winter*. *Islamist winter* diartikan sebagai ketakutan dunia akan tumbuhnya kalangan Islamis yang memegang kekuasaan di dunia Arab.¹ Hal ini mengarah pada notasi apakah radikalisme Islam akan tumbuh di Timur Tengah.

Gerakan *Arab Spring* bukanlah gelombang statis. Politik Timur Tengah senantiasa bergerak secara dinamis. Kemenangan Muhammad Mursi di Mesir, kekuasaan Recep Tayyip Erdogan yang semakin kuat di Turki, kemenangan Ennahda di Tunisia, dan bangkitnya Ikhwanul Muslimin secara terbuka hampir di semua negara yang dilanda *Arab Spring* tidaklah secara linier dikontotasi sebagai kebangkitan radikalisme Islam di Timur Tengah. Hal ini senada dengan Asef Bayat yang mengatakan bahwa *Arab Spring* me-

¹ Michael J. Totten, David Schenker, dan Hussain Abdul-Hussain, "Arab Spring or Islamist Winter? Three Views," *World Affairs* 174, no. 5 (Januari/Februari 2012): 23–42.

rupakan momentum baru bagi transformasi menuju *post-Islamism*, dengan sebuah gejala baru *the fusion of religiosity and rights, faith and freedom, Islam and liberty, as an attempt to transcend Islamism by building a pious society within non-religious state*.²

Pada posisi ini, Asef Bayat memiliki *standing position* yang berbeda dengan Olivier Roy. Roy memercayai bahwa gerakan politik Islam di dunia Islam tidak akan pernah berhasil karena konsep yang diajukan bersifat utopia. Dalam buku *The Failure of Political Islam*, Roy menggambarkan berakhirnya suatu periode dan dimulainya babak baru dari periode lain; dalam hal ini politik Islam tidak diterima, bahkan oleh masyarakat Islam itu sendiri.³ Generalisasi berlebihan yang dilakukan oleh Roy mendapatkan kritikan luas. Asef Bayat menilai bahwa Roy melakukan simplifikasi terhadap dinamisnya perkembangan politik Islam dari masa ke masa. Sementara itu, dalam konsep Asef Bayat tentang *post-Islamism*, politik Islam secara substansial tidak mati, tetapi bertransformasi secara lebih terbuka untuk membangun masyarakat yang religius di tengah sistem politik yang lebih demokratis dan sekuler.

Namun, temuan di buku ini tidak membenarkan semua klaim tentang gejala *post-Islamism*. Kudeta militer terhadap Muhammad Mursi memunculkan kekuasaan militer yang otoritarian di Mesir, runtuhnya Moammar Khadafi memunculkan perang dua pemerintahan (Dawn dan Tripoli) di Libya, perpecahan di Irak dan Suriah yang tak kunjung selesai, Yaman yang bergejolak, negara-negara Teluk yang semakin memproteksi diri dari Ikhwanul Muslimin yang dianggap organisasi teroris, hingga blokade Arab Saudi terhadap Qatar. *Arab Spring* berujung pada harapan kosong Timur Tengah yang lebih demokratis karena hanya berhasil menumbuhkan demokrasi di satu negara, Tunisia, tempat gelombang demokratisasi itu dimulai.

² Asef Bayat, *Post-Islamism: The Changing Faces of Political Islam* (Oxford: Oxford University Press, 2013), hlm 4–9.

³ Olivier Roy, *The Failure of Political Islam* (Cambridge: Harvard University Press, 1994).

Fenomena ini kami sebut dengan istilah *backward bending*. *Arab Spring* secara umum tidak menumbuhkan demokrasi (kecuali di Tunisia), dan justru menjadi arus balik bagi tumbuhnya otoritarianisme baru di Timur Tengah. Kegagalan *Arab Spring* dalam menumbuhkan iklim demokrasi di Timur Tengah merupakan fenomena *Arab Exceptionalism*, yakni dunia Arab secara politik dan kultural lebih sulit untuk menerima demokrasi. Praktik-praktik politik dan kekuasaan otoriter (dinasti) yang telah mengakar di Timur Tengah tidak bisa diubah serta-merta dengan jalur revolusi atau *regime change*. Jika negara tersebut memiliki kekuatan elite tunggal yang kuat, *re-enforcement* politik secara *top-down* akan terjadi untuk menguasai masyarakat. Jika tidak, polarisasi kekuatan politik bersifat lebih merata sehingga aktor-aktor politik akan saling menguasai satu sama lain dalam konflik sipil yang panjang dan berdarah.

Tunisia berhasil menumbuhkan demokrasi setelah revolusi dan *regime change* karena transformasi nilai-nilai demokrasi di negara bekas jajahan Prancis itu sudah tumbuh sebelum *Arab Spring*. Struktur politik, sosial, dan budaya masyarakat di negara *francophone* tersebut lebih siap menerima perubahan ke arah yang demokratis. Demokratisasi ini mengubah satu wajah politik Islam di Tunisia menjadi lebih terbuka dan moderat. Gerakan politik Islam terbesar di Tunisia, Ennahda, melakukan transformasi dari gerakan radikal menjadi partai politik dengan menjadikan Turki sebagai *prototype* dibandingkan apa yang dilakukan Mursi di Mesir.

Hal ini tidak hanya berlaku di Tunisia. Perubahan sosial dan politik di Timur Tengah yang terjadi pasca-*Arab Spring* berkorelasi dengan munculnya berbagai wajah baru gerakan politik Islam. Keniscayaan ini tumbuh karena politik Islam bersifat responsif terhadap perubahan sosial dan politik di lingkungannya. Selamat membaca.

Jakarta, Agustus 2020

Nostalgawan Wahyudhi



BAB 1

POLITIK ISLAM DI TIMUR TENGAH PASCA-ARAB SPRING

Nostalgiaawan Wahyudhi & M. Fakhry Ghafur

Dinamika politik di Timur Tengah senantiasa menarik untuk dikaji dan didiskusikan dalam ruang lingkup politik global dewasa ini, terutama di tengah semakin menguatnya tuntutan terhadap perubahan rezim dan pemberdayaan aspirasi rakyat pasca-*Arab Spring*. *Arab Spring* bermula di Tunisia pada Desember 2010, kemudian menyebar ke sejumlah negara lainnya, seperti Mesir, Libya, Aljazair, Yaman, Bahrain, dan Suriah yang sampai saat ini masih bergejolak.

Buku ini merupakan upaya kristalisasi hasil-hasil penelitian Tim Agama dan Politik LIPI sejak tahun 2013 sampai tahun 2018 yang mencakup 15 negara (Aljazair, Maroko, Sudan, Somalia, Lebanon, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Kuwait, Tunisia, Mesir, Libya, Suriah, dan Yaman), sebagai upaya mencari berbagai pola kekuatan politik Islam di Timur Tengah pasca-*Arab Spring* (lihat Gambar 1). Pembahasan buku ini diarahkan untuk mendapatkan *lesson learn* dalam konteks Indonesia.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Sumber: Maps of The Arab World¹

Gambar 1.1 Peta Timur Tengah

Pasca-*Arab Spring*, transisi demokrasi dapat berlangsung (ditandai dengan adanya pemilu parlemen dan pemilu presiden yang lebih kompetitif), namun sistem demokrasi yang berkembang masih kurang demokratis jika dibandingkan sistem demokrasi poliarki.² Sistem politik yang ada masih cenderung eksklusif dan dikuasai oleh segelintir elite, peran militer masih sangat dominan, dan konsolidasi demokrasi pun belum berjalan sepenuhnya sebagai akibat budaya politik yang masih kurang demokratis.

Selain persoalan demokratisasi yang belum selesai, fenomena *Arab Spring* juga menorehkan pengaruhnya dalam dinamika politik di sejumlah negara Timur Tengah, yakni runtuhnya sejumlah rezim yang sudah berkuasa selama beberapa dekade serta kebangkitan kembali kekuatan politik Islam. Meskipun rezim telah runtuh dan semangat demokrasi ditegakkan, tidak semua negara yang terim-

¹ "Maps of The Arab World," diakses pada 3 Februari 2018 dari <https://arabspringanditscontexts.files.wordpress.com/2014/01/arabspring-map-black-and-white.jpg>.

² Lihat definisi demokrasi yang dikemukakan Robert Dahl, *Demokrasi dan Para Pengritiknya* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992), hlm 111.

bas *Arab Spring* berujung pada pembentukan sistem negara yang demokratis. Sebaliknya, beberapa negara mengalami *backward bending process* atau pembalikan kondisi menuju sistem otoriter baru.³

Diadaptasi dari penelitian yang dilakukan Martin Beck dan Simon Huser, Timur Tengah pasca-*Arab Spring* mencerminkan beberapa tipe negara atau sistem politik. *Pertama*, kelompok negara yang tidak terpengaruh dan masuk dalam kategori “dikecualikan” atau terhindar dari dampak *Arab Spring*. *Kedua*, kelompok negara yang sedikit terpengaruh. Dalam penelitian kami, negara yang masuk kategori ini mayoritasnya menganut sistem monarki dan tergabung dalam *Gulf Cooperation Council* (GCC). Meskipun pada awal 2011 sempat terjadi pergolakan dengan maraknya demonstrasi, negara-negara tersebut berhasil menjaga pemerintahannya sehingga dapat berjalan stabil tanpa konflik yang luas. *Ketiga*, negara-negara yang terdampak cukup signifikan yang disertai dengan kejatuhan rezim. Beck dan Huser menyebutnya sebagai *Stable/Unstable Systems of Transition* atau negara yang melewati masa transisi, baik secara stabil maupun tidak. *Keempat*, kelompok negara yang terpengaruh signifikan, tetapi rezim otoriter dapat bertahan disertai dengan konflik gawat yang berkelanjutan atau disebut *Unstable Authoritarian Systems*.⁴

Kelompok pertama atau negara yang tidak terdampak (tidak terpengaruh) secara signifikan oleh *Arab Spring* adalah Aljazair, Maroko, Sudan, Somalia, dan Lebanon. Kelima negara ini diang-

³ Nostalgawan Wahyudhi, M. Hamdan Basyar, Dhurorudin Mashad, dan M. Fakhry Ghafur, “Politik Islam di Timur Tengah Pasca Arab Spring: Sebuah Pembelajaran,” *Policy Paper* Pusat Penelitian Politik LIPI (Jakarta: P2P-LIPI, 2019), hlm 1.

⁴ Martin Beck dan Simone Huser, “Political Change in the Middle East: An Attempt to Analyze the “Arab Spring,” *German Institute of Global and Area Studies Working Paper*, no.203 (August 2012). Beck dan Huser mengklasifikasikan respon negara Timur Tengah terhadap Arab spring dalam empat kategori besar yang didasarkan pada 2 klasifikasi sistem politik: otoritarian dan transisi. Klasifikasi diatas merupakan adaptasi dari kategori Beck dan Huser.

gap sebagai “pengecualian” dari pergolakan politik dan konflik sektarian yang parah. Di Aljazair, protes rakyat sebagai imbas dari *Arab Spring* tidak banyak berpengaruh terhadap perubahan rezim militer—walaupun gerakan protes dan perlawanan terhadap pemerintah terus berlangsung di sejumlah kota. Gerakan protes ini tidak dapat menggulingkan rezim militer yang berkuasa.⁵ Masih kuatnya peran militer dalam politik Aljazair menjadi alasan tidak berjalannya proses demokratisasi. Dengan kata lain, rezim militer sebagai pemegang otoritas tertinggi berusaha sekuat tenaga untuk menghindari perubahan rezim karena dapat berpengaruh terhadap kekuasaan militer. Selain itu, keberhasilan kelompok Islam yang tergabung dalam gerakan oposisi dianggap sebagai ancaman “lama” rezim. Koalisi oposisi anti-rezim tidak dapat berbuat banyak karena semakin represifnya pemerintah dalam memberangus gerakan Islam.⁶ Selama militer masih berkuasa, politik Aljazair akan tetap berada dalam sistem politik otoritarianisme.

Sama halnya dengan Aljazair, Maroko merupakan negara yang paling sedikit terpengaruh *Arab Spring* sehingga kalangan akademisi menyebut istilah “Maroccon Exceptionalism” untuk menggambarkan dan menganalisis dinamika politik di Maroko pasca-*Arab Spring*.⁷ Salah satu faktor yang menyebabkan rezim Maroko dapat bertahan adalah respons cepat kerajaan dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat, terutama dalam hal hak-hak perempuan, penegakan HAM, dan kebebasan pers. Meskipun ada reformasi konstitusi, Islam masih

⁵ Nostalgawan Wahyudhi, “Problematika Kekuatan Politik Islam di Aljazair: Politik Islam, Otoritarianisme-Militer, dan Krisis Legitimasi di Aljazair,” dalam *Problematika Kekuatan Politik Islam di Yaman, Suriah dan Aljazair*, ed., Muhammad Fakhry Ghafur (Bandung: Pustaka Jaya, 2016), hlm 137–180.

⁶ Lahouari Addi, “Political and Democracy: The Case of Algeria,” dalam *Democracy’s Victory and Crises*, ed., A. Hadenius (Cambridge University Press, 1997), hlm 105–122. Lihat juga Rabah Ghezali, “Why Has the *Arab Spring* Not Spread to Algeria,” *Huffington Post*, 3 April 2011, diakses pada 3 Juli 2018 dari https://www.huffpost.com/entry/why-has-the-arab-spring-n_b_844182.

⁷ Mohammed Hashas, “Moroccan Exceptionalism Examined: Constitutional Insights pre-and post-2011,” *IAI Working Papers* 23, no.34 (Desember 2013).

dipertahankan dan dicantumkan sebagai agama resmi negara dan raja sebagai pemegang otoritas tertinggi keagamaan. Konstitusi baru ini mempertahankan sistem yang telah ada dan menjaga religiusitas keislaman yang dikehendaki mayoritas masyarakat Muslim di Maroko.⁸

Sementara itu, dalam konteks politik Lebanon, pengaruh *Arab Spring* tidak begitu signifikan jika dibandingkan negara tetangganya, Suriah. Pergolakan politik dan konflik sektarian yang terjadi tidak lepas dari sejarah panjang perjalanan negara dengan beragam etnis tersebut jauh sebelum meletusnya *Arab Spring*. Lebanon pun kerap menjadi ajang pertarungan antar-kekuatan politik regional, misalnya krisis Israel-Palestina, konflik Sunni-Syiah, maupun perang saudara di Suriah. Oleh karena itu, ketika gelombang *Arab Spring* menerpa, Lebanon tidak begitu terdampak dengan pergolakan politik yang berujung pada kejatuhan rezim. Selain itu, masih kuatnya sistem pembagian kekuasaan yang telah disepakati melalui “*Al-Mitsaq Al-Wathani*” atau Pakta Nasional oleh berbagai kelompok keagamaan di Lebanon juga menjadi penyebab *Arab Spring* tidak signifikan pengaruhnya di Lebanon.⁹ Kekuatan politik Islam yang berkembang di Lebanon pun tidak muncul akibat imbas dari *Arab Spring*, tetapi karena kondisi politik Lebanon saat Revolusi Cedar atau setelah terbunuhnya Perdana Menteri Rafiq Hariri pada Februari 2005. Saat itu, kekuatan politik terpolarisasi menjadi dua blok, yaitu blok 14 Maret yang dimotori oleh Mustaqbal Movement dari kalangan Islam Sunni dan blok 8 Maret di bawah pimpinan kelompok Syiah (*Hizbullah* dan Amal). Kekuatan politik Islam Sunni di Lebanon pun bukan entitas tunggal, melainkan terpecah dalam beberapa kelompok, seperti

⁸ Indriana Kartini, “Problematika Kekuatan Politik Islam di Maroko,” dalam *Problematika Kekuatan Politik Islam di Maroko, Sudan, dan Somalia*, ed., Muhammad Fakhry Ghafur (Jakarta: Mahara Publishing, 2016), hlm 61–92.

⁹ Daniel Meier, “The Effects of *Arab Spring* and Syirian Uprising on Lebanon,” *Paper CLS Visiting Fellow-St. Anthony’s College, University of Oxford* (May 2013), diakses pada 12 Maret 2018 dari <https://www.lebanesestudies.com/wp-content/uploads/2013/10/daniel-May-.pdf>.

Harakah Al-Ahbash, Harakah Tauhid, dan Jama'ah Islamiyyah yang berafiliasi dengan kelompok Ikhwanul Muslimin.¹⁰

Kelompok kedua merupakan negara-negara yang sedikit terpengaruh oleh fenomena *Arab Spring*. Mayoritas negara ini menganut sistem monarki, baik absolut maupun konstitusional, dan tergabung dalam GCC, yaitu Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Kuwait. Meskipun gelombang *Arab Spring* tidak berdampak signifikan, dalam konteks politik keamanan regional, posisi negara-negara ini sedikit terancam dengan munculnya pergolakan dan kebangkitan kelompok radikal yang sudah lama terpinggirkan secara sosial, politik, dan ekonomi. Sebagai contoh, menguatnya jaringan Ikhwanul Muslimin (IM), Al-Qaeda dan *Islamic State in Iraq and Syria* (ISIS); serta kebangkitan pergerakan Syiah di Saudi, Bahrain, dan Oman. Sikap otoriter, diskriminatif, ketimpangan sosial yang tinggi, pemberangusan kebebasan, terhambatnya perubahan kepemimpinan, dan kurangnya keadilan dalam distribusi kekayaan menjadi faktor penyebab tumbuhnya kekuatan oposisi anti-rezim.

Selain menguatnya kekuatan oposisi, dinamika politik regional kawasan Teluk pasca-*Arab Spring* juga diwarnai sepak terjang negara-negara GCC pimpinan Arab Saudi yang memainkan peran penting di sejumlah negara terdampak, misalnya Mesir, Libya, Yaman, dan Suriah. Meskipun dukungan masing-masing negara berbeda, secara umum, kelompok negara-negara GCC menyatakan keberpihakannya kepada rezim yang berkuasa, baik melalui media maupun dukungan diplomatik dan sejumlah aksi filantropi. Kebijakan negara-negara GCC tersebut tidak lepas dari pengaruh kebijakan Saudi yang anti-Syiah dan represif terhadap kelompok IM yang pada akhirnya berdampak terhadap kestabilan politik di Timur Tengah. Dampak kebijakan tersebut dapat dilihat dalam berbagai kasus terkini, terutama saat negara GCC cenderung membantu atau menghalangi proses perubahan jangka panjang di kawasan Timur Tengah. Sebagai

¹⁰ Indriana Kartini, "Kekuatan Politik Islam di Lebanon: Politik Sektarianisme," dalam *Problematika Kekuatan Politik Islam di Bahrain, Qatar, dan Lebanon*, ed., Indriana Kartini (Jakarta: UI Press, 2017), hlm 138–139.

contoh, dukungan terhadap kudeta Jenderal As-Sisi di Mesir dan blokade politik terhadap Qatar yang kerap mendukung kelompok oposisi Islam.¹¹ Dalam hal ini, GCC bereaksi melalui serangkaian aksi koalisi, baik dukungan reformasi ekonomi-politik, intervensi militer, maupun melalui serangkaian aksi filantropi gabungan untuk mendukung kelompok oposisi yang anti terhadap rezim Syiah.

Sejak dibentuk pada 1981, GCC bertujuan membantu para rezim monarki untuk mempertahankan kekuasaannya melalui bidang ekonomi-politik dan keamanan. Pada titik ini, kita dapat melihat bahwa gerakan *Arab Spring* dianggap sebagai ancaman atas keberlangsungan kekuasaan GCC. Kewaspadaan GCC tecermin dari sejumlah kebijakan konservatif mereka, antara lain memberikan bantuan finansial yang besar kepada sejumlah negara anggota yang terdampak *Arab Spring* untuk melakukan reformasi politik dan ekonomi. Namun, GCC juga mengeluarkan kebijakan agresif terhadap kelompok pemberontak melalui serangkaian intervensi militer untuk menjamin keberlangsungan kekuasaan rezim monarki. Selain itu, GCC memberikan bantuan finansial yang cukup besar terhadap negara-negara terdampak, misalnya bantuan untuk Oman dan Bahrain yang mencapai total 130 miliar US\$.¹² Negara-negara GCC juga melakukan intervensi militer untuk melindungi monarki. Sebagai contoh, tentara dan polisi Saudi memasuki wilayah UEA dan Bahrain untuk melindungi keluarga monarki yang berkuasa.

Kelompok ketiga adalah negara-negara yang terdampak cukup signifikan hingga terjadi perubahan rezim, seperti Tunisia, Mesir, dan Libya. Tunisia merupakan pusat dari gerakan protes *Arab Spring* yang menyebabkan tergulingnya rezim Ben Ali, disusul lengsernya presiden Mesir Husni Mubarak, dan pemimpin Libya Muammar Qaddafi. Pasca-*Arab Spring*, transisi politik Tunisia berlangsung

¹¹ Dhurorudin Mashad, "Kekuatan Politik Islam dalam Konstelasi Politik Bahrain, Qatar, dan Lebanon," dalam *Kekuatan Politik Islam di Bahrain, Qatar, dan Lebanon*, ed., Indriana Kartini (Jakarta: UI Press, 2017), hlm 150–187.

¹² Silvia Colombo, "The GCC Countries and the *Arab Spring*," *IAI Working Papers 12* (March 2012).

cukup dinamis dan relatif stabil; ditandai dengan kemenangan partai Islam *An-Nahdah* pada pemilu 2011. Meskipun sempat terjadi pergolakan dan kekacauan politik, pemerintahan Rachid Gannouchi dapat mengambil pelajaran dari pengalaman Ikhwanul Muslimin di Mesir. Pada akhir September 2013, *An-Nahdhah* menyatakan mundur dari pemerintahan sesuai dengan usulan sejumlah kelompok di Tunisia, seperti Uni Serikat Buruh Tunisia, Liga HAM, dan sejumlah organisasi advokat yang menuntut diakhirinya krisis politik di Tunisia.¹³ Mundurnya *An-Nahdhah* dalam pemerintahan tidak terlepas dari upaya mengakhiri kekerasan dan anarkisme politik seperti yang terjadi di Mesir. Para pemimpin *An-Nahdhah* khawatir akan kehancuran partai seperti yang dialami Ikhwanul Muslimin dengan dikudetnya presiden Mursi oleh militer dan lawan politik mereka.

Berbagai kalangan memandang bahwa mundurnya *An-Nahdah* dari kekuasaan merupakan strategi politik untuk mewujudkan peralihan kekuasaan. Pada Pemilu 2014, partai *An-Nahdhah* tetap dapat bersaing dengan memperoleh 69 kursi. Jumlah ini berada di bawah partai penguasa partai An-Nidaa yang memperoleh 85 kursi. Kedua partai ini kemudian berkoalisi di parlemen. Perpecahan ideologi dalam keanggotaan partai pemenang pemilu mendorong mundurnya sejumlah anggota parlemen yang terpilih; sebanyak 32 orang anggota partai An-Nidaa mengundurkan diri sehingga membuat *An-Nahdah* menjadi kekuatan politik terbesar di Parlemen. Meskipun menang dalam pemilu, banyak kalangan di Tunisia memandang skeptis terhadap partai sekuler An-Nidaa. Hal tersebut tidak lepas dari masih kuatnya pengaruh rezim masa lalu terhadap kebijakan partai. Sebanyak 70% anggota parlemen yang terpilih adalah mantan anggota rezim Ben Ali. Banyak di antara mereka yang saat itu menjadi menteri dan elite di lingkaran kekuasaan rezim. Alhasil, mayoritas rakyat Tunisia khawatir pejabat rezim lama akan berkuasa lagi dan kembalinya gaya pemerintahan otoriter seperti pada era Ben Ali.

¹³ Lihat Indriana Kartini, “Demokrasi dan Kebangkitan Politik Islam di Tunisia,” dalam *Agama dan Demokrasi: Munculnya Kekuatan Politik Islam di Tunisia, Mesir, dan Libya*, ed., Indriana Kartini (Bandung: Pustaka Jaya, 2016), hlm 77–110.

Secara umum, pemilu di Tunisia pasca-*Arab Spring* berlangsung aman dan demokratis. Saat ini, pemerintah Tunisia di bawah pimpinan koalisi menghadapi isu-isu perpecahan, anarkisme politik, dan persoalan ekonomi serta kesenjangan sosial yang semakin meningkat. Di bidang ekonomi, inflasi meningkat hingga mencapai 5,2% dan tingkat pengangguran mencapai 15,3% atau naik dari pra-*Arab Spring* yang jumlahnya 13%.¹⁴ Perekonomian Tunisia mengalami stagnasi yang disebabkan melemahnya investasi dalam negeri serta naiknya harga kebutuhan pokok. Pada 2015, terjadi serangan di Museum Bardo dan pantai Sousse di Tunis sehingga melumpuhkan pariwisata sebagai sumber utama devisa negara. Selain itu, maraknya protes dan kerusuhan di sejumlah kota di Tunisia semakin memperparah kondisi perekonomian. Krisis politik yang terjadi di Libya dan Mesir pun berkontribusi besar terhadap perekonomian Tunisia.

Tunisia pasca-*Arab Spring* juga mengalami persoalan meningkatnya ekstremisme, seperti pembunuhan politisi sekuler Chokri Belaid dan pemimpin partai oposisi Mohamed Brahmi yang mengakibatkan maraknya gerakan protes menentang ekstremisme.¹⁵ Meskipun beberapa tahun setelah *Arab Spring* terjadi pergolakan politik, banyak kalangan memandang bahwa Tunisia berhasil melalui proses transisi politik dengan damai dan demokratis.

Sama halnya dengan yang terjadi di Tunisia, Mesir mengalami perubahan politik yang cukup signifikan sebagai imbas *Arab Spring*. Presiden Husni Mubarak yang sudah berkuasa cukup lama akhirnya dapat dilengserkan pada Februari 2011. Meskipun rezim telah lengser, dinamika politik relatif stabil. Setelah Mubarak lengser, terjadi perubahan politik yang cukup signifikan dengan semakin terbukanya aspirasi politik rakyat yang ditandai dengan pemilu par-

¹⁴ Owen Barnell, "Seven Years After *Arab Spring* Revolt, Tunisia's Future Remains Uncertain," *France 24*, 17 Desember 2017, diakses pada 13 Februari 2018 dari <https://www.france24.com/en/20171217-tunisia-seven-years-after-arab-spring-revolution-protests-economic-uncertainty>.

¹⁵ Kartini, *Demokrasi dan Kebangkitan*, hlm 77–110.

lemen dan presiden. Pada pemilu parlemen, Partai Kebebasan dan Keadilan unggul dengan suara mayoritas 225 kursi, disusul partai Islam An-Nour dari kalangan Salafi dengan 125 kursi. Sementara itu, pada pemilu presiden secara langsung pada Mei dan Juni 2012, calon dari Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) yang didukung Ikhwanul Muslimin mendapat suara mayoritas (51,7% suara).¹⁶ Pada akhirnya, Mursi menjadi presiden pertama yang dipilih secara demokratis setelah Mubarak tumbang. Setahun setelah Mursi ditetapkan sebagai presiden, kelompok militer di bawah pimpinan Jenderal Abdul Fatah As-Sisi melakukan kudeta sehingga Presiden Mursi yang terpilih secara demokrasi dapat dilengserkan dengan kekuatan senjata.

Di bawah rezim militer As-Sisi, Mesir di ambang perpecahan dan anarkisme politik yang tidak menentu. Ribuan orang dari kelompok Islam dan sejumlah aktivis oposisi ditangkap; jumlahnya bahkan melebihi jumlah penangkapan pada era Mubarak. Ratusan aktivis Islam lainnya terbunuh saat menggelar protes di Tahrir Square. Rezim As-Sisi juga melakukan pemberangusan media dan organisasi massa pro-demokrasi. Di samping itu, tindakan represif yang dilakukan rezim As-Sisi memicu semakin meningkatnya perlawanan dari kelompok radikal, terutama kelompok yang berbasis di Semenanjung Sinai. Hal ini mengakibatkan konflik sengit antara pihak militer dan milisi bersenjata yang mengakibatkan tewasnya ratusan orang. Banyak kalangan memandang bahwa Mesir telah kembali pada era rezim otoriter di mana kelompok oposisi ditindas, kebebasan pers diberangus, dan kekerasan di perbatasan semakin meningkat.

Selain Mesir, Libya juga terdampak *Arab Spring* cukup signifikan sehingga mengakibatkan tumbanganya rezim Qaddafi yang sudah berkuasa selama lebih dari 32 tahun. Setelah Qaddafi lengser, dinamika politik Libya lebih cenderung mengarah pada persaingan

¹⁶ M. Hamdan Basyar, "Demokrasi dan Kekuatan Politik Islam di Mesir," dalam *Agama dan Demokrasi: Munculnya Kekuatan Politik Islam di Tunisia, Mesir, dan Libya*, ed., Indriana Kartini (Bandung: Pustaka Jaya, 2016), hlm 113–144.

antar-kekuatan politik untuk memperebutkan kekuasaan. Konflik di Libya terjadi antara pemerintahan Tubruk dan General National Congress (GNC). Pemerintahan Tubruk terpilih berdasarkan hasil pemilu parlemen 2014 dan mendapatkan dukungan Jenderal Khalifah Haftar, salah seorang Jenderal era Qaddafi. Poros ini didukung Mesir dan UEA. Sementara itu, *General National Congress* (GNC) yang berbasis di Tripoli didukung Libya Down, Qatar, dan Turki, serta diakui secara internasional oleh PBB. Untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan, pada Desember 2015 disepakati perjanjian damai antara kedua belah pihak untuk membentuk pemerintahan nasional. Namun, perdamaian antara keduanya belum terwujud sampai saat ini, bahkan konflik semakin menguat dengan kemunculan kelompok milisi bersenjata, contohnya Majelis Syura Islam di Benghazi, kelompok Anshar Asy-Syariah, ISIS, milisi Tuareg, dan pemberontak dari Misrata.

Kelompok terakhir adalah negara yang terdampak gelombang *Arab Spring*, bahkan sampai sekarang mengalami gejolak (kemelut yang tiada kunjung akhir), yaitu Suriah dan Yaman. Rezim di kedua negara ini masih kuat bertahan dengan dukungan kekuatan politik, baik internal maupun eksternal. Di Suriah, rezim Bashar Al-Assad mendapat dukungan aktor politik internal, yaitu militer dan kelompok Syiah *Alawiyah*, yang berhasil menguasai sejumlah posisi penting di pemerintahan. Di Yaman, rezim Ali Abdullah Saleh yang sempat bertahan dengan dukungan milisi Syiah Al-Haouti, akhirnya terbunuh setelah membelot mendukung pemerintahan Abdurrabu Mansour Hadi. Setelah Ali Abdullah Saleh terbunuh, konflik antara pemerintah dan milisi Syiah *Al-Houthi* diprediksi semakin meningkat, terlebih dengan masuknya kekuatan koalisi militer GCC pimpinan Arab Saudi.

Beranjak dari hasil kajian tersebut, tim penulis mencoba menakar dinamika kekuatan politik Islam dalam kehidupan sosial, politik, dan keagamaan di sejumlah negara kasus sembari mengintegrasikan berbagai penelitian yang sudah dikaji sebelumnya (2013–2017). Ada beberapa poin penting yang menjadi pertimbangan. *Pertama*, gerakan politik Islam di sejumlah negara Timur Tengah sangat dina-

mis, kompleks, dan berada di tengah lingkungan politik yang tidak demokratis sehingga memerlukan kajian yang lebih mendalam. *Kedua*, pengaruh fenomena *Arab Spring* terhadap perubahan kehidupan sosial-politik dan ekonomi di sejumlah negara Timur Tengah perlu dikaji secara lebih mendalam oleh sarjana Indonesia karena Timur Tengah memiliki pengaruh besar bagi dunia internasional. *Ketiga*, peran kekuatan politik, baik regional maupun eksternal, seperti Amerika Serikat dan Rusia, terhadap dinamika sosial-politik yang berkembang pasca-*Arab Spring* cukup signifikan. *Keempat*, penelitian seputar perkembangan demokrasi dan gerakan politik Islam di sejumlah negara Timur Tengah pasca-*Arab Spring* sangat terbatas dilakukan oleh para akademisi di Indonesia, dan karena itu, menjadi signifikan untuk dilakukan.

Berdasarkan realitas tersebut, pembahasan buku ini sangat penting dilakukan. Terdapat beberapa hal penting yang ingin dibahas dalam buku ini, yaitu mengapa realitas kekuatan politik Islam di berbagai negara Timur Tengah pasca-*Arab Spring* memperlihatkan wajah yang berbeda-beda; Bagaimana dinamika kekuatan politik Islam terhadap pertumbuhan demokrasi di Timur Tengah di lingkungan politik yang berubah? Bagaimana implikasi peran kekuatan politik Islam terhadap pertumbuhan demokrasi di Timur Tengah?

A. ARAB SPRING DAN GERAKAN POLITIK ISLAM

Gelombang *Arab Spring* memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap pasang surut politik Timur Tengah kontemporer. Gerakan protes yang menyebar di seluruh wilayah menjadi titik tolak transformasi sosial-politik jangka panjang. Hal ini ditandai dengan transisi dan pergolakan politik, krisis ekonomi, dan bahkan konflik sengit yang berkepanjangan. Menurut Paul Danahar, selain tegaknya demokrasi, pencapaian terbesar *Arab Spring* adalah runtuhnya sejumlah rezim otoriter sebagai imbas dari gerakan protes rakyat yang menghendaki perubahan di berbagai bidang.¹⁷ Kendati tidak semua

¹⁷ Paul Danahar, *The New Middle East: The World After the Arab Spring* (New York: Bloomsbury Press, 2013).

rezim dapat runtuh, efek domino *Arab Spring* tidak dapat terelakkan lagi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sejumlah rezim monarki yang begitu kuat sekalipun tetap merasakan protes rakyatnya yang menghendaki adanya reformasi politik sebagaimana yang terjadi di negara terdampak lainnya.

Charothers berpendapat bahwa fenomena *Arab Spring* yang terjadi telah memecah tingkat homogenitas yang tinggi di antara rezim otoriter di Timur Tengah. Lebih lanjut, hal ini dapat dianalisis dalam beberapa bentuk. *Pertama*, terdapat beberapa negara yang rezimnya terguncang sampai runtuh sehingga terjadi transisi demokrasi, baik dalam bentuk yang stabil maupun tidak. *Kedua*, kelompok negara yang tidak begitu terdampak. Hal ini disebabkan oleh sistem politik otoriter yang dibangun sedemikian kuat dan sudah membudaya serta fondasi perekonomian mereka yang kuat. *Ketiga*, negara yang rezimnya dapat bertahan dan mengendalikan seluruh aset kekuasaannya dengan dukungan beberapa institusi penting, seperti militer dan elite politik. Namun, rezim ini tidak mampu membuat kelompok oposisi bertekuk lutut sehingga terjadi konflik sengit berkepanjangan. *Keempat*, kelompok negara yang tidak terdampak dan dikecualikan dari perubahan rezim. Di negara-negara ini, sebagian besar elite politik cenderung mendukung rezim lama yang mengakibatkan sistem rezim yang lebih otoriter terlestarikan.¹⁸

Berbeda dengan Charothers, penelitian yang dilakukan oleh Beck dan Huser menemukan bahwa selain dampak yang diakibatkan oleh *Arab Spring*, dalam melakukan klasifikasi, mereka melihat sistem politik yang sedang dianut dan kondisi stabilitas politik dalam negeri di negara-negara Timur Tengah. Beck dan Huser mengklasifikasikan tingkat keterpengaruhannya dampak pasca *Arab Spring* dalam empat tipe yang diklasifikasikan dalam dua kelompok besar. Kelompok pertama, "*Stable or Unstable Systems of Transition*" yaitu negara yang mengalami transisi sistem politik akibat gelombang Arab

¹⁸ Thomas Charothers, "The End of the Transition Paradigm," *Journal of Democracy* 13, no.1 (Januari 2002): 5–21.

spring sehingga memiliki kondisi politik dalam negeri yang stabil atau tidak stabil. Kelompok kedua, *Stable or Unstable Authoritarian Systems* yakni beberapa negara yang masih mempertahankan sistem politik yang otoritarian namun mengalami kondisi politik dalam negeri yang stabil atau tidak stabil akibat Arab *spring*.¹⁹ Penelitian pada tahun ini mencoba mengadaptasi penelitian Beck dan Huser untuk menakar *impact* atau tingkat keterpengaruh gelombang Arab *Spring* terhadap beberapa negara kasus yang sudah dikaji berdasarkan pandangan diatas. Ada empat klasifikasi besar: *pertama*, beberapa negara yang tidak terpengaruh dan masuk dalam kategori “dikecualikan” atau terhindar dari dampak Arab *Spring*. *Kedua*, beberapa negara yang sedikit terpengaruh. *Ketiga*, beberapa negara yang terdampak cukup signifikan yang disertai dengan kejatuhan rezim. *Keempat*, beberapa negara yang terpengaruh signifikan, tetapi rezim otoriter dapat bertahan disertai dengan konflik akut yang berkelanjutan.

Selain tuntutan demokratisasi dan keruntuhan rezim otoriter, fenomena penting pasca-Arab *Spring* adalah meningkatnya aktivisme politik Islam di beberapa negara. Munculnya kekuatan politik Islam tidak harus dimaknai sebagai tampilnya penguasa baru, tetapi dapat juga dimaknai sebagai kebangkitan kembali kekuatan Islam, atau meminjam istilah Roy, “Islam Politik,” baik sebagai kekuatan oposisi, partai politik, maupun gerakan sosial keagamaan.

Politik Islam merupakan konsep yang modern dalam wacana politik yang muncul setelah Perang Dunia Pertama²⁰ dan masih diperdebatkan oleh kalangan akademisi. Politik Islam sering dikaitkan secara sempit dengan wacana fundamentalisme, radikalisme, dan terorisme—meskipun hal tersebut masih dalam lingkup dan menjadi salah satu aspek kajian politik Islam. Hal ini akan mengarah pada generalisasi keliru yang menyatakan bahwa Islam ialah agama politik, agama radikal, dan agama yang fundamentalis.

¹⁹ Beck dan Huser, “Political Change,” 3–35.

²⁰ Nazih N. Ayubi, *Polical Islam: Religion and Politics in the Arab World* (London: Routledge, 2003), 91–95.

Generalisasi tersebut didasarkan pada asumsi bahwa Islam bukan sekadar agama (sebagai aspek privasi), melainkan juga ideologi, nilai (*values*), dan doktrin yang memberikan fondasi bagi gerakan sosial (*social actions*). Penggunaan konsep politik Islam (*Political Islam*) sendiri secara akademis sering disamakan dengan Islamisme (*Islamism*, Islam ideologis). Definisi lebih jelas yang memisahkan Islam sebagai agama dan politik Islam sebagai gerakan sosial diungkapkan oleh Denoëux. Politik Islam merupakan hasil dari proses “instrumentalisasi” ideologi, nilai, dan doktrin dalam sebuah organisasi gerakan Islam untuk mencapai tujuan politik (*political objectives*) sebagai respons terhadap tantangan dan problem dalam kehidupan sosial masyarakat Islam terkini.²¹

1. Islam dan Politik

Menurut Cunningham, agama dan politik demokrasi selalu menjadi pembicaraan yang menarik karena hubungannya di dunia Islam yang saling tumpang tindih (*overlapping*), tak pernah berujung, dan selalu menemukan justifikasi untuk menautkan diri.²² Bagi kalangan *cultural essentialist*, Islam dan budaya yang melekat padanya tidak menyediakan tempat bagi tumbuhnya iklim demokrasi,²³ bahkan agama dianggap sebagai faktor penghambat demokrasi.²⁴ Pesimisme ini juga ditampakkan oleh Huntington yang menyatakan kemungkinan adanya perbenturan peradaban Barat (*liberal democracy*) dan Islam (*religion/culture*)²⁵ serta Fukuyama yang menyatakan

²¹ Guilain Denoëux, “The Forgotten Swamp: Navigating Political Islam,” *Middle East Policy* IX, no. 2 (2002): 56–81.

²² Frank Cunningham, “The Conflicting Truths of Religion and Democracy,” dalam *Human Rights and Democracy*, ed. John Rowan (Charlottesville: Philosophical Documentation Centre, 2005), 65–80.

²³ Masdar Hilmy, *Islamism and Democracy in Indonesia: Piety and Pragmatism* (Singapore: ISEAS, 2010), 19.

²⁴ John Anderson, “Does God Matter, and If So Whose God? Religion and Democratization,” *Democratization* 11, no.4 (August 2004): 192–217.

²⁵ Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order* (New York: Simon and Schuster, 1996). Lihat juga selebrasi cetakan ke-20 buku tersebut di Samuel P. Huntington, “The Clash of Civilization?” *Foreign*

kemenangan demokrasi liberal atas “*the rest ideology*” (termasuk Islam).²⁶

Kalangan *structural instrumentalist* menyatakan bahwa dalam hubungannya, agama (Islam) berinteraksi secara dialektis dalam struktur sosial politik. Jadi, menurut pandangan ini, hubungan positif antara Islam dan demokrasi merupakan suatu keniscayaan.²⁷ Islam memiliki dasar ajaran yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi berdasarkan Alquran dan Sunnah, tetapi memiliki norma-norma tersendiri dalam implementasinya. Dalam khazanah klasik hingga modern, prinsip *ijtihad*, *shura*, dan *ijma* secara filosofis tidak bertentangan dengan demokrasi. Hal yang membuat demokrasi tidak subur di wilayah Muslim adalah praktik kenegaraan yang bersifat dinasti-otoritarian oleh rezim tangan besi.²⁸ Oleh karena itu, wacana “*Islamic exceptionalism*” sebagai dasar tidak selarasnya Islam dan demokrasi menjadi kurang tepat dibandingkan “*Arab exceptionalism*” yang lebih bisa mengilustrasikan tidak demokratisnya mayoritas negara-negara Arab.²⁹

Policy, (summer issue, 1993) diakses pada 13 Februari 2018 dari <http://www.foreignaffairs.com/articles/48950/samuel-p-huntington/the-clash-of-civilizations>.

²⁶ Francis Fukuyama, *The End of History and the Last Man* (New York: The Free Press, 1992).

²⁷ Hilmy, *Islamism and*, 26. Riset dari Pipa Norris dan Ronald Inglehart menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam penerimaan demokrasi di budaya Barat ataupun Muslim, baik tentang bagaimana demokrasi bekerja, dukungan terhadap idealisme demokrasi, maupun kepemimpinan. Baca juga Pipa Norris dan Ronald Inglehart, *Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).

²⁸ Hal yang menjadi kontras adalah bagaimana nilai-nilai demokratis dalam Islam diimplementasikan oleh kalangan radikal dalam bentuk otoritarianisme, sedangkan kalangan moderat menafsirkannya dalam koridor yang berkeadilan dan islami. Lihat Ahmad S. Mousalli, *The Islamic Quest for Democracy, Pluralism and Human Right* (Florida: University of Florida Press, 2003), 158–167. Baca juga Fares Al-Braizat, “Muslim and Democracy: An Empirical Critique of Fukuyama’s Cultural Approach,” *International Journal of Comparative Sociology* 43, no. 3–5 (2002): 269–299.

²⁹ Konsep *Islamic exceptionalism* didasarkan pada anggapan Islam sebagai faktor yang menyulitkan tumbuhnya iklim demokrasi. Begitu juga *Arab exceptionalism*

2. Politik Islam sebagai Gerakan Revivalisme Islam

Politik Islam menjadi perdebatan dalam dua sudut pandang yang berbeda. Muhammad Imarah memandang bahwa munculnya kekuatan politik Islam atau disebut *Ash-Shahwah Al-Islamiyyah* secara definitif diartikan sebagai revivalisme Islam.³⁰ Perbedaan mendasar antara definisi revivalisme Islam dan politik Islam terletak pada posisi agama dalam kehidupan politik (negara). Politik Islam dipandang sebagai gerakan agama (Islam) yang bersifat privat yang memasuki ranah politik (publik). Asumsi dasar pendekatan ini adalah pemisahan agama dan negara sebagaimana diungkapkan Ayubi sebagai “*religiously-neutral states*.” Sementara itu, revivalisme Islam didasarkan pada konteks sejarah masyarakat Islam yang tidak memisahkan keberadaan negara dan agama. Revivalisme adalah upaya politis untuk mengembalikan dan merevitalisasi Islam dalam ranah politik masyarakat Muslim. Revivalisme Islam ditandai dengan pengimplikasian ajaran Islam dalam kehidupan sosial-politik, budaya, dan ekonomi. Tujuan revivalisme Islam adalah terciptanya Islam *kaffah* dalam berbagai sektor kehidupan.

Sayyid Qutb menyimpulkan lima prinsip utama gerakan Islam secara umum. *Pertama*, *Ad-Din* (agama) dan *Ad-Daulah* (negara). Berdasarkan konsep ini, Islam merupakan ajaran yang bersifat universal (*Syumuliyah al-Islam*) yang mengatur tatanan kehidupan sosial-ekonomi dan politik umat Islam. *Kedua*, penerapan Alquran dan Sunah secara *kaffah*. *Ketiga*, puritanisme dan keadilan sosial. *Keempat*, kedaulatan dan hukum Allah berdasarkan syariat. *Kelima*, komitmen kuat dalam mewujudkan tatanan Islam (*an-nizam al-Is-*

menganggap budaya Arab sebagai faktor yang menyulitkan tumbuhnya iklim demokrasi. Riset ini didasarkan pada penelitian pemilu di 47 negara mayoritas Muslim yang menghasilkan bahwa negara non-Arab pemilunya hampir dua puluh kali lebih kompetitif dibandingkan negara-negara Arab. Alfred Stepan dan Graeme B. Robertson, “Arab, not Muslim, Exceptionalism,” *Journal of Democracy* 15, no.4 (Oktober 2004): 140–146.

³⁰ Muhammad Imarah, *Al-Ushuliyah Baina Al-Gharb wa Al-Islam* (Kairo: Daar Asy-Syaruq, 1998), 7–8.

lami). Oleh karena itu, menurut pandangan gerakan ini, Islam harus menghancurkan tatanan Jahiliyyah dan kekuasaan melalui jihad.³¹

Berbeda dengan Sayyid Qutb, Ayubi secara jernih mendudukkan kembali pemahaman tentang politik Islam. *Pertama*, Islam tersusun atas kolektivitas hukum, doktrin, dan nilai moral sebagai agama yang tidak bisa dibatasi dengan definisi agama yang bersifat politis. *Kedua*, dalam konteks legitimasi politik dan apa yang secara faktual terjadi dalam negara-negara mayoritas Muslim, politik Islam sering diartikan sebagai bentuk politisasi agama (Islam) yang dilakukan oleh penguasa dan kelompok Islam tertentu untuk mendapatkan legitimasi politik. *Ketiga*, politik Islam tidak bisa dipaksakan untuk dilihat dari perspektif negara sekuler atau dalam bahasa Ayubi *religiously-neutral states* yang menjurus pada penyimpulan yang “menghakimi.”³²

3. Politik Islam sebagai Gerakan Sosial-Politik

Politik Islam memiliki definisi yang variatif yang didasarkan pada faktor penyebab terjadinya gerakan sosial-politik. Defini yang paling kentara adalah pendapat bahwa religiositas dan ideologi sebagai landasan gerakan sosial (*religious and ideological factors to generate political actions*). Olivier Roy memandang politik Islam sebagai gaya baru dari gerakan fundamentalisme Islam modern yang memiliki tujuan spesifik untuk menciptakan prototipe masyarakat Islam yang sebenarnya. Tujuan ini tidak diwujudkan melalui pendekatan tradisional dengan menegakkan syariat Islam, tetapi mendirikan negara Islam melalui jalur politik yang dikategorikan sebagai neo-fundamentalisme.³³ Roy berangkat dari asumsi yang hampir sama dengan Mohammed Ayoub yang memandang Islam bukan sekadar sebagai agama, melainkan juga sebagai ideologi politik yang menjadi

³¹ Sayyid Qutb, *Ma'alim fi Ath-Thariq* (Bandung: Serambi, 1980).

³² Ayubi, *Political Islam*, 91–95.

³³ Olivier Roy, *The Failure of Political Islam* (Cambridge: Harvard University Press), vii–xi.

alat untuk mencapai tujuan politik yang terefleksi dari penggunaan simbol dan konsep yang Islamis di ranah publik.³⁴

Namun, sebagian lain berpendapat bahwa politik Islam sebagai ideologi politik harus dipisahkan aspek faktual yang lebih kultural. Graham Fuller berasumsi bahwa politik Islam bukanlah faktor ideologi semata, melainkan juga kombinasi aspek religio-sitas-kultural-politik (*religious-cultural-political factors*) yang sangat berkaitan dengan isu-isu dan memiliki tujuan politis (mendekat dengan kekuasaan) sehingga mendorong masyarakat muslim untuk aktif di dalamnya. Islam merupakan aspek integral dari keyakinan (*body of faith*) yang membentuk semua aspek sosial masyarakat dan memiliki aspek solutif dari kompleksitas permasalahan masyarakat modern.³⁵ Faktor ekonomi juga memiliki pengaruh yang kuat dalam politik Islam. Krisis ekonomi, kesenjangan ekonomi, dan pengangguran sering menjadi faktor utama terjadinya gerakan sosial. Studi Tessler menunjukkan bahwa politik Islam sangat dipengaruhi faktor ekonomi, bahkan menjadi pemicu dinamisasi pertumbuhan politik Islam dan menjadi faktor penting untuk memobilisasi dukungan.³⁶

Penjelasan faktor-faktor tersebut sangat berkaitan dengan analisis Immanuel Karagiannis yang mengomparasi tiga teori gerakan sosial dalam konteks politik Islam, yaitu *structural functional theory*, *resource mobilization theory*, dan *political opportunity theory*. Pertimbangan faktor religio-sitas, ideologi, kultural, ekonomi, dan politik sangat penting untuk menciptakan stabilitas dan keseimbangan sistem politik yang dalam pendekatan *structural functional theory* dianggap sebagai kondisi natural masyarakat. Institusi struktural memiliki fungsi sentral dalam mengakomodasi semua kepentingan

³⁴ Mohammed Ayoob, *The Many Faces of Political Islam: Religion and Politics in the Muslim World* (Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2008), 2.

³⁵ Graham E. Fuller, *The Future of Political Islam* (New York: Palgrave Mcmillan, 2004), 193.

³⁶ M. Tessler, "The Origins of Popular Support for Islamist Movements: A Political Economy Analysis," dalam *Islam, Democracy, and the State in North Africa*, ed. J. P. Entelis (Bloomington: Indiana University Press, 1997).

masyarakat untuk menciptakan kebijakan yang optimal sehingga tercipta kestabilan sistem politik. *Structural functional theory* berpandangan bahwa ketidakstabilan sistem politik terjadi jika institusi tidak berfungsi secara efisien (*structural strains*) sehingga tercipta frustrasi sosial dan kekacauan politik (*chaos*) yang menyebabkan tumbuhnya gerakan sosial.³⁷

Kelemahan teori tersebut adalah tidak mempertimbangkan modal sosial yang berperan penting bagi tumbuhnya gerakan sosial. Oleh karena itu, *resource mobilization theory* harus digunakan. Teori ini memandang frustrasi sosial dan *chaos* hanya akan menjadi gerakan yang sporadis dan parsial jika dianalisis dengan *structural functional theory*, dan tidak bisa menganalisis faktor yang mendasari gerakan sosial. Dalam teori ini, gerakan sosial merupakan gerakan yang dinamis, rasional, dan aksi kolektif yang terorganisasi. Gerakan sosial tidak akan menjadi besar dan berdampak masif jika tidak mampu memobilisasi modal (*resources*) yang ada. Fokus dari teori *resource mobilization* adalah menganalisis mobilisasi modal dari gerakan sosial, misalnya sistem rekrutmen, mobilisasi individu, sistem kaderisasi, regenerasi, jaringan organisasi, sistem finansial, yang justru lebih berpengaruh pada perkembangan gerakan sosial.³⁸

Political opportunity theory sebenarnya memiliki lingkup yang hampir sama dengan *structural functional theory* yang menekankan faktor lingkungan sebagai pendukung tumbuhnya gerakan sosial. Hanya saja, *political opportunity theory* lebih menekankan pada aspek perubahan lingkungan politik (yang bisa disebabkan, baik oleh faktor internal maupun internasional) sebagai peluang politik (*political opportunity*) bagi tumbuhnya gerakan sosial-politik. Teori ini menganggap bahwa gerakan sosial akan tumbuh jika peluang politik terbuka. Ketika institusi formal gagal merespons perubahan sosial (misalnya terjadi kekosongan kekuasaan, krisis ekonomi, friksi

³⁷ Emmanuel Karagiannis, "Political Islam and Social Movement Theory: The Case of Hizb ut-Tahrir in Kyrgyzstan," *Religion, State & Society* 33, no. 2 (Juni 2005): 137–149.

³⁸ Karagiannis, "Political Islam," 137–149.

dalam pemerintahan, lemahnya penegakan hukum) akan tercipta peluang politik yang memberikan kesempatan tumbuhnya gerakan sosial-politik untuk melakukan perubahan sosial (*social change*). Peluang politik ini juga bisa tercipta dari pengaruh internasional yang dominan yang berdampak terhadap stabilitas ekonomi-sosial-politik suatu negara³⁹

4. Politik Islam sebagai *counter-action*

Sebagaimana diungkapkan oleh Denooux, gerakan politik Islam merupakan respons terhadap tantangan dan problem dalam kehidupan sosial masyarakat Islam saat ini. Politik Islam muncul sebagai antitesis dari rezim yang represif dan otoritarian di negara-negara Muslim yang mengeksploitasi Islam untuk memonopoli kekuasaan sehingga gagal memberikan kebebasan beragama, kemerdekaan berpolitik, kemakmuran ekonomi, pendidikan yang layak, dan hal-hal lain yang menjadi hak-hak dasar warga negara.

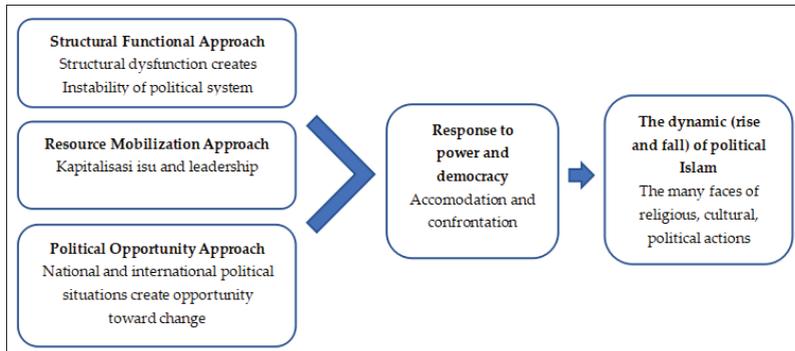
Menurut Antony Bubalo, kebangkitan politik Islam berakar pada kesadaran masyarakat untuk bertindak sesuai dengan ajaran Islam.⁴⁰ Bertolak belakang dengan Bubalo, Dekmejian memandang bahwa fenomena politik Islam ditandai dengan menguatnya aktivitas dan militansi keagamaan.⁴¹ Respons yang dilakukan gerakan Islam dibagi dalam dua pendekatan, yaitu akomodatif (misalnya mendirikan partai politik Islam) dan konfrontatif (seperti kelompok-kelompok pergerakan Islam militan yang menggunakan kekerasan). Kelompok-kelompok ini memiliki kesadaran tinggi dalam memperjuangkan Islam sehingga kerap berseberangan dengan pemerintah dan institusi-institusinya. Para pemikir Islam terdahulu, seperti Hasan Al-Banna, Al Maududi, Sayyid Qutb, Khomeini, Muhammad Baqi Sadr, dan Said Hawa memberikan landasan ideologi bagi kebangkitan Islam kontemporer. Gerakan yang mereka

³⁹ Karagiannis, "Political Islam," 137-149.

⁴⁰ Antony Bubalo, *Middle East, Islamism dan Indonesia* (New South Wales: Low Institute for International Policy, 2005).

⁴¹ Richard Hrair Dekmejian, "The Islamic Revival in the Middle East and North Africa," *Current History* 78, no. 000456 (April 1980): 169.

usung bertujuan melakukan perubahan sistem sosial politik ke arah kehidupan Islami. Gerakan ini mempunyai pandangan bahwa Islam adalah *Ya'lu wala Yu'la 'alaih* "Islam itu tinggi dan tidak ada yang dapat menandinginya."



Gambar 1.2 Bagan Kerangka Teoretis

Structural functional approach, *resource mobilization approach*, dan *political opportunity approach* merupakan satu kesatuan komponen yang saling mendukung bagi terciptanya perubahan sosial. Sistem politik yang in-stabil, pemerintahan yang diktator, tidak deliberatif dan aspiratif menjadi penyebab utama terciptanya ketimpangan sosial, politik, dan ekonomi. Isu-isu ini akan terkapitalisasi secara masif dan komunal jika ada sumber-sumber mobilisasi isu bekerja dengan baik, baik melalui saluran lembaga swadaya masyarakat, media sosial (Whatsapp, Facebook, dan sebagainya), media cetak, televisi sehingga terakumulasi dalam ranah publik. Terciptanya suatu momentum akan memberikan jalan bagi gerakan sosial politik untuk merespons kekuatan politik/rezim yang berkuasa, baik berupa akomodasi maupun konfrontasi. Ketegangan sosial politik ini akan memberikan ruang bagi gerakan sosial politik untuk melakukan perubahan.

Untuk mengoperasionalkan pendekatan kerangka teoretis tersebut, kami menggunakan metode kualitatif yang diperkaya dengan studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Untuk memperoleh

Buku ini tidak diperjualbelikan.

pendalaman, penelitian ini diawali dengan penelusuran data-data primer dan sekunder melalui studi kepustakaan atau literatur, misalnya jurnal, media elektronik dan cetak, serta media internet yang memberikan informasi penting yang dapat membantu mengidentifikasi sekaligus memetakan permasalahan yang dikaji. Untuk menghasilkan analisis yang tajam dan akurat, dilakukan penelitian lapangan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang berpegang pada pedoman wawancara yang sistematis dan didukung *workshop* dengan berbagai narasumber, terutama para pakar dan akademisi yang terkait dengan pokok kajian.

Untuk melakukan konfirmasi atas studi yang dilakukan sejak tahun 2013–2017, kami melakukan studi lapangan ke Tunisia. Tunisia merupakan negara pusat terjadinya *Arab Spring* yang berdampak luas terhadap perkembangan demokratisasi dan perubahan rezim di sejumlah negara Timur Tengah. Secara historis, Tunisia merupakan tempat berkembangnya Islam di kawasan Maghrib, selain Mesir dan Maroko. Hal ini didukung dengan adanya universitas Islam terkemuka, seperti *Jami'ah Al-Zaitunah (Zaytouna University)* yang didirikan sejak tahun 737 (120 H) pada masa dinasti Abbasiyah. Universitas ini berawal dari kelompok studi di Masjid Jami Zaytouna di kawasan kota tua, Tunis. Universitas ini juga telah melahirkan ilmuwan Islam terkenal, seperti Ibnu Khaldun dan ulama-ulama serta tokoh-tokoh keagamaan terkemuka yang tersebar di seantero dunia Islam.

Penulisan buku ini akan dibagi menjadi enam bab. Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi permasalahan, kerangka teoritis, dan tinjauan literatur. Bab kedua membahas kekuatan politik Islam di negara-negara yang tidak terpengaruh fenomena *Arab Spring*, yaitu Aljazair, Maroko, Somalia, Sudan, dan Lebanon. Bab ketiga mendiskusikan kekuatan politik Islam di negara-negara dengan pengaruh kecil oleh fenomena *Arab Spring*, yaitu Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Kuwait. Bab keempat membahas kekuatan politik Islam di negara-negara yang terdampak besar hingga terjadi kejatuhan rezim, tetapi kondisinya yang relatif stabil, yaitu Tunisia, Mesir, dan Libya. Bab kelima membahas kekuatan

politik Islam di negara-negara terpengaruh, tetapi rezimnya masih dapat bertahan disertai dengan konflik yang berkelanjutan, yaitu Suriah dan Yaman. Selanjutnya, buku ini ditutup oleh ringkasan temuan penelitian dan saran bagi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Addi, Lahouari. "Political and Democracy: The Case of Algeria," dalam *Democracy's Victory and Crises*, ed., A. Hadenius. Cambridge: Cambridge University Press, 1997: 105–122.
- Al-Braizat, Fares. "Muslim and Democracy: An Empirical Critique of Fukuyama's Cultural Approach." *International Journal of Comparative Sociology* 43, no. 3–5 (2002): 269–299.
- Anderson, John. "Does God Matter, and If So Whose God? Religion and Democratization." *Democratization*. 11, no.4 (Agustus 2004): 192–217.
- Ayoob, Mohammed. *The Many Faces of Political Islam: Religion and Politics in the Muslim World*. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2008.
- Ayubi, Nazih N. *Polical Islam: Religion and Politics in the Arab World*. London: Routledge, 2003.
- Basyar, M. Hamdan. "Demokrasi dan Kekuatan Politik Islam di Mesir." Dalam *Agama dan Demokrasi: Munculnya Kekuatan Politik Islam di Tunisia, Mesir, dan Libya*, diedit oleh Indriana Kartini. Bandung: Pustaka Jaya, 2016.
- Beck, Martin, dan Simone Huser. "Political Change in the Middle East: An Attempt to Analyze the "Arab Spring." *German Institute of Global and Area Studies Working Paper*, no.203 (Agustus 2012): 3–35.
- Bubalo, Antony. *Middle East, Islamism dan Indonesia*. New South Wales: Low Institute for International Policy, 2005.
- Charoters, Thomas. "The End of the Transition Paradigm." *Journal of Democracy* 13, no.1 (Januari 2002): 5–21.
- Colombo, Silvia. "The GCC Countries and The Arab Spring." *IAI Working Papers* 12 (Maret 2012).
- Cunningham, Frank. "The Conflicting Truths of Religion and Democracy." Dalam *Human Rights and Democracy*, diedit oleh John Rowan, 65–80. Charlottesville: Philosophical Documentation Centre, 2005.

- Dahl, Robert. *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992.
- Danahar, Paul. *The New Middle East: The World After the Arab Spring*. New York: Bloomsbury Press, 2013.
- Dekmejian, Richard Hrair. "The Islamic Revival in the Middle East and North Africa." *Current History* 78, no. 000456 (April 1980): 169.
- Denoeux, Guilain. "The Forgotten Swamp: Navigating Political Islam." *Middle East Policy* IX, no.2 (2002): 56–81
- Fukuyama, Francis. *The End of History and the Last Man*. New York: The Free Press, 1992.
- Fuller, Graham E. *The Future of Political Islam*. New York: Palgrave Mcmillan, 2004.
- Hashas, Mohammed. "Moroccan Exceptionalism Examined: Constitutional Insights pre- and post-2011." *IAI Working Papers* 23, no.34 (Desember 2013): 1–19.
- Hilmy, Masdar. *Islamism and Democracy in Indonesia: Piety and Pragmatism*. Singapore: ISEAS, 2010.
- Huntington, Samuel P. *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. New York: Simon and Schuster, 1996.
- Imarah, Muhammad. *Al-Ushuliyah Baina Al-Gharb wa Al-Islam*. Kairo: Daar Asy-Syaruq, 1998.
- Karagiannis, Emmanuel. "Political Islam and Social Movement Theory: The Case of Hizb ut-Tahrir in Kyrgyzstan." *Religion, State & Society* 33, no. 2 (Juni 2005): 137–149.
- Kartini, Indriana. "Demokrasi dan Kebangkitan Politik Islam di Tunisia," dalam *Agama dan Demokrasi: Munculnya Kekuatan Politik Islam di Tunisia, Mesir, dan Libya*, diedit oleh Indriana Kartini. Bandung: Pustaka Jaya, 2016: 77–110
- Kartini, Indriana. "Kekuatan Politik Islam di Lebanon: Politik Sektarianisme". Dalam *Problematika Kekuatan Politik Islam di Bahrain, Qatar, dan Lebanon*, diedit oleh Indriana Kartini. Jakarta: UI Press, 2017: 138–139.
- Kartini, Indriana. "Problematika Kekuatan Politik Islam di Maroko". Dalam *Problematika Kekuatan Politik Islam di Maroko, Sudan, dan Somalia*, ed., Muhammad Fakhry Ghafur. Jakarta: Mahara Publishing, 2016: 61–92.
- Mashad, Dhurorudin. "Kekuatan Politik Islam dalam Konstelasi Politik Bahrain, Qatar, dan Lebanon". Dalam *Kekuatan Politik Islam di Bahrain*,

- Qatar, dan Lebanon*, diedit oleh Indria Kartini. Jakarta: UI Press, 2017: 150–187.
- Mousalli, Ahmad S. *The Islamic Quest for Democracy, Pluralism and Human Right*. Florida: University of Florida Press, 2003.
- Norris, Pipa, dan Ronald Inglehart. *Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Qutb, Sayyid. *Ma'alim fi Ath-Thariq*. Bandung: Serambi, 1980.
- Roy, Olivier. *The Failure of Political Islam*. Cambridge: Harvard University Press, 1994.
- Stepan, Alfred, dan Graeme B. Robertson. "Arab, not Muslim, Exceptionalism." *Journal of Democracy* 15, no. 4 (Oktober 2004): 140–146.
- Tessler, M. "The Origins of Popular Support for Islamist Movements: A Political Economy Analysis." Dalam *Islam, Democracy, and the State in North Africa*, diedit oleh J. P. Entelis. Bloomington: Indiana University Press, 1997.
- Wahyudhi, Nostalgiaawan dkk. Politik Islam di Timur Tengah Pasca Arab Spring: Sebuah Pembelajaran. *Policy Paper* Pusat Penelitian Politik LIPI. Jakarta: P2P-LIPI, 2019.
- Wahyudhi, Nostalgiaawan. "Problematika Kekuatan Politik Islam di Aljazair: Politik Islam, Otoritarianisme-Militer, dan Krisis Legitimasi di Aljazair," dalam *Problematika Kekuatan Politik Islam di Yaman, Suriah dan Aljazair*, ed., Muhammad Fakhry Ghafur. Bandung: Pustaka Jaya, 2016: 137–180.

Internet

- Barnell, Owen. "Seven Years After *Arab Spring* Revolt, Tunisia's Future Remains Uncertain." *France 24*, 17 Desember 2017. Diakses 13 Februari 2018 dari <https://www.france24.com/en/20171217-tunisia-seven-years-after-arab-spring-revolution-protests-economic-uncertainty>.
- Ghezali, Rabah. "Why Has the *Arab Spring* Not Spread to Algeria." *Huffington Post*, 3 April 2011. Diakses 3 Juli 2018 dari https://www.huffpost.com/entry/why-has-the-arab-spring-n_b_844182 www.huffingtonpost.com.
- "Maps of The Arab World." Diakses pada 3 Februari 2018 dari <https://arabspringanditscontexts.files.wordpress.com/2014/01/arabspring-map-black-and-white.jpg>.
- Meier, Daniel. "The Effects of *Arab Spring* and Syrian Uprising on Lebanon." *Paper CLS Visiting Fellow-St. Anthony's College, University of Oxford* (Mei 2013). Diakses pada 12 Maret 2018 dari <https://www.lebanesestudies.com/wp-content/uploads/2013/10/daniel-May-.pdf>.



BAB 2

POLITIK ISLAM DI NEGARA YANG TIDAK TERDAMPAK *ARAB SPRING*: ALJAZAIR, SUDAN, MAROKO, SOMALIA, DAN LEBANON

Dhurorudin Mashad

Tuntutan untuk demokrasi meluas di kawasan Timur Tengah sejak akhir 2010, baik dalam wujud partisipasi politik formal yang mengacu pada aktivitas partai politik, munculnya organisasi *civil society*, maupun dalam wujud gerakan sosial.¹ Namun, upaya ke arah demokrasi ternyata tak berjalan mulus. Meskipun terdapat banyak elemen yang menerima demokratisasi secara antusias karena dianggap sebagai bagian dari perubahan politik yang dikehendaki mayoritas rakyat, tak sedikit yang masih memandang penuh khawatir pada setiap perkembangan politik yang terjadi. Akibatnya, di banyak negara di Timur Tengah terjadi pergulatan politik yang sebagian bahkan berdarah-darah dalam ekspresi politiknya.

Gerakan menuju demokrasi memang melibatkan interaksi politik antarunsur (baik sosial-politik, kultural, maupun agama) yang masing-masing relatif telah mapan sehingga acap kali menimbulkan gesekan, bahkan benturan. Benturan bisa terjadi antara pemerin-

¹ Lina Khatib, "Political Participation and Democratic Transition in The Arab World," *Journal of International Law* 34, no. 2 (April 2013): 315–340.

tah dan oposisi. Gesekan juga terjadi dalam interaksi antara kaum moderat dan kubu konservatif dalam suatu pemerintahan koalisi. Perselisihan juga bisa muncul antara kelompok nasionalis sekuler dan kaum fundamentalis agama.² Dalam proses ini, politik Islam juga menjadi bagian penting dalam dinamika politik di Timur Tengah.

Munculnya kekuatan politik Islam bukanlah sesuatu yang baru. Eksistensinya telah ada sejak bangkitnya berbagai gerakan Islam pada dua abad lampau, terkait dengan nama-nama Muhammad bin Abdul Wahab dari Arab Saudi (abad 18 M), Sayyid Muhammbad bin Ali Al Sanusi dari Aljazair (abad 19 M), Jamaluddin Al Afghani di Mesir (abad 19 M), dan lain-lain. Semuanya adalah pelopor kebangkitan Islam yang pengaruh moral spiritualnya tak dapat dipisahkan dari munculnya berbagai gerakan politik Islam pada periode-periode berikutnya. Berikut akan dijelaskan tentang apa dan bagaimana politik Islam di Aljazair, Sudan, Maroko, Somalia, dan Lebanon, serta bagaimana pengaruh fenomena *Arab Spring* terhadap konstelasi politik Islam di negara-negara tersebut.

A. ARAB SPRING, POLITIK ISLAM, DAN PENGARUH IKHWANUL MUSLIMIN (IM)

Munculnya politik Islam di Timur Tengah kontemporer sebenarnya bukan fenomena kekinian yang berlangsung secara tiba-tiba. Tumbuhnya politik Islam yang ditandai dengan keinginan pengimplementasian ajaran Islam dalam kehidupan sosial politik dan ekonomi embrionya sudah ada sejak lampau.³ Tujuan dari semua politik Islam adalah terciptanya Islam kaffah dalam berbagai sektor kehidupan.

1. Pengaruh Ikhwanul Muslimin di Aljazair

² Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995).

³ Bassam Tibi, *The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and The World Disorder* (London: University of California Press, 1998).

Di Aljazair, menggeliatnya politik Islam lebih dahulu tampil ke permukaan dibandingkan beberapa negara sekawasan. Kesadaran keagamaan di Aljazair telah menguat sejak 1967, dan hal ini ditandai oleh tren pemakaian hijab. Pemakaian hijab semula terbatas pada mahasiswi fakultas sastra dan studi Islam di Aljir, tetapi kemudian terus meluas di berbagai kalangan. Kecenderungan ini merupakan arus balik dari masa akhir kolonial, ketika Prancis mencoba “membebaskan” wanita setempat dari pemakaian hijab. Hal yang sama terlihat pula pada jumlah pria yang pergi ke masjid serta minta izin salat Jumat.⁴

Sampai awal 1980-an, pemerintah Aljazair sebenarnya berusaha memonopoli paham Islam dengan cara mengangkat penafsiran Islam versi pemerintah sebagai suatu yang paling benar. Pemerintah secara rutin mengadakan seminar pemikiran Islam tahunan (sejak 1969) untuk menghasilkan penafsiran resmi atas Islam dalam rangka mendukung kebijakan rezim. Pelembagaan ini dilakukan melalui jaringan kerja resmi kementerian agama dan organisasi masjid yang hanya dipimpin ulama yang terafiliasi dengan penguasa. Pada 1980, pemerintah bahkan membuat aturan pendaftaran semua masjid sehingga dapat mengawasi orientasi keagamaan semua masjid. Pemerintah juga mendirikan Institut Islam sebagai pusat pelatihan imam, dan tak seorang pun boleh memimpin salat dan ceramah di masjid tanpa ijazah dari institut ini. Untuk menarik simpati umat, pemerintah mengeksploitasi simbolisme Islam, seperti Jumat dijadikan hari libur, pejabat yang “tak Islami” (pada masa Benjedid) diganti, sekolah-sekolah Qur’an banyak dibangun (di bawah kontrol kementerian pendidikan). Untuk membangun imaji keislaman, pemerintah melabeli para pengkritik kebijakan pemerintah sebagai gerakan Islam yang ingin kembali ke praktik-praktik tradisional, takhayul, atau ke kafiran baru untuk meruntuhkan konsensus nasional.

⁴ Jean Claude Vatin, “Religious Resistance and State Power in Algeria,” dalam *Islam and Power*, ed. Ali H. Dessauki dan Alexander Cudsi (London: Croom Helm, 1981).

Politik manipulatif ini ternyata tak cukup kuat meredam gerakan Islam sentrifugal. Kelas menengah kian banyak dan kian kritis terhadap kebijakan memonopoli interpretasi Islam untuk kepentingan penguasa. Selain itu, industrialisasi—yang oleh Boumedienne sejak 1970-an dianggap lebih sebagai westernisasi—di Aljazair tak mampu menyejahterakan rakyat. Inflasi dan pengangguran meningkat, bahkan 33% pria usia produktif di Aljazair terpaksa mencari pekerjaan di Eropa.⁵ Kaum Islamis menilai bahwa berbagai kebijakan “ala Islam” bersifat manipulatif sehingga menyebabkan kemandekan. Rezim Chadli Bendjedid akhirnya mencanangkan reformasi dan memperkenalkan sistem multi-partai pada 1989 atau setelah 30 tahun partai tunggal Front Pembebasan Nasional/*National Liberation Front* (FLN) berkuasa. Pemilu multi-partai dijalankan tahun 1990 (untuk tingkat lokal) dan 26 Desember 1991 (untuk tingkat nasional). Saat itu, Front Penyelamatan Islam/Front Islamique du Salut (FIS) menang pemilu sesi pertama. FIS pimpinan Syaikh Ali Abbasi Al-Madani adalah partai Islam pertama yang diakui di Afrika Utara. FIS semula merupakan organisasi sosial yang memiliki jaringan masjid dan program kesejahteraan sosial. Pada pemilu lokal tahun 1990, FIS meraih 50% suara; pada pemilu nasional pada Desember 1991, FIS meraih 300 dari 599 kursi. Sementara itu, partai oposisi sekuler Front Kekuatan Sosialis hanya memperoleh 25 kursi, dan 16 kursi untuk FLN.⁶ Kemenangan FIS tidak lepas karena identitas keislaman yang kental yang telah berperan penting dalam gerakan kemerdekaan. Selain itu, rezim sekuler FLN tak mampu memperbaiki kondisi ekonomi yang buruk sehingga FIS menjadi partai Islam yang populer.⁷

⁵ Vatin, “Religious Resistance...”.

⁶ Dhurorudin Mashad, “Menelaah Demokrasi dan Politik Islam di Yaman, Suriah, dan Aljazair,” dalam M. Fakhry Ghafur (ed.) *Problematika Kekuatan Politik Islam di Yaman, Suriah, dan Aljazair* (Bandung: Pustaka Jaya), hlm.188.

⁷ Riza Sihbudi, *Menyandera Timur Tengah* (Bandung: Mizan, 2007).

Kemenangan FIS yang merupakan manifestasi IM dalam konteks Aljazair ini⁸ oleh kelompok sekuler (militer, Berber, kelompok organisasi perempuan, dan FLN) dilihat sebagai ancaman terkait restrukturisasi kehidupan sosial budaya Aljazair. Mereka ini dianggap telah mendorong sebuah rekayasa karena beberapa hari sebelum pemilu putaran kedua, Presiden Benjedid mengundurkan diri, militer mengambil alih kekuasaan, dewan kepresidenan dibentuk dan kemudian memilih presiden sementara, Muhammad Boudiaf. Dengan kata lain, kaum nasionalis sekuler telah melakukan kudeta terhadap hasil pemilu (membubarkan parlemen), bahkan diikuti oleh pembekuan FIS pada 1992, dan para aktivisnya ditahan atau dibunuh. Sejak saat itu, Aljazair tenggelam dalam pusaran konflik tak kunjung padam. Oleh sebab itu, ketika *Arab Spring* sedang berembus di kawasan Timur Tengah, rezim militer sekuler Aljazair yang fobia terhadap kekuatan politik Islam (islamofobia) sudah jauh-jauh hari waspada meredam gerakan kaum Islamis (dan atau IM) untuk menggelorakan demokratisasi yang telah dipangkas sejak awal 1990-an itu.

Selain terhadap FIS di Aljazair, IM ternyata juga telah lama menggejala dalam konstelasi politik Sudan. Di sana mereka terkadang tampil dinamis sebagai gerakan oposisi, tetapi pada saat lain bisa pula berkolaborasi dengan pemerintah. Semuanya ditujukan untuk melakukan kontitusionalisasi penerapan syariat Islam dalam negara.⁹ Terdapat faktor terpenting yang memudahkan IM tumbuh di Sudan, yakni secara geografis Sudan berbatasan langsung dengan Mesir sehingga kader IM di kedua negara dapat berhubungan secara intensif. Keterkaitan erat antara Khartoum dan Kairo tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga bidang pendidikan. Universitas Khartoum sebagian besar masih berkiblat pada universitas al-Azhar, baik secara akademis maupun aktivisme.

⁸ Azzedine Layachi, "Political Liberation and the Islamist Movement in Algeria," *The Journal of North African Studies* 9, no. 2 (2004): 46–67.

⁹ Carolyn Fluehr-Lobban, *Islamic Law and Society in the Sudan* (New York: Routledge, 1987), 269–274.

2. Pengaruh Ikhwanul Muslimin di Sudan

Eksistensi IM di Sudan mengalami empat fase, yaitu (1) Berkembangnya pengaruh IM di lingkungan mahasiswa Sudan, terutama di Universitas Khartoum sejak 1952; (2) Keberadaan Islamic Constitution Front (1955–1958); (3) Kian eksisnya IM dalam perpolitikan seiring bergabungnya Hassan Turabi pada 1960, yang lantas membentuk *The Islamic Charter Front* (ICF) dan ikut pemilu 1965; (4) ICF bertransformasi menjadi *al-Jabhab al-Islāmiyah al-Qawmiyyah / The National Islamic Front* (NIF) pada rentang 1985–1989 dan akhirnya menjadi partai ketiga terbesar di parlemen.¹⁰

Perubahan ICF menjadi NIF terjadi karena kesadaran bahwa gerakan Islam politis ini kurang mendapat dukungan kelompok-kelompok Islam lain, seperti *Ansār al-Sunna*, *The Republican Brothers*, kelompok-kelompok sufi, dan para pemimpin sekte tradisional karena perbedaan pandangan (dan bahkan perbedaan praktik-praktik keislaman) dengan tokoh IM, Hassan Turabi.¹¹ Basis lingkungan ICF-NIF memang kaum modernis perkotaan (*urban-centred modernist movements*) yang memiliki karakter politik adaptif dengan perubahan sosial dibandingkan kaum sufisme tradisional (*tradition-bound sufi order*).¹² Akibatnya, ICF-NIF (dengan Islam politiknya) dipandang sebagai gerakan kelas menengah dan kaum profesional yang tak memiliki basis di masyarakat Sudan, yang mayoritas penganut tarekat/sufisme.¹³

¹⁰ Abdel Ghaffar M. Ahmed, *One Against All: The National Islamic Front (NIF) and Sudanese Sectarian and Secular Parties* (Bergen: CMI, 2008), 2.

¹¹ Hassan Turabi telah terlibat dalam pembentukan Ikhwanul Muslimin pada awal 1950-an ketika aktif dalam kegiatan akademik di Universitas Khartoum. Keterlibatannya dalam dunia aktivisme berlanjut ketika dia menjadi sekjen perhimpunan mahasiswa Sudan di Inggris dan ikut menggalang solidaritas peduli Aljazair.

¹² R. Hrair Dekmejian, *Islam in Revolution: Fundamentalism in the Arab World. 2nd ed.* (New York: Syracuse University Press, 1995), 187.

¹³ John O. Voll, “The Evolution of Islamic Fundamentalism in Twentieth-Century Sudan,” dalam *Islam, Nationalism, and Radicalism in Egypt and Sudan*, eds. Gabriel R. Warburg dan Uri M. Kupferschmidt (New York: Praeger, 1983), 129. Lihat A.A. Sikainga, “Northern Sudanese Political Parties,” dalam *Civil War in*

Asumsi bahwa Turabi dan gerakan politik Islam hanya bisa eksis dalam masyarakat yang dominan sufisme disandarkan pada tiga hal. *Pertama*, fondasi ekonomi yang didukung bank-bank Islam, terutama yang memiliki jaringan ke Saudi. *Kedua*, latar belakang akademis dan pengalaman pernah menjadi menteri pendidikan memudahkan Turabi mendekati kaum intelektual kampus. *Ketiga*, Turabi sering melakukan pendekatan pada rezim kudeta militer Sudan melalui koalisi dan asistensi program-program kebijakan negara.¹⁴ Turabi bahkan sempat bekerja sama dengan Presiden Omar Bashir yang juga punya latar belakang politik gerakan Islam, meskipun akhirnya “koalisi” itu pecah. Bashir memang tetap menyatakan diri sebagai perwakilan Ikhwan yang resmi, tetapi realitasnya antara jemaah IM dan Bashir terbangun jarak (kurang akrab).

Pada era Turabi-Bashir, ideologi IM memang sangat mewarnai negara. Namun, setelah Turabi meninggalkan Bashir, ideologi IM relatif mencair. Meskipun IM masih cukup kuat, sisi tarbiyah (pembinaan) menurun dan kemampuan menampilkan diri sebagai tokoh politik juga tumpul. Bashir setelah berakhirnya “koalisi” dengan Turabi dapat dikatakan menjadi sempalan IM, terutama dalam menyikapi konflik Sudan vs. Sudan Selatan di mana tangan-tangan asing (Barat) ikut mencengkeram, baik dalam konteks ideologi kultural (Kristen) maupun ekonomi (Sudan Selatan sebagai sumber minyak). Berdasarkan realitas politik semacam ini, gelombang *Arab Spring* yang berembus di Timur Tengah menjadi tidak berpengaruh (tidak menarik perhatian masyarakat) Sudan. Pada kenyataannya, masyarakat Sudan memang tetap lebih nyaman pada era Bashir dan tak ingin kembali seperti pada era otoritarianisme Jafar Numeri yang berlangsung selama lebih dari 20 tahun.

the Sudan, eds. M.W. Daly dan A.A. Sikainga (London dan New York: British Academic Press, 1993), 86.

¹⁴ Graham E. Fuller, *The Future of Political Islam* (New York: Palgrave Macmillan, 2004), 108.

3. Pengaruh Ikhwanul Muslimin di Maroko

Dalam kasus Maroko, eksistensi Islam Siyasi yang dibangun IM kurang berkembang dan kaum Sufi masih kuat mengendalikan masyarakat. Terdapat beberapa alasan sehingga politik Islam kurang mendapat sambutan di Maroko. Pertama, tarekat dan atau sufisme pengaruhnya masih sangat kuat dalam masyarakat Maroko. Bahkan, Maroko sebenarnya daerah asal para mursyid Sufisme di Afrika utara, yang pada era runtuhnya Daulah Utsmaniah di Spanyol menyebar, termasuk ke Sudan, seperti telah sedikit disinggung pada bagian sebelumnya. Kedua, meskipun Maroko—sebagaimana Somalia dan Sudan—tergolong negara miskin, rajanya, Raja Hasan, mempunyai karisma yang sangat kuat. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, Raja Maroko adalah ahlul bait dari garis Hasan (Syarif). Maroko memang negara monarki, tetapi eksistensi historisnya berbeda dengan Arab Saudi. Kerajaan Saudi berdiri berdasarkan gerakan (gerakan pemurnian Islam) melalui kerja sama Saud-Abdul Wahab, sedangkan eksistensi monarki Maroko diwarisi dari Al Wahidun yang keturunan nabi. Raja Hasan kedua diyakini sebagai turunan nabi dari garis Hasan bin Ali. *Kedua*, Maroko menganut sistem monarki, tetapi sangat berbeda dengan berbagai monarki konservatif (bahkan juga dengan rezim republik progresif revolusioner) di sekelilingnya yang otoriter. Maroko telah menerapkan sistem monarki konstitusional seperti di Inggris. Meskipun namanya monarki, raja relatif memberikan kebebasan berekspresi. Artinya, langkah-langkah represif, pelan tetapi pasti berusaha dihilangkan. Hal ini tidak lepas dari pengaruh budaya Barat yang sangat kuat karena posisi Maroko memang berdampingan dengan Eropa. Mungkin letak geografis pula—Maroko terletak di perbatasan Eropa dan bekas dijajah Prancis—yang menyebabkan undang-undang negara ini banyak dipengaruhi oleh Undang-Undang Prancis. Jadi, demokrasi kebebasan yang diberikan oleh raja itu yang membuat rakyat tidak berontak. *Ketiga*, raja Maroko memberi perhatian kepada para jauliah dan sufi-sufi di negaranya. Tarekat-tarekat yang dominan dalam masyarakat sangat didukung negara. Kebijakan

ini menyebabkan kaum sufi sangat menghargai raja. Kebijakan ini menjadi satu kekuatan Maroko dalam menjalankan negara sehingga tidak terkena guncangan di deretan Afrika Utara (seperti Aljazair, Tunisia, Libya dan Mesir). Sufisme dan kaum Sufi tampaknya telah menjadi pilar bagi monarki Maroko sehingga tidak akan muncul militanisme.

Namun, politik Islam bukan lantas tak mendapat tempat dalam politik Maroko sebab mereka masih memperoleh saluran melalui kampus. Sebagai kelompok terdidik, kelompok Islam tak jarang mengkritisi monarki dan pemerintah Maroko, bahkan secara lebih keras dibandingkan kelompok sekuler yang biasa mengusung demokrasi liberal. Mereka menyerukan untuk kembali ke tradisi, yakni sistem yudisial yang didasarkan pada hukum syariat dan Islamisasi pemerintahan serta lembaga keuangan. Uniknyanya, meskipun kelompok sekuler dan Islam berbeda haluan politik, adakalanya mereka bekerja sama menuntut kebebasan pers dan pembebasan tahanan politik. Di Maroko, terdapat *Jama'at al-Adl wal-Ihsan/Justice and Charity* (JC) yang sangat sering mengkritisi Raja Muhammad VI dan menyerukan pembentukan republik Islam yang menghargai nilai-nilai demokrasi dan HAM. Realitas ini menjadikan organisasi JC sebagai oposisi terkuat terhadap monarki di Maroko. Meskipun JC berada dalam konflik permanen dengan otoritas, dan dalam beberapa situasi menjadi subjek represi, melalui ajaran Sufisme—sebagai basis terkuat dalam masyarakat Maroko—organisasi ini tetap saja memproklamasikan keinginan untuk mengislamisasi masyarakat dengan cara non-kekerasan, yakni melalui pendidikan. Berpijak pada karakteristik politik-kultural ini, ketika *Arab Spring* berembus di regional Timur Tengah, fenomena yang sama tidak terjadi di Maroko.

4. Pengaruh Ikhwanul Muslimin di Somalia

Di Somalia, politik Islam sebenarnya mulai muncul ke permukaan pasca-kemerdekaan setelah beberapa alumnus Universitas Al-Azhar mempromosikan ide-ide keislaman dan membentuk sejumlah gerakan Islam modern yang terinspirasi oleh IM Mesir dan sebagian

lain terpengaruh Salafiyah-Wahabi Arab Saudi.¹⁵ *Al-Islah* adalah gerakan Islam modernis pertama di Somalia yang didirikan sejumlah aktivis IM Somalia yang mempunyai jaringan dengan IM Sudan dan Arab Saudi, seperti Syaikh Mohammed Ahmad Nur, Dr. Ali Syaikh Ahmed, Dr. Mohamed Yusuf Abdi, Syaikh Ahmed Rashid Hanafi, dan Syaikh Abdullah Ahmed Abdullah.

Namun, para pemimpin *Al-Islah* merupakan musuh rezim militer-komunis yang menguasai Somalia sehingga mereka harus hidup di pengasingan dan mengendalikan gerakan dari Sudan dan Arab Saudi. Tujuan gerakan ini adalah menjaga nilai-nilai budaya asli Somalia dan menegakkan prinsip-prinsip Islam dalam negara. Di bawah pimpinan Syaikh Mohammed Ahmed Nur, *Al-Islah* menjadi gerakan Islam yang inklusif dan anti-kekerasan. Kelompok ini dalam aktivitasnya mengadopsi ideologi IM dan metodologi Islamisasi pendidikan modern gaya Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afgani di Mesir yang banyak terlibat dalam pelayanan sosial serta reformasi masyarakat dan negara sesuai dengan prinsip Islam.¹⁶ Oleh karena itu, tidak mengherankan jika *Al-Islah* menjadikan prinsip-prinsip moderasi Islam sebagai sistem nilai. Pendukung gerakan ini mengklaim bahwa metode *Al-Islah* dapat menjadi alternatif dalam memecahkan persoalan intoleransi agama di Somalia.

Jika di banyak negara di Afrika muslim (termasuk Aljazair dan Sudan) IM bisa bergerak relatif sukses, khusus di Somalia dapat dikatakan seret sebab:¹⁷

- 1) Sosialisme-komunisme awal 1960-an sangat kuat di Somalia sehingga *black campaign* terhadap reputasi IM sangat merasuki pemikiran orang-orang Somalia.

¹⁵ "The Failed State Index 2011," The Fund for Peace, diakses pada 4 September 2015 dari https://www.pucsp.br/ecopolitica/downloads/failed_states_index_2011.pdf.

¹⁶ Abdurrahman M. Abdullahi, "The Islah Movement: Islamic Moderation in War-torn Somalia," diakses pada 17 Februari 2018 dari <http://www.hiiraan.com/oct2008/ISLAH.pdf>.

¹⁷ Dr. Engkos Kosasih, FGD Tim Dunia Islam, wawancara di UIN Sunan Gunung Jati Bandung pada 26 Mei 2015.

- 2) Sejak berkuasanya rezim militer Siad Barri yang mengusung ide sosialisme-marxisme, gerakan Islam diberangus, aktivisnya ditangkap, dan sebagian mengasingkan diri ke Sudan, Mesir, Yaman, dan Arab Saudi. Pada era Siad Barri (1969–1991), kelompok Islam menjadi gerakan *underground*.
- 3) Dominannya Sufisme dalam masyarakat Somalia juga menyebabkan IM menjadi kurang besar pengaruhnya. Sufi tradisional merupakan kelompok Islam tradisional terbesar di Somalia, yang dimulai pada abad ke-19 di bawah pimpinan ulama Sufi terkemuka, seperti Syaikh Muhyiddin bin Syaikh Uwais dan beberapa muridnya. Terdapat beberapa aliran Sufi yang berkembang di Somalia, misalnya Qadariyyah, Ahmadiyyah, dan Salihyyah. Pada 1952, sejumlah tokoh Islam Sufi Somalia mendirikan organisasi Islam bernama *the Somali Islamic League* (Liga Islam Somalia) yang bereaksi terhadap maraknya gerakan misionaris Kristen di Somalia. Meskipun dalam konteks sosio-kultural sufisme di Somalia terlihat dinamis, dalam konteks Islam politik mereka bersifat apolitis. Hal ini sesuai dengan karakter kaum sufi yang memang cenderung non-politik. Sementara itu, tujuan *al Islam as siyasi* (politik Islam) yang dibawa IM selalu berlabelkan ideologis-politis. Hal ini sebagai konsekuensi dari paradigma kaum Siyasi yang memandang Islam itu sesuatu yang kamil—kaffah yang “tidak” diyakini sebagaimana kaum Sufi. Sufisme di wilayah Afrika dan wilayah bekas kekhalifahan Utsmaniah lainnya memang relatif dominan. Oleh sebab itu, ketika Islam dalam makna perbaikan politik hadir, kaum Sufi memilih untuk tidak turun, kecuali pada masa kolonialisme saat mereka mengusir Italia. Di luar perkecualian itu, urusan *Al Islam as siyasi* kaum sufisme selalu bersikap abstain, dan inilah yang dinikmati oleh rezim, seperti monarki Maroko dan pada tataran tertentu di Somalia. Namun, seiring perubahan sosial politik, ada anggota Sufi yang mulai bertransformasi menjadi Islam spritualis yang lebih radikal dan militan, seperti *Ahlussunnah wal Jama'ah* guna melawan simbol-simbol kemusyrikan dan budaya Barat.

- (4) Realitas berbagai konflik klan-kesukuan dan realitas universitas di Somalia yang tidak berkembang padahal universitas biasanya menjadi pintu masuk pemikiran IM.

Era rezim komunis dapat dikatakan ada kevakuman dalam hal kepemimpinan; pantas jika gerakan Islam tidak terlalu menonjol. Satu-satunya manifestasi IM di Somalia adalah *Harakatul Islam* pada 1978 yang menampilkan wajah sangat moderat. Langkah ini dilakukan untuk mengikuti perkembangan regional, dan gerakan ini sangat mengharamkan ikut perang saudara di Somalia. Artinya, tidak ada kader IM yang boleh ikut larut dalam perang saudara. Meskipun tergolong gerakan bawah tanah, IM masih bisa membangun jaringan dengan kekuatan politik Islam transnasional. Hal yang sama dilakukan kelompok Salafiyah, Jama'ah Tabligh, Jama'ah Takfir, dan Jama'ah Jihad. Pengaruh aktivisme politik gerakan tersebut telah menginspirasi lahirnya gerakan-gerakan Islam militan, seperti *Al-Ittihad Al-Islamiyyah*, *Ash-Shabab*, dan *Hizb al-Islam* yang menjadi motor gerakan perlawanan Islam terhadap pemerintahan despotik dan pendudukan militer asing di Somalia. Setelah kekuasaan rezim Siad Barri runtuh, barulah banyak alumni universitas Timur Tengah mengajar serta mendirikan sekolah dan lembaga pendidikan Islam. Mereka mengisi kekosongan hampir di semua lini, termasuk dalam bisnis dan aktivitas sosial.

Realitas bahwa Somalia senantiasa dilanda konflik etnis, rezim otoriter anti-politik Islam sempat bercokol, dan perguruan tinggi tidak berkembang akibat kemelut, menyebabkan pengaruh IM sangat kecil. Kampus dalam berbagai kasus sebenarnya telah menjadi sentra pengembangan pengaruh IM, mengingat wacana yang dibangun harakah Islam ini berada pada tataran intelektual. Dapat dipahami bahwa ketika *Arab Spring* menggejala di sejumlah negara di Timur Tengah yang berusaha keluar dari krisis sosial-politik dan ekonomi, Somalia masih berada dalam fase perang saudara sehingga fenomena regional itu tak memiliki pengaruh. Berdasarkan laporan *the Failed State Index 2011*, Somalia bahkan disebut sebagai negara terburuk dalam stabilitas sosial, politik, ekonomi, dan penegakan

HAM, sekaligus tergolong negara gagal (*the failed state*) dengan persentase tertinggi di dunia.

5. Pengaruh Ikhwanul Muslimin di Lebanon

Sebagaimana di Somalia, dalam kasus Lebanon, pengaruh IM dan realitas politik Islam yang bertumbuh di kawasan Timur Tengah ternyata juga sangat terbatas. Hal yang sama terjadi dalam konteks momentum *Arab Spring*—dalam pengertian masyarakat vs. negara—mengingat negara ini memang tak dihadapkan pada problem penguasa otoritarian dan justru disibukkan dengan problem horizontal dan problem sektarianisme berbasis keagamaan yang bahkan sempat meletupkan perang saudara selama bertahun-tahun. Lebanon dapat dikatakan sebagai negara yang terbelah oleh pisau primordialisme-sektarianisme dalam tiga entitas: Sunni, Syiah dan Kristen Maronit, dan dari tiga entitas ini menimbulkan dua konflik, yaitu Sunni vs. Syiah dan Syiah vs. Kristen Maronit. Jadi, Lebanon tak sempat berpikir dalam kerangka politik Islam, tetapi lebih terserap dalam isu-isu komunitas keagamaan. Sektarianisme pula yang menyebabkan terjadinya pembagian kekuasaan berdasar *al-Mitsaq al-Wathani* (Pakta Nasional) pasca-kemerdekaan 1943, yakni kekuasaan politik dibagi berdasarkan jumlah penduduk. Presiden dijabat orang Kristen Maronit, sementara perdana menteri dijabat Muslim Sunni, dan kepala Parlemen dijabat Muslim Syi'ah. Namun, kesepakatan itu ternyata tak mampu menetralisasi ancaman akibat isu sektarian seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Kelompok Muslim (Sunni dan Syi'ah) menginginkan perubahan sistem politik dengan melakukan sensus ulang, tetapi pihak Kristen menolaknya sehingga meletupkan perang saudara yang berkepanjangan. Perang saudara yang berlangsung selama puluhan tahun pada akhirnya berhasil diredam. Namun, dinamika sosial, politik, dan budaya yang cenderung dinamis dengan keanekaragaman agama, budaya, dan etnis sampai kini masih berlangsung. Di samping menganut sistem demokrasi parlementer, Lebanon juga memberlakukan sistem politik konfesionalisme atau pembagian kekuasaan

didasarkan pada komposisi etnis dan aliran keagamaan. Itulah realitas sosio-kultural dan politik yang senantiasa menggelelayuti Lebanon sehingga gerakan IM, politik Islam, bahkan fenomena *Arab Spring* tak sempat menarik perhatian masyarakat Lebanon.

B. MEMBACA PETA KEKUATAN POLITIK ISLAM

Peta kekuatan politik Islam di negara-negara dengan kasus yang sangat beragam. Untuk melihat peta kekuatan politik Islam ini perlu dibahas bagaimana pola relasinya dengan kekuasaan dan antarkelompok Islam itu sendiri. Dinamika kekuatan politik Islam di negara-negara ini memang sangat bergantung pada kekuatan rezim yang berkuasa, terutama jika relasinya bersifat rivalitas. Jika rezim dalam posisi yang kuat maka penindasan, intimidasi, konflik berdarah, pola politik adu domba dan memecah belah sering dilakukan oleh rezim. Jika cenderung lemah maka gerakan politik Islam akan lebih dominan dalam melakukan perubahan sosial politik, baik dalam bentuk konsolidasi politik maupun penggulingan rezim.

1. Peta Kekuatan Politik Islam di Aljazair

Politik Islam Aljazair telah lebih dahulu eksis di kawasan Timur Tengah, bahkan lebih dahulu aktif melancarkan tuntutan demokrasi dibanding dengan era *Arab Spring* sejak penghujung tahun 2010. Namun, upaya itu tak kunjung menampakkan hasil akibat dipangkas oleh rezim militer sekuler. Ketika pemilu multi-partai diperkenalkan tahun 1990-an, FIS berhasil memenangkan kontestasi politik, baik pemilu lokal maupun nasional. Kemudian, hasil ini dibatalkan oleh militer dengan dukungan FLN (dengan berbagai *underbow*-nya) sehingga memancing konflik bersenjata yang berlangsung lama seiring dengan hadirnya berbagai kelompok sayap militer, contohnya *Islamic Army of Salvation* (AIS), *Armed Islamic Group* (GIA), dan *Islamic Front for Armed* (FIDA). Kelompok-kelompok ini dikategorikan sebagai *The Violent Islamic Organizations*¹⁸ yang masih ada sampai kini.

¹⁸ Layachi, "Political Liberation," 46–67.

Pemerintah memang berusaha mengadakan kontak dengan FIS dengan membebaskan 780 pengikut FIS, disusul dengan pembebasan dua tokoh pada Februari 1994.¹⁹ Namun, realitas ini tak mampu meyakinkan FIS sampai organisasi itu merasa yakin ada penyelesaian konflik secara adil, penjaminan keamanan dan perdamaian serta penghargaan terhadap keinginan menerapkan agama dalam kehidupan sehari-hari. Politik Islam Aljazair mulai menemukan momentum kembali ketika diselenggarakan pemilu 1997 dan 2002, dan beberapa partai Islam, seperti *Harokat Mujtama' As-Silm* (MSP) dan Harakat An-Nahdhah mampu bersaing dalam pemilu parlemen. *Arab Spring* memang sedikit membawa pengaruh pada konstelasi Aljazair, seperti munculnya gerakan protes Desember 2010 dan terus berkembang sampai Januari 2011 ketika para demonstran menentang kebijakan kenaikan harga pangan. Namun, rezim militer Aljazair sudah sangat berpengalaman mengatasi persoalan ini sehingga dapat dengan cekatan meredam kian luasnya protes rakyat yang dimotori kaum politik Islam. Kebijakan yang dilakukan adalah memotong bea pajak, menurunkan harga kebutuhan pokok, dan melakukan langkah-langkah reformasi politik dengan merombak susunan kabinet pada Maret 2011.²⁰ Para demonstran memang sempat menuntut agar presiden Abdul Aziz Bouteflika mundur dari jabatannya. Menghadapi realitas ini, rezim militer Aljazair menyelenggarakan pemilu pada Mei 2012 sekadar untuk mencari legitimasi baru. Kubu nasionalis dalam FLN memperoleh 220 kursi, disusul Partai Demokrasi Nasional pimpinan Perdana Menteri Ahmed Ouyahia dengan 68 kursi, sedangkan partai Islam (MSP dan Harakat An-Nahdhah) menempati urutan ketiga dengan 48 kursi. Politik rekayasa ini dilakukan akibat keengganan militer kehilangan kontrol atas politik Aljazair.

¹⁹ Dhurorudin Mashad, "Menelaah Demokrasi dan Politik Islam... hlm. 189.

²⁰ Apriadi Tambukara, *Revolusi Timur Tengah* (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2011).

2. Peta Kekuatan Politik Islam di Sudan

Di negara Sudan, militer juga cukup dominan, bahkan kudeta militer sering terjadi seperti dilakukan Jenderal Ibrahim About tahun 1958, Jenderal Ja'far Numeiri tahun 1969 (*May Revolutions*), Jenderal Hasem al-Atta tahun 1971, Jenderal Abdel Rahman Swar al-Dahab tahun 1985, dan Jenderal Omar Bashir tahun 1989 sehingga pergantian sistem politik dan masa transisi membuat pemilu di negara tersebut tidak teratur. Perubahan sistem politik juga berperan terhadap ketidakteraturan pemilu dan sistem kepartaian di Sudan. Pada masa Ja'far Nemeiri, Sudan menerapkan sistem partai tunggal yang dikuasai oleh *Sudan Socialist Party* (SSP) sehingga pemerintah sosialis menutup semua kemungkinan kontestasi politik di Sudan. Model pemerintahan seperti ini juga pernah diadopsi Bashir pada 2000 saat *The National Congress Party* (NCP) memegang kendali pemerintahan secara penuh. Dalam pemilu legislatif pada tahun yang sama, semua kandidat berasal dari calon independen. Bashir juga pernah bereksperimen dengan sistem politik non-partai pada 1989–1996 dan menguasai pemerintahan transisi dengan mencalonkan dirinya sendiri sebagai presiden pada 1993.²¹ Realitas politik ini menyebabkan ekonomi Sudan tidak kunjung membaik. Dalam konteks politik pun, demokrasi masih sulit mewujudkan secara substantif di negara itu, meskipun pemilu prosedural juga cukup sering dilaksanakan.

Realitas konteks politik ini tentu tak bisa dilepaskan dari konteks keagamaan. Sampai saat ini di Sudan banyak *fuqaha* (orang yang memiliki otoritas untuk mengajarkan Islam) adalah juga ulama sufi yang mengajarkan mistisisme dan tarekat beraliran *Qadiriyyah*, *Tijaniyyah* dan *Naqshabandiyyah*.²² Islam berkembang di Sudan melalui

²¹ Xan Rice, "Profile: Omar al-Bashir," *The Guardian*, 4 Maret 2009, diakses pada 15 Oktober 2015 dari <http://www.theguardian.com/world/2008/jul/14/sudan.warcimes3>.

²² *Tariqah Tijaniyyah* yang terkonsentrasi di selatan Sudan disebarkan oleh ulama sufi asal Maroko dan dibesarkan oleh Syaikh Sidi Ahmad al-Tijani dari wilayah Tijani, Maroko.

personalitas diri ulama sufi dan kekuatan kekerabatan ataupun keluarga dari suku-suku yang ada di Sudan. Dalam hal ini, loyalitas terhadap ulama adalah jalan untuk mendapatkan berkah. Pada dasarnya, Islam di Sudan ialah sufi Islam yang tidak menjadikan tradisi dan budaya lokal dari suku-suku (*tribes*) di Sudan sebagai ancaman sehingga budaya dan tradisi lokal dan kesukuan tetap terpelihara.²³ Kelompok tarekat ini sampai sekarang menjadi kekuatan terbesar dalam konstelasi sosial politik Sudan, terutama di wilayah perdesaan.

Sementara itu, kekuatan Islam lain, seperti kaum politik Islam dan Islam modernis seperti ICF-NIF berbasiskan kaum modernis perkotaan (*urban-centred modernist movements*) yang memiliki karakter politik lebih adaptif terhadap perubahan sosial jika dibandingkan pola-pola kaum sufisme tradisional (*tradition-bound sufi order*).²⁴ Pandangan bahwa ICF-NIF adalah gerakan kelas menengah dan kaum profesional yang tak memiliki basis yang kuat di masyarakat Sudan, terutama mayoritas masyarakat bawah penganut tarekat atau sufisme, sebenarnya tidak keliru.²⁵ Realitas inilah yang menyebabkan Hasan Turabi dengan politik Islamnya tidak mudah disosialisasikan pada masyarakat secara lebih masif.

Ketika Hasan Turabi-Omar Bashir masih bekerja sama, ideologi IM sangat kental mewarnai negara.²⁶ Namun, jika dicermati, pengendali utamanya tetap Omar Bashir sebab pascakudeta dia menerapkan sistem partai tunggal (*one state party*) dan ikut berkontestasi pada pemilihan presiden tahun 1996.

Dalam pandangan Bashir, Turabi, dan NIF tidak memiliki pilihan lain selain bergabung dengan pemerintahannya, terlebih Bashir memiliki posisi yang sama, yakni memperjuangkan penerapan

²³ Abd Al Rahim Al Siddiq Mohamed Omer, Duta Besar Sudan untuk Indonesia, Singapura dan Australia, wawancara pada 16 September 2015.

²⁴ Dekmejian, *Islam in Revolution*, 187.

²⁵ Voll, "The Evolution of," 129. Lihat juga Sikainga, "Northern Sudanese", 86.

²⁶ John L. Esposito, *The Islamic Threat: Myth or Reality? 3rd ed.* (New York and Oxford: Oxford University Press, 1999), 90.

syariat Islam. Dengan demikian, aliansi Turabi-Bashir tampil sebagai *state ordered re-Islamization* atau kolaborasi negara dan gerakan Islamis yang memiliki tujuan ideologis melakukan re-Islamisasi Sudan; yang sulit bagi tumbuhnya iklim demokrasi karena berlatar belakang militer. Bagi Bashir, bergabungnya gerakan Islamis dalam skema partai tunggal akan memperkuat posisinya dalam perpolitikan Sudan dan ia pun mendapatkan justifikasi ideologis dari NIF untuk melawan gerakan sekuler.²⁷ Bagi kaum Islamis, tujuan pokok gerakan, yakni reislamisasi Sudan, dapat terlaksana dengan ditopang oleh penguasa. Eksistensi Islam politik menguat setelah Baashir membentuk partai baru pada 1998, yakni NCP, yang menempatkan Hassan Turabi pada posisi sekjen. Namun, logika simbiosis sebagai *state ordered re-Islamization* ini justru membuat IM menjaga jarak dari kedua tokoh ini (Turabi dan Bashir) sehingga IM tampil sebagai kekuatan politik Islam alternatif.

Perlu dicatat bahwa pada 1996 Bashir memenangkan pemilihan presiden dengan 75,68% suara. Saat itu tak ada partai politik di Sudan karena Bashir membubarkannya pada 1989. Bergabungnya Turabi dalam pemerintahan Bashir tahun 1990 membuat publik menilai bahwa NIF yang didirikan Turabi secara informal merupakan partai negara. Sebenarnya tidak ada pernyataan resmi bahwa NIF merupakan partai negara hingga Bashir-Turabi mendirikan *The National Congress Party* (NCP) yang pada 2000 berhasil menguasai 355 dari total 360 kursi parlemen, dan sisanya diisi oleh calon independen. Bashir sendiri memenangi 86,5% suara pada pemilihan presiden. Pada saat itu, partai-partai Islam tak memiliki suara di parlemen akibat diterapkannya partai tunggal. Namun, ketika akhirnya pemilu multi-partai diterapkan, pelemahan suara partai-partai Islam sangat terasa sehingga dapat dikatakan bahwa suara Islam tergeser dari parlemen. Pelemahan partai-partai Islam pada masa Bashir sangat efektif, terutama pada pemilu 1996, 2000, dan 2010. Pada pemilu 2010, perolehan suara partai-partai Islam bahkan sangat

²⁷ Gilles Kepel, *Jihad: The Trial of Political Islam* (Massachusetts: Harvard University Press, 2006), 182.

terpuruk di mana *Umma Party* hanya mendapat 5 kursi, sedangkan DUP dan partai milik Hassan Turabi, *The Popular Congress Party* (PCP), masing-masing hanya mendapat 4 kursi.²⁸ Padahal, sebelum kudeta Bashir dan NCP mendominasi politik Sudan, partai-partai Islam sangat berkuasa di parlemen. NUP (sebelum menjadi DUP), Umma Party, dan NIF menguasai lebih dari 50% kursi parlemen. Penguasaan partai sosialis, SSU, selama lebih 14 tahun ternyata tak bisa mengikis kekuatan partai-partai Islam. Pada pemilu 1986 partai Islam bahkan mengalami masa terkuat (82,69%) dan berhasil menjadikan Ahmed Al-Mirghani (dari DUP) sebagai kepala Majelis Tinggi pemerintahan transisi yang dikudeta oleh Bashir.

Realitas ini terjadi karena dua hal utama. Pertama, dampak dari 21 tahun (partai tunggal) Bashir memvakumkan eksistensi partai-partai Islam dalam kancah politik. Kedua, Bashir sangat aktif melakukan program-program Islamisasi dan berkomitmen untuk menerapkan syariat Islam, dan visi ini sama dengan visi partai-partai Islam.²⁹ Pendukung Islamisme akhirnya berpendapat bahwa cita-cita implementasi Islam di Sudan cukup dilakukan dengan mendukung Bashir, tanpa harus berpindah ke partai Islam yang belum tentu mampu mengimplementasikan Islam dalam konteks negara.

Secara faktual, Turabi-Bashir memang sempat berkoalisi dengan segala plus minusnya terhadap Politik Islam di Sudan. Secara prinsipil, ajaran Islam menjunjung prinsip *syuro*. Jadi, meskipun dalam konteks politik idealisme Turabi diuntungkan, ia tetap tak bisa berdiam terhadap kesewenang-wenangan penguasa. Akibatnya, hubungan antara tokoh gerakan Islam politik ini tidak harmonis dan mencapai puncak ketika Turabi menggugat kekuasaan Bashir melalui parlemen dengan mengusulkan undang-undang baru yang membatasi kekuasaan presiden.³⁰ Menghadapi tantangan ini,

²⁸ "Elections in Sudan," diakses pada 18 Oktober 2015 dari <http://africanelections.tripod.com/sd.html>.

²⁹ Abd Al Rahim Al Siddiq Mohamed Omer, wawancara pada 16 September 2015.

³⁰ Stefano Bellucci, "Islam and Democracy: The 1999 Palace Coup in Sudan," *Middle East Policy* 7, no. 3 (Juni 2000): 173.

Baashir segera membubarkan parlemen, memecat Turabi dari posisi ketua parlemen, bahkan dari keanggotaan NCP. Kemudian, pada 1999 Turabi mendirikan partai sendiri, yakni PCP. Realitas ini berdampak pada hubungan kompleks antara Islam dan politik di Sudan yang terpecah dalam tiga faksi bertentangan, yaitu NCP sebagai partai pemerintah yang dikendalikan Omar Bashir, PCP dipimpin Hassan Turabi, dan IM yang berusaha mengambil jarak dari kedua partai politik tadi. Seiring pecahnya kongsi Bashir-Turabi, Bashir yang sebelumnya lebih mengandalkan Turabi akhirnya mencari dukungan alternatif massa Islam sendiri dengan mendirikan sayap politik gerakan Islam bernama *Islamic Movement*.

Pada 2011 di Sudan muncul gerakan protes *new intifada* sebagai refleksi perlawanan terhadap rezim “diktator.” Protes berawal dari kalangan mahasiswa di Khartoum dan El-Obeit, lalu meluas ke beberapa universitas di Sudan. Pada 2013, gerakan ini berubah menjadi gerakan massa yang tidak hanya berbasis mahasiswa, tetapi juga *non-government organization* (NGO) dan partai politik oposisi. Namun, gerakan tersebut tidak signifikan untuk menggoyahkan kekuasaan Bashir³¹ karena beberapa sebab. *Pertama*, tidak adanya tokoh sentral sebagai simbol perlawanan terhadap Bashir pasca-2011. Keinginan masyarakat untuk melakukan *regime change* sendiri tidak didukung tokoh oposisi sentral, seperti Hassan Turabi, yang mengatakan bahwa dia tidak menginginkan perubahan dramatis dari rezim seperti yang terjadi di Mesir. Hal yang ingin dilakukan Turabi adalah membuat undang-undang transisi untuk menciptakan pemerintahan transisi agar pergantian kekuasaan berjalan mulus.³² *Kedua*, kelompok oposisi terkemuka justru terpecah antara Hasan Turabi

³¹ Nesrine Malik, “Sudan is Finally Building Up io Its Own *Arab Spring*,” *The Guardian*, 1 Oktober 2013, diakses pada 7 Februari 2015 dari <http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/oct/01/sudan-arab-spring-khartoum-omar-al-bashir>.

³² Mohamed al-Makki Ahmed “Sudanese Opposition Leader: Bashir Does Not Represent Islam,” *Al-Monitor*, 12 Juni 2013, diakses pada 15 Oktober 2015 dari <http://www.al-monitor.com/pulse/politics/2013/06/sudan-opposition-turabi-interview-bashir.html>.

dan Sadeq el Mahdi sejak tahun 2010. Penahanan terhadap Turabi tahun 2011 juga membuat oposisi kehilangan tokoh sentral. *Ketiga*, peran *civil society* tidak kuat di Sudan dan tidak diberikan ruang untuk tumbuh dan berkembang sehingga pergerakan massa antara 2011–2015 sifatnya masih sporadis dan tidak masif. Akibatnya, dengan dukungan yang kuat dari militer, rezim represif ini masih bisa meredam protes massa. Selain itu, media-media arus utama dikuasai pemerintah sehingga membuat rezim Bashir bisa mengantisipasi protes agar tidak meluas. Bashir juga dengan cerdas menampilkan diri sebagai penguasa yang mampu menyerap semangat demokrasi dengan cara menyelenggarakan pemilu pada 2015. Di atas semua itu, alasan yang mendasar adalah bahwa ketika muncul euforia *Arab Spring* di Timur Tengah, Sudan justru dilanda tragedi politik merdekanya Sudan Selatan lewat referendum sehingga fenomena *Arab Spring* tak menyerap perhatian masyarakat Sudan.

3. Peta Kekuatan Politik Islam di Maroko

Lantas bagaimanakah peta kekuatan Islam dalam konstelasi politik di Maroko? Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, sufisme dan atau tarekat merupakan gerakan keagamaan yang paling dominan di Maroko. Oleh sebab itu, kelompok masyarakat ini didekati penguasa dalam rangka membangun stabilitas. Rezim monarki Maroko berhasil “mengendalikan” mereka melalui serangkaian kebijakan, tetapi tidak sedikit dari mereka yang bersifat kritis pada rezim.

Terdapat sejumlah kelompok Islam dalam konstelasi politik Maroko, dan hampir semuanya memakai kaum sufisme sebagai basis massanya. Sufi *Zaouiya Boutchichia*, misalnya, merupakan kelompok yang secara vulgar menjadi pendukung monarki. Gerakan ini beraliansi dengan monarki dalam bidang politik dan sosial sehingga dapat dimobilisasi untuk menghadapi oposisi kelompok Islam lainnya. Kelompok sufi ini sering kali dipinggirkan dalam kajian politik Maroko padahal kelompok ini berperan sangat penting dalam pe-

ngakuan legitimasi monarki dan sebagai penghubung kaum religius kelas menengah dengan monarki.³³

Selain itu, ada kelompok *Hizb al-Adala wal-Tanmiyya (The Party for Justice and Development/PJD)* sebagai gabungan organisasi-organisasi Islam moderat dan kelompok pendukung Kerajaan. Struktur PJD berkaitan erat dengan asosiasi keagamaan, *the Movement for Unity and Reform (MUR)*, yang terdiri atas 200 kelompok agama. PJD memang membantah hubungan kultural-struktural dengan MUR, tetapi kebanyakan pemimpin PJD adalah anggota MUR. Hanya saja terdapat pembagian fungsi antara MUR dan PJD. *Pertama*, jika *the Justice and Development Party/PJD* berada pada posisi pro-monarki, MUR bersikap lebih kritis terhadap otoritas dan tetap mempertahankan kontak dengan basis pendukungnya melalui asosiasi keagamaan. *Kedua*, jika *the Justice and Development Party/PJD* bermain pada ranah politik kepartaian, MUR bermain pada ranah organisasi massa penekan. Berbeda dengan Sufi *Zaouiya Boutchichia* yang bermain pada tataran *pressure group* (kelompok), organisasi pimpinan Abd al-Karim Khatib dan Abd al-Allah Benkiran ini ikut bermain dalam politik parlementariat dan kepartaian. Di bawah nama *The Constitutional and Democratic Popular Movement (MPDC)*, mereka berkompetisi pada pemilu legislatif 1997 dengan meloloskan 9 kursi. Pada 1998, MPDC berubah menjadi *the Justice and Development Party (PJD)* serta ikut pemilu pada 2002 dan memenangkan 42 dari 295 kursi. Partai ini telah menjadi salah satu kekuatan politik utama di Maroko.³⁴

PJD tampaknya tidak mempersoalkan fondasi politik kerajaan Maroko sehingga tidak menyerukan retorika perubahan sosial yang bertujuan membentuk negara Islam. Bagi PJD, negara-bangsa Maroko tak perlu diislamisasikan karena memang sudah Muslim. Sebaliknya, PJD akan teguh memegang prinsip mempertahankan identitas Islam saat identitas itu terancam. Intinya, PJD mengecam

³³ Michael M. Laskier, "A Difficult Inheritance: Moroccan Society under King Mohammed VI," *Middle East Review of International Affairs*.7, no.3 (2003), 4.

³⁴ Laskier, "A Difficult Inheritance", 4.

upaya menghilangkan karakter Muslim di negaranya. Sikap terlalu jinak ini acap kali menumbuhkan tuduhan miring dari lawan politik, bahkan juga dari kalangan internal. Dalam perkembangannya, PJD mengubah strategi dari pendukung kritis menjadi oposisi konstruktif terhadap pemerintah. Strategi ini diambil untuk memuaskan sayap radikal partai, tetapi tanpa membahayakan aliansi strategis dengan negara dalam isu mempertahankan identitas keislaman negara Maroko.³⁵

Sikap PJD berseberangan dengan kelompok lainnya, yakni *Jama'at al-Adl wal-Ihsan (Justice and Charity)*/JC yang tidak ragu mengkritik Raja Muhammad VI, bahkan menyerukan pembentukan republik Islam yang menghargai nilai-nilai demokrasi dan HAM. Organisasi ini menempatkan diri di luar sistem dan menjadi oposisi terkuat monarki. Jika PJD bersikap non-konfrontasional dengan raja, JC justru dalam situasi konflik permanen.

Sebagaimana dua kekuatan Islam sebelumnya, JC juga menjadikan sufisme sebagai basis kultural mengingat tarekat memang dominan dalam masyarakat Maroko. Melalui sufisme pula JC memproklamasikan keinginan untuk mengislamisasi Maroko melalui cara non-kekerasan dan jalur pendidikan. Salah satu caranya adalah penerbitan majalah Islam al-Jama'a dan harian *al-Subh*. Jika PJD memisahkan sayap politik dan agama (baca: MUR), JC justru menggabungkan aktivitas keagamaan dan politiknya.³⁶ JC berkiprah melalui gerakan sosial dan memberikan pelayanan serta bantuan kepada masyarakat miskin. JC, atau lebih terkenal sebagai *Al-Adl* (didirikan oleh Syekh Abd al-Salam Yasin), secara konsisten mengkritik imperialisme monarki, dekadensi Westernisasi, dan ketidakadilan sosial. Karena dilarang menyebarkan pandangannya di masjid-masjid, *al-Adl* melakukan diseminasi ide-ide mereka melalui jaringan-jaringan afiliasi, kaset, internet, dan sirkulasi publikasi yang terbatas. Akibat kegiatan ini, Yasin dan para elite JC acap kali masuk

³⁵ Samir Amghar, "Political Islam in Morocco," *CEFS Working Document*, no. 269 (Juni 2007): 1–2.

³⁶ Amghar, "Political Islam," 2–3.

bui. Walaupun *Al-Adl* mendapat kekerasan sistematis, gerakan sosial ini tetap bertahan.

Reformasi sosial yang dilakukan Raja Muhammad VI setelah wafatnya Raja Hassan II justru kian meningkatkan gaung perlawanan dari JC sebab reformasi itu kontradiktif dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam reformasi sosial yang dilakukan oleh PM Abderrahmane Yussufi mengenai hak perempuan (*Mudawana*) pada 2000, gerakan JC justru mendapat dukungan dari seluruh faksi Islam—termasuk PJD yang senantiasa pro Monarki—dengan menggelar demonstrasi di Kasablanka pada 13 Maret 2000 diikuti sekitar 1 juta orang.³⁷

Ada kelompok politik radikal di Maroko yang ingin menggulingkan pemerintah dengan cara kekerasan, yakni Salafiya Jihadiya (Salafi Jihadi/SJ). SJ melakukan penyerangan pada Mei 2003 di Kasablanka. Realitas ini tentu sangat berbeda dari pandangan arus utama tarekat/sufisme yang tidak suka pada ingar bingar politik, terlebih lagi yang bersifat kekerasan. Oleh karena itu, SJ menjadi minoritas. Eksistensi SJ sangat paradoks karena keberadaan kelompok ini justru berawal pada 1980-an ketika Raja Hassan II mengizinkan Arab Saudi menyebarkan Wahabi-Salafi untuk mengatasi Islam politik (IM) di Maroko. Konsekuensinya, banyak generasi baru ulama radikal yang disekolahkan di Arab Saudi. Namun, pasca-Perang Teluk 1991, generasi ulama baru ini mulai berseberangan dengan Arab Saudi—juga Maroko—yang dianggap turut membantu invasi AS. Secara ideologi, SJ alafiya Jihadiya terinspirasi Sayyid Qutb, Omar Abd al-Rahman, Abu Qatada, dan bahkan Osama bin Laden.

Maroko acap kali disebut sebagai kasus perkecualian dalam gempitanya fenomena *Arab Spring*, tetapi bukan berarti realitas politik itu tidak sempat menjamah Maroko. Pada kenyataannya, di negara itu juga terjadi demonstrasi pada 20 Februari 2011. Hanya saja, monarki Maroko sangat tanggap dengan segera melancarkan program reformasi (sejak 9 Maret 2011) untuk mengimplementasikan perubahan nyata di Maroko, termasuk membuat konstitusi

³⁷ Amghar, “Political Islam,” 5–6.

baru. Dalam konstitusi baru, raja memang tetap memiliki otoritas eksekutif yang signifikan. Namun, dalam sistem politik parlementer, kepala negara (raja ataupun presiden) punya otoritas tertinggi terkait dengan integritas kedaulatan negara. Hampir semua elemen sosial politik menerima reformasi ini, dan hanya JC yang masih turun ke jalan melakukan protes menolak konstitusi yang mereka anggap dipaksakan oleh elite dalam sistem yang sama, dan bukan disusun oleh dewan yang diseleksi secara demokratis.³⁸

Rezim juga menjalankan pemilu legislatif pada 25 November 2011, dan partai Islam tampil sebagai pemenang. PJD meraih 107 kursi, diikuti Partai *Istiqlal* (partai independen) sebagai partai politik tertua Maroko dengan 60 kursi. Adapun *The National Rally for Independents* (RNI) mendapat 52 kursi, The Authenticity and Modernity Party (PAM), sebagai parpol terbaru, meraih 47 kursi.³⁹ JC sebagai kekuatan politik Islam yang menolak sistem tentu saja tidak terlibat dalam pemilu. Namun, pada basis-basis JC (seperti Kasablanka dan di wilayah utara Maroko), PJD meraih banyak suara sehingga beberapa analisis menyimpulkan bahwa JC memberikan suaranya kepada PJD. Di wilayah-wilayah miskin, PJD memperoleh suara banyak.⁴⁰ Namun, perlu dicatat bahwa kemenangan PJD pada 2011 merupakan momentum historis karena untuk pertama kalinya pemerintahan baru Maroko dipimpin partai Islam.

4. Peta Kekuatan Politik Islam di Somalia

Bagaimanakah peta kekuatan politik Islam di Somalia? Perlu diketahui bahwa hubungan antara Islam dan penduduk asli *Soomal* mencapai puncaknya seiring dengan kedatangan dua Syaikh Sufi dari

³⁸ Mohammed Hashas, "Is Moroccan Exceptionalism Falling Apart?" *Reset Doc*, 31 Mei 2013, diakses pada 14 Agustus 2015 dari <http://www.resetdoc.org/story/00000022251>.

³⁹ Mohammed Hashas, "Fragility of the Party System in Morocco and the Way Ahead post-2011 New Constitution and Elections," *Reset Doc*, 18 April 2012, diakses pada 15 Agustus 2015 dari <http://www.resetdoc.org/story/00000021937>.

⁴⁰ Carlos García-Rivero dan Hennie Kotzé, "Electoral Support for Islamic Parties in the Middle East and North Africa," *Party Politics* 13, no. 5 (September 2007): 622.

Yaman, yaitu Syaikh Daarood Jabarti dan Syaikh Ishaq. Kehadiran keduanya mempererat relasi antara identitas Islam dan identitas klan di Somalia. Kedua tokoh itu menikah dengan penduduk asli *Soomal* hingga membentuk klan terbesar di Somalia saat ini, yaitu Darood dan Ishaq, yang menempati wilayah utara dan selatan Somalia. Terdapat beberapa suku besar di Somalia, yaitu Darood, Ishaq, Dir, Hawiya, Digil, dan Rahanwain. Suku-suku besar ini terbagi lagi menjadi ratusan bahkan ribuan sub-klan. Dalam perkembangannya, klan Darood dan Ishaq menjadi pelopor lahirnya sejumlah kelompok Sufi dan gerakan Islam di Somalia. Sheikh Sharif Sheikh Ahmad adalah tokoh klan Darood yang memimpin pergerakan kelompok Islam Sufi di Somalia. Pada pemilu 2008 di Djibuti, ia—didukung aliansi oposisi Islam moderat—berhasil menjadi presiden Republik Somalia untuk periode 2008–2012. Sebagaimana Sudan, Sufisme juga menjadi kultur keagamaan mayoritas di Somalia. Jadi, sufisme dan klan telah berpilin menjadi satu kekuatan politik yang besar di Somalia.

Gerakan Islam politik di Somalia sebagai kekuatan alternatif mulai muncul ke permukaan pasca-kemerdekaan setelah beberapa alumni Universitas Al-Azhar mempromosikan ide-ide keislaman dan membentuk sejumlah gerakan Islam modern yang terinspirasi oleh Ikhwanul Muslimin di Mesir dan *Salafiyah*-Wahabi di Arab Saudi. Gerakan Islam yang terkenal adalah *Al-Ittihad Al-Islami* yang didirikan pada 1982. Gerakan *Al-Itisham*, *Hizb al-Islam*, *Ash-Shabab*, dan *Salafiyah Jadidah* adalah empat kelompok utama Salafiyah yang merupakan cabang dari *Al-Ittihad Al-Islami*. Selain itu, ada juga gerakan Islam yang jauh sebelumnya telah berdiri, seperti gerakan An-Nahdhah yang berdiri di Mogadishu pada 1967, *Wahadat Ash-Shabab Al-Islami* (Persatuan Pemuda Muslim) di Hargeisa pada 1969, dan organisasi mahasiswa *Jamaat Ahlal Islami* (Al-Ahli) yang berdiri pada 1970.

Namun, sejak rezim militer Siad Barri yang mengusung ide sosialis-marxisme berkuasa, gerakan dan organisasi massa Islam diberangus sehingga banyak aktivisnya ditangkap atau mengasingkan

diri ke sejumlah negara, misalnya Sudan, Mesir, Yaman, dan Arab Saudi, serta membuat kontak dengan kelompok politik Islam yang berada di negara itu. Selama masa kepemimpinan Siad Barri (1969–1991), kelompok Islam menjadi gerakan bawah tanah dalam melawan kekuatan rezim militer.⁴¹ Keberadaan kelompok Islam semakin kuat setelah kekuasaan rezim otoriter Siad Barri runtuh. Banyak alumni universitas Timur Tengah yang mengajar dan mendirikan sekolah serta lembaga pendidikan Islam. Selain dalam bidang pendidikan, mereka pun mengisi kekosongan hampir di semua bidang lainnya, termasuk bisnis dan aktivitas sosial.

Di antara berbagai kekuatan politik, Sufi tetap menjadi kelompok Islam tradisional terbesar di Somalia. Kebangkitan sufisme dimulai pada abad ke-19 di bawah pimpinan Syaikh Muhyiddin bin Syaikh Uwais dan beberapa muridnya yang menjadi syaikh sufi di sejumlah daerah di Somalia. Terdapat beberapa aliran sufi yang berkembang, yaitu Qadariyyah, Ahmadiyyah dan Salihyyah.⁴² Pada 1952, sejumlah tokoh Sufi mendirikan *the Somali Islamic League* Liga Islam Somalia yang bereaksi terhadap maraknya misionaris Kristen di Somalia. Pada awalnya, gerakan ini mengusung damai dalam setiap aktivitasnya. Pada perkembangannya, Liga Islam Somalia bertransformasi menjadi Islam spritualis yang lebih radikal dan militan seperti *Ahlussunnah wal Jama'ah* melawan simbol-simbol kemusyrikan dan budaya Barat serta Ash-Shabab dan Hizb al-Islami yang reaksioner terhadap kekuatan militer dan simbol-simbol Barat di Somalia.

Selain sufisme, ada dua kelompok politik Islam lain yang tergolong besar di Somalia, yaitu Islam modernis dan Salafiah/Salafiah.⁴³ Kelompok Islam modernis *Al-Islah* menjadi gerakan Islam

⁴¹ George Sebastian Holzer, "Political Islam in Somalia," diakses 2 Maret 2018 dari http://www.operationspaix.net/DATA/DOCUMENT/5337-v-Political_Islam_in_Somalia_A_Fertile_Ground_for_Radical_Islamic_Groups_.pdf.

⁴² Abdurrahman M. Abdullahi, "Islamism and Politics in Somalia," *Chatham House*, 12 Juni 2012.

⁴³ Najum Mustaq, "Federalism Amid Political Military Chaos," diakses pada 3 Maret 2018 dari life-peace.org/hab/federalism-amid-political-military-chaos/.

modernis pertama di Somalia yang didirikan oleh aktivis IM Somalia yang mempunyai jaringan dengan IM Sudan dan Arab Saudi, seperti Syaikh Mohammed Ahmad Nur, Dr. Ali Syaikh Ahmed, Dr. Mohamed Yusuf Abdi, Syaikh Ahmed Rashid Hanafi, dan Syaikh Abdullah Ahmed Abdullah. Para pemimpin *Al-Islah* merupakan musuh rezim sehingga mereka harus hidup di pengasingan dan mengendalikan gerakan dari Sudan maupun Arab Saudi. Tujuan didirikannya gerakan ini adalah menjaga nilai-nilai budaya asli Somalia dan menegakkan prinsip-prinsip Islam dalam negara tersebut. Di bawah pimpinan Syaikh Mohammed Ahmed Nur, *Al-Islah* menjadi gerakan Islam yang inklusif dan anti-kekerasan. Kelompok ini dalam aktivitasnya mengadopsi ideologi IM.⁴⁴ Jadi, tidaklah mengherankan jika *Al-Islah* menjadikan prinsip-prinsip moderasi Islam sebagai sistem nilai. Pendukung gerakan ini mengklaim bahwa metode islah dapat menjadi alternatif dalam memecahkan persoalan intoleransi agama di Somalia.

Selain kelompok tradisional dan modernis, ada pula kelompok Islam radikal, contohnya *Al-Ittihad Al-Mahakim Al-Islamiyyah* (AIAI), *Ash-Shabab*, dan *Hizb Al-Islami*. Mulanya Al-Ittihad (singkatan AIAI) yang bertujuan melengserkan rezim Siad Barri dan mendirikan pemerintahan yang Islami. Agenda keislamannya sangat jelas melalui pembentukan pengadilan Islam (*Al-Mahakim Al-Islamiyyah*) yang dipimpin oleh seorang ahli hukum Islam di sejumlah wilayah. Meski bersimbolkan Islam, faktor klan tetap sangat berpengaruh. Sejumlah klan, seperti subklan Saleban, Hawiya, dan Duduble, mendirikan pengadilan Islam di wilayahnya masing-masing.⁴⁵ Selain AIAI, ada pula *Wahadat Ash-Shabab* dan *Jama'ah Al-Islamiyyah* yang pada akhirnya mampu menggulingkan kekuasaan Siad Barri. Bergabungnya dua kelompok radikal ini berkat pemimpinnya (Syaikh Ali Warsame) yang mempunyai hubungan dengan sejumlah tokoh Al-Qaeda, seperti Ibrahim Haji Jama atau Al-Afgani. Jadi, selain mempunyai relasi ideologis de-

⁴⁴ Abdullahi, "The Islah."

⁴⁵ Abdullahi, "The Islah."

ngan Salafiyah, gerakan ini juga mempunyai hubungan dengan Al-Qaeda. Hubungan terjalin sejak awal 2000, ketika Osama bin Laden memberikan dukungan finansial kepada sejumlah gerakan Islam radikal dengan maksud mendirikan basis Al-Qaeda di Somalia. Sejak saat itu, militansi *Al-Ittihad* semakin meningkat dengan menyerang fasilitas pemerintah dan militer asing. Adapun *Hizb al-Islam* adalah gerakan Islam yang juga kerap berseberangan dengan pemerintahan federal Somalia. Gerakan yang berdiri pada Februari 2009 melalui aliansi gerakan *Jabhatul Islam* dengan sejumlah klan ini bertujuan mendirikan negara Islam Somalia. Pada Mei 2010, *Hizb al-Islam* mendeklarasikan berdirinya pemerintahan Islam di selatan Mogadishu di bawah pimpinan Syeikh Omar Iman Abu Bakar. Klaim ini memperuncing konflik dengan pemerintah transisi.⁴⁶ Sebagaimana *Ash-Shabab*, *Hizb al-Islam* juga memilih menjadi oposisi militan terhadap pemerintah dan militer asing di Somalia. Hubungan *Hizb al-Islam* dan *Ash-Shabab* mengalami pasang surut antara aliansi dan konflik. Pada 7 Mei 2009, *Hizb al-Islam* dan *Ash-Shabab* bekerja sama melancarkan serangan terhadap pemerintahan *Transition Federal Government* (TFG) di Mogadishu. Namun, keduanya pernah konfrontasi pada 2009 setelah militan *Hizb al-Islam* menangkap penasihat keamanan Prancis di Mogadishu yang berujung pada konflik kedua belah pihak. Pada Oktober 2010, kedua kelompok bahkan saling angkat senjata memperebutkan daerah strategis Kismayo dan sejumlah kota di selatan Somali yang berakhir pada kemenangan *Ash-Shabab* di Kismayo dan Dhusa Marib (wilayah selatan). Akhirnya, *Hizb al-Islam* tinggal terkonsentrasi di daerah utara Mogadishu. Konflik antara dua kubu mulai mereda seiring terbentuknya Pemerintahan Federal Somalia pada Agustus 2012 dan melemahnya kekuatan *Ash-Shabab* akibat invasi koalisi militer asing ke basis *Ash-Shabab* di sejumlah wilayah.

Somalia memang wilayah konflik sehingga gerakan kaum radikal tampak lebih eksis, dan kekerasan tampak lebih menonjol.

⁴⁶ Markus Virgil Hoehne, *Counter-Terrorism in Somalia: How External Interference Helped to Produce Militant Islamism* (2007).

Selain itu, kekuatan asing ikut tampil dalam panggung politik di negara ini sebagaimana telah digambarkan secara detail pada bab sebelumnya. Masyarakat Somalia yang dominan dengan tradisi sufisme sebenarnya kurang menyukai radikalisme seperti itu. Kelompok sufi moderat dan *Ahlussunnah wal Jamaah*, misalnya, sangat menentang sepak terjang *Ash-Shabab* di Somalia.

Karena tidak kokohnya dukungan dari masyarakat yang sangat diwarnai sufisme ini, sejak 2008 Al-Ittihad dan *Ash-Shabab* mengalami penurunan kekuatan. Hal ini juga terjadi akibat perpecahan internal dan pembelotan sejumlah pemimpin senior, seperti Mohamed Faruq dan Ali Hassan Gheddi, yang bergabung dengan pemerintah federal Somalia. Pendukung utama, seperti *Hizb al-Islam*⁴⁷ dan *Ahlussunnah wal Jamaah* akhirnya bekerja sama dengan pemerintah untuk melawan Ash-Shabab dan milisi radikal lainnya, terutama sejak *Ash-Shabab* melakukan aksi brutal terhadap penduduk sipil dan pemboman sejumlah fasilitas umum milik pemerintah.

Konstelasi politik Somalia memang penuh konflik sehingga kekuatan militan yang dominan tampil dalam wacana politik. Namun, proses politik juga sebenarnya ada di balik konflik bersenjata, tentu saja dilakukan oleh kekuatan yang menjunjung cara-cara politik demokrasi, termasuk kalangan Islam modernis model *Al-Islah*. Pada awalnya, tidak ada partai politik Islam yang mewakili aspirasi umat Islam; yang ada hanyalah partisipasi individu yang mewakili umat Islam dalam partai politik tertentu. Setelah rezim Siad Barri runtuh, terjadi perdebatan tentang perlunya partisipasi rakyat dalam politik. Pada 2000, diselenggarakan konferensi untuk rekonsiliasi nasional di Djibuti. Dalam konferensi ini, disepakati pembentukan pemerintahan dan parlemen sementara Somalia. Kelompok Islam diwakili oleh *Al-Islah* pimpinan Shaikh Sharif Ahmad. Pada pemilihan anggota parlemen, *Al-Islah* memperoleh 10% kursi di Parlemen dari 30% kursi untuk kelompok Islam. Namun, keanggotaan parlemen

⁴⁷ Hizb Al-Islami pimpinan Syaikh Syarif Hassan juga pernah menyatakan dukungannya, tetapi karena perbedaan pandangan ia menarik dukungannya pada 2013.

ini tidak berlangsung lama setelah pada 2004 dibubarkan akibat konflik dan dikuasainya Kota Mogadishu oleh kelompok militan.

Ketika kekuatan radikal relatif berhasil “dijinakkan,” proses politik kembali dijalankan. Menjelang pemilu 2016, sejumlah tokoh politik dan para pemimpin klan membentuk partai dan organisasi politik baru, termasuk tokoh politik Islam. Pada April 2007, Hassan Sheikh Mahmoud mendeklarasikan *Peace and Development Party* (PDP) sebagai partai Islam moderat yang mengusung visi 2016 menuju Somalia menjadi negara demokratis. Sementara itu, pada Februari 2012, kelompok Islam lainnya mendirikan *Daljir Party* yang merupakan aliansi partai Islam, seperti *Al Itisham*, *Al-Islah*, dan *Ala Ash Sheikh*. Para anggotanya mencakup mantan pejabat pemerintahan, seperti Abdirrahman Janaqaw, mantan menteri agama Mahmoud Abdi Ibrahim Garweyne, dan mantan wakil perdana menteri Hassan Mo'allin. Meskipun mendapat dukungan dari tiga partai Islam, partai ini tidak sepenuhnya merepresentasikan kekuatan politik Islam karena kelompok Islam terpecah dalam beberapa faksi politik.⁴⁸ Untuk menandingi kekuatan politik PDP, pada Mei 2015, kelompok liberal mendirikan *Cosmopolitan Democratic Party* di bawah pimpinan Yarow Sharif Ahmad.

5. Peta Kekuatan Politik Islam di Lebanon

Politik di Lebanon tampaknya terbelenggu oleh sistem politik konfesionalisme. Dalam sistem ini, demokrasi dijalankan dengan penjatahan kekuasaan berdasarkan perbedaan agama. Presiden dijabat oleh orang Maronit, Perdana Menteri dijabat oleh Muslim Sunni, sementara Ketua Parlemen dijabat oleh Muslim Syiah. Sementara itu, Dewan Perwakilan dibagi berdasarkan agama, dengan perbandingan jumlah kursi untuk orang Kristen dan orang Muslim 50%: 50%. Di dalam kalangan Kristen, kursi parlemen juga dibagi lagi berdasarkan aliran/sekte yang ada. Demikian juga kursi

⁴⁸ Mahad Omar Diriye, “Which are Somalia’s Political Parties,” *Somalia Report*, 7 September 2012, diakses pada 15 September 2015 http://www.somaliareport.com/index.php/post/3478/Which_are_Somalias_Political_Parties.

parlemen jatah Muslim akan dibagi lagi menurut aliran/sekte yang ada. Sistem ini dimaknai sebagai implementasi prinsip demokrasi berlandaskan sistem proporsionalitas. Oleh karena itu, momentum *Arab Spring*—dalam pengertian masyarakat vs. negara—tampaknya tidak mendapat perhatian masyarakat Lebanon. Negara ini memang tidak dihadapkan pada problem penguasa yang otoritarian, bahkan dapat dikatakan “negara” *vis a vis* masyarakat dalam kasus Lebanon berada pada posisi paling lemah dibanding dengan negara-negara lainnya. Dapat dipahami jika Lebanon lebih dihadapkan pada problem sektarianisme berbasis keagamaan yang bahkan sempat meletupkan perang saudara selama bertahun-tahun.⁴⁹ Dalam sistem politik konfesionalisme tersebut, kekuatan politik Islam Lebanon akhirnya juga bukan dalam entitas tunggal, melainkan terpecah dalam kelompok Sunni dan Syi’ah, bahkan termanifestasi dalam beberapa wujud yang lebih ekstrem.

Pertama, kelompok Islam yang merepresentasikan politik Sunni, contohnya *Harakah al-Ahbash*, *Harakahat-Tauhid*, dan *Jama’ah al-Islamiyyah*. *Harakah al-Ahbash* lahir di Beirut di bawah pimpinan Syeikh Abdullah al-Habsyi, seorang mufti asal Ethiopia. Beberapa tahun terakhir, *al-Ahbash* menjadi gerakan Islam paling aktif dalam politik di Lebanon dan mendapat dukungan dari Al-Qaeda. Adapun *Jama’ah al-Islamiyyah* berdiri di Tripoli dipimpin Abdullah al-Babati, dan para aktivisnya dipengaruhi pemikiran Faisal al-Maulawi dan Muhammad Khalil ad-Dinawi yang menyerukan masyarakat Islam untuk kembali ke syariat Islam. Pasca-agresi militer Israel tahun 1982, kelompok ini berkomitmen untuk menjadikan Israel sebagai target serangan. Kelompok Sunni lain yang juga berpengaruh adalah *Islamic Unification Movement* (IUF) atau *Harakah at-Tauhid*. Gerakan ini juga menjadi faksi utama yang lahir akibat agresi Israel tahun 1982. Sebagai pemimpin, Syeikh Said Sya’ban berupaya untuk mendirikan negara Islam di Lebanon.⁵⁰

⁴⁹ Dr. Mohamed Chamsedine, wawancara pada 8 Maret 2016 di Information International Research Consultants, Martyrs Square, Beirut, Lebanon.

⁵⁰ Ahmad S. Moussalli, “Political Islam in Sunni Communities of Lebanon,” ISIM News Letter, 3/99, diakses pada 10 Maret 2018 dari <https://openaccess>.

Kedua, kelompok Islam yang merepresentasikan politik Syi'ah, yaitu *Harakah al-Amal* dan *Hizbullah*. *Harakah al-Amal* merupakan gerakan Syi'ah moderat. Amal didirikan Imam Musa As-Sadr, seorang Mullah yang lahir dan besar di Iran. As-Sadr adalah tokoh Syi'ah yang menghendaki toleransi dan persamaan di Lebanon.⁵¹ Sementara itu, *Hizbullah* merupakan representasi dari kelompok Syi'ah radikal yang secara politis didukung Suriah dan Iran. Meskipun Syi'ah, beberapa tahun terakhir *Hizbullah* ternyata telah membangun kerja sama dengan gerakan Islam lain, seperti *Hamas* di Palestina. Namun, kelompok ini juga membangun kerja sama dengan kelompok Syi'ah *Al-Houthi* dalam kemelut di Yaman. Mantan Perdana Menteri Najib Mikati dipandang sebagai tokoh utama terbentuknya poros "Suriah-*Hizbullah*-Iran" yang berdampak luas terhadap kebijakan politik Lebanon. Poros ini berusaha menjadikan Timur Tengah sebagai kawasan yang tak terpisahkan, baik secara geografis maupun ideologis. Namun, hubungan harmonis Suriah-*Hizbullah* sempat memudar akibat terjadinya *Cedar Revolution* yang ditandai dengan terbunuhnya Perdana Menteri Rafik Hariri pada Februari 2005.⁵²

Berlatar pada demokrasi konfesional, kelompok Druze memiliki *The Progressive Socialist Party*, kelompok Sunni membentuk *Future Movement*, kelompok Kristen membentuk partai Phalangis, *National Liberal Party*, dan *Free Patriotic Movement* yang akhirnya membentuk Aliansi 14 Maret. Kelompok ini menyerukan penarikan pasukan Suriah dari Lebanon. Sebagai respons lahirnya Aliansi 14 Maret, kelompok Syi'ah melalui *Hizbullah*, *Harakah al-Amal*, dan *Syirian Social Nationalist Party*, serta *Arab Socialist Ba'ath* membentuk Aliansi 8 Maret yang bertujuan membendung kekuatan AS

leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/17302/ISIM_3_Political_Islam_in_Sunni_Communities_of_Lebanon.pdf?sequence=1.

⁵¹ Moussalli, "Political Islam."

⁵² Riad al-Khoury, "The Future of Democracy in Lebanon," *UNISCI Discussion Papers* no. 12 (Oktober 2006).

dan Israel di Lebanon.⁵³ Munculnya sejumlah aliansi ini menandai dimulainya kembali “pertarungan politik” antara kelompok pro-Suriah yang anti-Israel dan kelompok oposisi yang didukung AS dan Israel.⁵⁴

Politik Islam di Lebanon terbelah antara Sunni dan Syiah, bahkan masing-masing masih terpilah lagi ke dalam beberapa kelompok berbeda. Namun, kekuatan ketiga terbesar di Lebanon lahir dari kelompok agama berbeda (baca: bukan muslim), yaitu kaum Druz dan Kristen Maronit. Dalam kasus Lebanon, keterbelahan yang terjadi bahkan menjadi lebih parah karena terkait langsung dengan kekuatan regional di sekitar Lebanon. Peristiwa pembunuhan Rafiq Hariri tahun 2005, misalnya, telah menandai perubahan konstelasi politik nasional Lebanon, bahkan juga regional. Di level nasional, politik sektarian Lebanon terbagi menjadi dua koalisi politik yang pro-Suriah (biasa disebut Aliansi 14 Maret) dan anti-Suriah (dikenal dengan sebutan Aliansi 8 Maret). Aliansi anti-Suriah muncul sebagai gerakan protes atas pembunuhan Hariri dan mencapai momentumnya pada 14 Maret 2005 ketika sekitar 1,5 juta rakyat Lebanon turun ke jalan melakukan demonstrasi menuntut mundurnya Suriah dari Lebanon. Peristiwa ini disebut *Cedar Revolution*. Mereka yang tergabung dalam aliansi ini antara lain Future Movement (*Mustaqbal*) atau kelompok Sunni pimpinan Saad Hariri, putra Rafiq Hariri, yang berperan menjadi motor koalisi. Kubu ini juga didukung *Jamaah Islamiyah*, *Haiah Ulama Muslim*, *Progressive Socialist Party* (PSP) (kelompok Druze pimpinan Walid Jumlat, putra Kamal Jumlat), *Free Patriotic Movement* (FPM) (kelompok Maronit pimpinan Jenderal Michel Aoun), *Lebanese Forces* (kelompok Maronit pimpinan Samir Geagea), dan *Kataeb Party* (*Lebanese Phalangist Party* pimpinan Amine Gemayel).⁵⁵

⁵³ al-Khoury, “The Future,” hlm. 74.

⁵⁴ Dr. Rached Fayad, Anggota Bidang Politik Future Movement, wawancara di Future Movement Building, Beirut, Lebanon, pada 9 Maret 2016.

⁵⁵ Michel de Chadarevian (Free Patriotic Movement/FPM), wawancara di Beirut, pada 9 Maret 2016.

Sementara itu, muncul Aliansi 8 Maret yang pro-Suriah. Mereka berdemonstrasi di Beirut untuk menyampaikan rasa terima kasih terhadap Suriah yang berperan menghentikan perang saudara di Lebanon. Aliansi tandingan ini terdiri atas *Hizbullah* (kelompok Syiah pimpinan Hasan Nasrallah) yang menjadi motor koalisi didukung oleh *Amal Movement* (kelompok Syiah pimpinan Nabih Berri), dan *Al Abbash* pimpinan Adnan Trabulsi. Pada perkembangan selanjutnya, ada unsur-unsur Aliansi 14 Maret yang akhirnya bergabung ke dalam Aliansi 8 Maret ini seperti dilakukan (pada 2006) dan PSP (pada 2011). Realitas keterbelahan ini pada akhirnya melebar pada pola dukungan mereka terhadap kemelut Suriah yang muncul belakangan.

Dalam entitas politik Lebanon kontemporer, eksistensi *Hizbullah* menjadi sedemikian penting untuk bisa diabaikan. Dalam retorika politik internasional, *Hizbullah* acap kali diwacanakan sebagai profil politik radikal yang anti-demokrasi akibat sikapnya yang senantiasa konfrontatif dengan Israel. Namun, dalam realitas politik internal Lebanon, *Hizbullah* mengikuti apa yang disebut sebagai alur demokrasi. Pada 3 Juli 1992, *Hizbullah* mengumumkan partisipasinya dalam pemilu parlemen serta menandai kebijakan *Infitah* (pembukaan diri) *Hizbullah* dalam sistem politik Lebanon.

Partisipasi dalam proses politik Lebanon dianggap memberikan beberapa keuntungan signifikan bagi *Hizbullah*. Pertama, menggunakan parlemen sebagai podium politik untuk menjaga kepentingan bersama. Kedua, menyusun legislasi untuk memberikan manfaat bagi kehidupan rakyat. Ketiga, memperoleh pengetahuan berkaitan legislasi, dan jika dibutuhkan, memberikan saran untuk mengamandemennya. Keempat, membangun jaringan hubungan politik dengan perwakilan berbagai pihak sehingga dapat menghilangkan mispersepsi. Kelima, *Hizbullah* mendapat pengakuan resmi dari parlemen Lebanon. Keenam, *Hizbullah* dapat mengajukan pandangan Islam mengenai beragam isu.⁵⁶

⁵⁶ al-Khouri, "The Future", hlm. 74–75

Politik *Infitah* (pembukaan diri) *Hizbullah* dapat berjalan karena restu dari Ayatollah Khamenei (imam di Iran). Selain itu, peran Ayatollah Muhammad Hussein Fadlallah (imam di Lebanon) juga signifikan dalam mendorong partai Islam untuk mengarahkan diri pada apa yang dia sebut “Lebanonisasi” gerakan Islam di Lebanon yang sinonim dengan *Infitah*. Hal ini telah dipelopori Sayyid Abbas al-Mussawi, Sekjen Partai pada Mei–Juli 1991, yang melakukan dialog dengan kelompok Kristen, termasuk kaum Maronit yang pernah memiliki hubungan dekat dengan Israel. Usaha ini dilanjutkan oleh Ayatollah Fadlallah yang menghapus rintangan ideologi dan politik antara Islam dan Kristen. Program politik *Hizbullah* dalam pemilu parlemen 1992 difokuskan pada dua tujuan, yaitu pembebasan Lebanon dari pendudukan Zionis dan penghapusan politik sektarianisme.⁵⁷

Program tersebut tidak mengkritik langsung rezim Maronit, tetapi menggunakan kalimat diplomatis yang menggambarkan bahwa politik sektarianisme merupakan kegagalan fundamental terbesar, dan pemerintah harus bertanggung jawab terhadap korupsi di Lebanon dan untuk seluruh tragedi dan kekacauan politik, budaya, sosial, keamanan yang terjadi di negara tersebut. Pemilu 1996 menegaskan kembali seruan penghapusan politik sektarianisme dan seruan agar UU pemilu bersifat adil dan seimbang, termasuk usulan perwakilan proporsional.⁵⁸ Dalam pemilu 2000, *Hizbullah* melunakkan seruan penghapusan politik sektarianisme dengan menekankan pembentukan Komite Nasional untuk Penghapusan Politik Sektarianisme. Hal ini diikuti dengan pernyataan Sekjen *Hizbullah*, Hassan Nasrallah, pada 2001, yang menyerukan penghapusan politik sektarianisme secara mental terlebih dahulu, sebelum dituangkan dalam UU. Pernyataan ini konsisten dengan posisi Maronit ketika isu penghapusan politik sektarianisme dimunculkan.⁵⁹

⁵⁷ Dr. Ali Fayyad, anggota parlemen Lebanon dari *Hizbullah*, wawancara di Gedung Parlemen, Beirut, pada 11 Maret 2016.

⁵⁸ al-Khoury, “The Future,” 75–76.

⁵⁹ al-Khoury, “The Future,” 77.

Dalam kelompok Sunni, Sekjen *Jamaah Islamiyah*, Fathi Yakan, merupakan tokoh penting dalam menentukan partisipasi dalam politik konfesional. Sebelum pemilu 1992, Jamaah Islamiyah melakukan studi hukum Islam (9 Agustus 1992) sebagai langkah memperoleh justifikasi. Hasil dari studi itu disusun dalam sebuah piagam Jamaah Islamiyah di Lebanon yang berisi antara lain: 1) kerja parlementer sebagai metode *Husbat* (akuntabilitas) dan sebagai langkah *Amar ma'ruf nahi munkar*; 2) berpartisipasi dalam parlemen bukan berarti menyetujui setiap posisi legislasi yang bertentangan dengan Islam. Wakil Jamaah Islamiyah dapat menyampaikan pandangan alternatif bahkan memboikot legislasi tersebut; 3) partisipasi di parlemen merupakan gerbang dakwah dalam Islam melalui dialog; 4) partisipasi di parlemen memberikan kesempatan untuk merealisasikan kepentingan rakyat dan mencegah perbuatan buruk.⁶⁰

Pada pemilu 1992, Jamaah Islamiyah menegaskan kewajiban untuk mengevaluasi seluruh hukum yang kontradiktif dengan Islam. Jamaah Islamiyah juga menyatakan dua pandangannya. Pertama, menyerukan pemisahan kekuasaan untuk mencegah intervensi di antara kabinet, presiden, dan parlemen. Kedua, menyerukan penghapusan rezim prerogatif konfesional yang didominasi Maronit dengan mendorong pengembangan formula koeksistensi antarsekte.⁶¹ Pada 2001, Jamaah Islamiyah tetap mengusulkan dibatalkannya politik sektarianisme, dan bahwa keadilan dalam UU pemilu harus didasarkan pada perwakilan proporsional. Pada 2003, Jamaah Islamiyah menjelaskan perubahan posisi dengan menegaskan bahwa koeksistensi dengan non-Muslim harus pula melibatkan isu implementasi hukum Islam. Menariknya, piagam tersebut untuk

⁶⁰ Syeikh Dr. Abd. Nasher Jabry, Dekan Kuliyah Dakwah Islamiyyah, anggota dan perintis organisasi 'Tajammu' Ulama al-Muslimin, wawancara di Kampus Kuliyah Dakwah, Beirut, Lebanon, pada 12 Maret 2016.

⁶¹ Prof. Dr. Hilal Khashan, profesor ilmu politik, wawancara di American University of Beirut (AUB), pada 10 Maret 2016. Juga Dr. Imad El Hout, anggota parlemen Lebanon dari Jama'ah Islamiyyah, wawancara di Muassasah Ad-Da'wah al-Islamiyyah, Beirut, pada 10 Maret 2016.

pertama kali mencantumkan ayat-ayat Alquran dalam setiap topik, sebagai justifikasi posisi Jamaah Islamiyah.⁶²

Dalam serangkaian pemilu tersebut, partai-partai politik Islam, seperti Jamaah Islamiyah dan *Hizbullah*, berpartisipasi dalam pemilu parlemen sejak 1992. Hal ini tampaknya lebih didasarkan pada pertimbangan praktis ketimbang ideologis. Kedua partai tersebut mendasarkan diri pada pengalaman sebagai pendiri dan dapat mengorganisasikan jaringan institusi sosial yang besar sehingga mampu melakukan kampanye efisien dan menjangkau banyak wilayah perkampungan.⁶³ Secara substantif, kubu Islam menginginkan agar politik didasarkan pada sektarianisme diakhiri. Namun, kubu Kristen masih enggan meninggalkan prinsip lama ini karena pertimbangan bahwa sistem sektarian dengan pembagian *fifty-fifty* untuk Islam dan Kristen cenderung menguntungkan pihak Kristen jika dikaitkan dengan pergeseran proporsionalitas jumlah umat.

Itulah pola persaingan antar-kekuatan politik di Lebanon yang dari dahulu dapat dikatakan tidak berubah, yakni berpijak pada semangat primordial. Mereka terpilah akibat persoalan sektarianisme, tetapi pada saat yang sama muncul pemilahan lain terkait dengan perbedaan sikap terhadap rezim Suriah. Sebelum terjebak dalam perang saudara, rezim ini memiliki pengaruh luar biasa dalam konstelasi politik Lebanon. Di permukaan, friksi ini sedemikian kental dalam hal penyikapannya yang berbeda terhadap eksistensi “asing” di Lebanon. Namun, masing-masing kelompok yang bersaing ternyata mau bertarung melalui konsep demokrasi, yakni bersaing dalam pemilihan (umum).

Pada Pemilu 2009, Aliansi 14 Maret yang didukung partai Islam Sunni dan partai Kristen memperoleh 71 kursi (55,5%), sementara Aliansi 8 Maret yang didukung partai-partai Syi’ah memperoleh 57

⁶² al-Khoury, “The Future,” 74.

⁶³ Tim peneliti berhasil mewawancarai anggota parlemen Lebanon dari Jama’ah Islamiyah, Dr. Imad El Hout, di Beirut, pada 10 Maret 2016; dan anggota Parlemen Lebanon dari *Hizbullah*, Dr. Ali Fayyad, di Beirut, pada 11 Maret 2016.

kursi (44,5% suara).⁶⁴ Kedua kubu bertarung lagi pada pemilu presiden 2014, setelah berakhirnya masa jabatan Michel Sleiman. Sesuai dengan *al-Mitsaq al-Wathani* Lebanon, presiden harus dipilih dari Kristen Maronit melalui pemungutan suara di parlemen. Meskipun demikian, pilpres menjadi pertarungan kekuatan politik antara yang mendukung melawan yang kontra “Suriah,” antara Aliansi 8 Maret pimpinan *Hizbullah* melawan Aliansi 14 Maret pimpinan Partai al-Mustaqbal.

C. PENUTUP

Perbedaan tantangan yang dihadapi generasi lampau politik Islam dibanding dengan generasi kontemporer sebenarnya hanya terletak pada konteks tempat dan waktu. Jika aktivitas generasi lampau fokusnya pada dominasi politik kolonial serta pengaruhnya bagi upaya pencarian identitas perjuangan Muslim dalam mencapai negara merdeka, aktivitas era kontemporer lebih tertuju pada realitas sistem internasional yang masih didominasi Barat terhadap dunia Muslim pascamerdeka. Pada konteks kontemporer, aspirasi demokrasi dalam realitas internal mencakup semua penyelesaian problem masyarakat muslim terkait dengan otoritarianisme rezim, kemiskinan dan keterbelakangan, realitas paham keagamaan, serta pengaruhnya dalam konstelasi kehidupan sosio-kultural. Hal ini dapat dipahami sebab politik Islam pada kenyataannya memang amat terkondisikan oleh sejarah, budaya politik, latar belakang ekonomi dan etnisitas, serta isu-isu lokalitas lainnya. Selain itu, realitas internasional juga ikut berpengaruh,⁶⁵ kendati masing-masing (politik Islam) mempunyai tujuan relatif sama menuju kejayaan Islam.

⁶⁴ “March 14 Bloc Wins Lebanon Election,” *Aljazeera*, 9 Juni 2009 diakses pada 3 April 2016 dari <http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2009/06/20096813424442589.html>. Lihat juga “Lebanon Elections 2009,” diakses pada 3 April 2016 dari <https://www.cfr.org/background/lebanon-parliamentary-elections-june-7-2009>

⁶⁵ Candra Muzaffar, “Islamic Resurgence, A Global View,” *Straits Times*, 14–18 Agustus 1984, Kuala Lumpur.

Politik Islam di Aljazair sampai kini dihadapkan pada problem politiko-islamofobia oleh militer Aljazair (yang didukung elemen-elemen politik sekuler). Menteri Dalam Negeri Aljazair menyatakan bahwa tidak ada tempat bagi partai Islam untuk eksis dalam politik negara itu. Pernyataan ini bahkan disampaikan ketika demokratisasi telah bergulir secara deras dalam konstelasi politik Timur Tengah. Dengan adanya pernyataan itu, tampaknya kekuatan politik Islam masih menghadapi problem serius untuk tampil dalam konstelasi politik Aljazair. Realitas politik Aljazair sejak 1980-an hingga berembusnya fenomena *Arab Spring* telah memperlihatkan betapa upaya menuju demokrasi senantiasa gagal. Salah satu sebabnya adalah masih kuatnya peran militer dalam politik. Tentara sebagai pemegang otoritas secara *de facto* ingin menghindari segala bentuk perubahan terhadap rezim berkuasa—apalagi dalam wujud politik demokrasi—karena akan berpengaruh terhadap kekuasaan militer. Keberhasilan kelompok politik Islam dinilai dapat mengancam keselamatan militer yang sudah terjebak dalam pusaran kasus, baik korupsi, penggelapan dana, dan pelanggaran HAM.⁶⁶ Selama militer masih mengendalikan partai berkuasa FLN dan pemerintah, politik Al-Jazair masih berada pada sistem politik otoritarianisme.

Jika kekuatan politik Islam di Aljazair dihadap kaum sekuler yang didukung militer, kekuatan politik Islam di Sudan-Maroko-Somalia—yang sama-sama termasuk dalam tiga negara termiskin di antara anggota liga Arab—⁶⁷tampaknya lebih dihadapkan pada realitas tradisi tarekat/sufisme masih sangat kental dan kurang memberi peluang terhadap masuknya pengaruh kaum Politik Islam. Di ketiga negara tersebut, terutama di Maroko yang menjadi mata air sufisme bagi kaum Muslim Sudan dan Somalia, eksistensi tarekat

⁶⁶ Lahouari Addi, "Political and Democracy: The Case of Algeria," dalam *Democracy's Victory and Crises*, ed., A. Hadenius (Cambridge University Press, 1997), hlm 105–122.

⁶⁷ Dr. Muinudillah yang belum lama berkunjung ke Sudan menggambarkan negara itu seperti Indonesia tahun 1960-an. Mata uang Sudan, real, sebetulnya lebih tinggi dibandingkan rupiah Indonesia. Namun, ketika dia pulang dan mampir di Dubai, mata uang Sudan ditolak, sementara mata uang Indonesia masih diterima.

mendapat perhatian serius dari raja dalam rangka “menjinakkan” kaum Islamis agar tidak menjadi gerakan sentrifugal terhadap kerajaan. Dengan merengkuh sufisme ini pula, rezim Maroko dapat relatif terbantu dalam menahan laju kaum politik Islam (IM maupun Salafi) yang potensial mengganggu stabilitas monarki, bahkan rezim pun terbantu dalam konteks *Arab Spring* di kawasan Timur Tengah.

Sementara itu, stabilitas politik Sudan senantiasa terganggu perang saudara dengan Sudan Selatan pasca-kemerdekaan dan disusul konflik sipil di wilayah Darfur.⁶⁸ Namun, tradisi intelektual (kampus) di Sudan lebih bagus dibandingkan Maroko, apalagi Somalia, meskipun negara ini sering terjadi kudeta militer. Hal inilah yang menyebabkan pengaruh politik Islam dapat merembes secara cepat dan lebih masif dibandingkan di Maroko dan Aljazair. Realitas ini tampaknya juga tidak terlepas dari fakta bahwa Sudan berbatasan langsung dengan Mesir sebagai basis IM (organisasi induk dari mayoritas gerakan politik Islam modern) sehingga memungkinkan kampus-kampus kedua negara bekerja sama membangun visi politik Islam mereka. Oleh karena itu, dapat dipahami jika setiap kali pemilu dilakukan, parlemen Sudan didominasi kekuatan politik Islam.

Politik Islam di Sudan masih dihadapkan pada beberapa tantangan besar. *Pertama*, elemen masyarakat umumnya menerima Islamisasi, tetapi proses menuju Islamisasi masih dihadapkan pada friksi substantif kaum Sufi yang dikonotasikan sebagai tradisional yang cenderung apolitis berhadapan dengan kaum Islamis pendidikan tinggi yang dikonotasikan modernis dan cenderung sangat politik. *Kedua*, internal kaum politik Islam sendiri memiliki perbedaan dalam strategi mewujudkan visi keislamannya, bahkan terpilah dalam beberapa kelompok atau bahkan partai politik. *Ketiga*, rezim penguasa Bashir juga menjadi problem tersendiri. Hal ini karena meskipun retorika dan kebijakan politik Bashir tak berbeda de-

⁶⁸ Lebih lanjut lihat Scopus S. Poggio, *The First Sudanese Civil War: Africans, Arabs, and Israelis in the Southern Sudan, 1955–1972* (New York: Palgrave Macmillan, 2009). Lihat juga Samuel Totten dan Eric Markusen, eds., *Genocide in Darfur: Investigating the Atrocities in the Sudan* (New York: Routledge, 2007).

ngan kaum politik Islam, dia menerapkan politik belah bambu atau “merangkul atau memusuhi” antareleman kekuatan politik sehingga memancing konflik antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus perseteruan dalam masyarakat sendiri.

Di luar tataran jabatan, politik Islam di Sudan tampaknya tak dimarginalisasi Bashir yang secara formal mengaku sebagai perwakilan resmi IM di Sudan. Rezim juga tak bereaksi negatif terhadap para cendekiawan sebab meskipun termasuk negara miskin, universitas di Sudan ternyata tetap menjadi kiblat dunia Islam, termasuk bagi Indonesia yang memiliki 1.500–2.000 mahasiswa di Sudan. Iklim intelektual sampai sejauh ini memang tetap sangat terbuka dan tidak ada penangkapan terhadap pemikir.⁶⁹ Berbagai realitas inilah yang menyebabkan *Arab Spring* tak membawa pengaruh terhadap stabilitas politik Sudan. Dinamika politik di Sudan tidak mengganggu Islam karena masalahnya bukan soal interpretasi agama, melainkan sekadar pada pola relasi kekuasaan. Konspirasi dalam konteks internal sangat mungkin terjadi, kecuali jika ada intervensi luar, seperti dalam konflik antara Sudan dan Sudan Selatan (Kristen).

Dalam kasus Somalia, kaum Islamis mendapat tantangan jauh lebih berat dalam membangun kultur politik Islam. Hal ini karena kultur tarekat masih sangat kuat, realitas konflik yang diwariskan rezim komunis, dan faktor klan yang sangat kental. Klan sangat dominan di Somalia dibandingkan dan *Harakah Islamiah*. Namun, pada tataran tertentu, eksistensi gerakan Islam, khususnya IM, masih dapat dideteksi. Di Somalia, ada satu gerakan dakwah yang murni dakwah dan tidak ada niat berpolitik karena merasa lelah dengan konflik politik, yakni Jamaah Al-Dakwah. Sebagian besar anggotanya adalah kader IM atau Al Azhar yang berusaha mewarnai Somalia yang terluka dan miskin. Berbeda dengan Maroko dan Sudan, di Somalia, gerakan IM memiliki tingkat kompleksitas permasalahan yang paling tinggi karena tumbuh di tengah kondisi negara yang san-

⁶⁹ Dr. Engkos Kosasih, FGD Tim Dunia Islam di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, pada 26 Mei 2015

gat kacau. Ketika *Arab Spring* menggejala di sejumlah negara Timur Tengah dan Afrika Utara dan negara-negara tersebut berusaha keluar dari krisis sosial-politik dan ekonomi, Somalia justru memasuki fase perang saudara. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Somalia dikategorikan sebagai negara gagal (*the failed state*).

Adapun Maroko, meskipun secara formal menganut sistem monarki, negara ini menerapkan sistem monarki konstitusional yang mengarah pada politik demokrasi. Akibat karakteristik politik itulah Maroko dapat dikatakan lebih sepi konflik dibandingkan negara-negara yang sudah dibahas. Jika di Somalia klanisme-kabilahisme sangat kuat, di Sudan hal tersebut bahkan telah meletupkan pemisahan diri wilayah Sudan selatan. Sementara itu, dalam kasus Maroko, faktor kesukuan ternyata kurang kuat karena faktor pemersatu dari monarki. Monarki juga berhasil mengukuhkan dukungan kaum sufisme sebagai kekuatan tradisional dalam konstelasi sosiokultural Maroko. Loyalitas kaum Sufi inilah yang menyebabkan monarki masih terus bertahan. Beberapa hal tersebut menyebabkan IM di Maroko terseok-seok membangun simbol-simbol politik Islam dalam masyarakat sampai sekarang. Oleh sebab itu, dapat dipahami jika *Arab Spring* yang sempat menggejala di kawasan Timur Tengah tak menjangkau monarki Maroko yang memang sudah cenderung demokratis.

Melihat realitas ini, kaum politik Islam memilih jalur kerja sama dan atau mendukung rezim dalam rangka membangun Islam di tanah Maroko. IM memang bersifat *mutaghoyyaroh* (fleksibilitas) sesuai cuaca. Artinya, mengetahui kapan harus tiarap, kapan operasi harus senyap, dan kapan harus muncul terang-terangan. Jika sebelum 1960-an IM belum bisa berkibar karena gerakan komunisme-sosialisme sedang berkoalisi dengan Monarki, pada 2013 IM menang mayoritas dalam pemilu—meskipun dalam pemerintahan tetap berkoalisi dengan partai sekuler, seperti *hizbul istiqlal*, dan partai sosialis. Realitas politik ini dimungkinkan karena yang dibangun IM atas kekuatan politik lain lebih pada level beda *fikrah*

(beda pemikiran) dan tak sampai pada *takfiri* (pengkafiran).⁷⁰ Di Maroko, elemen-elemen politik Islam anti-rezim memang ada, dan mereka tak bergerak dalam kerangka parlementariat, tetapi memilih membangun kesadaran sosial dan sesekali tampil sebagai kelompok penekan (*pressure group*). Melihat realitas ini, peran kekuatan politik Islam dalam kerangka membangun politik demokrasi, pelan tetapi pasti kian mapan tanpa harus mengalami tragedi, seperti Aljazair atau Mesir, saat partai Islam diberangus.

Sementara itu, Lebanon secara formal menganut sistem demokrasi, tetapi bersifat sangat khas sehingga disebut “demokrasi konfesional.” Realitas sosial semacam ini tentu memiliki pengaruh signifikan dalam politik kontemporer—yang terkait dengan eksistensi politik Islam yang menjadi tidak terlalu kental—sebab fokus problemnya terletak pada sisi sektarianisme. Problem ini bahkan menjadi lebih kompleks karena berpilin dengan problem regional mengingat eksistensi Lebanon lemah (*weak state*) ketika berhadapan dengan kelompok-kelompok masyarakat dengan segala afiliasi politiknya, baik internal maupun regional. Politik konfesional (sektarianisme) dari generasi ke generasi telah menyobek keutuhan Lebanon, dan hal itu masih terefleksi pada *Thaif Accord*.⁷¹ Partai Islam semula menolak *Thaif Accord* karena tetap memberikan posisi penting bagi kaum Maronit, misalnya kursi presiden dan komandan militer. Selain itu, mereka juga meyakini bahwa perjanjian tersebut tidak mengatur secara jelas opsi mengenai pendudukan Israel di selatan Lebanon. Politik Islam baik ala IM maupun *Arab Spring* tidak

⁷⁰ Dr. Engkos Kosasih, FGD Tim Dunia Islam di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, pada 26 Mei 2015.

⁷¹ *Thaif Accord* merupakan kesepakatan yang digunakan untuk mengganti Pakta Nasional yang selama ini menjadi dasar demokrasi confessional di Lebanon dalam membagi kepemimpinan kekuasaan atas dasar kelompok Sunni, Syiah, dan Kristen Maronit. Namun, komposisi jumlah masyarakat pasca-perang sipil yang berubah, *Thaif Accord* dijadikan dasar *power sharing* agar stabilitas nasional tetap terjaga di Lebanon.

mendapat perhatian masyarakat Lebanon sebab perhatian masyarakat telah tereksploitasi habis oleh politik konfesionalisme tadi.⁷²

Dalam menyikapi Thaif Accord, *Hizbullah* mendasarkan proses pengambilan keputusannya pada *al-Thawabit* (prinsip-prinsip yang kekal) dan *Maslaha* (kepentingan). *Thawabit* diaplikasikan melalui sikap permusuhan terhadap Israel, sementara *Maslaha* merupakan ekspresi kesamaan prinsip dan nilai (*common denominator*) dengan partai-partai lainnya di bawah naungan *Thawabit*. Para pemimpin partai melihat bahwa Damaskus merupakan satu-satunya negara Arab yang berkonfrontasi dengan Israel, meskipun Suriah telah bergabung dengan Konferensi Perdamaian Madrid. Keputusan terpenting lainnya adalah *Hizbullah* tidak berkonfrontasi dengan pemerintah dan memiliki kesepakatan dengan rezim Suriah (era Presiden Hafez Assad) agar kebebasan bertindak *Hizbullah* tidak dibatasi dan sikap resistansinya terhadap Israel tidak dihalangi.⁷³ Pola persaingan antar-kekuatan politik di Lebanon dari dahulu dapat dikatakan tak berubah dari problem sektarianisme, dan pada saat yang sama, berpilin dengan perbedaan sikap terhadap rezim Suriah—yang sebelum terjebak dalam perang saudara memiliki peran sangat besar dalam konstelasi politik Lebanon.⁷⁴ Setelah terjebak dalam perang saudara selama belasan tahun, masing-masing kelompok akhirnya mau bertarung melalui konsep demokrasi agar terhindar dari peperangan tak berkesudahan.

⁷² Prof. Dr. Raafat Miqaati, *Vice President* of Tripoli University, dan Prof. Dr. Ali Beqai, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Tripoli, wawancara di Kampus Universitas Tripoli, Lebanon, pada 13 Maret 2016.

⁷³ Robert G. Rabil, *Religion, National Identity, and Confessional Politics in Lebanon: The Challenge of Islamism* (New York: Palgrave Macmillan, 2011), 63.

⁷⁴ Rami al Rayess, *Senior Media Officer* Progressive Socialist Party (PSP)/Druze Party, wawancara di Kantor Media Online Al Anba, Beirut, pada 14 Maret 2016.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Abdullahi, Abdurrahman M. "Islamism and Politics in Somalia." *Chatham House*, 12 Juni 2012.
- Addi, Lahouari. "Political and Democracy: The Case of Algeria". Dalam *Democracy's Victory and Crises*, diedit oleh A. Hadenius. Cambridge University Press, 1997: 105–122.
- Ahmed, Abdel Ghaffar M. *One Against All: The National Islamic Front (NIF) and Sudanese Sectarian and Secular Parties*. Bergen: CMI, 2008.
- Al-Khouri, Riad. "The Future of Democracy in Lebanon." *UNISCI Discussion Papers* 12 (Oktober 2006).
- Amghar, Samir. "Political Islam in Morocco." *CEFS Working Document* 269 (Juni 2007).
- Tambukara, Apriadi. *Revolusi Timur Tengah*. Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2011.
- Belluci, Stefano. "Islam and Democracy: The 1999 Palace Coup in Sudan." *Middle East Policy* 7, no. 3 (Juni 2000): 168–175.
- Dekmejian, R. Hrair. *Islam in Revolution: Fundamentalism in the Arab World*. 2nd ed. New York: Syracuse University Press, 1995.
- Esposito, John L. *The Islamic Threat: Myth or Reality?* 3rd ed. New York dan Oxford: Oxford University Press, 1999.
- Fuller, Graham E. *The Future of Political Islam*. New York: Palgrave Macmillan, 2004.
- García-Rivero, Carlos, dan Hennie Kotzé. "Electoral Support for Islamic Parties in the Middle East and North Africa." *Party Politics* 13, no. 5 (September 2007): 611–36. doi:10.1177/1354068807080088.
- Huntington, Samuel P. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995.
- Kepel, Gilles. *Jihad: The Trial of Political Islam*. Massachuset: Harvard University Press, 2006.
- Khatib, Lina. "Political Participation and Democratic Transition in the Arab World." *Journal of International Law* 34, no. 2 (April 2013): 315–340.

- Laskier, Michael M. "A Difficult Inheritance: Moroccan Society under King Mohammed VI." *Middle East Review of International Affairs* 7, no.3 (2003).
- Layachi, Azzedine. "Political Liberation and the Islamist Movement in Algeria." *The Journal of North African Studies* 9, no. 2 (2004): 46–67.
- Lobban, Carolyn Fluehr. *Islamic Law and Society in the Sudan*. New York: Routledge, 1987.
- Mashad, Dhurorudin. "Menelaah Demokrasi dan Politik Islam di Yaman, Suriah, dan Aljazair." Dalam *Problematika Kekuatan Politik Islam di Yaman, Suriah, dan Aljazair*, diedit oleh M. Fakhry Ghafur. Bandung: Pustaka Jaya, 2016.
- Poggo, Scopas S. *The First Sudanese Civil War: Africans, Arabs, and Israelis in the Southern Sudan, 1955–1972*. New York: Palgrave Macmillan, 2009.
- Rabil, Robert G. *Religion, National Identity, and Confessional Politics in Lebanon: The Challenge of Islamism*. New York: Palgrave Macmillan, 2011.
- Sihbudi, Riza. *Menyandera Timur Tengah*. Bandung: Mizan, 2007.
- Sikainga, A.A. "Northern Sudanese Political Parties." Dalam *Civil War in the Sudan*, diedit oleh M.W. Daly dan A.A. Sikainga. London dan New York: British Academic Press, 1993.
- Tambukara, Apriadi. *REvolusi Timur Tengah*. Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2011.
- Totten, Samuel, dan Eric Markusen, eds. *Genocide in Darfur: Investigating the Atrocities in the Sudan*. New York: Routledge, 2007.
- Tibi, Bassam. *The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and the World Disorder*. London: University of California Press, 1998.
- Vatin, Jean Claude. "Religious Resistance and State Power in Algeria." Dalam *Islam and Power*, diedit oleh Ali H. Dessauki dan Alexander Cudsi. London: Croom Helm, 1981.
- Voll, John O. "The Evolution of Islamic Fundamentalism in Twentieth-Century Sudan." Dalam *Islam, Nationalism, and Radicalism in Egypt and Sudan*, diedit oleh Warburg, Gabriel R. dan Uri M. Kupferschmidt. New York: Praeger, 1983.

Internet

- Abdullahi, Abdurrahman M. "The Islah Movement: Islamic Moderation in War-torn Somalia." Diakses pada 17 Februari 2018 dari <http://www.hiiraan.com/oct2008/ISLAH.pdf>.
- al-Makki Ahmed, Mohamed. "Sudanese Opposition Leader: Bashir Does Not Represent Islam." *Al-Monitor*, 12 Juni 2013. Diakses pada 15 Oktober 2015 dari <http://www.al-monitor.com/pulse/politics/2013/06/sudan-opposition-turabi-interview-bashir.html#>.
- Diriye, Mahad Omar. "Which are Somalia's Political Parties." *Somalia Report*, 7 September 2012. Diakses pada 15 September 2015 dari http://www.somaliareport.com/index.php/post/3478/Which_are_Somalias_Political_Parties.
- "Elections in Sudan." Diakses pada 18 Oktober 2015 dari <http://africanelections.tripod.com/sd.html>
- Hashas, Mohammed. "Fragility of the Party System in Morocco and the Way Ahead Post-2011 New Constitution and Elections." *Reset Doc*, 18 April 2012. Diakses pada 15 Agustus 2015 dari <http://www.resetdoc.org/story/00000021937>.
- Hashas, Mohammed. "Is Moroccan Exceptionalism Falling Apart?" *Reset Doc*, 31 Mei 2013. Diakses pada 14 Agustus 2015 dari <http://www.resetdoc.org/story/00000022251>.
- Hoehne, Markus Virgil. *Counter-Terrorism in Somalia: How External Interference Helped to Produce Militant Islamism*, 2007. Diakses pada 17 Oktober 2018 dari http://webarchive.ssrc.org/Somalia_Hoehne_v10.pdf.
- Holzer, George Sebastian. "Political Islam in Somalia." Diakses pada 2 Maret 2018 dari http://www.operationspaix.net/DATA/DOCUMENT/5337-v-Political_Islam_in_Somalia__A_Fertile_Ground_for_Radical_Islamic_Groups_.pdf.
- "Lebanon Elections 2009." Diakses pada 3 April 2016 dari <http://www.elections.gov.lb/Parliamentary/>.
- Malik, Nesrine. "Sudan is Finally Building Up to Its Own Arab Spring." *The Guardian*, 1 Oktober 2013. Diakses pada 7 Februari 2015 dari <http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/oct/01/sudan-arab-spring-khartoum-omar-al-bashir>.

- “March 14 Bloc Wins Lebanon Election.” *Aljazeera*, 8 Juni 2009. Diakses pada 3 April 2016 dari <http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2009/06/20096813424442589.html>.
- Moussalli, Ahmad S. “Political Islam in Sunni Communities of Lebanon.” *ISIM News Letter*, 3/99. Diakses pada 10 Maret 2018 dari https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/17302/ISIM_3_Political_Islam_in_Sunni_Communities_of_Lebanon.pdf?sequence=1.
- Muzaffar, Candra. “Islamic Resurgence, A Global View.” *Straits Times*, 14 Agustus 1984. Kuala Lumpur.
- Mustaq, Najum. “Federalism Amid Political Military Chaos.” Diakses pada 3 Maret 2018 dari life-peace.org/hab/federalism-amidpolitical-military-chaos/.
- Rice, Xan. “Profile: Omar al-Bashir.” *The Guardian*, 4 Maret 2009. Diakses pada 15 Oktober 2015 dari <http://www.theguardian.com/world/2008/jul/14/sudan.warcrimes3>.
- “The Failed State Index 2011.” The Fund for Peace. Diakses pada 4 September 2015 dari https://www.pucsp.br/ecopolitica/downloads/failed_states_index_2011.pdf.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



BAB 3

POLITIK ISLAM DI NEGARA YANG SEDIKIT TERDAMPAK *ARAB SPRING*: ARAB SAUDI, BAHRAIN, QATAR, UNI EMIRAT ARAB DAN KUWAIT

Nostalgiaawan Wahyudhi

Perubahan konstelasi politik di Timur Tengah sangat menarik untuk dikaji, terutama pasca-*Arab Spring*. Gelombang politik *Arab Spring* merupakan gerakan demokratisasi yang memberi ruang pada gerakan politik Islam untuk mengambil momentum berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam berbagai kasus di negara-negara Timur Tengah, *Arab Spring* membawa dampak dan respons berbeda-beda.

Dalam penelitian tahun 2014–2017, kami melihat ada beberapa negara yang cukup tangguh dan hampir tidak terkena dampak gelombang *Arab Spring*, misalnya Aljazair, Maroko, dan Lebanon. Namun, dalam skala yang lebih ekstrem, gelombang *Arab Spring* masih menyisakan perang dan konflik yang belum usai, seperti yang terjadi di Suriah, Yaman, dan Libya. Posisi yang cukup unik sebenarnya ada pada negara-negara Teluk yang cukup kaya dan mengedepankan stabilitas selama ini. Bab ini ingin mengupas bagaimana negara-negara petrodolar, seperti Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab (UEA) dan Kuwait, memberikan respons berbeda-beda dan terkadang kontraproduktif satu sama lain. Respons yang saling bertolak belakang terhadap *Arab Spring* membuat ketegangan baru

Buku ini tidak diperjualbelikan.

di kawasan ini, kemudian berujung pada blokade diplomatik, dan polarisasi baru yang menggeser bandul keseimbangan kekuatan di kawasan ini.

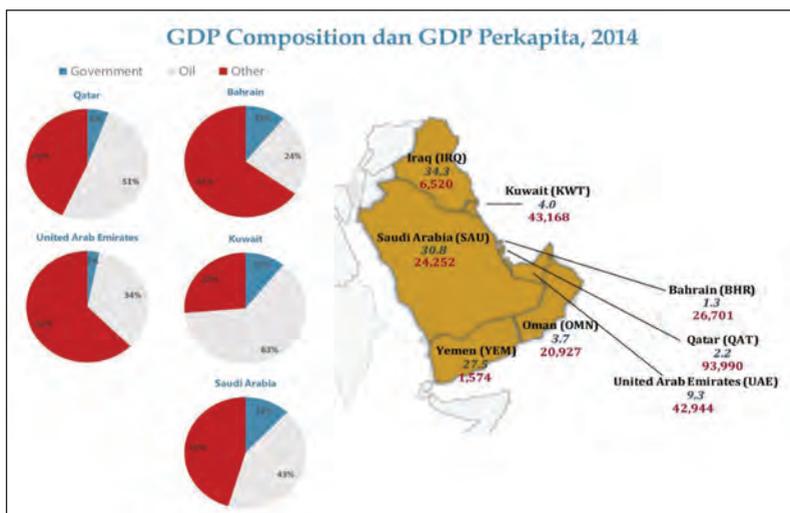
A. KONDISI EKONOMI, SOSIAL, DAN POLITIK

Secara umum, Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, UEA dan Kuwait merupakan negara-negara papan atas di kawasan Timur Tengah. Hal ini tentu saja memberikan konsekuensi politik dan ekonomi di kawasan tersebut. Perubahan politik yang terjadi antarnegara ini dan fluktuasi ketegangan dalam relasi politiknya memberikan dampak yang besar bagi kawasan Timur Tengah. Selain dampak politik yang besar, negara-negara ini memiliki kekayaan ekonomi di atas negara-negara lain. Sumber daya fosil yang terkandung di negara-negara ini bukan saja krusial bagi kawasan Timur Tengah, melainkan juga menjadi daya tarik politik yang besar bagi negara-negara *super power*. Hal ini pada akhirnya membuat sebagian besar dari kelima negara ini terjebak dalam *rentier state* (GDP negara bergantung pada pemasukan non-produktif dari sumber daya minyak).

Di antara kelima negara tersebut, Qatar merupakan negara yang memiliki tingkat kekayaan dan kemakmuran yang paling tinggi. Negara kecil ini memiliki GDP per kapita yang paling tinggi di dunia mencapai 93.990 US\$ pada 2014. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Qatar paling cepat di kawasan Timur Tengah setelah ladang gas dan teknologi LNG yang mengubah gas dalam likuid ditemukan. Pertumbuhan ekonomi yang pesat ini diiringi oleh politik luar negeri yang agresif dan royal. Dalam beberapa peristiwa, Qatar mengambil posisi yang strategis dan krusial, dan dalam titik tertentu, mengambil peran Arab Saudi yang selama ini menjadi polisi kawasan. Qatar bahkan tidak segan mengambil sikap politik yang bertentangan dengan negara tetangganya itu.

Arab Saudi yang selama ini terkenal sebagai negara petrodolar pun sedikit mengalami koreksi ekonomi. GDP per kapita negara ini justru paling kecil dari empat negara lainnya dan hanya mencapai 20.029 US\$ pada 2016 atau turun dari 24.252 US\$ pada 2014.

Harga minyak yang fluktuatif membuat negara yang GDP-nya sangat tergantung pada eksplorasi minyak ini mempertimbangkan kembali untuk mencari potensi ekonomi alternatif seperti yang sudah lebih dulu dilakukan Bahrain, UEA, dan Qatar. Penurunan ekonomi ini sangat berpengaruh terhadap politik Saudi di kawasan Timur Tengah. Politik luar negeri Saudi yang selama ini royal dan sering menggunakan pengaruh ekonominya untuk mendikte negara lain harus berhadapan dengan Qatar yang mengambil pola pendekatan politik luar negeri yang sama.



Gambar 3.1 Diagram Komposisi GDP Per Kapita 2014¹

Ketergantungan tertinggi pada sektor minyak sebenarnya ada pada GDP negara Kuwait hingga mencapai 63%. Dibandingkan keempat negara lainnya, Kuwait memiliki persentase ekspor minyak tertinggi dari total persentase neraca perdagangannya. Ketergantungan ini tidaklah mengherankan mengingat negara kecil ini belum mengembangkan sektor-sektor kreatif seperti negara-ne-

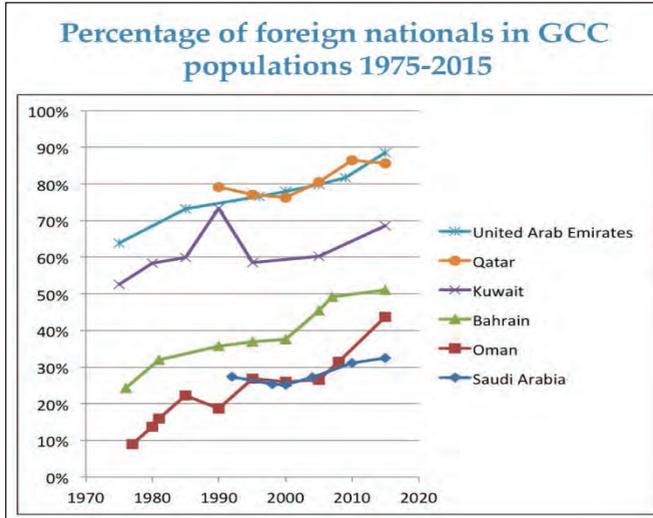
¹ IMF, "Annual Meeting of Arab Ministers of Finance: Economic Diversification in Oil-Exporting Arab Countries," April 2016, 6 dan 8, Manama, Bahrain,

gara tetangganya. Namun, GDP per kapita negara ini cukup tinggi, yakni mencapai 43.168 US\$ pada 2014 atau sedikit lebih tinggi dari UEA yang mencapai 42.994 US\$ pada 2014. Jadi, kerentanan ekonomi negara diakibatkan fluktuasi harga minyak lebih berisiko di negara Kuwait.

UEA merupakan negara yang paling maju dalam mengembangkan sektor jasa untuk mengurangi ketergantungannya terhadap sektor minyak. Negara ini sukses menjadi hub yang menghubungkan Timur Tengah dengan berbagai benua lainnya lewat maskapai Emirates dan Etihad. Selain itu, negara ini mengembangkan sektor pariwisata, terutama produk-produk pasar bebas yang bebas pajak. Negara ini juga mengembangkan proyek mercusuar, seperti Buruj al-Khalifa gedung tertinggi di dunia dan hotel ikonik Buruj al-Arab.

Bahrain merupakan negara yang memiliki ketergantungan yang paling rendah terhadap minyak dalam GDP-nya. Sektor minyak hanya menyumbang 24% dalam GDP. Bahrain sangat mengedepankan sektor pariwisata untuk menyumbang GDP-nya. Pada setiap akhir pekan, Bahrain dipadati oleh wisatawan dari Arab Saudi karena negara ini mampu menyediakan lingkungan yang lebih bebas dan sektor jasa yang lebih baik daripada Saudi.²

² Ahmad Ma'rufi dan Wisnu Suryo Hutomo, Staf Kedutaan Indonesia di Bahrain dan UEA, FGD di Jakarta, pada 20 Juli 2017.



Gambar 3.2 Grafik Warga Negara Asing di Populasi GCC 1974–2015³

Populasi masyarakat menjadi hal yang unik dari negara-negara ini. Warga negara asli menjadi penduduk minoritas di negara sendiri, kecuali Arab Saudi. Kekayaan ekonomi membuat negara ini menjadi daya tarik bagi kalangan pekerja imigran. Persentase jumlah imigran mencapai 90% dari total populasi, seperti yang terjadi di UEA. Jumlah ini terpaut sedikit dari Qatar yang hampir mencapai 88%, Kuwait 70%, dan Bahrain 50%; yang terendah justru Arab Saudi yang jumlahnya lebih dari 30%. Berdasarkan data European University Institute, jumlah pekerja imigran yang datang ke negara-negara tersebut mengalami peningkatan yang cukup stabil antara tahun 1975–2015. Sebagian besar imigran berasal dari Asia Selatan, terutama dari India, Pakistan, dan Bangladesh.⁴ Oleh karena itu,

³ Philippe Fargues, “Immigration vs. Population in the Gulf,” dalam *The Gulf Monarchies Beyond the Arab Spring. Changes and Challenges* (European University Institute, 2015), 14.

⁴ Fargues, “Immigration vs. Population,” 13.

tidak mengherankan jika negara-negara tersebut menerapkan undang-undang kependudukan yang ketat dan tidak memberikan ruang bagi pekerja imigran menjadi warga negara.

Banyaknya serapan tenaga kerja asing di negara-negara teluk harusnya sejalan dengan rendahnya angka pengangguran. Namun, angka pengangguran di kalangan warga negara di kelima negara terdapat perbedaan mencolok. Qatar yang memiliki performa ekonomi yang baik, angka penganggurannya berada pada level di bawah 1%, angka pengangguran yang cukup tinggi justru ada di negara Arab Saudi yang mencapai angka 12% (2016). Sementara itu, di negara Kuwait dan Bahrain jumlah pengangguran ada di bawah angka 4%.⁵ Hal ini tidak mengindikasikan ada kelangkaan lapangan kerja, baik di sektor publik maupun swasta. Namun, hal itu mengindikasikan adanya permasalahan di negara-negara tersebut. Banyaknya tenaga kerja asing yang datang dan menjadi mayoritas di negara-negara tersebut menyebabkan banyak lapangan kerja yang tersedia, terutama di sektor swasta, justru diisi pekerja asing.⁶

Populasi imigran di Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab (UEA), dan Kuwait memiliki kecenderungan meningkat di masa depan. Kita melihat bahwa pembangunan nasional negara-negara ini sangat bergantung pada imigran. Kondisi paradoks terjadi ketika negara-negara tersebut mengalami surplus secara ekonomi, tetapi memiliki *deficit of human capital* yang sangat akut. Mendatangkan tenaga kerja imigran masih menjadi sesuatu yang perlu untuk menjaga keberlangsungan pembangunan negara.⁷

⁵ Tidak ada data yang tersedia tentang pengangguran di UEA, lihat IMF, "Gulf Cooperation Council: The Economic Outlook and Policy Challenges in the GCC Countries," *IMF Policy Paper*, December 2017.

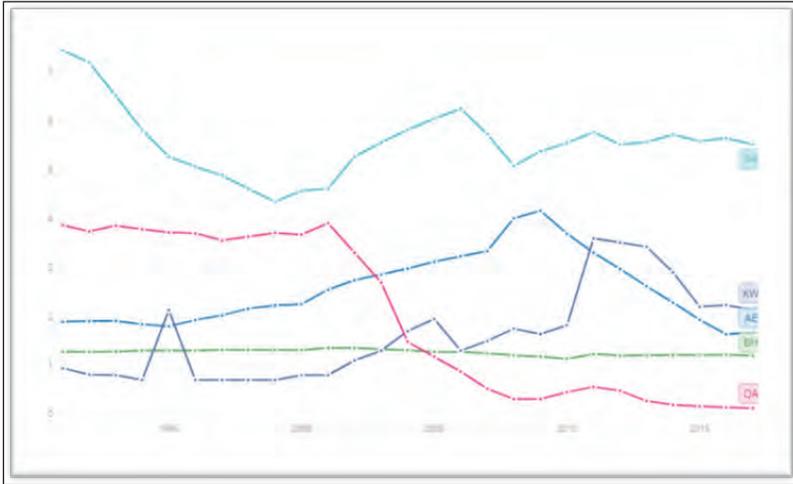
⁶ World Economic Forum, "Part II-The Employment System in GCC Countries 2018," diakses pada 31 Juli 2019 dari http://reports.weforum.org/rethinking-arab-employment/part-ii-the-employment-system-in-gcc-countries/?doing_wp_cron=1536313161.7802679538726806640625.

⁷ Fargues, "Immigration vs. Population," hlm 11–13.

Angka pengangguran di kelima negara Teluk ini sebenarnya lebih baik dibandingkan negara-negara lain di Timur Tengah. Di antara kelima negara tersebut, Qatar memiliki tingkat pengangguran yang paling rendah, yakni 0,12%. Jumlah pengangguran di Qatar tidak meningkat meskipun Arab Saudi, Bahrain, dan UEA melakukan blokade diplomatik terhadapnya. Bahrain dan UEA cukup baik menangani angka pengangguran. Kedua negara ini berhasil menekan angka pengangguran hingga 1,2% dan 1,67%. Negara Kuwait memiliki angka di atas Bahrain dan UAE, tetapi grafik angka pengangguran di negara ini justru menurun sejak terjadinya *Arab Spring*. Sementara itu, Arab Saudi justru memiliki angka pengangguran yang cukup tinggi, yakni 5,52%.⁸ Data statistik perekonomian Arab Saudi tidak terbuka sehingga memicu dugaan adanya data yang berbeda. Menurut Forbes, pengangguran di Saudi mencapai 12,7%. Angka ini dipicu oleh kebijakan Saudi yang ketat dalam melarang perempuan untuk bekerja. Lesunya perekonomian Arab Saudi belakangan ini berdampak juga pada pembelanjaan pemerintah yang menurun dan tekanan terhadap pekerja imigran dan ekspatriat yang semakin ketat. Namun, peningkatan jumlah pekerja berkebangsaan Saudi juga tidak tampak.⁹

⁸ Data World Bank berdasarkan estimasi dari ILO. Lihat World Bank, "Unemployment, Total (% of Total Labor Force) (Modeled ILO Estimate)-United Arab Emirates, Bahrain, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia" diakses pada 31 Juli 2019 dari <https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?end=2017&locations=AE-BH-KW-QA-SA&start=1991&type=shaded&view=chart>.

⁹ Dominic Dudley, "Is Saudi Arabia Heading for a Recession?" *Forbes*, 12 Juli 2016, diakses pada 31 Juli 2019 dari <https://www.forbes.com/sites/dominicdudley/2016/07/12/saudi-recession/2/#6834a0d26330>.



Keterangan: Saudi Arabia (SA), Kuwait (KW), UAE (AE), Bahrain (BH), dan Qatar (QA)

Gambar 3.3 Grafik Angka Pengangguran di Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Kuwait¹⁰

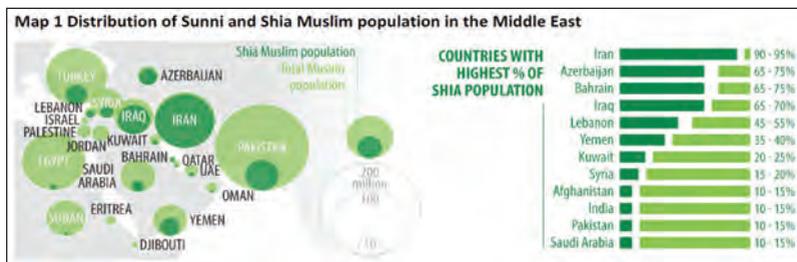
Di kawasan Teluk, Syiah menjadi isu yang selalu hangat. Dibandingkan negara-negara Arab lainnya, daerah teluk memang berseberangan dengan jantung Syiah di Iran. Sebaran pengikut Syiah di wilayah ini cukup merata, tetapi memiliki persentase yang berbeda-beda. Negara sekutu dekat dan setia Arab Saudi, Bahrain, merupakan negara yang mayoritas penduduknya menganut Syiah. Dalam data survei PEW, penganut Syiah di Bahrain diperkirakan jumlahnya 65–75% dari jumlah total warga negara. Sementara itu, di Qatar, UEA, dan Arab Saudi, penganut Syiah jumlahnya 10–15% dari total jumlah penduduk. Angka penganut Syiah yang lebih tinggi ada di Kuwait, yakni 20–25%.¹¹ Angka ini rasional karena Kuwait

¹⁰ World Bank, “Unemployment, Total.”

¹¹ Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life, *Mapping the Global Muslim Population*, Oktober 2009, diakses pada 31 Juli 2019 dari <http://www.pewforum.org/files/2009/10/Shiarange.pdf>.

berbatasan langsung dengan dua negara mayoritas Syiah (Iran dan Irak) dan berada di seberang Bahrain yang juga mayoritas Syiah.

Di Arab Saudi, mayoritas penganut Syiah menetap di Provinsi Syaqqiyah (Timur) di tepi Teluk Persia yang dekat dengan Iran. Mereka terkonsentrasi di dua kota yang berdekatan, yaitu Qatif (sah satu kegubernuran di Syarqqiyah) dan Dammam. Kedua kota ini berdekatan dengan Kota Dahran yang memiliki jalur transportasi untuk menyeberang ke Bahrain, negara yang mayoritas penduduknya juga Syiah. Penganut Syiah di Saudi berasal kelompok dari al-Baharna, Nakhawila, Bani Husaini, Bani Ali (Harb), dan Bani Juhaynah.



Gambar 3.4 Diagram Distribusi Populasi Syiah di Timur Tengah^{12, 13}

Relasi Syiah dengan negara-negara ini menunjukkan pola yang berbeda-beda. Dua negara yang bersahabat sangat dekat, Arab Saudi dan Bahrain, pun menunjukkan perbedaan pola relasi yang mencolok. Saudi menerapkan pembatasan ketat bagi pengikut Syiah, terutama dalam hal kebebasan politik dan beragama. Sebaliknya, Bahrain memiliki pendekatan yang lebih lunak dalam hal beragama.

¹² European Parliamentary Research, “Distribution of Sunni and Shia Muslim Population in the Middle East 2016, diakses pada 4 Agustus 2019 dari https://eiphinktank.eu/2016/01/12/the-wider-middle-east-between-iran-and-saudi-arabia/sunni_and_shia/.

¹³ Lebih lanjut lihat Sebastian Kusserow dan Patryk Pawlak, “Understanding the Branches of Islam: Shia Islam,” *Briefing European Parliamentary Research Service*, Januari 2016.

Syiah di negara ini memiliki kebebasan yang lebih, bahkan hari-hari suci Syiah, termasuk Assyura (peringatan hari kematian Hussain), dijadikan hari libur nasional. Penduduk Syiah yang telah lama menetap di sana sudah merasa sebagai penduduk asli di tengah kekuasaan Al-Saud dan Al-Khalifa. Di satu sisi, sekuritisasi kebijakan dalam menangani Syiah di Saudi dan Bahrain pasca-*Arab Spring* membuat fragmentasi dalam kepemimpinan Syiah. Di sisi, lain pengerasan ideologi juga terjadi di antara pengikutnya dan diperkirakan relasi Syiah dan penguasa akan berlangsung dinamis di Saudi dan Bahrain.¹⁴

Kuwait sering kali dianggap sebagai tempat singgah dan ber-*lindung* bagi pengikut Syiah yang mengalami tekanan berat secara ekonomi dan politik, baik dari Saudi, Bahrain, maupun Iran. Dalam sejarah berdirinya, Syiah berkontribusi dalam membangun kerajaan yang dipimpin oleh keluarga As Sabah ini. Selain itu, secara politis, penguasa Kuwait cenderung memihak pengikut Syiah jika terjadi gesekan dengan suku-suku Sunni di sana. Oleh karena itu, keluarga Sabah yang berkuasa di Kuwait mendapatkan dukungan pengikut Syiah, baik di tengah masyarakat maupun di parlemen.¹⁵

B. POLITIK ISLAM DAN RESPONSNYA TERHADAP DEMOKRASI

Meskipun banyak negara pada masa pasca-kolonialisme berbondong-bondong mengadopsi sistem pemerintahan modern, negara-negara Teluk tetap jalan di tempat. Negara-negara ini tidak pernah secara sungguh-sungguh mengadopsi sistem pemerintahan yang demokratis. Negara-negara Teluk merasa lebih cocok dengan romantisme gaya pemerintahan monarki-kesultanan (*sultanic style of monarchy*) yang dianggap sebagai bagian dari tradisi politik.¹⁶ Gaya

¹⁴ Laurence Louër, "The Transformation of Shia Politics in the Gulf Monarchies," *Islam in a Changing Middle East: New Analysis of Shia Politics, POMEPS Studies*, no. 28 (Desember 2017): 39–42.

¹⁵ Laurence Louër, "The Transformation," hlm. 39–42.

¹⁶ Charlotte M. Levins, "The Rentier State and the Survival of Arab Absolute Monarchies," *Rutgers Journal of Law & Religion*, 14 (Spring 2013): 388–423.

pemerintahan seperti ini dipelihara secara komunal dalam organisasi teluk *Gulf Cooperation Council* (GCC) sebagai upaya untuk saling melanggengkan kekuatan secara regional dalam lingkup politik dan ekonomi.¹⁷ Kemakmuran membuat pemerintah mampu mengge-lontorkan kompensasi ekonomi untuk menyandera loyalitas rakyat kepada keluarga kerajaan. Gaya pemerintahan seperti ini, oleh Larbi Sadiki disebut *dimuqratiyyat al-khubz* (demokrasi roti)¹⁸—membuat *democracy deficite* terjadi karena demokrasi yang partisipatif sulit berkembang.¹⁹

Arab Spring tidak memberi perubahan politik pada Arab Saudi. Negara ini tetap menganut sistem monarki absolut dengan sentralitas kekuasaan di tangan raja. Raja dan putra mahkota diangkat oleh forum bai'at keluarga kerajaan (*Hay'at al-Bay'ah*) sebagai simbol pengakuan dan ketundukan anggota keluarga kerajaan terhadap raja dan putra mahkota yang dipilih.²⁰ Keputusan politik merupakan hak prerogatif raja yang dilakukan setelah berkonsultasi dengan keluarga penting kerajaan dan ulama Wahhabi. Kekuasaan raja yang sangat penuh membuat faksionalisasi di keluarga tidak terhindarkan. Faksi terkuat datang dari keluarga Sudairi, anak keturunan dari istri raja Abdulaziz, ratu Husna Sudairi, putri dari klan yang paling kuat di Najd.²¹

¹⁷ Andrew Rathmell dan Kirsten Schulze, "Political Reform in the Gulf: The Case of Qatar," *Middle Eastern Studies* 36, no. 4 (Oktober 2000): 47–62.

¹⁸ Larbi Sadiki, "Towards Arab Liberal Governance-From the Democracy of Bread to the Democracy of the Vote," *Third World Quarterly* 18, no. 1 (1997): 127–148.

¹⁹ Rathmell dan Schulze, "Political Reform," 47–62.

²⁰ Patrick Martin, "Why Saudi King Spurned Half-Brother and Restored the Sudairi Seven Royal Lineage," *The Globe and Mail*, 29 April 2015, diakses pada 4 Agustus 2019 dari <https://beta.theglobeandmail.com/news/world/saudi-arabias-royal-overhaul-signals-riyadhs-assertive-foreign-policy/article24178168/?ref=http://www.theglobeandmail.com>.

²¹ "King Salman Reasserts Sudairi Seven, Key Abdullah Advisor Removed," *Middle East Eye*, 13 Februari 2015, diakses pada 4 Agustus 2019 dari <http://www.middleeasteye.net/news/king-salman-reasserts-sudairi-seven-key-abdullah-advisor-removed-496423196>.

Pada 1992, Raja Fahd menerbitkan *Basic Law of Government* (*Nizām al-Asāsi li al-Hukm*) atau undang-undang tentang pemerintahan, hak, dan wewenang raja, serta warga negara. Undang-undang ini mempertegas peran absolut raja sebagai eksekutif, legislatif, dan yudikatif.²² Tidak ada mekanisme *check and balance* dalam fungsi eksekutif dan legislatif karena semua berada di tangan raja. Dalam wilayah eksekutif, raja dibantu oleh Majelis Menteri (*Majlis al-Wuzaraa*) yang terdiri atas dua wakil perdana menteri (biasanya putra mahkota kerajaan) dengan 23 menteri dengan portofolio dan 5 menteri negara.

Pemerintahan di Arab Saudi dibagi dalam 13 wilayah (*Manaatiq al-Idaariyya*) yang bisa kita persepsikan sebagai provinsi. Provinsi yang terluas merupakan provinsi yang sering bergejolak, yakni Wilayah Timur (provinsi *al-Syarqiyya*) yang sedikit lebih luas dari Wilayah Riyadh. Di bawah Wilayah ada beberapa kegubernuran (*al-Muhafadzat*) yang merupakan pemerintah daerah setingkat kabupaten/kota yang membawahi beberapa sub-kegubernuran/kecamatan (*al-Markaz*). Dalam pengelolaannya, pemerintah provinsi dan kabupaten ini biasanya ditunjuk dan diduduki oleh keluarga kerajaan Ibn Saud.

Arab Saudi tidak mengenal sistem politik kepartaian. Tidak ada satu pun organisasi sosial-politik yang boleh berdiri meskipun hanya organisasi independen biasa. Masyarakat Saudi tidak terbiasa dengan perbedaan, tetapi terbiasa dengan “kesepakatan.”²³ Untuk mengakomodasi aspirasi, Saudi memiliki semacam lembaga legislatif (*Shura Council*) yang bertugas sebagai fungsi konsultatif yang dapat mengajukan rancangan undang-undang, tetapi tidak memiliki wewenang legislasi. Lembaga legislatif ini beranggotakan 150 orang yang semuanya ditunjuk oleh raja. Tidak ada ruang bagi gerakan

²² “Government and Society of Saudi Arabia,” dalam *Encyclopedia Britannica*, diakses pada 4 Agustus 2019 dari <https://www.britannica.com/place/Saudi-Arabia/Government-and-society>.

²³ Prof. Murdi Ali Idris, wawancara di Taibah University, Saudi Arabia, pada 11 April 2017.

politik Islam untuk terlibat dalam mekanisme pemilihan kepemimpinan tingkat nasional atau masuk dan menyalurkan aspirasi lewat *Shura Council*.

Meskipun Arab Saudi memiliki Dewan Daerah (semacam DPRD) di masing-masing provinsi, hal ini tidak menjamin gerakan politik Islam bisa berpartisipasi secara penuh karena tetap dikontrol oleh keluarga kerajaan. Komposisi keanggotaan Dewan Daerah separuhnya ditunjuk langsung oleh gubernur, hanya separuhnya dipilih melalui pilkada langsung. Sistem seperti ini serupa dengan yang diterapkan di keempat negara kasus, kecuali Kuwait. Lembaga legislatif memang dibentuk setengah hati untuk memastikan kontrol pemerintah terhadap potensi yang melawan rezim, termasuk gerakan Islam.

Di bawah pemerintahan Raja Abdullah, pilkada dilaksanakan pada 2005 dan 2011. Pilkada 2011 sebenarnya merupakan penundaan dari pilkada yang seharusnya dilakukan pada 2009 karena ketidaksiapan kelengkapan pemilu. Uniknya, dalam semua pemilu lokal ini, Saudi hanya memberikan hak memilih dan dipilih bagi kaum laki-laki saja. Sistem sosial politik Saudi masih belum memberikan ruang bagi perempuan untuk berkecimpung dalam politik.

Raja Faisal dan Abdullah sebenarnya reformer Saudi di tengah tekanan keluarga kerajaan dan para ulama Wahhabi. Isu tentang hak perempuan sering dibangkitkan pada masa mereka, termasuk hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk meniti karier dan bekerja, dan hak untuk mengendarai mobil. Perubahan mendasar sebenarnya terjadi pada masa pemerintahan Raja Abdullah saat untuk pertama kalinya pada 2011 raja di depan *Shura Council* membolehkan perempuan mendapatkan posisi di lembaga tersebut serta memiliki hak pilih dan dipilih dalam pemilu lokal 2015.²⁴

²⁴ Untuk menjembatani hukum syariat di kerajaan tersebut, KPU menyediakan tempat dan petugas khusus yang dikelola oleh perempuan. "Women in Saudi Arabia to Vote and Run in Elections," *BBC News*, 25 September 2011, diakses pada 7 Agustus 2019 dari <http://www.bbc.com/news/world-us-canada-15052030>. Lihat juga Aya Batrawi, "Women Win 17 Seats in Saudi Arabia's First Elections

Ketiadaan peran politik Islam di Saudi disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, rezim Saudi tidak menyediakan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya *civil society*, termasuk politik Islam. Saudi menerapkan pengawasan ketat sehingga gerakan politik Islam tidak mendapatkan tempat di pilkada. *Kedua*, mekanisme pemilihan politik kekuasaan tidak menyediakan ruang bagi keterlibatan rakyat. Semua akses politik dimonopoli sedemikian rupa sehingga menjadi hak absolut dinasti Saud. Pada tingkat lokal, pembatasan ruang gerak dan wewenang Dewan Daerah oleh keluarga kerajaan membuat demokrasi tidak bisa tumbuh dan berkembang.

Qatar sebenarnya memiliki model kekuasaan yang paling mirip dengan Saudi. Negara ini menganut sistem monarki absolut. Meskipun negara ini berusaha mengklaim dirinya sebagai negara yang terbuka, demokratis, dan modern,²⁵ Qatar belum bisa memisahkan fungsi legislatif dan eksekutif. Usaha pembentukan badan legislatif secara demokratis, *Majelis Syura (Advisory Council)*, yang dicanangkan pada 2013, berujung ketidakpastian karena hingga kini belum terselenggara. Hal ini menunjukkan demokrasi mengalami stagnasi di tengah modernisasi Qatar yang semakin maju.²⁶

Qatar menerapkan pilkada serupa yang ada di Saudi. Qatar memiliki legislatif daerah yang bernama *Central Municipal Council (CMC)*. Dalam struktur pemerintahan negara-kota Qatar, CMC berada di bawah pemerintah pusat setingkat kabupaten/kota.

with Female Candidates,” *Independent*, 13 Desember 2015, diakses pada 7 Agustus 2019 dari <http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/a-woman-has-been-elected-in-saudia-arabias-elections-a6771161.html>.

²⁵ Mehran Kamrava, “Royal Factionalism and Political Liberalization in Qatar,” *The Middle East Journal* 63, no. 3 (summer 2009): 401–420.

²⁶ Badan legislatif yang rencananya dibentuk terdiri dari 30 orang yang terpilih dalam kontestasi dan 15 orang perwakilan kerajaan yang ditunjuk oleh Emir. Lihat *James A. Robinson dan Danyel Reiche*, “Postponing Democracy: Qatar’s Modernization Attempts Fail Without Inclusive Political Institutions,” *Annahar English*, 18 Desember 2014, diakses pada 7 Agustus 2019 dari <http://en.annahar.com/article/199010-postponing-democracy-qatars-modernizationization-attempts-fail-without-inclusive>.

Pemilihan badan perwakilan daerah dilakukan setiap empat tahun sekali sejak 1999. Berbeda dengan Dewan Daerah di Saudi, CMC berisi perwakilan dari 29 kabupaten/kota (daerah pemilihan) yang semuanya dipilih secara langsung tanpa melibatkan peran partai politik. Tidak ada anggota CMC yang ditunjuk langsung sebagai utusan raja. Kandidat bisa secara bebas mendaftarkan diri dengan memenuhi persyaratan umum.²⁷ Pada sisi ini sebenarnya keberadaan CMC lebih baik daripada Dewan Daerah di Saudi. Politik Islam bisa masuk dalam CMC, tetapi warga negara Qatar pada umumnya tidak tertarik dalam gerakan Islam.

Serupa dengan Dewan Daerah yang ada di Saudi, CMC tidak memiliki fungsi legislasi untuk membuat kebijakan. Badan tersebut hanya mampu memberikan saran/masukan (*advice*), pengawasan (*monitoring*), melaporkan kegiatan melanggar hukum, dan memberikan rekomendasi kepada Emir. Usaha untuk memperluas wewenang CMC sebenarnya telah diusulkan pada 2014 agar bisa melakukan fungsi investigasi terhadap pelanggaran hukum kecil. Namun, proposal tersebut ditolak oleh Kementerian Kota dan Perencanaan Kota (*Ministry of Municipality and Urban Planning*). Dalam hal ini, Sheikha al-Jefairi, anggota CMC, mengungkapkan bahwa ada kesalahpahaman tentang proposal yang diajukan dan wewenang yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Yang ingin diajukan CMC merupakan wewenang lebih untuk menjamin perlindungan hukum terhadap kehidupan masyarakat sipil.²⁸

Hal yang patut disayangkan di sini adalah tiadanya keinginan CMC untuk mengubah dirinya agar menjadi badan legislatif. Batalnya pembentukan *Majelis Syura* sebenarnya memberikan ruang bagi CMC untuk mengubah dirinya agar memiliki fungsi

²⁷ "Qatar Central Municipal Council Election 2015," *Marhaba Qatar*, 23 April 2015, diakses pada 7 Agustus 2019 dari <http://marhaba.qa/qatar-central-municipal-council-election-2015/>.

²⁸ Shabina S. Khatri, "Qatar's Only Elected Body Rebuffed After Asking for More Authority," *Doha News*, 16 April 2014, diakses pada 13 Juni 2019 dari <http://dohanews.co/qatars-elected-body-rebuffed-asking-authority/>.

legislasi. Dalam kasus Qatar, pergerakan ke arah demokrasi, seperti munculnya CMC ataupun reformasi atas fungsinya, sangat tergantung pada kehendak elite sebagai agen perubahan karena gerakan sosial di masyarakat bawah yang cenderung apolitis.²⁹ Hal ini justru menyebabkan politik Islam di Qatar tidak bisa tumbuh. Karakter masyarakatnya yang apatis menyumbat harapan akan perkembangan demokrasi di Qatar.

Uni Emirat Arab menarik untuk dikaji. Negara ini memiliki pola pengelolaan pemerintahan monarki-federal karena menggabungkan tujuh emirate (kerajaan),³⁰ tetapi terdapat pembagian kekuasaan seperti sistem konfesionalisme di Lebanon. Kekuasaan tertinggi ada pada Dewan Tinggi Federal atau *Federal Supreme Council-FSC* (المجلس الأعلى للاتحاد) yang beranggotakan emir dari tujuh emirate. Tugas utama FSC adalah menetapkan undang-undang federal dan mengangkat presiden dan wakil presiden setiap lima tahun sekali. Namun, emirat Abu Dhabi dan Dubai memiliki hak veto.³¹

Pada kenyataannya, pemilihan presiden selalu dilakukan berdasarkan konsesi; Emir Abu Dhabi mendapat jatah sebagai presiden, sementara Emir Dubai sebagai wakil presiden. Posisi wakil presidendiUEAmerupakanPerdanaMenteriyangmengepalaiDewan Menteri (مجلس وزراء الاتحاد) yang membantu tugas pemerintahan. Seperti halnya negara-negara Arab, UEA memiliki lembaga legislatif (*Federal National Council-FNC* (المجلس الوطني الاتحادي)). Format

²⁹ Jennifer Lambert, "Political Reform in Qatar: Participation, Legitimacy and Security," *Middle East Policy* 18, no. 1 (2011): 89–101.

³⁰ Monarki federal adalah gabungan beberapa monarki dalam satu negara dengan satu raja sebagai kepala negara federasi, tetapi masing-masing negara bagian mempertahankan monarki yang berbeda. Dalam kajian ini, UEA adalah gabungan beberapa emirat dalam satu negara dengan kepala negara yang disebut Presiden. Lihat Kenneth Katzman, "The United Arab Emirates (UAE): Issues for U.S. Policy," CRS Report, 1 November 2019; "United Arab Emirates: Governance & Politics," Fanack, 3 September 2018, diakses pada 11 Desember 2019 dari <https://fanack.com/united-arab-emirates/governance-and-politics-of-uae/>.

³¹ Lihat Country Watch, *United Emirat Arab: 2017 Country Review*, 63, diakses pada 13 Juni 2019 dari <http://www.countrywatch.com/intelligence/countryreviews?countryid=180>.

FNC di UEA lebih mirip seperti Dewan Daerah di Saudi yang mana dari total 40 orang anggota FNC, 20 orang di antaranya utusan masing-masing Emirat dan 20 orang lainnya dipilih secara langsung oleh rakyat tanpa mekanisme kepartaian.³²

Sistem pemerintahan di UEA lebih baik daripada Saudi dan Qatar karena setidaknya negara ini memisahkan lembaga eksekutif dan legislatif. Namun, campur tangan rezim di UEA masih sangat kuat dan belum menciptakan lembaga legislatif yang independen. Sebanyak 20 orang anggota FNC merupakan titipan para emir sehingga sangat berpotensi untuk mengontrol kerja badan legislatif tersebut.

UEA juga menerapkan peraturan yang ketat bagi tumbuhnya gerakan sosial serupa di Saudi. Negara ini mengikuti kebijakan Arab Saudi yang melarang berdirinya IM dan menganggapnya sebagai organisasi teroris. Rezim UEA sangat keras akan tumbuhnya politik Islam dan gerakan sosial lainnya. Namun, masyarakat UAE tidak apatis seperti masyarakat Qatar sehingga geliat sosial keagamaan bergulir dinamis di level bawah.

Aktivis sosial di UEA melakukan protes di sebuah situs internet atas kebijakan pemerintah yang tidak adil karena membebaskan keluarga kerajaan yang diduga melakukan sodomi. Rakyat mengkhawatirkan adanya sistem peradilan yang tidak adil. Namun, pemerintah UEA justru berusaha menutup situs tersebut. Karena dibuat di luar negeri, upaya ini berujung gagal, tetapi rakyat UEA tetap tidak bisa mengaksesnya.³³

Terinspirasi oleh gerakan demokratisasi *Arab Spring*, tersebar petisi yang dilakukan oleh 130 intelektual yang didukung empat organisasi profesi, yang terdiri dari asosiasi para ahli hukum, guru,

³² Sebelum al-Khaimah bergabung ke dalam UEA, jumlah anggota FNC adalah 34 orang. Kemudian, berdasarkan Keputusan Dewan Tinggi Federal (FSC) No. 3 Tahun 1972, jumlah tersebut diubah menjadi 40 orang.

³³ Christopher Davidson, "Fear and Loathing in the Emirates," *Carnegie*, 18 September 2012, diakses pada 23 Oktober 2017 dari <http://carnegieendowment.org/sada/49409>.

kalangan profesional, dan dosen. Petisi itu menuntut agar seluruh anggota parlemen dipilih langsung oleh rakyat dan meminta UEA menjadi negara monarki konstitusional yang berkomitmen terhadap hak asasi manusia dan prinsip dasar lainnya. Namun petisi ini berakhir dengan penangkapan “*UAE Five*” atau lima pemimpin yang menginisiasi petisi itu.³⁴

Demokrasi di Bahrain sangat sulit ditegakkan. Negara monarki ini memang memisahkan kepala negara dan kepala pemerintahan. Masalahnya, raja Hamad Ibn Isa al-Khalifah menunjuk perdana menteri bukan dari kalangan anggota parlemen, tetapi pamannya sendiri, Khalifah Ibn Sulman al-Khalifah. Perdana Menteri Khalifah hingga saat ini merupakan perdana menteri yang korup dan paling lama menduduki posisinya. Hal ini bisa jadi sebagai upaya keluarga al-Khalifa yang berasal dari kalangan Sunni untuk mempertahankan kekuasaannya di tengah mayoritas penduduk Bahrain yang Syiah.

Sistem politik Bahrain menganut bikameral. Dalam hal ini, majelis tinggi (*Majelis Syura*) berisikan 40 orang yang ditunjuk langsung oleh raja dan majelis rendah juga berisi 40 anggota yang dipilih melalui pemilu. Berbeda dengan sistem bikameral yang diterapkan di Inggris, Majelis Syura di Bahrain memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan parlemen (majelis rendah). Hal ini yang menyebabkan demokratisasi mengalami stagnasi di Bahrain.

Namun, politik Islam di Bahrain bisa ikut dalam proses demokrasi yang terbatas itu dan berkontestasi memperebutkan 40 kursi parlemen (majelis rendah). Pada pemilu tahun 2011, partai terbesar yang memenangkan pemilu adalah *al-Wefaq* dari kelompok Syiah dengan 18 kursi. Pemenang kedua adalah kelompok independen non-partai yang meraih 17 kursi. *Al-Wefaq* dan kelompok independen pernah berkoalisi dan memenangkan suara mayoritas di parlemen. Sementara itu, kalangan Sunni yang merupakan minori-

³⁴ Lihat Human Rights Watch, “UAE: Investigate Threats against ‘UAE 5,’” diakses pada 23 Oktober 2017 dari <https://www.hrw.org/news/2011/11/25/uae-investigate-threats-against-uae-5>. Hal senada diutarakan Wisnu Suryo Hutomo, mantan staf KBRI Abu Dhabi, UEA, di FGD di LIPI pada 20 Juli 2017.

tas di Bahrain hanya mendapatkan 5 kursi, yaitu partai *al-Ashalah* dari kelompok Salafi (3 kursi) dan *al-Minbar Islamic Society* dari IM (2 kursi).

Pemerintah Bahrain adalah pemerintahan diktator. Pada 2016, pemerintah Bahrain membubarkan partai Syiah terbesar *al-Wefaq* dan mencabut status kewarganegaraan ulama tertingginya. Hal ini disinyalir sebagai upaya melemahkan kekuatan Syiah yang semakin solid. Pada 2017, pemerintah Bahrain juga membubarkan organisasi HAM sekuler, *Waad*.³⁵ Jika dilihat dari sepak terjangnya, *al-Wefaq* dan *Waad* memang merupakan organisasi yang paling keras mengkritisi pemerintah. *Al-Wefaq* dan *Waad* bahkan memboikot pemilu 2014. Dua organisasi ini paling keras dan kritis menjadi oposisi pemerintah pasca-*Arab Spring*. Paara anggota *al-Wefaq* dan *Waad* juga dilarang untuk ikut dalam pemilu selanjutnya meski sebagai calon independen.³⁶

Transisi demokrasi di Bahrain jauh lebih maju dibandingkan Arab Saudi, UEA, dan Qatar. Namun, rezim masih melakukan tekanan politik untuk mempertahankan kekuasaan. Akibatnya, banyak gerakan politik Islam yang mengalami restriksi di berbagai saluran politik sehingga upaya mereka berkontribusi untuk memajukan demokrasi di Bahrain masih terhalang tembok kekuasaan.

Negara yang paling demokratis dibandingkan negara-negara tersebut adalah Kuwait. Negara ini merupakan monarki konstitusional yang demokratis yang melindungi kebebasan berpendapat, membuka ruang bagi organisasi sosial kemasyarakatan, serta memperkuat partisipasi politik warga. Konstitusi 1962 menyebutkan, "*The System of Government in Kuwait shall be democratic, under which*

³⁵ Aziz El Yaakoubi, "Bahrain Bars Members of Opposition Groups from Standing in Elections," *Reuters*, 13 Mei 2018, diakses pada 29 Oktober 2018 dari <https://www.reuters.com/article/us-bahrain-security/bahrain-bars-members-of-opposition-groups-from-standing-in-elections-idUSKCN1IE0QA>.

³⁶ "Bahrain to Ban Members of Dissolved Opposition Groups from Elections," *The Middle East Eye*, 13 Mei 2018, diakses pada 29 Oktober 2018 dari <https://www.middleeasteye.net/news/bahrain-ban-members-dissolved-opposition-groups-elections-1206808776>.

*sovereignty resides in the people, the source of all powers. Sovereignty shall be exercised in the manner specified in this Constitution.*³⁷ Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak kalangan memandang Kuwait pada masa awal berdirinya merupakan *role of model* pelaksanaan prinsip demokrasi di dunia Arab.

Kuwait memisahkan badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Atas desakan publik, sejak 2003, posisi perdana menteri menjadi terpisah dari struktur monarki, meski posisinya tetap ditunjuk oleh Emir Dinasti As-Sabah.³⁸ Sementara itu, Majelis Nasional atau parlemen beranggotakan 50 orang yang dipilih melalui jalur pemilihan umum tanpa campur tangan Emir. Majelis ini mempunyai posisi istimewa dalam struktur politik di Kuwait karena dapat meminta penjelasan Emir, melakukan mosi tidak percaya, membubarkan kabinet, dan memberhentikan Perdana Menteri.

Politik Islam sangat dinamis di tengah lingkungan politik yang demokratis di Kuwait. Kedekatan dinasti as-Sabah terhadap faksi Syiah membuat kelompok oposisi dari kalangan Sunni sangat kritis terhadap rezim. Kelompok Sunni dari kalangan IM yang tergabung dalam *the Islamic Constitutional Movement* (ICM) dan kelompok Salafi merupakan kelompok yang paling kuat di parlemen. Kelompok ini menguasai hampir separuh kursi parlemen, masing-masing 23 dan 24 kursi pada pemilu 2012 dan 2013. Namun, rezim As-Sabah tidak melakukan upaya pembatasan terhadap dinamika politik yang menurunkan capaian demokrasi di Kuwait.

Dari dinamika politik yang terjadi sepanjang tahun 2006–2016, tercatat sebanyak lima kali penyelenggaraan pemilu dan enam kali pembubaran parlemen, yaitu pada 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, dan 2016. Menurut Ghabra, krisis politik yang berkelanjutan tersebut menunjukkan dinamika hangat politik Kuwait dalam beberapa tahun terakhir, di samping semakin menurunnya tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.

³⁷ "Kuwait Constitution 1962," Diwan of HH the Prime Minister.

³⁸ Kristin Smith Diwan, "New Generation Royals and Succession Dynamic in the Gulf States," *Arab Gulf States Institute*, no.2 (2017): 7.

Kelima negara kasus tidak memiliki komitmen yang sama terhadap penerapan demokrasi. Selain Kuwait, kehidupan demokrasi di empat negara lainnya tidak tumbuh subur. Namun, kelima negara tersebut sama-sama mengelola pemerintahan dengan sistem monarki tanpa memberi ruang bagi tumbuhnya partai politik. Saudi, Qatar, dan UEA meletakkan kekuasaan yang terlalu besar di tangan Emir. Fenomena *executive heavy* sangat kentara. Kewenangan legislatif sangat dibatasi karena pemilihan anggota legislatif sebagian besar diisi oleh anggota keluarga kerajaan.

C. GERAKAN POLITIK ISLAM DI TENGAH LINGKUNGAN POLITIK YANG BERUBAH

Perubahan Sosial politik yang drastis di Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Kuwait mendorong gerakan gerakan politik Islam untuk meresponnya dengan cara yang berbeda-beda. Setidaknya ada tiga gerakan politik Islam yang menarik dan cukup dominan dalam memberikan respons di negara-negara ini, yaitu Ikhwanul Muslimin, Wahhabi, dan Syiah.

1. Ikhwanul Muslimin

Perkembangan IM di Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Kuwait memiliki pola yang berbeda-beda tergantung sistem politik dan karakter rezim yang berkuasa. Dari kelima negara tersebut, IM menempati posisi yang paling unik. *Pertama*, IM menyebar di kelima negara kasus hampir dalam momentum yang sama, yakni terjadinya eksekusi yang dipimpin oleh Jamal Abd Nasser pada medio 1950-an di Mesir atas para pengikut dan pemimpin *al-Ikhwanul al-Muslimin* karena IM dianggap sebagai organisasi sosial-keagamaan yang telah melakukan mobilisasi politik yang mengancam rezim. *Kedua*, IM masuk di masing-masing negara melalui saluran pendidikan. Kader-kader IM menyediakan SDM yang dibutuhkan oleh negara-negara Teluk yang sedang mengembangkan kurikulum pendidikan.

Di Arab Saudi, IM tidak bisa bergerak banyak karena kuatnya relasi ulama-ulama Wahhabi dengan dinasti Saud. IM bermetamorfosis melalui gerakan non-politis di bidang pendidikan yang melahirkan generasi baru Saudi yang lekat dengan ajaran Wahhabi, tetapi memiliki embrio gerakan sosial-politik untuk bersikap kritis terhadap pemerintah. Muhammad Qutb, adik dari Sayyid Qutb, datang pada 1970-an kemudian menjadi dosen di Institute Syariah untuk memodernisasi pendidikan Islam di Arab Saudi. Institut ini kemudian menjadi Universitas Ummul Quro dan memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan IM di Arab Saudi.³⁹ Pada era kepemimpinan Raja Abdullah (2005–2015), terjadi perubahan sikap rezim menjadi lebih keras terhadap IM pasca-*Arab Spring* tahun 2011. Raja Abdullah bahkan mengatakan IM sebagai “*a Masonic cult*” run by “*wolves in sheep’s clothing*.”⁴⁰ Kelompok ini melakukan *taghayur* (metamorfosis) bagi pertemuan ajaran Wahhabi dan IM. Karya-karya Muhammad Qutb di Ummul Quro memberi inspirasi bagi berdirinya gerakan *al-Shahwah al-Islamiyah* (Kebangkitan Islam) di Arab Saudi.⁴¹

Karena *al-Shahwah al-Islamiyah* secara natural memiliki akar gerakan politik dari IM, pada titik tertentu Shahwah juga berkonflik dengan rezim Saudi. Gerakan Shahwah yang dipimpin Safar al-Hawali dan Salman al-Awdah melakukan protes keras terhadap

³⁹ Masami Nishino, “Muhammad Qutb’s Islamist Thought: A Missing Link between Sayyid Qutb and al-Qaeda?” *NIDS Journal of Defense and Security*, no. 16 (Desember 2015): 113–145.

⁴⁰ Setelah *Arab Spring*, raja Abdullah bersikap keras terhadap IM. Lebih lengkap lihat Jeffrey Goldberg, “The Modern King in the Arab Spring,” *the Atlantic*, April 2013, diakses pada 29 Oktober 2018 dari <https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2013/04/monarch-in-the-middle/309270/>. Lihat juga Mohamed Mokhtar Qandil, “The Muslim Brotherhood and Saudi Arabia: From Then to Now,” *The Washington Institute*, 18 Mei 2018, diakses pada 29 Oktober dari <https://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/the-muslim-brotherhood-and-saudi-arabia-from-then-to-now>.

⁴¹ Stephane Lacroix, *Awakening Islam: The Politics of Religious Dissent in Contemporary Saudi Arabia*, trans. George Holoch (Cambridge: Harvard University Press, 2011), 43. Lihat juga Nishino, “Muhammad Qutb’s,” 113–145.

pemerintah Saudi yang meminta bantuan pada negara non-muslim (Amerika) ketika perang Irak-Kuwait. Pada 1991, Gerakan Shahwah juga berani mengkritik pemerintah dengan melayangkan surat permintaan agar pemerintah Saudi kembali kepada pijakan Islam yang benar.⁴² Berbagai narasi para ulama Shahwah yang disampaikan di antaranya larangan untuk turut mendukung penghancuran terhadap sesama pemerintahan Muslim, dan larangan menentang pemerintahan muslim yang dipilih oleh rakyatnya.⁴³ Saudi kemudian mengeluarkan dekrit yang menyatakan IM dan afliasiya menjadi organisasi terlarang.

Di UEA, kelompok IM datang sebelum negara itu berdiri. Mereka bekerja di sektor publik dan swasta, termasuk sektor peradilan dan pendidikan.⁴⁴ Keberadaan IM di UEA mendapatkan sambutan yang berbeda-beda. Sebagian emir menerima IM membuka cabang di wilayah kekuasaannya, tetapi sebagian lagi menolaknya. Keberadaan IM menguat setelah mereka menguasai majalah *Al-Islah* dan membuka cabang di beberapa emirat. Pada perkembangannya, dewan mahasiswa dan asosiasi profesional—seperti serikat ahli hukum dan guru—berubah menjadi pos terdepan bagi kepentingan Ikhwanul Muslimin.⁴⁵ Hal ini menyebabkan IM di UEA menjadi “negara” dalam negara.

Pada perkembangan berikutnya, penguasa UEA merasa ada ancaman terhadap stabilitas nasional dan regional. Hal ini menguat setelah peristiwa serangan World Trade Centre 9/11 tahun 2001 di

⁴² David Commins, *The Wahhabi Mission and Saudi Arabia* (London dan New York: I.B. Tauris, 2006), 179–180. Lihat juga David Commins, *Islam in Saudi Arabia* (London dan New York: I.B. Tauris, 2015), 144–145.

⁴³ Stéphane Lacroix, “Saudi Arabia’s Muslim Brotherhood Predicament,” *The Washington Post*, 20 Maret 2014, diakses pada 3 Oktober 2017 dari https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2014/03/20/saudi-arabias-muslim-brotherhood-predicament/?utm_term=.f3b04fe78fc2.

⁴⁴ Sultan al-Qassemi, “The Brothers and the Gulf,” *Foreign Policy*, 14 Desember 2012, diakses pada 18 Oktober dari <http://foreignpolicy.com/2012/12/14/the-brothers-and-the-gulf/>.

⁴⁵ al-Qassemi, “The Brothers.”

Amerika Serikat, dimana dua orang Emirat dituduh terlibat dalam peristiwa itu. Setelah tuduhan itu muncul, otoritas UEA memutuskan untuk mereformasi sistem pendidikan, kurikulum sekolah, dan membatasi gerak IM. Pasca-*Arab Spring*, UEA, Arab Saudi, dan Bahrain menyatakan IM sebagai organisasi terlarang di negaranya.

IM masuk di Qatar dengan pola yang serupa dengan UEA. Atas undangan emir Qatar, mereka melakukan reformasi sistem pendidikan, berkontribusi mendirikan universitas, dan menguasai narasi publik melalui acara khusus di al-Jazeera. Berbeda dengan di UEA, IM di Qatar tidak mengalami friksi dengan pemerintah. Relasi antara IM dan pemerintah Qatar merupakan anomali mengingat hampir semua negara teluk menolak keberadaan organisasi reformis tersebut dan lebih dekat dengan organisasi Wahhabi. Sebagai contoh, dalam konflik Suriah, hampir semua organisasi teluk mendukung organisasi jihadis yang menentang penguasa Syiah Bashar al-Assad. Namun, sebagian besar mereka yang dipimpin Saudi Arabia mendukung gerakan Wahhabi, kecuali Qatar yang konsisten mendukung gerakan berbasis IM di Suriah.⁴⁶

Di tengah penduduk Qatar yang memiliki imunitas terhadap pengaruh gerakan Islam, keluarga al-Thani melihat perkembangan IM di Qatar bukan sebagai ancaman, melainkan menganggap hubungan dengan organisasi ini sebagai relasi yang saling menguntungkan. Jumlah penduduk Qatar yang kecil dengan tingkat kemakmuran yang tinggi membuat masyarakatnya sangat sulit digerakkan oleh infiltrasi ideologi. Secara internal, Qatar memanfaatkan aktivis IM untuk memajukan pendidikan. Dari sisi politik, Qatar memanfaatkan pengaruh IM untuk membentuk karakter politik luar negerinya agar berada di tengah sebagai mediator dan dekat dengan semua gerakan Islam.

⁴⁶ Eugenio Dacrema, "New Emerging Balances in the Post-*Arab Spring*: The Muslim Brotherhood and the Gulf Monarchies," *ISPI Analysis*, no. 155 (Januari 2013): 1-6.

Kepemimpinan emir tidak memberikan ruang bagi terbentuknya *civil society*. Pemilu lokal yang dibentuk, seperti pemilu untuk memilih anggota *Central Municipal Council* (CMC), tidak lebih hanya upaya melokalisasi isu dan menginventarisasi pelanggaran-pelanggaran di daerah karena CMC tidak memiliki wewenang sebagai badan legislatif yang melakukan fungsi monitoring terhadap pemerintah.

Di Kuwait, IM Kuwait sempat memutuskan hubungan dengan organisasi induknya karena tidak mengambil sikap apa-apa terhadap invasi Irak ke negaranya. Posisi ini sangat unik dan menjadikan IM lebih leluasa menyesuaikan diri dengan konteks lingkungan politik Kuwait. IM mendapatkan lingkungan politik yang paling dinamis. Mereka mendirikan *the Islamic Constitutional Movement* (ICM) yang merupakan organisasi Islam kuat dan berpengaruh secara politik di Kuwait. ICM di Kuwait tidak ragu-ragu untuk menjadi kelompok oposisi yang kritis kepada pemerintah. Posisi ini justru berkebalikan dengan peran kelompok Syiah yang lebih pro-pemerintah. Pada Pemilu tahun 2012, ICM dan Salafi memperoleh suara terbanyak dengan 23 kursi di parlemen.⁴⁷

ICM diuntungkan dengan lingkungan masyarakat karena Islam memiliki pengaruh yang penting dalam membentuk identitas keislaman melalui aktivitas sosial kemasyarakatan. Di kalangan komunitas suku-suku yang kritis terhadap pemerintah, mereka tidak ragu untuk mendukung kelompok Islam (seperti Salafi), maupun reformis dari kalangan oposisi ICM, selama dapat memperjuangkan kepentingan mereka.⁴⁸ IM di Kuwait merupakan satu-satunya kasus yang menggambarkan bahwa gerakan Islam memiliki kontribusi yang kuat dan dinamis terhadap pembangunan demokrasi.

Serupa dengan Kuwait, IM di Bahrain masuk dalam kancah politik. Kelompok ini termasuk faksi yang kecil tetapi aktif, terutama

⁴⁷ Chatham House. *Kuwait Study Group: The Experience of Parliamentary Politics in the GCC* (London: Chatham House, 2012).

⁴⁸ Yagoub Yousif Al-Kandari, "Tribalism, Sektarianisme, and Democracy in Kuwaiti Culture," *Digest of Middle East Studies*, 19(2) (Fall 2010): 268–285.

menghadapi kekuatan kelompok Syiah yang merupakan penduduk mayoritas di Bahrain. Mereka tergabung dalam faksi *al-Minbar Islamic Society* yang hanya mampu memasukkan dua anggota saja dalam parlemen. Namun, sayap IM non-politik, *Jamiyyat Al-Islah al-Islamiyyah*, memiliki kekuatan sangat besar berhubungan baik dengan keluarga al-Khalifa.⁴⁹

2. Wahhabi

Dalam negara yang otoriter, organisasi sosial keagamaan yang bisa tumbuh adalah organisasi-organisasi yang tidak memiliki misi perubahan sosial, seperti Salafi/Wahhabi. Doktrin kelompok ini mengharuskan anggotanya menjauhi kehidupan politik dan taat pada pemimpin (*ulil amri*). Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Wahhabi subur dan bisa melekat dengan rezim yang berkuasa.

Di Arab Saudi, relasi mutualisme antara keluarga Ibn Saud dan ulama Wahhabi sudah berlangsung selama hampir dua ratus tahun. Banyak yang didapatkan oleh keluarga Saud ketika berkolaborasi dengan ulama Wahhabi, termasuk legitimasi yang kuat dari dalam negeri dan kawasan. Ulama Wahhabi juga mewarnai karakter kebijakan dan politik luar negeri Arab Saudi. Hal ini tampak dari kebijakan Saudi yang sangat keras terhadap penyebaran pengaruh Syiah di kawasan. Dalam perkembangannya, Wahhabi menjadi satu-satunya aliran Islam yang diterima di Saudi di tengah bayang-bayang kelompok lain yang didiskreditkan, seperti IM dan Syiah.

Relasi yang terbentuk secara formal antara pemerintah Saudi dan ulama diwujudkan melalui institusionalisasi lembaga ulama dalam *Hai'ah Kibar al-Ulama Lil-Buhuts wal-Ifta'* (Lembaga Ulama Senior untuk Riset dan Fatwa). Hingga tahun 2009, lembaga ulama ini hanya diisi oleh ulama dari mazhab Hanbali. Perubahan terjadi sejak masa kepemimpinan Raja Abdulah yang menyertakan ulama dari tiga mazhab lainnya, Maliki, Hanafi, dan Syafi'i dan meng-

⁴⁹ Toby Matthiesen, *Al Khalij Ath Thaifi wa Ar Rabi' Al Arabi* (Beirut: Arab Network for Research and Publishing, 2014).

genapkannya menjadi 21 anggota ulama. Namun, relasi antara ulama Wahhabi dan pemerintah Arab Saudi tetap terjalin kuat hingga saat ini.⁵⁰

Meskipun Wahhabi di Saudi memiliki ciri khas memberikan kesetiaan pada *ulil amri*, sejarah mencatat bahwa negara tersebut pernah mengalami pemberontakan kalangan Wahhabi yang dipimpin Juhaiman al-Utaibi. Juhaiman menginvasi Masjidil Haram sehingga terjadi pertempuran berdarah yang melibatkan alat perang berat, seperti tank, di masjid suci itu. Yaroslav mengemukakan bahwa ideologi yang dikembangkan Juhaiman ini menjadi inspirasi bagi Osama bin Laden, pemimpin al-Qaeda.⁵¹

Kelompok Wahhabi di Bahrain menghadapi pertarungan keras di tengah mayoritas pengikut Syiah. Meskipun jumlahnya mayoritas, Syiah di Bahrain merasa dimarginalkan, baik secara politik (dianggap kelas dua) maupun secara ekonomi (tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah). Posisi Wahhabi sangat diuntungkan oleh keluarga al-Khalifa yang berasal dari kalangan Sunni. Dalam parlemen Bahrain yang 50% di antaranya ditunjuk oleh keluarga al-Khalifa, pengikut Syiah mendapatkan porsi minoritas. Oleh karena itu, tekanan Syiah untuk mengubah konstitusi Bahrain agar lebih ramah terhadap kepentingan Syiah sering berujung gagal.⁵² Kelompok Wahhabi yang tergabung dalam faksi *Al-Ashalah* lebih intens terlibat dalam politik karena tekanan kelompok oposisi Syiah yang cukup besar. *Al-Ashalah* yang memiliki afiliasi dengan Wahhabi

⁵⁰ Christopher Boucek, "Saudi Fatwa Restrictions and the State-Clerical Relationship," *Carnegie Endowment*, 27 Oktober 2010, diakses pada 15 Oktober 2018 dari <https://carnegieendowment.org/sada/41824>.

⁵¹ Juhaiman memberontak karena kecewa terhadap keluarga raja Saudi yang hidup foya-foya, gemar ke klub malam dan bioskop, serta menyelundupkan minuman keras. Baca lebih lanjut Yaroslav Trofimov, *Kudeta Mekkah: Sejarah yang Tak Terkuak* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2017).

⁵² Fakhry Ghafur, "Kekuatan Politik Islam di Bahrain: Politik Diskriminasi Monarki," dalam *Kekuatan Politik Islam di Bahrain, Qatar, dan Lebanon* (Jakarta: UI Press, 2017), 53–59.

cukup aktif dalam gerakan, tetapi tidak mendapatkan dukungan suara yang signifikan.⁵³

Pada dasarnya, masyarakat Qatar sangat terbuka terhadap keberagaman. Namun, ajaran Wahhabi menjadi aliran keagamaan yang dominan dan paling berpengaruh bagi masyarakat Qatar. Penerimaan masyarakat Qatar terhadap ajaran Wahhabi ini bersifat inklusif. Mereka tetap memberi ruang bagi hadirnya gerakan Islam lain untuk tumbuh mewarnai corak keberagaman mereka, misalnya IM. Perbedaan mencolok tentang karakter gerakan IM di negara-negara Teluk dengan negara asalnya, Mesir, dan negara-negara Afrika utara adalah hilangnya karakter sufisme. Metamorfosis karakter IM di Teluk dilakukan agar bisa menyesuaikan diri dengan ajaran Wahhabi yang sudah lebih dulu mengakar di masyarakat Teluk.

Hal yang menarik di Qatar adalah perpaduan gerakan teologis Wahhabi dengan karakter sosial-politis dari IM tidak pernah terimplementasikan menjadi gerakan sosial yang aktif melakukan rekayasa sosial. Namun, perpaduan ini lebih diimplementasikan menjadi kesadaran sosial melalui empati dan gerakan filantropi, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke atas di Qatar. Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, Qatar juga lebih sekuler dibandingkan Saudi.

Di tengah masyarakat kosmopolitan, Wahhabi di UAE memiliki karakter yang lebih dekat dengan Wahhabi pesisir. Perbedaan karakter Wahhabisme ini bisa menjadi studi lebih lanjut dari perbedaan letak geografis antara Wahhabi daratan (*Wahhabi of the land*) yang ada di Arab Saudi dan Wahhabi pesisir (*Wahhabi of the sea*) yang berada di Qatar, Kuwait, Bahrain, dan UEA yang secara ekonomi lebih stabil.⁵⁴ Dalam praktik-praktik politik dan pemerin-

⁵³ "Bahrain's October 24 and 31, 2002 Legislative Elections," The National Democratic Institute for International Affairs, diakses pada 3 Agustus 2016 dari https://www.ndi.org/sites/default/files/2392_bh_electionsreport_engpdf_09252008.pdf.

⁵⁴ Istilah *Wahhabi of the land* dan *Wahhabi of the sea* merupakan konsep yang digunakan penulis untuk mengklasifikasi karakter Wahhabi berdasarkan letak geografisnya. Konsep ini dipinjam dari tulisan James M. Dorsey dengan definisi

tahan, UAE menerapkan cara yang lebih sekuler. Namun, karakter Wahhabi tetap menjadi arus utama dalam keberagaman masyarakat UEA. Dibandingkan dengan Saudi, Wahhabi di UEA lebih dekat karakternya dengan Qatar. Namun, ada penolakan UEA terhadap IM karena kekuatan organisasi tersebut secara politis mulai mengancam kekuasaan para emir dan adanya tekanan politik dari Arab Saudi. Keterbukaan masyarakat UEA terhadap IM masih sangat tinggi, bahkan sel-sel gerakan IM secara sosial masih aktif di tengah masyarakat UEA.

Wahhabi di Kuwait memiliki hubungan historis dengan Wahhabi yang lahir di Arab Saudi. Kelompok ini berkembang di Kuwait sejak abad ke-18 ketika pengaruh penguasa Bani Khalid mulai luntur dan para ulama Wahhabi yang berasal dari daerah Najd, Arab Saudi, mulai menyebarkan ajarannya di Kuwait.⁵⁵ Selain itu, relasi antara Kuwait dan dinasti Saudi terjadi ketika jazirah Arab dikuasai oleh Bani Rasyidi yang menyebabkan keluarga Saud terusir dan mengungsi di bawah perlindungan penguasa Kuwait yang masih memiliki hubungan familial.⁵⁶ Perkembangan politik Kuwait yang lebih demokratis dibandingkan negara-negara lain di Teluk menyebabkan Wahhabi tidak dapat merapatkan diri dengan keluarga as-Sabah. Pada titik ini, relasi keluarga as-Sabah dengan kelompok Syiah lebih dekat dibandingkan kelompok Sunni. Jadi, Wahhabi di Kuwait justru bergabung dengan IM dan masuk dalam aktivitas politik menjadi kelompok oposisi yang vokal terhadap pemerintahan.⁵⁷

Wahhabi di Kuwait merupakan pengecualian. Mereka mengambil langkah yang berbeda dan secara intens masuk dalam politik. Sikap oposisi merupakan respons terhadap keberpihakan rezim

yang berbeda. Baca James M. Dorsey, "Wahhabism vs. Wahhabism: Qatar Challenges Saudi Arabia," *RSIS Working Paper series*, no. 262 (September 2013).

⁵⁵ Michael S. Casey, *The History of Kuwait* (Westport, CT: Greenwood Press, 2007), 37–38.

⁵⁶ Commins, *The Wahhabi Mission*, 71.

⁵⁷ Shafeeq N Ghabra, "Balancing State and Society: The Islamic Movement in Kuwait," *Middle East Policy* no. 5/2 (Mei 1997): 58.

terhadap kelompok Syiah, meskipun secara teologis Wahhabi merupakan organisasi yang tidak mementingkan politik dan cenderung taat dengan penguasa. Pada titik ini, bisa dilihat bahwa sikap politis Wahhabi di Kuwait merupakan bukti bahwa dalam iklim yang demokratis, gerakan Wahhabi yang anti-politik sekalipun dapat berkontestasi dan masuk dalam proses demokratisasi.

3. Syiah

Kelompok Syiah sebenarnya memiliki akar yang kuat secara sosial dan kultural di wilayah Teluk. Iran merupakan pusat kekuatan politik kaum Syiah di kawasan Teluk saat ini. Namun, karena Syiah lahir di jazirah Arab, tidak mengherankan jika ajaran Syiah masih memiliki penganut fanatik berbasis suku-suku—meskipun minoritas di tengah-tengah lautan Wahhabi yang kuat, seperti di Saudi Arabia.

Pada kondisi politik kontemporer, ketegangan antara Arab Saudi dan Iran tidak terlepas dari sejarah yang berdarah pada masa lampau.⁵⁸ Di Saudi, kelompok Syiah sangat kuat di wilayah timur Arab Saudi (Syarqiyah) yang berdekatan Iran. Di tengah relasi Wahhabi dan keluarga Saud yang kuat, kelompok Syiah cenderung menjadi kelompok oposisi dan minoritas. Oposisi Syiah menguat di Saudi dipimpin oleh sheikh Hasan al-Saffar dengan mendirikan *Organization of Islamic Revolution* (OIR) pada 1979. Momentum revolusi Iran membuat organisasi ini semakin aktif melakukan kritik dan menggelar demonstrasi di wilayah timur Saudi. Pada akhirnya, banyak anggota OIR ditangkap aparat Saudi.⁵⁹

Kasus yang terbaru adalah pertentangan antara Saudi dan tokoh oposan Syiah Sheikh Nimr al-Nimr yang sangat kritis terhadap keluarga kerajaan. Ia mengusulkan diadakannya pemilu terbuka dan pemisahan diri Provinsi Syarqiyah. Tekanan politik yang dilakukan kelompok Syiah menguat dengan adanya demonstrasi besar-besaran pada sepanjang tahun 2011 hingga tahun 2016. Konflik politik

⁵⁸ Commins, *Islam in Saudi*, 3.

⁵⁹ Commins, *Islam in Saudi*, 141.

ini berujung pada putusan hukuman mati terhadap Sheikh Nimr bersama 4 ulama Syiah dan 43 orang pengikutnya. Hal ini tidak menyurutkan aksi protes kelompok Syiah. Kelompok militan Syiah ini justru megebom kantor intelijen Saudi di Qatif.⁶⁰

Kasus yang lebih mirip dengan Saudi adalah kelompok Syiah di UEA. Rezim tidak memberikan artikulasi politik bagi kelompok ini. Pemerintah UEA menerapkan peraturan bahwa calon legislatif yang duduk di FNC tidak boleh memiliki afiliasi keanggotaan di gerakan sosial/Islam mana pun. Pemerintah UEA juga tidak memperbolehkan terbentuknya partai politik. Kelompok Syiah merupakan kelompok minoritas yang tidak memiliki *bargaining* politik apa pun terhadap rezim sehingga pengusiran terhadap pengikut Syiah di UEA terjadi.⁶¹

Di kerajaan Bahrain, Syiah merupakan penduduk mayoritas. Namun, pemerintahan Dinasti al-Khalifa merupakan kelompok Sunni. Syiah di Bahrain ikut berperan serta dalam pemilu dan memenangkan suara mayoritas. Namun, jumlah perolehan kursi di parlemen tidak dalam angka yang proporsional. Hal ini karena Dinasti al-Khalifa membatasi jumlah perwakilan kaum Syiah di parlemen.

Marginalisasi politik dan ekonomi terhadap kelompok Syiah memunculkan perlawanan terhadap rezim al-Khalifa. Namun, kekuatan politik kelompok Syiah sangat fluktuatif tergantung posisi kekuatan dan kelemahan rezim yang berkuasa. Perlawanan kelompok Syiah memuncak ketika peristiwa *Arab Spring*. Mereka melakukan

⁶⁰ "Inside the Saudi Town that's been Under Siege for Three Months by its Own Government," *Independent*, 4 Agustus 2017, diakses pada 2 September 2017 dari <http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/saudi-arabia-siege-town-own-citizens-government-kingdom-military-government-awamiyah-qatif-a7877676.html>. Lihat juga "Saudi Protesters Fire-Bomb Intelligence Building in Qatif," *Middle East Eye*, 11 Januari 2016, diakses pada 2 September 2017 dari <http://www.middleeasteye.net/news/saudi-protesters-fire-bomb-intelligence-building-qatif-843608836>.

⁶¹ "Lebanese Families Given 48 Hours to Leave the UAE," *The New Arab*, 18 Maret 2015, diakses pada 2 September 2017 dari <https://www.alaraby.co.uk/english/news/2015/3/18/lebanese-families-given-48-hours-to-leave-the-uae>.

protes dalam skala besar sehingga mengancam posisi rezim. Pasukan militer Arab Saudi (1.200 tentara) dan UEA (800 tentara) masuk ke Bahrain dan melakukan intervensi untuk menekan perlawanan kelompok Syiah yang mendapatkan momentum dari gelombang *Arab Spring*.⁶²

Hal serupa juga terjadi di Kuwait. Kelompok Syiah bukanlah faksi politik yang paling kuat. Namun, lingkungan politik yang demokratis membuat artikulasi politik kelompok Syiah disalurkan dalam perebutan suara di parlemen. Berbeda dengan di Bahrain, meskipun ikut berkontestasi di parlemen dan rajanya dari kalangan Sunni, kelompok Syiah menjadi pendukung utama rezim as-Sabah. Sebaliknya, mayoritas kelompok Sunni, ICM (IM), dan Salafi, menjadi kelompok oposisi yang terkuat yang melawan kekuasaan keluarga as-Sabah.

Kelompok Syiah di Qatar merupakan penduduk minoritas. Pengikut Syiah hanya berjumlah 10% dari total populasi. Sebagian besar di antara mereka merupakan warga negara keturunan dari Persia (Iran). Permasalahan konflik sektarianisme dan agama di Qatar nyaris mendekati titik nol. Sejak tahun 1971, konflik sektarianisme berbasis agama tidak muncul ke permukaan. Di satu sisi, masyarakat Qatar cenderung penganut Wahhabi yang toleran. Di sisi lain, kelompok Syiah di Qatar juga bukan pengikut yang fanatik. Hal ini dimungkinkan karena kebanyakan pengikut Syiah di Qatar menggeluti dunia bisnis, memiliki latar belakang sebagai pengusaha, dan dekat dengan keluarga Emir.⁶³

E. PENUTUP

Dalam analisis gerakan politik Islam di Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Kuwait, kita melihat pola yang berbeda-

⁶² Ethan Bronner dan Michael Slackman, "Saudi Troops Enter Bahrain to Help Put Down Unrest," *The New York Times*, 14 Maret 2011, diakses pada 4 Maret 2016 dari <https://www.Nytimes.com/2011/03/15/world/middleeast/15bahrain.html>.

⁶³ Dedy Saiful Hadi, mantan dubes RI untuk Qatar, FGD pada 2 Juni 2016.

beda dalam pola gerakan dan pendekatan politik. Tiadanya peran politik Islam di lima negara kasus disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, rezim penguasa tidak menyediakan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya *civil society*, termasuk politik Islam. Saudi dan UEA menerapkan pengawasan ketat sehingga gerakan politik Islam tidak bisa menjalankan fungsinya untuk mengkritisi kerja pemerintah.

Kedua, mekanisme pemilihan politik kekuasaan tidak menyediakan ruang bagi keterlibatan rakyat. Dalam kasus Arab Saudi dan UEA, semua akses politik dimonopoli sedemikian rupa sehingga menjadi hak absolut kerajaan. Hal ini juga berlaku pada tingkat lokal (Dewan Daerah di Saudi) dan nasional (FNC di UEA). Ada pembatasan ruang gerak dan wewenang parlemen karena keluarga kerajaan mengakuisisi separuh kursi parlemen dengan menunjuk orang-orang mereka untuk duduk di sana. Akibatnya, demokrasi tidak bisa tumbuh dan berkembang di sana.

Ketiga, apatisme politik akibat kemapanan ekonomi dan sosial. Dalam kasus Qatar, di satu sisi, negara memberikan ruang yang lebar dalam terwujudnya parlemen yang baik. Di sisi lain, politik Islam cenderung apatis. Hal ini didukung oleh sikap penguasa yang memang tidak menginginkan fungsi parlemen ke arah pembentukan lembaga legislatif yang sebenarnya. Dengan adanya apatisme ini, gerakan politik Islam tidak mendorong terbentuknya demokrasi.

Keempat, manipulasi politik yang dilakukan oleh rezim untuk mempertahankan kekuasaan. Akibatnya, banyak gerakan politik Islam yang mengalami restriksi di berbagai saluran politik sehingga upaya mereka untuk berkontribusi dalam memajukan demokrasi terhalang tembok kekuasaan, seperti yang terjadi di Bahrain. Geliat politik Islam di Bahrain jauh lebih maju dibandingkan Arab Saudi, UEA, dan Qatar. Namun, rezim masih melakukan tekanan secara politik.

Di luar Arab Saudi, UEA Bahrain, dan Qatar, politik Islam mendorong terbentuknya iklim yang demokratis di Kuwait. Sebagian besar dari mereka menjadi kelompok oposisi yang kuat terhadap rezim. Kedekatan dinasti as-Sabah terhadap faksi Syiah membuat

kelompok oposisi dari kalangan Sunni sangat kritis terhadap rezim. Kelompok Sunni dari kalangan IM yang tergabung dalam *the Islamic Constitutional Movement* (ICM) dan kelompok Salafi merupakan yang paling kuat di parlemen. Kelompok ini menguasai hampir separuh kursi parlemen, masing-masing 23 dan 24 kursi pada pemilu 2012 dan 2013. Namun, rezim As-Sabah tidak melakukan upaya pembatasan terhadap dinamika politik yang menurunkan capaian demokrasi di Kuwait.

Perubahan lingkungan politik membuat politik Islam melakukan *taghoyyur* atau menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat dia berada. *Pertama*, pada lingkungan rezim yang memerintah negara dengan sistem monarki absolut dan diktator yang tidak memberikan ruang bagi tumbuhnya *civil society*, gerakan Islam maupun gerakan sosial lainnya tidak bisa secara leluasa tumbuh memberikan kontribusi membangun lingkungan yang demokratis. Hal ini tampak di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain. Sebagai contoh, karakter IM yang mempunyai akar gerakan politik dan kritis lebih dianggap sebagai ancaman bagi rezim yang berkuasa. Rezim cenderung menggunakan cara-cara keras, termasuk menetapkan organisasi tersebut sebagai organisasi teroris terlarang. Gerakan ini melakukan *taghoyyur* atau menyesuaikan diri dengan tidak masuk dalam isu-isu sensitif, seperti masuk ke aktivitas politik dan menjadi oposisi bagi rezim yang berkuasa. Mereka hanya berkecimpung dalam sektor pendidikan dan filantropi seperti yang terjadi di Qatar.

Kedua, di negara yang memiliki kondisi ekonomi yang kurang kondusif, termasuk negara yang memiliki kesenjangan ekonomi yang lebar dan penggunaan keuangan negara yang koruptif, politik Islam akan tumbuh subur dan reaktif terhadap kondisi yang ada. Dalam kasus Arab Saudi, gerakan ini semakin aktif ketika ekonomi Saudi semakin melemah dan ketimpangan sosial ekonomi semakin lebar. Dalam kondisi ekonomi yang cukup baik, seperti di Qatar dan UEA, gerakan politik Islam akan mengalami stagnasi.

Ketiga, di negara yang memiliki kebijakan yang tidak ramah terhadap gerakan Islam, kecenderungan untuk melakukan *counter-*

action di ranah politik terhadap kebijakan pemerintah akan semakin tinggi. Dalam kasus Kuwait dan Bahrain, gerakan Islam menjadi kelompok oposisi yang paling reaktif. Dalam kasus Qatar, ketika negara ramah dengan gerakan Islam, gerakan Islam akan fokus pada aspek religiositas saja dan tidak akan keluar dari tugas utamanya dan masuk ke ranah politik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- al-Kandari, Yagoub Yousif. "Tribalism, Sektarianisme, and Democracy in Kuwaiti Culture." *Digest of Middle East Studies*, 19(2) (Fall 2010): 268–285.
- Casey, Michael S. *The History of Kuwait*. Westport: Greenwood Press, 2007.
- Chatham House. *Kuwait Study Group: The Experience of Parliamentary Politics in the GCC*. London: Chatham House, 2012.
- Commins, David. *Islam in Saudi Arabia*. London dan New York: I.B. Tauris, 2015.
- Commins, David. *The Wahhabi Mission and Saudi Arabia*. London dan New York: I.B. Tauris, 2006.
- Dacrema, Eugenio. "New Emerging Balances in the Post-Arab Spring: The Muslim Brotherhood and the Gulf monarchies." *ISPI Analysis*, no. 155 (Januari 2013): 1–6.
- Diwan, Kristin Smith. "New Generation Royals and Succession Dynamic in the Gulf States." *Arab Gulf States Institute*, no. 2 (2017).
- Dorsey, James M. "Wahhabism vs. Wahhabism: Qatar Challenges Saudi Arabia," *RSIS Working Paper series*, no. 262 (September 2013): 1–44.
- Fargues, Philippe. "Immigration vs. Population in the Gulf." Dalam *The Gulf Monarchies Beyond the Arab Spring. Changes and Challenges*, 13. European University Institute, 2015.
- Ghabra, Shafeeq N. "Balancing State and Society: The Islamic Movement in Kuwait." *Middle East Policy* no. 5/2 (Mei 1997): 58–72.
- Ghafur, Fakhry. "Kekuatan Politik Islam di Bahrain: Politik Diskriminasi Monarki." Dalam *Kekuatan Politik Islam di Bahrain, Qatar, dan Lebanon*, 53–59. Jakarta: UI Press, 2017.

- Kamrava, Mehran. "Royal Factionalism and Political Liberalization in Qatar." *The Middle East Journal* 63, no. 3 (Summer 2009): 401–420.
- Kusserow, Sebastian, dan Patryk Pawlak. "Understanding the Branches of Islam: Shia Islam." *Briefing European Parliamentary Research Service*, Januari 2016.
- Lacroix, Stephane. *Awakening Islam: The Politics of Religious Dissent in Contemporary Saudi Arabia*, diterjemahkan oleh George Holloch. Cambridge: Harvard University Press, 2011.
- Lambert, Jennifer. "Political Reform in Qatar: Participation, Legitimacy and Security." *Middle East Policy* 18, no. 1 (2011): 89–101.
- Levins, Charlotte M. "The Rentier State and the Survival of Arab Absolute Monarchies." *Rutgers Journal of Law & Religion* 14 (Spring 2013): 388–423.
- Louër, Laurence. "The Transformation of Shia Politics in the Gulf Monarchies." Dalam *Islam in a Changing Middle East: New Analysis of Shia Politics*, *POMEPS Studies no. 28* (Desember 2017): 39–42.
- Matthiesen, Toby. *Al Khalij Ath Thaiif wa Ar Rabi' Al Arabi*. Beirut: Arab Network for Research and Publishing, 2014.
- Nishino, Masami. "Muhammad Qutb's Islamist Thought: A Missing Link Between Sayyid Qutb and al-Qaeda?" *NIDS Journal of Defense and Security*, no. 16 (Desember 2015): 113–145.
- Rathmell, Andrew, dan Kirsten Schulze. "Political Reform in the Gulf: The Case of Qatar." *Middle Eastern Studies* 36, no. 4 (Oktober 2000): 47–62.
- Sadiki, Larbi. "Towards Arab Liberal Governance-From the Democracy of Bread to the Democracy of the Vote." *Third World Quarterly* 18, no. 1 (1997): 127–148.
- Trofimov, Yaroslav. *Kudeta Mekkah: Sejarah yang Tak Terkuak*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2017.

Data

- Country Watch. *United Emirat Arab: 2017 Country Review*. Diakses pada 13 Juni 2019 dari <http://www.countrywatch.com/intelligence/countryreviews?countryid=180>.
- FSC. "Keputusan Dewan Tinggi Federal (FSC) No. 3 Tahun 1972."
- IMF. "Annual Meeting of Arab Ministers of Finance: Economic Diversification in Oil-Exporting Arab Countries." April 2016. Manama, Bahrain.

- IMF. "Gulf Cooperation Council: The Economic Outlook and Policy Challenges in the GCC Countries." *IMF Policy Paper*, Desember 2017.
- Pew Research Center's Forum on Religion & Public Life. "Mapping the Global Muslim Population." Oktober 2009. <http://www.pewforum.org/files/2009/10/Shiarange.pd>.
- World Bank, "Unemployment, Total (% of Total Labor Force) (Modeled ILO Estimate)-United Arab Emirates, Bahrain, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia." Diakses pada 31 Juli 2019 dari <https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?end=2017&locations=AE-BH-KW-QA-SA&start=1991&type=shaded&view=chart>.
- World Economic Forum. "Part II-The Employment System in GCC Countries, 2018." Diakses pada 31 Juli 2019 dari http://reports.weforum.org/rethinking-arab-employment/part-ii-the-employment-system-in-gcc-countries/?doing_wp_cron=1536313161.7802679538726806640625.

Internet

- al-Qassemi, Sultan. "The Brothers and the Gulf." *Foreign Policy* 14 Desember 2012. Diakses pada 18 Oktober 2017 dari <http://foreignpolicy.com/2012/12/14/the-brothers-and-the-gulf/>.
- "Bahrain to Ban Members of Dissolved Opposition Groups from Elections." *The Middle East Eye*, 13 Mei 2018. Diakses pada 29 Oktober 2018 dari <https://www.middleeasteye.net/news/bahrain-ban-members-dissolved-opposition-groups-elections-120680876>.
- "Bahrain's October 24 and 31, 2002 Legislative Elections." The National Democratic Institute for International Affairs. Diakses pada 3 Agustus 2016 dari https://www.ndi.org/sites/default/files/2392_bh_electionsreport_engpdf_09252008.pdf.
- Batravi, Aya. "Women Win 17 Seats in Saudi Arabia's First elections with Female candidates." *Independent*, 13 Desember 2015. Diakses pada 7 Agustus 2019 dari <http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/a-woman-has-been-elected-in-saudia-arabias-elections-a6771161.html>.
- Boucek, Christopher. "Saudi Fatwa Restrictions and the State-Clerical Relationship." *Carnegie Endowment*, 27 Oktober 2010. Diakses pada 15 Oktober 2018 dari <https://carnegieendowment.org/sada/41824>.

- Bronner, Ethan, dan Michael Slackman. "Saudi Troops Enter Bahrain to Help Put Down Unrest." *The New York Times*, 14 Maret 2011. Diakses pada 4 Maret 2016 dari <https://www.nytimes.com/2011/03/15/world/middleeast/15bahrain.html>.
- Davidson, Christopher. "Fear and Loathing in the Emirates." *Carnegie*, 18 September 2012. Diakses pada 23 Oktober 2017 dari <http://carnegieendowment.org/sada/49409>.
- Dudley, Dominic. "Is Saudi Arabia Heading For A Recession?" *Forbes*, 12 Juli 2016. Diakses pada 31 Juli 2019 dari <https://www.forbes.com/sites/dominicdudley/2016/07/12/saudi-recession/2/#6834a0d26330>.
- el-Yaakoubi, Aziz. "Bahrain Bars Members of Opposition Groups from Standing in Elections." *Reuters*, 13 Mei 2018. Diakses pada 29 Oktober 2018 dari <https://www.reuters.com/article/us-bahrain-security/bahrain-bars-members-of-opposition-groups-from-standing-in-elections-idUSKCN1IE0QA>.
- European Parliamentary Research. "Distribution of Sunni and Shia Muslim Population in the Middle East 2016." Diakses pada 4 Agustus 2019 dari https://epthinktank.eu/2016/01/12/the-wider-middle-east-between-iran-and-saudi-arabia/sunni_and_shia/.
- Goldberg, Jeffrey. "The Modern King in the *Arab Spring*." *The Atlantic*, April 2013. Diakses pada 29 Oktober 2018 dari <https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2013/04/monarch-in-the-middle/309270/>.
- "Government and Society of Saudi Arabia." *Encyclopedia Britannica*. Diakses pada 4 Agustus 2019 dari <https://www.britannica.com/place/Saudi-Arabia/Government-and-society>.
- "Inside the Saudi Town That's Been Under Siege for Three Months by its Own Government." *Independent*, 4 Agustus 2017. Diakses pada 2 September 2017 dari <http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/saudi-arabia-siege-town-own-citizens-government-kingdom-military-government-awamiyah-qatif-a7877676.html>.
- Katzman, Kenneth. "The United Arab Emirates (UAE): Issues for U.S. Policy," *CRS Report*, 1 November 2019; "United Arab Emirates: Governance & Politics," *Fanack*, 3 September 2018, diakses pada 11 Desember 2019 dari <https://fanack.com/united-arab-emirates/governance-and-politics-of-uae/>.

- Khatri, Shabina S. "Qatar's Only Elected Body Rebuffed After Asking for More Authority." *Doha News*, 16 April 2014. Diakses pada 13 Juni 2019 dari <http://dohanews.co/qatars-elected-body-rebuffed-asking-authority/>.
- "King Salman Reasserts Sudairi Seven, Key Abdullah Advisor Removed." *Middle East Eye*, 13 Februari 2015. Diakses pada 4 Agustus 2019 dari <http://www.middleeasteye.net/news/king-salman-reasserts-sudairi-sev-en-key-abdullah-advisor-removed-496423196>.
- "Kuwait Constitution 1962." Diwan of HH the Prime Minister.
- Lacroix, Stéphane. "Saudi Arabia's Muslim Brotherhood Predicament." *The Washington Post*, 20 Maret 2014. Diakses pada 3 Oktober 2017 dari https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2014/03/20/saudi-arabias-muslim-brotherhood-predicament/?utm_term=.f3b-04fe78fc2.
- "Lebanese Families Given 48 hours to leave the UAE." *The New Arab*, 18 Maret 2015. Diakses pada 2 September 2017 dari <https://www.alaraby.co.uk/english/news/2015/3/18/lebanese-families-given-48-hours-to-leave-the-uae>.
- Martin, Patrick. "Why Saudi King Spurned Half-Brother and Restored The Sudairi Seven Royal Lineage." *The Globe and Mail*, 29 April 2015. Diakses pada 4 Agustus 2019 dari <https://beta.theglobeandmail.com/news/world/saudi-arabias-royal-overhaul-signals-riyadhs-assertive-foreign-policy/article24178168/?ref=http://www.theglobeandmail.com>.
- Qandil, Mohamed Mokhtar. "The Muslim Brotherhood and Saudi Arabia: From Then to Now." *The Washington Institute*, 18 Mei 2018. Diakses pada 29 Oktober 2018 dari <https://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/the-muslim-brotherhood-and-saudi-arabia-from-then-to-now>.
- "Qatar Central Municipal Council Election 2015." *Marhaba Qatar*, 23 April 2015. Diakses pada 7 Agustus 2019 dari <http://marhaba.qa/qatar-central-municipal-council-election-2015/>.
- Robinson, James A., dan Danyel Reiche. "Postponing Democracy: Qatar's Modernization Attempts Fail Without Inclusive Political Institutions." *Annahar English*, 18 Desember 2014. Diakses pada 7 Agustus 2019 dari <http://en.annahar.com/article/199010-postponing-democracy-qatars-modernization-attempts-fail-without-inclusive>.

- “Saudi Protesters Fire-Bomb Intelligence Building in Qatif.” *Middle East Eye*, 11 Januari 2016. Diakses pada 2 September 2017 dari <http://www.middleeasteye.net/news/saudi-protesters-fire-bomb-intelligence-building-qatif-843608836>.
- “UAE: Investigate Threats Against ‘UAE 5.’” Diakses pada 23 Oktober 2017 dari <https://www.hrw.org/news/2011/11/25/uae-investigate-threats-against-uae-5>.
- “Women in Saudi Arabia to vote and Run in Elections,” *BBC News*, 25 September 2011. Diakses pada 7 Agustus 2019 dari <http://www.bbc.com/news/world-us-canada-15052030>.



BAB 4 POLITIK ISLAM DI NEGARA YANG TER- DAMPAK ARAB SPRING: TUNISIA, MESIR, DAN LIBYA

M. Hamdan Basyar

Peristiwa bakar diri Mohamed Bouazizi pada 17 Desember 2010 di Tunisia telah menyebabkan rentetan peristiwa besar di Timur Tengah. Bouazizi, seorang pedagang kaki lima, melakukan protes dengan membakar diri setelah penyitaan barang dagangannya dan pelecehan serta penghinaan yang dilakukan oleh seorang pejabat kota dan ajudannya. Bouazizi akhirnya meninggal dunia pada 4 Januari 2011.

Kematian Bouazizi telah memicu demonstrasi besar-besaran yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Tunisia, Zine El Abidine Ben Ali, pada 14 Januari 2011.¹ Demonstrasi besar-besaran itu mengawali apa yang disebut sebagai *Revolusi Jasmine*.² Kemudian, demonstrasi besar itu berimbas ke Mesir dan menyebabkan jatuhnya kekuasaan Presiden Mesir, Husni Mubarak. Kekuasaan yang telah lama digenggam oleh Mubarak akhirnya tumbang pada Februari

¹ Presiden Zine El Abidine Ben Ali berkuasa di Tunisia sejak 7 November 1987 sampai 14 Januari 2011.

² Revolusi Jasmine kemudian berkembang menjadi *Arab Spring* yang artinya mengharapkan adanya “musim semi” untuk demokratisasi di dunia Arab. Lihat Peter J. Schraeder, “Tunisia’s Jasmine Revolution and the *Arab Spring*: Implications for International Intervention,” *Orbis*, 56, no. 4 (Autumn 2012): 662–675.

2011.³ Turunnya Mubarak memberikan ruang pada perpolitikan Mesir untuk berubah. Gelombang demonstrasi juga berhasil menggulingkan kekuasaan Pemimpin Libya, Muammar Qadhafi. Dia berkuasa di Libya setelah melakukan kudeta pada 1969 sampai tahun 2011.⁴

Pada waktu itu dunia Arab memang menggeliat untuk melakukan perubahan. Pemimpin otoriter diprotes oleh rakyatnya sendiri. Mereka ingin kehidupan yang lebih bebas. Pergantian pemimpin adalah salah satu tuntutan mereka. Di tiga negara (Tunisia, Mesir, dan Libya), demonstrasi rakyat berhasil menjatuhkan rezim yang lama berkuasa. Gelombang protes yang disebut *Arab Spring* juga melanda Yaman, Bahrain, dan Suriah.

Bab ini membahas tiga negara (Tunisia, Mesir, dan Libya) yang kekuasaan rezim lamanya berubah akibat gelombang protes itu. Tulisan dimulai dengan penjelasan dinamika sosial-politik di tiga negara. Kemudian dilanjutkan pembahasan respons dan kebijakan pemerintah terhadap kekuatan politik Islam yang muncul di sana.

A. DINAMIKA SOSIAL-POLITIK PASCA-ARAB SPRING

Pasca Arab spring, Tunisia, Mesir dan Libya mengalami perubahan kondisi sosial politik yang cukup drastis. Namun ketiga negara tersebut memiliki kondisi sosial politik yang berbeda-beda tergantung pada dinamika politik antara rezim yang berkuasa, politik militer, tekanan gerakan sosial politik, intervensi dari luar negeri, dan hal-hal lain yang berpengaruh secara langsung terhadap perubahan politik secara domestik.

1. Kekuatan Politik Islam di Tunisia

³ Husni Mubarak dilantik menjadi Presiden Mesir pada 14 Oktober 1981 dan diturunkan pada 11 Februari 2011.

⁴ Qadhafi berkuasa di Libya sejak 1 September 1969 sampai 20 September 2011. Lihat Tesi Di-Laurea, "Libya Before and After Gaddafi: An International Law Analysis," (Tesis Magister di Universita Ca'Foscari 2012), hlm 6–7.

Setelah Ben Ali lengser, Tunisia melakukan reformasi politik. Pada Oktober 2011, Tunisia mengadakan pemilihan umum legislatif untuk mengisi 217 kursi di parlemen. Lembaga legislatif yang baru ini bertugas membuat konstitusi baru dan membentuk pemerintahan interim. Pemilihan umum tersebut diikuti oleh partai politik di Tunisia, yaitu *An-Nahdah*, *The Congress for the Republic*, *Ettakatol*, dan *Modernist Democratic Pole & Democratic Progressive Party*.

Pada pemilu parlemen 23 Oktober 2011, *An-Nahdah* memenangkan 41% kursi atau 89 dari 217 kursi di Majelis Konstituante Nasional (*National Constituent Assembly-NCA*), sementara *Congress for The Republic* (CPR) berada di posisi kedua dengan memenangkan 29 kursi (lihat Tabel 4.1).⁵ Dengan kemenangan itu, *An-Nahdah* membentuk pemerintahan berkoalisi dengan partai kiri-tengah *Congress for the Republic* dan *Ettakatol* (*Democratic Forum for Labor and Liberties*). Koalisi itu dikenal sebagai Koalisi Troika. Sidang NCA pada 12 Desember 2011 memilih Perdana Menteri (PM), Presiden, dan Ketua NCA. Hamadi Jebali (Sekjen Partai *An-Nahdah*) dipilih sebagai Perdana Menteri; Moncef Marzouki (pemimpin partai CPR/aktivis HAM) dipilih menjadi Presiden; dan Mustapha Ben Jafar dipilih menjadi Ketua NCA Tunisia.

Setelah itu, NCA menyusun draf konstitusi. Partai *An-Nahdah* tidak menyetujui dimasukkannya aturan syariat dalam konstitusi, tidak melarang penjualan minuman yang mengandung alkohol, bunga bank, serta memberikan jaminan bagi keberadaan kelompok sekuler, investor Barat, dan turis. Tampaknya, *An-Nahdah* mengikuti jejak partai yang berkuasa di Turki, yakni *Islamist Justice and Development*, tetapi menentang kelompok Salafi.⁶

⁵ The Carter Center, *National Constituent Assembly Elections in Tunisia* (Atlanta: The Carter Center, 2011), 52–54.

⁶ Lihat Indriana Kartini, “Demokrasi dan Kebangkitan Politik Islam di Tunisia,” dalam *Agama dan Demokrasi: Munculnya Kekuatan Politik Islam di Tunisia, Mesir, dan Libya*, ed. Indriana Kartini (Bandung: Pustaka Jaya, 2016), 86–87.

Tabel 4.1 Hasil Pemilu Tunisia, 23 Oktober 2011⁷

Political Party	Number of Seats	
Ennahdha	89	41 percent
Congress for the Republic (CPR)	29	13.4 percent
Popular Petition (Al Aridha Al Chaabia)	26	12 percent
Ettakatol	20	9.2 percent
Democratic Progressive Party (PDP)	16	7.4 percent
The Initiative (Al Moubadara)	5	2.3 percent
Democratic Modernist Pole (PDM)	5	2.3 percent
Afek Tounes	4	1.8 percent
Al Badil Althawri	3	1.4 percent
Democratic Socialist Movement (MDS)	2	0.9 percent
Movement of the People (Haraket Achaab)	2	0.9 percent
16 independent lists	1 each	0.5 percent
Total	217	

Pascapemilu parlemen Oktober 2011, Tunisia memulai transisi demokrasi, meskipun belum mencapai konsolidasi demokrasi. Dalam hal ini, Tunisia dapat dikatakan telah mencapai transisi demokrasi dan mulai memasuki tahap yang lebih menantang, yakni konsolidasi demokrasi. Untuk mencapai tahapan itu, dibutuhkan berbagai persyaratan. *Pertama*, “perjanjian” untuk menghasilkan pemerintahan yang terpilih melalui pemilu. *Kedua*, hasil langsung dari pemilu yang bebas. *Ketiga*, pemerintah secara *de facto* memiliki otoritas untuk mengeluarkan kebijakan baru. *Keempat*, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dipilih melalui demokrasi yang baru sehingga tidak perlu berbagi kekuasaan dengan lembaga lain secara *de jure*, seperti militer dan pemimpin agama.⁸ Demokrasi harus dijaga dan dikawal oleh konstitusi dengan proteksi terhadap tirani mayoritas, lembaga yudisial yang independen, *civil society* yang kritis, dan kebebasan pers.

⁷ The Carter Center, *National Constituent*, 54

⁸ Alfred Stepan, “Tunisia’s Transition and the Twin Tolerations,” *Journal of Democracy* 23, no. 2 (April 2012): 90.

Meskipun sudah ada pemilu yang terbuka dan diawasi oleh dunia internasional, pemerintah hasil pemilu tidak cukup stabil. Berbagai permasalahan politik domestik Tunisia harus dihadapi pemerintahan di bawah Partai *An-Nahdah*, seperti demonstrasi dan pembunuhan tokoh politik yang antikelompok Islam, yakni Chokri Belaid, pada awal Februari 2013. Belaid tewas akibat ditembak kepala dan lehernya saat berada di Kota Tunis. Kejadian itu tercatat sebagai peristiwa pembunuhan bermotif politik pertama sejak gelombang perubahan di sejumlah negara Arab pada Januari 2011.

Meninggalnya Chokri Belaid menimbulkan kemarahan warga di seluruh Tunisia. Ribuan orang menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah tempat, salah satunya di depan kantor kementerian dalam negeri Tunisia. Dalam aksinya, para pengunjuk rasa mendesak pemerintah untuk mundur dan menyerukan dilakukannya revolusi baru. Untuk mengamankan unjuk rasa, pemerintah Tunisia mengirimkan tentaranya, salah satunya ke Kota Sidi Bouzid, tempat lahirnya revolusi Arab, Januari 2011.

Menanggapi pembunuhan itu, PM Tunisia, Hamadi Jebali, mengatakan, “Ini merupakan tindak kejahatan, tindak terorisme tidak hanya kepada Belaid, tetapi juga kepada seluruh Tunisia.”⁹ Namun, pernyataan itu belum mampu meredam kemarahan kelompok oposisi. Kelompok oposisi Front Popular menyerukan aksi mogok nasional pada Kamis, 7 Februari 2013. Akhirnya, Perdana Menteri Jebali mengumumkan pembentukan pemerintahan baru yang terdiri atas kelompok teknokrat non-partisan untuk menjalankan roda pemerintahan hingga digelar pemilihan umum.¹⁰

Belum lama berselang, seorang tokoh oposisi Tunisia terbunuh. Mohamed Brahmi, pemimpin Partai Gerakan Rakyat dan anggota Majelis Nasional, ditembak mati di luar rumahnya di Tunis, 25 Juli

⁹ “PM Tunisia Bentuk Pemerintahan Baru,” *BBC Indonesia*, 7 Februari 2013, diakses pada 15 Oktober 2018 dari https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/02/130207_tunisi_belaid_pemerintahan_baru_new_government.shtml.

¹⁰ “PM Tunisia.”

2013. Saat itu, ia bersama anggota Majelis Nasional lainnya tengah merancang konstitusi Tunisia yang baru.¹¹ Pengaruh politik Brahmi memang tidak sebesar Belaid, tetapi dia merupakan politisi beraliran kiri yang sering mengkritik pemerintah pimpinan Partai *An-Nahdah*.

Dua pembunuhan tokoh oposisi itu telah melemahkan posisi Partai *An-Nahdah* sebagai pemegang kekuasaan. Mereka dianggap gagal menjaga keamanan di Tunisia dan mengawal transisi demokrasi di Tunisia. *An-Nahdah* banyak mendapatkan penentangan. Protes anti-pemerintah pecah di berbagai daerah di Tunisia. Para pemrotes menuntut *An-Nahdah* mundur dari pemerintahan karena dianggap tidak mampu mengatasi berbagai permasalahan di Tunisia.

Ada beberapa anggota parlemen yang mengundurkan diri dan ikut berdemonstrasi di depan NCA. Berbagai kejadian itu telah memperkuat protes kaum sekuler yang menuduh *An-Nahdah* memasukkan agenda-agenda Islamis ke dalam pemerintahan Tunisia. Sebagai contoh, protes kaum sekuler draf konstitusi menyebutkan bahwa status istri terhadap suami adalah saling melengkapi (*complementary*). Namun, istilah ini kemudian diganti menjadi sejajar (*equal*) setelah ada protes dari kelompok feminis.

Polarisasi politik di Tunisia terus terjadi. Hal itu menjadi kendala bagi konsolidasi politik di Tunisia. Selain kondisi politik yang bergejolak, janji perbaikan ekonomi oleh *An-Nahdah* pun belum terwujud. Pertumbuhan ekonomi Tunisia berjalan lambat. Sektor pariwisata yang menjadi andalan Tunisia belum pulih. Tingkat pengangguran secara umum masih berada di level 17%, bahkan di daerah-daerah perdesaan 30% lulusan perguruan tinggi tidak mendapatkan pekerjaan.¹² Dalam kondisi seperti itu, terjadi pem-

¹¹ Lihat "Tokoh oposisi Tunisia Ditembak Mati," *BBC Indonesia*, 25 Juli 2013, diakses pada 15 Oktober 2018 dari https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/07/130725_tunisia_pembunuhan.

¹² F.T. Tozeur, "Tunisia's Economy Still struggling," *The Economist*, 19 Maret 2013, diakses pada 12 Maret 2019 dari <http://www.economist.com/blogs/pomegranate/2013/03/tunisiass-economy>.

bakaran diri kembali di Tunisia pada 12 Maret 2013. Saat itu, Adel Khazri, seorang pedagang rokok dari daerah miskin Jendouba, membakar dirinya di Kota Tunis, ibu kota Tunisia. Dia frustrasi karena adanya larangan pemerintah untuk berjualan di jalan dan adanya penangkapan terhadap pedagang asongan oleh polisi.¹³

Menghadapi berbagai persoalan yang cukup rumit itu, akhirnya pemerintah koalisi yang dipimpin oleh *An-Nahdah* menyetujui tuntutan untuk mundur dari kekuasaan pada 28 September 2013. Keputusan itu diambil untuk menghindari kekacauan situasi politik di Tunisia. Dalam waktu tiga pekan, *An-Nahdah* mengalihkan kekuasaan mereka ke badan transisi independen. Badan inilah yang kemudian menjadwalkan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.

Mundurinya *An-Nahdah* sebagai pimpinan koalisi pemerintahan merupakan tindakan cepat tanggap atas situasi politik di Tunisia saat itu. Tampaknya mereka belajar dari kegagalan Ikhwanul Muslimin di Mesir. *An-Nahdah* juga menyatakan bersedia untuk mundur dari pemerintahan sesuai dengan usulan jalan tengah dari Uni Serikat Buruh Tunisia (UGTT), *employer's federation*, liga HAM, dan organisasi advokat untuk mengakhiri krisis politik di Tunisia.¹⁴

Usulan jalan tengah tersebut terdiri dari lima hal.¹⁵ *Pertama*, dialog nasional untuk mengakhiri krisis politik di Tunisia. *Kedua*, menunjuk figur independen untuk memimpin pemerintahan Tunisia (sepekan setelah dimulainya dialog nasional). *Ketiga*, figur independen tersebut diberi tenggat waktu dua pekan untuk membentuk pemerintahan teknokrat. *Keempat*, pemerintahan sementara yang dipimpin *An-Nahdah* bersamaan dengan pembentukan pemerintahan baru pada akhir pekan ketiga. *Kelima*, Majelis Konstituante

¹³ "Tunisian Street Vendor Dies Morning After Self-Immolation," *Aljazeera*, 13 Maret 2013, diakses pada 29 Oktober 2013 dari <https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/03/201331385433367799.html>. Ketika melakukan penelitian di Tunisia, penulis juga melihat penertiban pedagang asongan di pasar.

¹⁴ Lihat "Tunisia, Ennahda Mundur untuk Akhiri Krisis Politik," *Kompas*, 30 September 2013, 8.

¹⁵ "Tunisia, Ennahda Mundur."

menyusun konstitusi, kembali beraktivitas, dan harus menyelesaikan tugasnya dalam empat pekan. Kesediaan *An-Nahdah* menerima usulan jalan tengah tersebut karena adanya pertemuan dari pihak Amerika Serikat dan pemimpin *An-Nahdah* (Rachid Ghannouchi), dan sekretaris jenderal UGTT (Honice Abassi), dan pemimpin kubu oposisi Beji Caid Edebsi, pada pekan ketiga September 2013.

Mundurinya *An-Nahdah* dari pemerintahan bisa dikatakan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya spiral kekerasan seperti yang terjadi di Mesir. Para pemimpin *An-Nahdah* memiliki kekhawatiran akan mengalami nasib yang sama dengan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Penggulingan Presiden Mursi dijadikan pelajaran oleh mereka. Kekerasan yang diikuti oleh pelarangan Ikhwanul Muslimin oleh pengadilan Mesir menjadi peringatan bagi pemimpin *An-Nahdah*. Hal ini pernah diutarakan oleh pemimpin Annadah, Rachid Ghannouchi, dalam pidatonya yang memperingatkan bahwa “peristiwa yang sama” dapat saja terjadi di Tunisia. Namun, beberapa pendukung *An-Nahdah* meyakini bahwa kesediaan *An-Nahdah* menyerahkan tampuk kepemimpinan hanyalah taktik politik mereka. Dalam hal ini, *An-Nahdah* tidak sepenuhnya menyerahkan kekuasaan yang telah diraih.¹⁶

Pada 2014, dilakukan pemilu parlemen dan presiden di Tunisia. Pemilu anggota parlemen diselenggarakan pada 26 Oktober 2014. Pemilu itu berjalan dengan baik. *The Carter Center* yang ikut melakukan pemantauan menganggap pemilu legislatif di Tunisia telah berjalan dengan “*very good*” atau “*reasonable*.”¹⁷

Berdasarkan hasil pemilu legislatif, Partai Nida Tunis mendapatkan 86 kursi (lihat Tabel 4.2). Partai *An-Nahdah* mengalami penurunan dengan menempati posisi kedua (69 kursi).

¹⁶ “Tunisia’s Ennahda Withdraws—But Why?” *Deutsche Welle*, 2 Oktober 2013, diakses pada 10 Oktober 2013 dari <http://www.dw.de/tunisi-as-ennahda-withdraws-but-why/a-17130859>.

¹⁷ “The Overall Implementation of Procedures was Assessed as “Very Good” or “Reasonable” in 99 Percent of Observations, Except for a Few Minor Irregularities.” Lihat *The Carter Center, Legislative and Presidential Elections in Tunisia: Final Report* (Atlanta: The Carter Center, 2014), 51–52.

Tabel 4.2 Hasil Pemilu Tunisia, 26 Oktober 2014¹⁸

Candidate list	# of votes	% of overall votes	# of seats	% of seats
Nidaa Tounes (Tunisia's Call)	1,279,941	37.56%	86	39%
Ennahdha (Renaissance Movement)	947,034	27.79%	69	31%
Free Patriotic Union (UPL)	137,110	4.02%	16	7%
Jabha Chaabia (Popular Front)	124,654	3.66%	15	6%
Afek Tounes (Tunisia's Horizons)	102,916	3.02%	8	3%
Congress for the Republic (CPR)	72,942	2.14%	4	1%
Democratic Current	65,792	1.93%	3	1%
Al Joumhouri (Republican Patty)	49,965	1.47%	1	0.4%
People's Movement	45,799	1.34%	3	1%
Al Moubadara (The Initiative)/National Destourian Initiative	45,086	1.32%	3	1%
Democratic Alliance	43,371	1.27%	1	0.4%
Current of Love	40,924	1.20%	2	0.9%
Union for Tunisia (UPT)	27,802	0.82%	0	0%
Ettakol (The Front)	24,592	0.72%	0	0%
Wafa (Loyalty Movement)	23,768	0.70%	0	0%
Al Amen (Safety Party)	7,926	0.23%	0	0%
Party of the Voice of the Tunisian People	7,849	0.23%	0	0%
National Salvation Front	5,977	0.18%	1	0.4%
Movement of Socialist Democrats (MDS)	5,792	0.17%	1	0.4%
List of the Rehabilitation	5,236	-	1	0.4%
List for the Glory of the Djerid	5,111	-	1	0.4%
Farmers' Voice Party	3,515	0.10%	1	0.4%
List of the Call of Tunisians Abroad	1,814	0.05%	1	0.4%
Other lists	103,408	3.05%	0	0%

Menurunnya popularitas *An-Nahdah* disebabkan oleh adanya gesekan kepentingan ketika partai itu berusaha melakukan perubahan di Tunisia. *An-Nahdah* memberikan kebebasan kepada umat Muslim untuk menjalankan ajaran agamanya. Hal itu menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat Tunisia. Di satu sisi, terdapat Muslimah yang merasa senang karena diperbolehkan memakai jilbab dan niqab. Di sisi lain, ada perempuan Tunisia merasakan “tertekan”

¹⁸ National Democratic Institute (NDI), *Final Report on The 2014 Legislative and Presidential Elections in Tunisia*, 53.

dengan kondisi tersebut. Kebebasan yang diberikan *An-Nahdah* ketika berkuasa juga membuat nyaman dan senang sebagian penganut Islam. Mereka memperoleh kebebasan untuk menumbuhkan jenggot dan memakai pakaian agamis serta mengikuti salat berjamaah. Namun, terdapat anak muda yang merasa terganggu dengan teguran dari kaum konservatif untuk berhenti minum alkohol dan berjudi.¹⁹ Kondisi kehidupan sehari-hari itu menjadi sumber ketegangan di masyarakat. Partai *An-Nahdah* mengalami tekanan dari berbagai pihak.²⁰ Pemilu legislatif 2014 menunjukkan masyarakat Tunisia cenderung memilih partai yang tidak berbasis agama. Partai Nida Tunis yang anti-Islam memperoleh kursi terbanyak di parlemen Tunisia, sementara *An-Nahdah* turun ke posisi kedua.²¹

Pemilu presiden Tunisia dilaksanakan dalam dua putaran. Pada putaran pertama yang dilakukan pada 23 November 2014, ada 27 kandidat yang ikut berlaga dalam pilpres. Karena pada pemilu presiden putaran pertama belum ada kandidat yang memperoleh suara lebih dari 50% pemilih, diadakan pemilu putaran kedua pada 9 Desember 2014. Pada putaran kedua itu, rakyat Tunisia memilih dua kandidat presiden dengan perolehan suara terbanyak pada putaran pertama, yaitu Beji Caid Essebsi (39,46%) dan Mohamed Moncef Marzouki (33,43%). Berdasarkan hasil pemilu presiden Tunisia putaran kedua, Beji Caid Essebsi memenangkan pemilu dengan memperoleh 55,68% suara sah.²² Dengan hasil itu, Essebsi

¹⁹ “Tunisia: Can Niqabs and Bikinis Live Side-by-side?” *BBC*, 27 Maret 2013, diakses pada 12 Maret 2019 dari <http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-21925753>.

²⁰ Pemimpin *An-Nahdah*, Rachid Ghannouchi, mengakui bahwa memperjuangkan Islam dalam dunia politik itu tidak mudah. Ada risiko dan penentangan dari kalangan lain. Menurut Ghannouchi, “Terlalu berisiko apabila kami menggunakan identitas asli kami di sini sebagai partai politik ... terlalu banyak yang meminggirkan Islam dalam dunia politik.” Wawancara dengan Rachid Ghannouchi di Tunis, pada 19 April 2018.

²¹ Lihat “Tunisia Election Results: Nida Tunis Wins Most Seats, Sidelining Islamists,” *The Guardian*, 30 Oktober 2014, diakses pada 17 Oktober 2018 dari <https://www.theguardian.com/world/2014/oct/30/tunisia-election-results-nida-tunis-wins-most-seats-sidelining-islamists>.

²² Lihat The Carter Center, *Legislative and Presidential Elections in Tunisia*, 164.

menjadi Presiden Tunisia pertama yang dipilih secara langsung pasca-*Arab Spring*.

Tunisia terus menjalankan program reformasi politiknya. Pada 2018, mereka melakukan pemilihan perwakilan daerah yang dilaksanakan pada Mei 2018. Penulis sempat melihat kampanye partai politik menjelang pemilihan tersebut.²³ Dalam wawancara dengan tim peneliti, pemimpin *An-Nahdah*, Rachid Ghannouchi, memperkirakan partainya akan memenangkan pemilu lokal tersebut.²⁴

2. Kekuatan Politik Islam di Mesir

Mesir mengalami dinamika politik yang lebih ruwet pasca-*Arab Spring*. Demokratisasi yang diharapkan ada setelah lengsernya Presiden Husni Mubarak, tampaknya tidak begitu terwujud. Kudeta militer Mesir pada 3 Juli 2013 menjadi potret buram demokratisasi di negara piramid itu.

Demokratisasi di Mesir telah menghantarkan kelompok Islam melaju ke puncak kekuasaan. Mereka berhasil menguasai parlemen dan kursi kepresidenan. Keberhasilan kelompok Islam tentunya menghilangkan atau mengurangi kekuasaan militer yang telah berlangsung lama di Mesir.

Kalangan militer Mesir tampaknya tidak rela bila peran politik mereka disingkirkan. Hal itu dapat dimaklumi karena mereka telah menikmati kehidupan itu sejak lama. Kudeta militer terhadap kekuasaan Raja Farouk pada 1952 menjadi awal keterlibatan militer dalam dunia politik. Sejak saat itu, penguasa Mesir selalu dari kalangan militer. Presiden Mohammad Naguib, Presiden Abdel Nasser, Presiden Anwar Saddat, dan Presiden Husni Mubarak adalah tokoh-tokoh militer yang menjalankan kekuasaan di Mesir sejak 1952 sampai 2011. Tidak hanya itu, kalangan elite militer mempunyai kedudukan yang tinggi dan terhormat dalam strata kehidupan politik Mesir.

²³ Ketika melakukan penelitian di Tunisia (April 2018), penulis melihat langsung kampanye Partai Nida Tunis di Kota Tunis. Penulis juga melihat arak-arakan mobil kampanye di wilayah Provinsi Sousse dan Zaghouan.

²⁴ Rachid Ghannouchi, wawancara di Tunis, pada 19 April 2018.

Hal itu, misalnya, tecermin dengan adanya Dewan Agung Militer (*Supreme Council of the Armed Forces-SCAF*).

Tumbangnya kekuasaan Presiden Husni Mubarak pada 11 Februari 2011 tidak mengakhiri kekuasaan militer dalam pemerintahan Mesir. Buktinya, kekuasaan berikutnya justru di tangan SCAF. Untuk memperkuat posisinya, SCAF membuat amandemen terbatas pada Konstitusi Mesir pada 30 Maret 2011.

Desakan nasional dan internasional akan pentingnya demokrasi di Mesir memaksa militer memberikan peluang kepada elite sipil untuk meraih kekuasaan melalui pemilu. Oleh karena itu, ada pemilu parlemen dan dilanjutkan dengan pemilu presiden. Pada waktu itu, Parlemen Mesir menganut dua kamar (*bicameral system*), yaitu *Majlis as-Sa'ab* (Dewan Perwakilan) dan *Majlis as-Syura* (Dewan Syura). Untuk kursi di dua dewan tersebut, ada sistem yang digunakan, yaitu *Majoritarian System* (yang diisi oleh calon independen) dan *Proportional Representation System* (yang diisi oleh calon dari partai politik).

Total jumlah anggota Dewan Perwakilan yang dipilih adalah 498 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 166 kursi untuk calon independen dan 332 kursi untuk calon dari partai politik. Sementara itu, jumlah total anggota Dewan Syura yang dipilih adalah 180 anggota. Dari jumlah itu, sebanyak 60 kursi untuk calon independen, dan 120 kursi untuk calon partai politik.²⁵

Pada pemilu parlemen yang menang adalah Partai Kebebasan dan Keadilan (*Freedom and Justice Party-FJP*) yang berafiliasi pada gerakan Ikhwanul Muslimin, disusul oleh kelompok Salafi dengan Partai Nour. Pemilu parlemen itu diselenggarakan dalam tiga tahap, yaitu pada 28 November 2011, 14 Desember 2011, dan 3 Januari 2012 (sekitar enam minggu). Masyarakat Mesir pada waktu itu memilih 498 anggota parlemen. Sepuluh kursi anggota parlemen lainnya ditunjuk oleh penguasa militer. Dari 498 anggota yang dipilih tersebut, dua pertiga dipilih dari daftar calon partai politik, dan

²⁵ The Carter Center, *Final Report of the Carter Center Mission to Witness the 2011–2012 Parliamentary Elections in Egypt* (Atlanta: The Carter Center, 2012), 24.

sepertiga dari calon independen. Secara lengkap hasil pemilu Dewan Perwakilan dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Hasil Pemilu *Majlis as-Sa'ab* (Dewan Perwakilan) Mesir (2011–2012)²⁶

Party	Percent of votes	PR seats	Individual seats	Total seats
Democratic Alliance for Egypt (led by the Freedom and Justice Party)	45,2	124	101	225
Islamist Bloc (led by the Al-Nour Party)	25,0	93	32	125
New Wafd Party	8,2	39	2	41
Egyptian Bloc	6,8	33	1	34
Reform and Development Party	2,0	9	1	10
Al Wasat Party	1,8	9	0	9
Revolution Continues Alliance	1,6	8	0	8
Egypt National Party	1,0	4	1	5
Egyptian Citizen Party	0,8	3	1	4
Union Party	0,6	3	0	3
Freedom Party	0,6	2	1	3
Al-Adl Party	0,4	0	2	2
Democratic Peace Party	0,4	2	0	2
Arab Egyptian Union Party	0,2	1	0	1
Nasserite Party	0,2	1	0	1
Independents	5,0	0	25	25
Total	100,0	332	166	498

Selain memilih anggota *Majlis as-Sa'ab*, rakyat Mesir juga memilih anggota *Majlis as-Syura* yang merupakan Majelis Tinggi dalam parlemen Mesir. Pemilihan Dewan Syura berlangsung dalam dua tahap yang dimulai pada 29 Januari 2012 dan berakhir pada 22 Februari 2012. Dari 264 kursi di Dewan Syura, sebanyak 180 dipilih dalam pemilu tersebut, sedangkan sisanya akan ditunjuk oleh presiden berikutnya setelah pemilihan presiden diadakan.²⁷

²⁶ “Pemilu legislatif 2011” diakses pada 25 Oktober 2013 dari <http://www.elections2011.eg/index.php/results>.

²⁷ Presiden Mursi tidak sempat memilih sisa anggota Dewan Syura karena sebelum dirinya dilantik menjadi Presiden Mesir, hasil pemilu telah dibekukan SCAF.

Hasil pemilu Dewan Syura, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.4 menunjukkan bahwa kekuatan Islamis menguasai Mesir.

Tabel 4.4 Hasil Pemilu *Majlis as-Syura* (Dewan Syura) Mesir (2011–2012)²⁸

Party	Percent of votes	PR seats	Individual seats	Total seats
Democratic Alliance for Egypt (led by the Freedom and Justice Party)	58,4	57	48	105
Islamist Bloc (led by the Al-Nour Party)	25,0	38	7	45
New Wafd Party	7,8	14	0	14
Egyptian Bloc	4,4	8	0	8
Freedom Party	1,1	2	0	2
Democratic Peace Party	1,1	1	1	2
Independents	2,2	0	4	4
Total	100,0	120	60	180

Kemenangan partai Islam cukup mengagetkan kalangan elite Mesir yang cenderung liberal dan sekuler. Selain elite Mesir, kalangan militer juga mengkhawatirkan kemenangan tersebut. Sudah puluhan kelompok IM ditekan dalam kehidupan politik Mesir dan tokoh-tokoh mereka disingkirkan serta dipenjara. Namun, geliat IM itu terus bangun. Jadi, ketika kebebasan ada di Mesir, mereka berusaha menyeruak ke dalam kancah politik. Tampaknya kemenangan IM lewat Partai Kebebasan dan Keadilan hanyalah menunggu waktu saja. Namun, kemenangan kelompok IM mendapatkan tantangan dari SCAF dan kelompok liberal. Kalangan militer berusaha mencari peluang untuk tetap tampil dalam dunia politik. Mereka merasa tidak cukup sebagai *watch dog* dan ingin menentukan jalannya kehidupan politik Mesir.

Kemudian, terjadi “adu kekuatan” antara Presiden dan kelompok militer. Lihat “Results of Shura Council Elections” diakses pada 12 April 2012 dari <http://egyptelections.carnegieendowment.org/2012/02/29/results-of-shura-council-elections>.

²⁸ “Pemilu legislative 2011”.

Di beberapa negara, pemilu digunakan sebagai “terminal” bagi pertarungan kepentingan elite. Artinya, setelah pemilu selesai, mereka akan berusaha menjalankan kehidupan sehari-hari sampai dengan pemilu berikutnya dan mereka kembali bertarung untuk memperrebutkan pemilih. Rupanya kondisi tersebut tidak terjadi di Mesir. Seusai pemilu, para elite Mesir kembali bertarung di tempat lain. Tidak lama setelah pemilu parlemen, ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi Mesir bahwa UU pemilu yang memperbolehkan partai politik dapat mencalonkan anggotanya lewat jalur independen dianggap inkonstitusional. Dengan demikian, anggota parlemen hasil pemilu dianggap tidak sah dan harus dibubarkan. Jika, tidak ada lagi parlemen hasil pemilu yang telah dimenangkan oleh kelompok IM.

Meskipun parlemen hasil pemilu dibubarkan, Mahkamah Konstitusi Mesir menyatakan bahwa keputusan yang telah dibuat oleh parlemen dianggap sah dan harus dijalankan. Dengan begitu, proses pencalonan presiden dan pembentukan Dewan Konstituante yang beranggotakan 100 orang dianggap sah. Tugas Dewan Konstituante adalah merancang konstitusi baru dalam jangka waktu enam bulan.

Pertarungan politik terjadi di berbagai medan. Sebelum Presiden terpilih, Mohammad Mursi, resmi dilantik, CPR mengeluarkan dekrit pada 17 Juni 2012 yang memberikan kekuasaan legislatif bagi SCAF. Alasannya adalah mengisi kekuasaan legislatif akibat pembubaran parlemen hasil pemilu. Dengan kekuasaan itu, SCAF dapat mengangkat Dewan Konstituante baru yang sesuai dengan kepentingan mereka.

Presiden Mursi, yang resmi dilantik pada 30 Juni 2012, mengeluarkan dekrit pada 8 Juli 2012 untuk memulihkan parlemen yang telah dibekukan. Namun, pada hari berikutnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa tidak ada banding untuk keputusan pembubaran Majelis Rakyat. Pada 17 Juli, mereka harus sudah dibubarkan.

Presiden Mursi berusaha menunjukkan kekuasaannya dengan mengeluarkan dekrit pada 12 Agustus 2012. Dekrit yang berisi

4 pasal itu dikeluarkan untuk “menjinakkan” kalangan militer.²⁹ Kekuasaan legislatif yang ada di tangan SCAF sejak 17 Juni pun dibatalkan. Mursi juga mengganti Kepala SCAF, Jenderal Tantowi. Dengan demikian, kalangan militer relatif terkontrol dalam kekuasaannya.

Namun, Presiden Mursi masih belum merasa aman dengan nasib Dewan Konstituante yang tengah menyusun konstitusi baru karena lembaga itu masih dapat dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi dan anggotanya dapat saja dinyatakan inkonstitusional. Oleh karena itu, Mursi mengeluarkan dekrit 22 November 2012. Dekrit yang berisi 7 pasal ini memberikan kekuasaan yang hampir tak terbatas kepada Mursi sendiri.³⁰ Dekrit itu ternyata memicu protes rakyat. Kelompok liberal yang tadinya sudah “agak diam” kembali ikut bersuara. Lapangan Tahrir digunakan sebagai tempat demonstrasi menentang dekrit Presiden Mursi. Para pendemo menuntut pencabutan dekrit yang dianggap otoriter itu.

Seminggu setelah dekrit dikeluarkan, Dewan Konstituante menyepakati draf konstitusi baru tanpa kehadiran kelompok liberal pada 30 November 2012. Kemudian Presiden Mursi memutuskan untuk mengadakan referendum terhadap draf konstitusi tersebut pada 15 Desember 2012. Hasilnya, rakyat menyetujui draf konstitusi menjadi konstitusi baru Mesir.

Rupanya keputusan Mursi untuk referendum tidak menyurutkan tekad kaum pendemo. Mereka pun menolak referendum. Untuk meredakan gejolak politik itu, Presiden Mursi mengadakan dialog dengan tokoh-tokoh nasional pada 9 Desember 2012. Setelah lebih dari 10 jam bertukar pikiran, Mursi mengeluarkan dekrit lagi yang antara lain berisi pencabutan dekrit sebelumnya.

²⁹ Isi lengkap Dekrit Presiden tersebut dapat dilihat pada “English Text of President Morsi’s New Egypt Constitutional Declaration,” *Abram Online*, 12 Agustus 2012, diakses pada 25 November 2012 dari <http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/0/50248/Egypt/0/English-text-of-President-Morsis-new-Egypt-Constitut.aspx>.

³⁰ “English Text of Morsi’s.”

Walaupun dekrit sudah dicabut, protes terhadap Mursi terus berlanjut. Memasuki tahun 2013, kaum oposisi terus berusaha menggoyang kekuasaan Presiden Mursi. Peringatan setahun kekuasaan Presiden Mursi dijadikan momentum oleh kaum oposisi untuk melakukan perlawanan terhadap penguasa. Sebelum peringatan 30 Juni, muncul kelompok yang menyebut dirinya “Tamarod” yang berarti pembangkangan. Kelompok itu beserta oposisi lain menggalang kekuatan untuk melawan Mursi.

Lapangan Tahrir kembali dijadikan tempat demo anti-penguasa, tetapi di tempat lain ada demo pro-penguasa. Masing-masing kelompok berusaha meyakinkan dunia bahwa mereka benar dan mewakili masyarakat Mesir. Kalangan militer melihat kondisi pro dan kontra tersebut sebagai pintu masuk kembali ke dunia politik Mesir.

Selain keadaan politik yang begitu riuh rendah, masalah ekonomi Mesir yang terpuruk juga ikut membebani kekuasaan Presiden Mursi. Kalangan militer menganggap Mursi tidak sanggup lagi menanggung kondisi tersebut. Oleh karena itu, pada 1 Juli 2013 pukul 16.30 (waktu Mesir), militer memberikan ultimatum kepada Presiden Mursi untuk menyelesaikan masalah politik Mesir dalam batas 48 jam. Militer mengancam akan mengambil langkah sendiri bila Mursi tidak mengikuti keinginan mereka. Presiden Mursi, yang merasa dipilih oleh rakyat dan mempunyai legitimasi kekuasaan yang kuat, menolak ultimatum militer tersebut.

Mendapatkan penolakan Presiden Mursi, militer melaksanakan ancamannya dengan pengambilalihan kekuasaan pada 3 Juli 2013 malam. Kudeta militer tak berdarah itu telah mengakhiri kekuasaan Presiden Mursi yang dipilih secara demokrasi. Kemudian, Mursi beserta aparatnya menjadi tahanan militer.

Apa pun nama dan alasannya, kudeta adalah bentuk pengingkaran dari proses demokratisasi yang tengah tumbuh di alam kebebasan Mesir pasca-Revolusi 11 Februari 2011. Militer telah merampas proses demokrasi dan menghilangkan kesempatan masyarakat Mesir untuk mengekspresikan kebebasan melalui demokrasi. Masyarakat

Mesir kembali ke titik nol dan mereka mulai demokrasi lagi dari awal.

Di negara yang mengikuti aturan berdemokrasi, semestinya semua kalangan menjadi pengawal terselenggaranya demokratisasi. Tidak seharusnya mereka merampas, apalagi membunuh demokrasi. Ironinya, negara-negara yang mengagungkan demokrasi tidak ikut membantu masyarakat Mesir. Mereka membiarkan militer membeberangus demokrasi di Mesir.

Setelah militer kembali menguasai politik Mesir, partisipasi masyarakat dalam pemilu diatur sesuai kepentingan militer. Konstitusi Mesir 2014 menguntungkan kelompok militer. Hal itu dapat dimaklumi karena merekalah yang telah memenangkan perpolitikan di Mesir, dengan mengambil alih kekuasaan dari Presiden Mursi. Dalam pemilihan Presiden tahun 2014, yang menang adalah Jenderal Abdul Fattah al-Sisi, tokoh militer yang melakukan kudeta. Dengan terpilihnya Jenderal Al-Sisi menjadi Presiden pada 2014, penguasa Mesir kembali berasal dari kalangan militer.³¹

Pertarungan kandidat presiden dalam pemilu 2014 tidak seketat pilpres 2012. Pada 2012, pilpres sampai terjadi dua putaran karena pada putaran pertama tidak ada kandidat yang memperoleh mayoritas (50% lebih). Pada pilpres 2014, hanya ada satu putaran karena hanya diikuti oleh dua kandidat presiden, dan salah satunya memperoleh suara lebih dari 90%.

Jika melihat dua kandidat pada pilpres 2014, sudah terlihat siapa yang bakal memenangkan pertarungan sejak pencalonan. Jenderal Al-Sisi memimpin perolehan suara karena dialah tokoh yang dianggap dapat “menyelamatkan” Mesir dari konflik politik yang berkepanjangan sejak Ikhwanul Muslimin menguasai panggung politik Mesir. Al-Sisi dipandang sebagai tokoh yang dapat mengawal masyarakat Mesir menuju kehidupan yang lebih baik. Sementara itu, kandidat lain, Hamdeen Sabahi, adalah tokoh dari

³¹ Lihat M. Hamdan Basyar, *Pertarungan dalam Berdemokrasi: Politik di Mesir, Turki, dan Israel* (Jakarta: UI Press, 2015), 11.

kelompok Nasseris.³² Dia juga ikut dalam kompetisi pilpres 2012, tetapi tidak masuk dalam putaran kedua. Kaum Nasseris di Mesir sudah berkurang sejak masa Presiden Anwar Sadat dan Presiden Hosni Mubarak. Dengan kondisi tersebut, Al-Sisi dengan mudah memenangkan kursi presiden pada 2014.

Ketika masa kampanye, kedua kandidat mendiskusikan berbagai isu yang berkembang dalam masyarakat Mesir. Salah satu yang mereka tanggapi adalah nasib Ikhwanul Muslimin (IM). Mengenai kelompok tersebut, Al-Sisi secara tegas mengatakan, “*finish off the Muslim Brotherhood in Egypt.*” Dia beralasan bahwa Konstitusi 2014 melarang adanya partai yang berdasarkan pada agama. Al-Sisi menjelaskan, “*The constitution obliges me to disband religion-based parties.*”³³ Sementara itu, Sabahi tidak akan melarang atau membeberangus kelompok Islam, asalkan mereka dapat hidup secara damai. Jadi, tidak ada kerusuhan atau konflik yang mengganggu kehidupan masyarakat luas.

Dengan kemenangan Al-Sisi dalam pemilu Presiden Mesir 2014, IM akan tamat. IM sendiri sudah kembali dilarang di Mesir pada Desember 2013 karena dianggap sebagai kelompok teroris. Lantas, apakah politik Islam di Mesir selesai? Tentunya tidak demikian. Pada 2014, masih ada partai politik yang berbasis agama, yakni Partai Nour yang membawa suara kaum Salafi. Permasalahannya adalah sampai kapan Partai Nour diperkenankan berkibrah di Mesir, mengingat Konstitusi 2014 pasal 74 dengan tegas melarang adanya partai politik yang berdasarkan pada agama.

Kemenangan Al-Sisi menandai kembalinya kalangan militer dalam dunia politik Mesir. Artinya, secara politik kenegaraan, posisi militer Mesir masih kuat dan dominan, terlebih pada 2018 Al-Sisi

³² Kelompok Nasseris adalah penganut ajaran Gamal Abdel Nasser yang menginginkan adanya persatuan di kalangan dunia Arab dengan menggunakan ideologi nasionalis-sosialis.

³³ Lihat Zeinab El-Gundy, “El-Sisi and Sabahi Speak on Key Issues: A Virtual Debate,” *Abram Online*, 23 Mei 2014, diakses pada 26 Mei 2014 dari <http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/101501/Egypt/Politics-/ElSisi-and-Sabahi-speak-on-key-issues-A-virtual-de.aspx>.

kembali memenangkan pemilu presiden Mesir. Pemungutan suara tiga hari yang dimulai pada 26 Maret 2018 itu telah memberikan legitimasi ulang pada petahana Al-Sisi. Kemenangan suaranya cukup telak, yakni 92% suara. Lawannya, Moussa Mustafa Moussa, hanya dapat suara yang minim. Media lokal Mesir menyebut pemilu itu sebagai suatu sandiwara “pernikahan” Mesir dengan demokrasi.³⁴

3. Kekuatan Politik Islam di Libya

Dinamika politik di Libya tidak sama dengan yang terjadi di Tunisia dan Mesir. Pemimpin Libya, Muammar Qadhafi, tidak mudah ditumbangkan ketika bertiup angin *Arab Spring*. Qadhafi yang sudah lama berkuasa di Libya tidak mudah ditaklukkan oleh para demonstran.

Gerakan protes rakyat Libya berawal dari Kota Benghazi pada 17 Februari 2011. Masyarakat Libya berdemonstrasi menyusul penangkapan aktivis hak asasi manusia (HAM), Fathi Terbil. Beberapa demonstran menuntut Qadhafi mundur dari jabatannya. Protes di Benghazi memaksa militer rezim untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap para demonstran. Berdasarkan laporan dari BBC, sepanjang Februari–Maret 2011 telah terjadi bentrokan antara para demonstran dengan loyalis rezim yang mengakibatkan tewasnya ratusan orang dari kedua belah pihak. Banyaknya korban memicu terjadinya perlawanan yang lebih besar dari para demonstran di Benghazi. Menanggapi gerakan perlawanan yang semakin meningkat di berbagai daerah, Qadhafi berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya dengan memengaruhi pihak militer untuk melawan kekuatan oposisi.

Sejak awal pihak militer memang menjadi simbol kekuatan politik di Libya yang mendapat perlakuan istimewa di bawah pimpinan keluarga rezim. Abdullah Sanusi adalah ipar Qadhafi yang

³⁴ Lihat “Abdel-Fattah al-Sisi Wins a Second Term in Egypt,” *The Economist*, 30 Maret 2018, diakses pada 26 Oktober 2018 dari <https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2018/03/30/abdel-fattah-al-sisi-wins-a-second-term-in-egypt>.

memimpin militer, sedangkan putranya Khamis Qadhafi memimpin sebuah pasukan elite di Libya. Terdapat beberapa pasukan elite yang mendukung kekuasaan rezim pada saat itu, di antaranya Korps Garda Revolusi dan Pasukan Islam Pan-Afrika. Selain itu, Qadhafi merekrut sekelompok tentara bayaran dari berbagai negara Afrika untuk kampanye kepemimpinannya di Uni Afrika pada 1980-an. Khamis Qadhafi memimpin pasukan Kavaleri Rakyat yang didukung oleh 40.000 pasukan, sementara Mu'tasim Billah dan Saadi menjadi pemimpin dan bertanggung jawab terhadap dua badan militer lainnya.

Sepanjang masa kepemimpinannya, Qadhafi sering menggunakan tindakan kekerasan untuk melawan kelompok oposisi. Demonstrasi pun berubah menjadi bentrokan bersenjata yang mengakibatkan korban tewas bertambah. Rezim Qadhafi bahkan mulai mempersenjatai tentara bayaran untuk melawan pemberontakan. Namun, aksi kekerasan yang dilakukan rezim tidak memadamkan gerakan perlawanan rakyat, aksi protes malah semakin meningkat dan meluas. Pada 23 Februari 2011, beberapa tempat strategis di Benghazi, misalnya pangkalan militer dan kantor perwakilan pemerintahan, dikuasai kelompok oposisi. Dikuasainya Benghazi menandai awal tegaknya kekuatan oposisi di Timur Libya.

Pasca-dikuasainya Benghazi, para politisi, akademisi, mantan perwira militer, dan pimpinan suku mengadakan pertemuan di Baidha,³⁵ timur Libya, dipimpin oleh Mustafa Abdul Jalil mantan menteri kehakiman era Qadhafi. Pertemuan tersebut menjadi cikal bakal berdirinya *National Transitional Council* (NTC) atau Dewan Transisi Nasional yang secara *de facto* memegang otoritas pemerintahan di Libya. Pada Agustus 2011, NTC menyusun peta jalan transisi demokrasi.

³⁵ Dalam sejarahnya, Baidha adalah kota pertama yang dimasuki para sahabat Rasul dalam menyebarkan Islam di Libya. Pada masa penjajahan, Baidha menjadi basis perlawanan umat Islam menghadapi Italia.

Proses transisi menuju demokrasi di Libya dimulai dengan pelaksanaan nilai-nilai demokrasi yang meliputi mekanisme pemilu multi-partai, kebebasan mengemukakan pendapat secara terbuka, kebebasan pers, hadirnya kelengkapan institusi-institusi dalam negara (seperti lembaga pemilihan umum, lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif) ditambah partai politik yang dapat menampung aspirasi rakyat serta tegaknya supremasi hukum.

Ada perubahan yang besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Libya. Demokrasi menjadi sistem politik yang baru berkembang di sana sebab selama 42 tahun masa kepemimpinan Qadhafi, nilai-nilai demokrasi kerap diberangus. Libya tak ubahnya sebagai sebuah bangunan yang hancur akibat krisis politik yang melanda. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memulihkan kondisi sosial, politik dan ekonomi yang hancur tersebut. Untuk membangun kembali lembaga dan institusi politik yang hancur, NTC membentuk badan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dewan eksekutif sementara dipimpin oleh Mahmoud Jibril, seorang tokoh kelompok oposisi di Benghazi. NTC pun mendapat pengakuan dari dunia internasional sebagai otoritas pemerintahan yang sah di Libya, bahkan beberapa negara telah membangun hubungan diplomatik permanen di Benghazi untuk bekerja sama dengan NTC. Di samping itu, pada September 2011, secara berturut-turut NTC mendapat dukungan dari Liga Arab, Uni Eropa, Uni Afrika, dan PBB.

Namun, pelaksanaan transisi menuju demokrasi di Libya tidak berjalan mulus, terutama dengan semakin meningkatnya konflik dan peredaran senjata di berbagai daerah.³⁶ Konflik bersenjata yang terjadi di tengah transisi demokratisasi menunjukkan masih lemahnya peran pemerintah sementara (NTC) dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam negeri. Peran masyarakat sipil dalam

³⁶ "Gunmen Attack Libya's Interior Ministry in Tripoli Forcing its Closure," *Al Arabiya*, 3 Juli 2013, diakses pada 7 Agustus 2013 dari <http://english.alarabiya.net/en/News/africa/2013/07/03/Gunmen-Attack-Libya-s-interior-ministry.html>.

politik juga masih sangat rendah akibat warisan kediktatoran politik rezim Qadhafi.

Kekacauan politik yang terjadi pada akhirnya mendorong kekuatan eksternal, seperti PBB dan NATO, untuk melakukan intervensi di Libya. PBB membentuk *United Nation Support Mission in Libya* (UNSMIL) yang bertugas menyelesaikan konflik di Libya. Pada 29 Maret 2011, PBB mengadakan konferensi di London untuk membahas kondisi politik yang semakin memburuk di Libya.

Uni Eropa dan Liga Arab mendesak DK PBB untuk mengimplementasikan Resolusi No. 1970 (2011) dan Resolusi No. 1973 (2011). Resolusi tersebut memberikan legitimasi bagi DK PBB dan NATO untuk melakukan langkah-langkah seperti embargo senjata, zona larangan terbang dan tindakan lainnya yang diperlukan termasuk operasi militer. Resolusi yang ditetapkan DK PBB dan keterlibatan NATO dalam operasi militer menjadi awal masuknya intervensi asing di Libya.

Berbagai langkah yang dilakukan NATO, termasuk melakukan serangan militer ke berbagai basis militer Qadhafi, pada akhirnya dapat membantu kelompok oposisi menguasai kota-kota penting, seperti Tripoli dan Sirte. Pasukan oposisi yang dibantu NATO bahkan berhasil menewaskan Qadhafi di Sirte pada 20 Oktober 2011. Serangan NATO yang berhasil menumbangkan Qadhafi tersebut tidak lepas dari peran Inggris dan Prancis dalam memberikan informasi seputar keberadaan pasukan Qadhafi. Inggris dan Prancis memiliki kepentingan dalam membangun pangkalan militernya di Libya Timur yang dikuasai pasukan pemberontak. Harian *Tripoli Press* yang dikuasai pihak oposisi menyebutkan bahwa pihak militer AS, Inggris, dan Prancis tengah membangun pangkalan militer di dua kota, yaitu Benghazi dan Tobruk. Kedua kota kaya minyak tersebut menjadi incaran negara-negara Barat sejak masa Qadhafi.³⁷

³⁷ Atriadi Tamburaka, *Revolusi Timur Tengah: Kejatuhan Para Penguasa Otoriter di Timur Tengah* (Yogyakarta: Narasi, 2011).

Setelah Qadhafi tewas, NTC yang didukung PBB membentuk peta jalan demokratisasi dengan mengagendakan pelaksanaan pemilu dan pembentukan konstitusi di Libya. Konstitusi memang sangat diperlukan karena pada masa Qadhafi konstitusi dibentuk hanya untuk mendukung kekuasaannya semata sehingga peraturan yang muncul adalah larangan berdirinya partai politik, serta pemberangusan gerakan oposisi dan media massa. Perbedaan pendapat di antara anggota NTC dalam perumusan konstitusi menghambat laju transisi, terutama yang terkait pelaksanaan pemilu hingga otoritas Libya terpaksa menyetujui konstitusi sementara sampai terbentuknya keanggotaan Kongres Nasional Libya (*General National Congress*, GNC).

Pada 7 Juli 2012, pemilu bersejarah diselenggarakan di Libya. Pemilu tersebut merupakan momentum penyerahan kekuasaan dari pemerintah transisi (NTC) ke GNC atau Kongres Nasional Libya. Pemilu yang melibatkan 60% pemilih dan memperebutkan 200 kursi³⁸ di parlemen serta diikuti sedikitnya 160 partai politik tersebut berlangsung transparan dan tidak menemui kendala berarti.³⁹

Sama halnya dengan pemilu di Tunisia dan Mesir, pemilu di Libya melahirkan dua aliran partai politik yang saling bersaing memperebutkan suara mayoritas di parlemen. *Pertama*, partai-partai Islam yang diwakili dua partai besar, yaitu *Justice and Construction Party* (JCP) yang merupakan representasi dari gerakan Ikhwanul Muslimin Libya dan partai Al Wathan yang didirikan mantan komandan *Libyan Islamic Fighting Group* (LIFG) dan mendapat dukungan kelompok Salafi. *Kedua*, kubu nasionalis-liberal yang diwakili beberapa partai besar, seperti *National Forces Alliance* (NFA) pimpinan Mahmoud Jibril, *National Centrist Party* (NCP) yang didirikan Ali Tarhouni, serta *National Front Party* (NFP) yang

³⁸ Dari jumlah kursi parlemen tersebut, sebanyak 120 kursi untuk calon independen dan 80 kursi untuk calon yang berasal dari partai politik.

³⁹ Christopher S. Chivvis, Keith Crane, Peter Mandaville, dan Jeffrey Martini, "Libya's Post-Qaddafi Transition: The Nation-Building Challenge," diakses pada 26 Agustus 2013 dari https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR129.html.

dipimpin Muhammad Yusuf Al Magharif, mantan duta besar Libya untuk India pada era Qadhafi.

Hasil akhir perhitungan suara menunjukkan bahwa partai liberal NFA yang dipimpin Mahmoud Jibril memperoleh suara mayoritas dengan meraih 39 kursi atau 49% dari total 80 kursi yang diperebutkan. Sementara itu, *Justice and Construction Party* (JCP), sayap politik Ikhwanul Muslimin yang diprediksi memperoleh suara signifikan justru hanya mendapat 17 kursi atau 21% suara. Sementara itu, Al Wathan yang didukung Salafi hanya memperoleh 3,45% suara yang berarti tidak memperoleh satu kursi pun di parlemen.⁴⁰

Terdapat beberapa faktor penting yang menjadi sebab kemenangan partai NFA. *Pertama*, mayoritas rakyat Libya percaya pada kepemimpinan Dewan Transisi Nasional yang berhasil membawa perubahan setelah Qadhafi tumbang. NTC tidak hanya diterima rakyat Libya, tetapi juga dunia internasional yang sejak awal mendukung proses transisi demokrasi. Eksplorasi minyak yang sempat terhenti akibat krisis politik kembali dapat berjalan berikutan pengembalian sejumlah aset rezim Qadhafi ke negara. *Kedua*, kubu nasionalis mempunyai visi politik religius yang jelas dan sikap nasionalisme sebagian tokohnya dalam melawan rezim otoriter. Pascadeklarasi berdirinya NTC, Mahmoud Jibril menyatakan akan menerapkan syariat Islam di Libya dan merangkul berbagai kalangan dalam transisi demokrasi. Kubu nasionalis dinilai menjadi harapan baru selama proses transisi karena mampu menyatukan berbagai golongan di Libya.

⁴⁰ High National Elections Commission, "Libya Election 2012," diakses pada 7 Agustus 2013 dari www.hnec.ly.

Tabel 4.5 Hasil Pemilu Libya, 7 Juli 2012⁴¹

Partai Politik	Suara (%)	Kursi
National Forces Alliance	48,14	39
Justice and Construction	10,27	17
National Front	4,08	3
Union for the Homeland	4,50	2
National Centrist Party	4,00	2
Wadi Al-Hayah Party	0,47	2
Moderate Ummah Assembly	1,47	1
Authenticity and Renewal	1,26	1
National Party For Development and Welfare	1,16	1
Al-Hekma (Wisdom) Party	1,15	1
Authenticity and Progress	0,92	1
Libyan National Democratic Party	0,88	1
National Parties Alliance	0,86	1
Ar-Resalah (The Massage)	0,53	1
Centrist Youth Party	0,49	1
Libyan Al-Amal (Libyan The Hope)	0,41	1
Labaika National Party	0,23	1
Libyan Party for Liberal and Development	0,18	1
Arrakeza (The Foundation)	0,10	1
Nation and Prosperity	0,09	1
National Party of Wadi ash-Shati	0,09	1
Total perwakilan dari partai		80

Pascapemilu 2012, *General National Congress* (GNC) terbentuk di bawah pimpinan Mohamed Al Magharief. GNC menjadi sarana berbagai fraksi untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Pada 12 September 2013, GNC menyelenggarakan pemilihan perdana menteri yang melibatkan 190 anggota. Mustafa Abu Shagur yang merupakan calon kuat dari koalisi fraksi Islam dan liberal berhasil memperoleh 96 suara dan mengungguli rivalnya dari NFA yang

⁴¹ Diolah dari The Carter Center, *General National Congress Elections in Libya: Final Report* (Atlanta: The Carter Center, 2012), 99–100.

memperoleh 94 suara.⁴² Terpilihnya Mustafa Abu Shagur menjadi langkah awal keberhasilan proses demokratisasi di parlemen. Namun, pada Oktober 2012, Abu Shagur mengundurkan diri dan digantikan Ali Zaidan setelah mendapat mosi tidak percaya dari mayoritas anggota parlemen terkait proposal pembentukan kabinet.

Pengangkatan Ali Zaidan sebagai perdana menteri membawa sejumlah harapan akan kemajuan demokratisasi di Libya. Langkah awal yang dilakukan Ali Zaidan adalah membentuk kabinet yang terdiri dari berbagai kalangan. Kabinet yang dibentuk pada 30 Oktober 2012 tersebut berhasil mendapat persetujuan dari GNC pada 31 Oktober 2012. Setelah mengalami beberapa kali perubahan terkait nama-nama menteri yang diusulkan, kabinet akhirnya dapat ditetapkan GNC pada 31 Oktober 2012.

Nama-nama menteri yang disetujui parlemen, yaitu Sadiq Abdul Karim sebagai Menteri Agama, Menteri Kerja Sama Internasional dijabat Mohamed Imhamid Abdul Aziz, Menteri Pariwisata dijabat Ikram Abdussalam Imam, Menteri Kehakiman dijabat Salah Bashir Margani, Menteri Komunikasi dan Informasi dijabat Osama Abdurrauf Siala, Menteri Dalam Negeri dijabat Ashour Suleiman Shuwail yang menjabat sampai Mei 2013 dan kemudian digantikan Mohammed Khalifa As Syaikh, Menteri Ekonomi dijabat Mustafa Mohammad Abu Funas, Menteri Sosial dijabat Kamila Khamis Al Mazini yang merupakan salah seorang menteri perempuan dalam kabinet Zaidan, Menteri Keuangan dijabat Haitem Saed Jalgham, Menteri Pertanian dijabat Ahmed Ali Al Urfi, Menteri Perindustrian dijabat Suleiman At Taif Al Fituri, Menteri Kebudayaan dijabat Habib Mohammed Al Amin, dan Menteri Transportasi dijabat Mohamed Al Ayib. Keterlibatan tokoh lintas partai dalam kabinet Ali Zaidan menjadi langkah awal reformasi sistem pemerintahan pada masa

⁴² Didi Purwadi, "Mustafa Abu Shagur Terpilih Jadi PM Libya," *Republika*, 13 September 2012, diakses pada 7 Juli 2013 dari <https://www.republika.co.id/berita/internasional/global/12/09/13/ma9jvu-mustafa-abu-shagur-terpilih-jadi-pm-libya>.

transisi. Berbagai persoalan, seperti pemberantasan kemiskinan dan pengangguran, menjadi fokus kabinet pemerintahan Ali Zaidan.

Demokratisasi terus berlangsung di Libya. Pada 2014, pemilu anggota Majelis Draf Konstitusi (*Constitutional Drafting Assembly-CDA*) Libya. Pemilihan anggota majelis itu sesuai dengan Deklarasi Konstitusi GNC pada 9 April 2013; UU 17 tahun 2013 tentang Pemilu; UU 8 tahun 2013 tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum Tinggi (*High National Election Commission-HNEC*); dan peraturan yang disahkan komisionaris HNEC.

Pemilu diselenggarakan dalam tiga tahap pada 1 Desember 2013–23 Januari 2014. Ada 649 kandidat yang terdaftar untuk memperebutkan 60 kursi anggota Majelis Draf Konstitusi. Dari total jumlah kandidat tersebut, terdapat 64 orang perempuan. Komisi Pemilihan Umum Tinggi (HNEC) Libya sukses menyelenggarakan pemilu tersebut, tetapi gagal mencapai inklusivitas yang diinginkan untuk mewujudkan CDA sebagai badan yang benar-benar mewakili seluruh masyarakat Libya. Hasil pemilu menyisakan 13 kursi tak terisi dari total 60 anggota majelis. Kursi yang tidak terisi tersebut termasuk lima dari enam kursi untuk Amazigh Libya, Touareg, dan Komunitas Tebu; serta salah satu dari enam kursi yang disediakan untuk wanita. Pemilu memang berlangsung di tengah kekhawatiran keamanan yang berkepanjangan. Sebagian masyarakat frustrasi dengan Kongres Nasional Umum (GNC) dan laju transisi politik negara. Institusi politik di Libya gagal mengatasi sikap apatis masyarakat. Selain itu, terdapat ketidakrelevanan institusi itu sendiri dalam kehidupan politik Libya.⁴³

Perpolitikan Libya terus bereformasi. Pada akhir 2015, masyarakat Libya berhasil merumuskan “kesepakatan politik.” Kesepakatan itu bertumpu pada empat prinsip utama. Pertama, menjamin hak-hak demokratis rakyat Libya. Kedua, adanya kebutuhan pemerintahan konsensus berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan. Ketiga, pengawasan dan keseimbangan di antara institusi kekuasaan dengan

⁴³ Lihat The Carter Center, *The 2014 Constitutional Drafting Assembly Elections in Libya: Final Report* (Atlanta: The Center Canter, 2014).

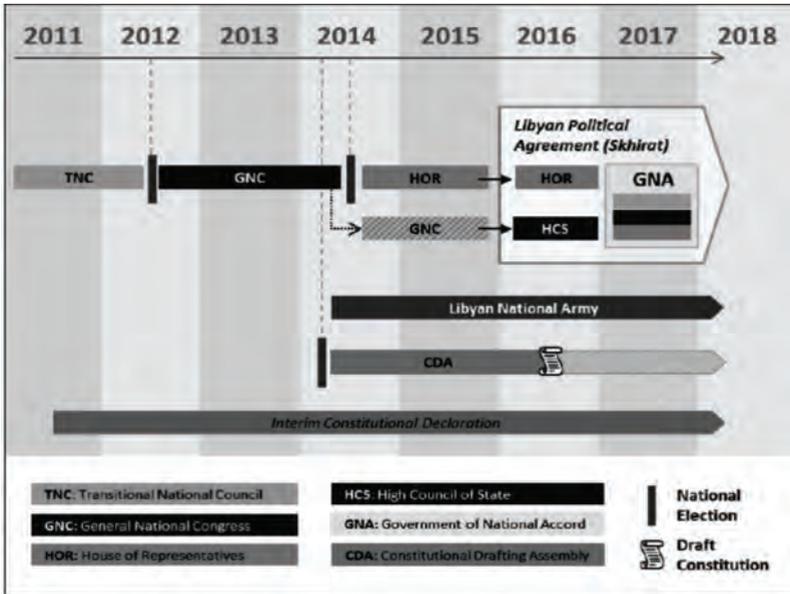
memberdayakan lembaga-lembaga negara. Keempat, menghormati pengadilan Libya dan kemerdekaannya.⁴⁴ Kesepakatan ini dilakukan untuk memerangi terorisme, mereformasi dan membangun lembaga-lembaga negara, merangsang pertumbuhan ekonomi, menghadapi fenomena migrasi ilegal, serta mengonsolidasikan supremasi hukum dan hak asasi manusia di seluruh negeri.

Kesepakatan itu menjadi langkah awal dalam perjalanan panjang menuju pemulihan dan kemakmuran Libya. Transisi politik tidaklah mudah. Mengubah otoritarianisme dengan demokrasi sejati harus diusahakan terus-menerus, tidak ada jalan pintas, dan hal ini sungguh rumit. Namun, kesepakatan ini adalah langkah pertama yang baik yang menempatkan Libya di tempat yang kokoh untuk menghadapi tantangan masa depan.

Sejak tahun 2011 sampai tahun 2018, Libya berbenah diri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gambaran transisi kehidupan politik Libya sebagai berikut.

Ada tahapan demokrasi di Libya. Tahun 2016–2017 adalah masa cukup sibuk di perpolitikan Libya setelah ada kesepakatan politik pada 2015. Bila tiga negara tersebut dibandingkan (Libya, Mesir, dan Tunisia), proses transisi demokrasi yang paling baik terjadi di Tunisia. Di negara tempat munculnya *Arab Spring* itu, ada proses demokratisasi yang cukup lancar, meski ada sedikit riak-riak demonstrasi. Sementara itu, di Mesir, demokrasi yang berusaha dibangun dengan pemilu yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, akhirnya harus dinodai oleh kudeta militer pada 2013.

⁴⁴ Lihat “Libyan Political Agreement as Signed on 17 December 2015,” diakses pada 9 Oktober 2018 dari <https://unsmil.unmissions.org/sites/default/files/Libyan%20Political%20Agreement%20-%20ENG%20.pdf>.



Gambar 4.1 Bagan Proses Transisi Demokrasi di Libya⁴⁵

Seorang intelektual Tunisia yang menjabat sebagai President of Art and Democracy, Abdurrahim, mendukung pendapat tersebut. Menurutnya, keberhasilan demokratisasi di Tunisia ditandai dengan terlibatnya semua elemen masyarakat di sana untuk memperbaiki kehidupan bangsa dan bernegara. Lebih lanjut Abdurrahim mengatakan:⁴⁶

Sekarang, semua partai politik dapat mengambil peran, semua warga dapat berbicara. Mereka dapat mengatakan semua yang ingin mereka katakan, dari partai kanan atau kiri, dan ini adalah hal yang paling penting dan awal dari sebuah kesuksesan. Ketika ada demokrasi kita dapat menemukan hasil yang bagus dan setelah revolusi, kita menemu-

⁴⁵ Christopher M. Blanchard, "Libya: Transition and U.S. Policy," *Congressional Research Service* (2 Mei 2018): 5.

⁴⁶ Abdurrahim, President of Art and Democracy, wawancara di Tunis, pada 17 April 2018.

kan sebuah kendali atas revolusi. Kita memiliki gaya hidup tersendiri, dengan satu jenis pemikiran, tetapi setelah revolusi ada banyak pemikiran dan ideologi. Jadi, kita harus mengubah pikiran orang lain untuk hidup dalam situasi baru dan itu butuh waktu, banyak waktu untuk memahami bahwa kita memiliki hak untuk maju. Setelah saya ingat hari-hari revolusi semua orang bekerja sebagai polisi di jalanan, ketika mereka menemukan ruang mereka membersihkan situasi buruk itu, semua orang ingin saling membantu, dan setelah beberapa tahun mereka belajar dengan kehidupan baru, mereka masih mencari sistem baru. Kita sekarang berada dalam situasi yang baik di mana kita hanya memiliki 700.000 orang yang tidak bekerja, itu setelah revolusi. Artinya kita memiliki pengangguran kecil. Kami menemukan semua orang tersenyum di jalanan bandara ini adalah hal bagus yang kami rasakan.

Selain keterlibatan semua elemen masyarakat, keberhasilan demokrasi di Tunisia juga karena pemimpin di sana mau memperbaiki kesalahannya. Hal itu dijelaskan oleh politisi dari Partai Badil Tunis, Khulud. Menurutnya, Tunisia telah melakukan banyak hal pascarevolusi. Beberapa kebijakan diakui ada yang kurang tepat, tetapi pemimpin Tunisia berusaha memperbaikinya. Khulud menilai Tunisia adalah yang paling baik di antara negara-negara Arab yang mengalami perubahan akibat adanya *Arab Spring*. Khulud mengatakan, “Saya melihat Tunisia adalah yang paling baik dan saya bangga Tunisia bisa banyak belajar dari transisi demokrasi yang terjadi di negara ini dari sekian waktu itu, dan saya masih merasa optimis masa depan akan jauh lebih baik.”⁴⁷

Kondisi Tunisia berbeda dengan Mesir dan Libya. Masyarakat Mesir tidak seluruhnya dapat berkiprah dalam dunia politik. Mereka mendapatkan tekanan dan bahkan pelarangan untuk hidup, seperti yang dialami oleh kelompok Ikhwanul Muslimin. Sementara itu, di Libya, masih terdapat berbagai permasalahan yang berkaitan dengan soliditas kebangsaan. Mereka memang sudah melakukan kesepakatan politik antarelemen, tetapi implimentasinya masih belum terwujud dengan baik.

⁴⁷ Khulud, politisi Partai Badil Tunis, wawancara di di Lamarsa Tunisia, pada 16 April 2018.

B. KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP KEKUATAN POLITIK ISLAM

Di tiga negara tersebut, kebijakan pemerintah dalam merespons kekuatan politik Islam tidaklah sama. Di Tunisia, kekuatan politik Islam, salah satunya disuarakan oleh Partai *An-Nahdah* yang dibentuk pada 1981 oleh Rachid Ghannouchi. Pada 1989, *An-Nahdah* ikut dalam pemilu nasional dan meraih 17% suara. Dengan angka suara itu, *An-Nahdah* menjadi pemenang kedua setelah partai penguasa pimpinan Ben Ali. Namun, *An-Nahdah* dituduh melakukan kecurangan pemilu. Akibatnya, pemimpin *An-Nahdah*, Rachid Ghannouchi, diasingkan, kemudian tinggal di Inggris. Sejak saat itu, rezim Ben Ali melarang eksistensi partai *An-Nahdah*.

Setelah Ben Ali tumbang, Ghannouchi kembali ke Tunisia dan membangkitkan Partai *An-Nahdah*. Dalam pemilihan umum Oktober 2011, *An-Nahdah* mengkampanyekan diri sebagai partai Islam moderat yang menghargai kebebasan beragama dan hak-hak minoritas. Selain itu, *An-Nahdah* berjanji untuk menjamin hak perempuan dan mengatakan tidak akan meregulasi cara berpakaian perempuan. Selain itu, *An-Nahdah* juga menjanjikan pemberantasan korupsi dan mereformasi pemerintahan dengan membuat parlemen satu kamar (*uni cameral*) dan akan membatasi masa jabatan presiden selama 5 tahun, serta maksimal hanya dalam dua kali masa jabatan. Di bidang kesejahteraan, *An-Nahdah* berjanji untuk memperbaiki akses kesehatan, menaikkan upah minimum, dan membuka 589.000 lapangan kerja serta menurunkan tingkat pengangguran ke level 8,5% pada 2016. Selain itu, *An-Nahdah* juga menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dengan bertumpu pada bidang pariwisata.⁴⁸

Walaupun *An-Nahdah* mengusung keseimbangan antara Islam dan modernitas, partai itu tidak diterima dengan baik oleh masya-

⁴⁸ Lihat "Tunisia's Ennahda Says it is 'Natural' for Islamists to Lead the Country," *Al Arabiya*, 26 Oktober 2011, diakses pada 20 Oktober 2013 dari www.alarabiya.net/articles/2011/10/26/173810.html.

rakat Tunisia. Selama *An-Nahdah* memimpin pemerintahan setelah menang pemilu 2011, mereka mendapatkan berbagai hambatan. Terlihat ada kecurigaan terhadap Partai *An-Nahdah* yang dianggap akan mengembangkan keislaman di Tunisia.

Rachid Ghannouchi sebenarnya tidak ingin menjadikan Tunisia sebagai negara Islam apalagi khilafah. Dalam sebuah wawancara, Ghannouchi menegaskan tentang konsep kenegaraan. Dia menegaskan:

Jelas, kami adalah negara kebangsaan. Kami menginginkan reformasi bagi rakyat Tunisia, bagi Negara Tunisia. Adapun isu Khilafah, ini merupakan masalah yang tidak menyentuh realitas. Persoalan realitas saat ini adalah bahwa Negara Tunisia menginginkan reformasi sehingga mari wujudkan keinginan Rakyat Tunisia, jangan melawan mereka.⁴⁹

Sistem yang akan dikembangkan oleh Ghannouchi melalui *An-Nahdah* adalah negara Tunisia yang demokratis. Sistem demokrasi akan berkembang ke seluruh dunia Arab. Itu hanyalah soal waktu kapan suatu negara akan menganut sistem demokrasi itu. Dia menjelaskan hal itu ketika kami mewawancarainya. Secara lebih rinci, Ghannouchi mengatakan:⁵⁰

Pada saat 2011, saya sangat percaya bahwasanya Tunisia memasuki era baru dan zaman yang baru. Seluruh negara Arab pun ke depannya nanti pasti akan memakai sistem demokrasi hanya tinggal menunggu waktunya saja yang tepat, karena situasinya yang sangat komplikasi. Kita mungkin ke depannya butuh banyak waktu dan mungkin akan lebih banyak memakan korban. Semuanya hanyalah masalah waktu, semua negara Arab akan menganut paham demokrasi sebagaimana kami di Tunisia. Demokrasi ini terus bergerak ke seluruh penjuru dunia dari Eropa ke Asia, Afrika dan sampai ke negara-negara Arab. Kita pada saat ini hanya bagaikan tinggal di sebuah desa kecil saja.

⁴⁹ Wawancara Rachid Ghannouchi, *France 24*, 13 November 2011, diakses pada 20 Oktober 2013 dari <http://alhattin.com/2011/11/13/rashid-al-ghannushi-rejects-the-idea-of-khilafah-wants-reforms/>.

⁵⁰ Rachid Ghannouchi, wawancara di Tunis, pada 19 April 2018.

Dunia ini penuh dengan strategi-strategi yang dikerjakan oleh barat, baik itu strategi untuk mendapatkan minyak, mengatasnamakan demokrasi dan lain-lain sepertinya ke depan pasti juga akan banyak korban yang berjatuhan.

Namun, kecurigaan terhadap *An-Nahdah* tetap ada. Akhirnya, *An-Nahdah* mundur dari kekuasaan. Pada pemilu 2014, *An-Nahdah* mengalami kekalahan dari Nida Tunis yang beraliran sekuler liberal. Walaupun kalah dalam pemilu, kekuatan politik Islam yang diwakili oleh *An-Nahdah* masih tetap dapat berkiper dalam politik di Tunisia.

Seorang politisi dari Partai Badil Tunis, Khulud, menilai *An-Nahdah* tidak sama dengan partai Islam lainnya. Partai itu cukup akomodatif untuk kemajuan masyarakat Tunisia. Dalam hal tertentu yang berkaitan dengan konstitusi negara, *An-Nahdah* mempertahankan pendiriannya. Sebagai contoh, ketika ada pembahasan mengenai landasan nilai negara Tunisia, *An-Nahdah* bersikeras menyatakan bahwa Tunisia adalah negara Arab dan Islam. Khulud sendiri sebagai politisi liberal tidak sependapat dengan *An-Nahdah*. Menurutnya, agama dan negara adalah suatu hal yang berbeda. Keduanya tidak dapat disatukan. Dalam Konstitusi Tunisia memang disebutkan bahwa Tunisia adalah negara Arab dan Islam, "...tetapi saya secara pribadi berpendapat bahwa politik harus dijauhkan dari unsur agama."⁵¹

Secara ideologis, *An-Nahdah* berdekatan dengan kelompok Ikhwanul Muslimin (IM). Namun, dalam kiprah kehidupannya di Tunisia, *An-Nahdah* berbeda dengan IM yang ada di Mesir. Prof. Abdel Majid Charfi, Kepala *Bait al-Hikmah* di Tunisia,⁵² menilai perbedaan tersebut memang ada. Charfi mengatakan, "... meskipun memiliki latar belakang yang sama dengan gerakan

⁵¹ Khulud, politisi Partai Badil Tunis, wawancara di Lamarsa, Tunisia, pada 16 April 2018.

⁵² *Bait al-Hikmah* adalah lembaga *think tank* yang memberi masukan kebijakan kepada pemerintah Tunisia.

Ikhwanul Muslimin di Mesir, *An-Nahdah* di Tunisia sangat berbeda jauh dengan gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir.”⁵³*An-Nahdah* berubah dan menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi di Tunisia. Ini adalah suatu keistimewaan yang dimiliki oleh pergerakan Islam *An-Nahdah* di Tunisia. Perubahan sikap *An-Nahdah* juga diakui oleh ilmuwan dari Universitas Al-Manar, Tunisia.⁵⁴

Selain *An-Nahdah*, di Tunisia ada kelompok Islam lainnya. Ada kelompok Salafi yang diwakili oleh partai politik, seperti *Jabhat Al-Islah (The Reform Front)* dan *Hizb al-Tahrir*. Ada gerakan sosial Islam, seperti Ansar al-Shari'a (*Supporters of the Shari'a*), yang menolak berpartisipasi dalam proses politik. Ada juga kelompok-kelompok *violent vigilante* yang mengidentifikasi diri sebagai Salafi. Berdasarkan perkiraan tidak resmi, jumlah kaum Salafi di Tunisia berkisar antara 6.000–10.000 warga. Terdapat laporan tidak resmi yang menyebutkan bahwa Salafi memiliki kontrol terhadap lebih dari 200 masjid di seluruh Tunisia.⁵⁵

Kondisi berbeda dialami oleh kekuatan politik Islam di Mesir. Setelah kekuasaan otoriter di Mesir tumbang, kekuatan politik Islam Mesir menyeruak ke atas panggung politik lewat FJP. FJP yang berafiliasi ke kelompok Ikhwanul Muslimin menang dalam pemilu parlemen Mesir. Ketika ada pemilu presiden, Mursi (calon dari FJP) juga menang.

Namun, Presiden Mursi dan FJP tidak mampu mengatasi permasalahan politik, ekonomi, dan sosial di Mesir. Dalam masa satu tahun kekuasaannya, Presiden Mursi dikudeta oleh militer Mesir.

⁵³ Prof. Abdel Majid Charfi, Kepala *Bait al-Hikmah*, wawancara di Tunis, pada 20 April 2018.

⁵⁴ Asma Nouira, Ph.D, Ketua Program Studi Politik, Universitas Al-Manar dan Sami Bostanji, Ph.D, Dekan Fakultas Ilmu Politik, Universitas Al-Manar, wawancara di Tunis, pada 24 April 2018.

⁵⁵ Mengenai perkiraan angka kekuatan Salafi di Tunisia, lihat Mohammed Al-Jazairy, “Salafism in Tunisia: A Brief History,” *Asharq al-Awsat*, 5 Agustus 2012. Nouredin Jebnoun, “Salafi Trouble in Tunisia’s Transition,” *Jadaliyya*, 13 Juni 2012. Anna Mahjar-Barducci, “Salafists in Tunisia,” *Gatestone Institute, International Policy Council*, 23 Februari 2012.

Setelah kudeta militer, Ikhwanul Muslimin (IM) menjadi organisasi “tertuduh” yang menyebabkan politik Mesir tidak stabil. Kalangan militer berusaha mendiskreditkan posisi IM. Militer Mesir perlahan-lahan berhasil membuat IM sebagai pihak yang bersalah. Militer bahkan meminta ulama-ulama moderat membantu “mengebiri” IM yang melakukan perlawanan setelah kudeta Mursi dari kursi presiden.

Mantan mufti Mesir, Ali Gomaa, mengungkapkan kekesalannya terhadap kekacauan negara akibat perlawanan IM. Gomaa menytir ayat-ayat suci tentang larangan pengafiran terhadap orang lain hanya lantaran perspektif yang beda. Gomaa mengharamkan Muslim Mesir yang ikut dalam aksi IM untuk kembali mendudukkan Mursi sebagai pemimpin. Menurut Gomaa, IM telah menuduh semua pihak yang berbeda sebagai mereka yang pantas dinistakan dan dibunuh. “Bahkan dengan darah sekalipun, kita harus melawan ini,” katanya seperti disadur dari *New York Times*.⁵⁶

Tokoh lainnya, Amr Khaled, memberi perhatian pada semangat pembangkangan. Menurutnya, semangat pembangkangan semestinya berdasarkan kepentingan bersama. Khaled bertanya alasan IM mengatasnamakan rakyat Mesir yang homogen. Pendongkolan Mursi oleh militer adalah usaha terbaik untuk menghindari perang saudara. Di mata Amr Khaled, militer adalah pahlawan dan komandan penyelamat bangsa. Ungkapan diplomatis dia serukan agar pemuda menaatinya, “Kita wajib memberikan kewenangan militer dalam situasi ini. Itu bermakna di hadapan Tuhan.” Khaled menambahkan ungkapan propagandanya dengan mengatakan bahwa militer adalah komandan dan telah melakukan tugas besar. “Agama mengatur hukuman bagi pembangkang dan orang-orang yang tidak mematuhi komandannya.”⁵⁷

⁵⁶ Lihat Bambang Noroyono, “Ikhwanul Muslimin Dikebiri Ayat Suci,” *Republika*, 26 Agustus 2013, diakses pada 28 Agustus 2013 dari <http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/13/08/26/ms50xz-ikhwanul-muslimin-dikebiri-ayat-suci/>.

⁵⁷ Noroyono, “Ikhwanul Muslimin.”

Sementara itu, Juru Bicara Militer Kolonel Ahmed Aly membenarkan bahwa tayangan-tayangan yang menyudutkan IM didanai militer. Lewat korespondensi via surel, Aly mengatakan bahwa tayangan-tayangan tersebut adalah pidato-pidato keagamaan dalam kajian budaya dan agama yang lebih luas.

Militer memang mendekati kalangan ulama moderat untuk memberikan fatwa tentang IM. Ulama moderat pendukung membuat fatwa bahwa haram hukumnya bila rakyat melawan pemerintah dan komandan keamanan negara yang dikomandoi militer. Berbagai sarana komunikasi digunakan untuk menjelaskan fatwa itu. Di sejumlah televisi Mesir, ditemukan banyak tayangan mirip iklan yang dikemas dalam bentuk tayangan agamis, dengan menampilkan tokoh agama dan ulama. Anehnya, tayangan tersebut menempatkan Departemen Militer sebagai sponsor.

Ada pernyataan dari Abdel Galil, bekas pejabat yang mengurus persoalan agama dan rumah ibadah, ketika Husni Mubarak menjabat sebagai presiden. Dia menyatakan bahwa IM adalah kelompok yang dibenci oleh masyarakat Mesir. Pernyataan tokoh agama senior ini mengimbangi desakan IM tentang perlawanan rakyat Mesir terhadap rezim sementara. IM bagi Abdul Galil adalah kelompok pemaksa di dalam kultur keberagaman di Mesir. “Jika mereka tetap seperti ini, mereka tidak bisa diterima. Kita tetap harus menggunakan akal dan logika.”⁵⁸

Penjelasan ulama moderat tentang IM tersebut tidak hanya dilakukan di dalam negeri Mesir, tetapi juga ke berbagai negara muslim. Indonesia, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, juga dikunjungi oleh para ulama moderat tersebut. Mereka berusaha menjelaskan bahwa tindakan militer menurunkan Presiden Mursi dari tampuk kekuasaan adalah benar. Militer melakukan tugasnya untuk menyelamatkan negara dari berbagai kekacauan.

⁵⁸ Bambang Noroyono, “Militer Mesir Minta Ulama Moderat Keluarkan Fatwa Haramkan IM,” *Republika*, 26 Agustus 2013, diakses pada 28 Agustus 2013 dari <http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/13/08/26/ms50In-militer-mesir-minta-ulama-moderat-keluarkan-fatwa-haramkan-im>.

Militer terus berusaha “membersihkan” unsur IM dengan membubarkan berbagai demonstrasi yang dilakukan oleh pengikut IM. Pembubaran yang paling mengesankan adalah peristiwa pada 14 Agustus 2013, ketika ratusan masyarakat sipil tewas akibat tindakan militer yang membubarkan demonstrasi menentang kudeta militer. Pertarungan pascakudeta semakin menyudutkan posisi kalangan Islamis. Tokoh-tokoh IM ditangkap dan dipenjarakan. Mereka dituduh menghasut rakyat untuk melawan penguasa.

Kekuatan politik Islam Mesir dari Ikhwanul Muslimin tampaknya tidak mendapatkan tempat lagi. Mereka menjadi terlarang kembali, seperti sebelum *Arab Spring*. Namun, IM bukan satu-satunya kelompok dalam kategori aktor Islam. Ketika terjadi *Arab Spring*, muncul Partai Noor yang berafiliasi dengan kelompok Salafi. Dalam pemilu parlemen (2011–2012), Partai Noor menduduki posisi kedua. Awalnya, Partai Noor berkolaborasi dengan FJP (Ikhwanul Muslimin), tetapi kemudian mereka berpisah. Partai Noor mendukung kudeta militer pada 2013 sehingga partai ini bisa berkiprah dalam dunia politik sampai saat ini.

Di Mesir, setidaknya ada empat kategori aktor Islam, yaitu aktor Islam resmi (pemerintah), aktor Islam sosial, aktor Islam politik, dan aktor Islam akademisi.⁵⁹ Aktor resmi/pemerintah termasuk di antaranya lembaga al-Azhar, Kementerian Wakaf Agama, Dar al-If-ta’, serta Komite Agama, Sosial dan Wakaf di parlemen. Aktor resmi ini sering digambarkan sebagai tradisional karena menggunakan agama untuk sanksi kebijakan negara dan untuk melegitimasi status quo.

Aktor Islam sosial mencakup kelompok dan organisasi yang berfokus pada kegiatan sosial dan keagamaan, seperti pengajian, penerbitan, amal dan penyediaan layanan sosial Islam. Aktor ini termasuk gerakan sufi, gerakan Salafi, LSM Islam, dan Da’i Baru. Aktor-aktor ini memperlihatkan diri sebagai non-politik dan sebagian besar menjauhkan diri dari posisi politik. Pada kenyataannya,

⁵⁹ Basyar, *Pertarungan dalam*, 24–26.

beberapa aktor ini memiliki hubungan dan aliansi implisit dengan gerakan politik dan organisasi. Sebagai contoh, tarekat sufi tradisional telah selaras dengan rezim penguasa dan memiliki hubungan dekat dengan al-Azhar dan lembaga keagamaan resmi lainnya. Beberapa LSM Islam besar memiliki hubungan dekat dengan Ikhwanul Muslimin dan kegiatannya membantu memperluas basis gerakan, sementara Gerakan Salafi melahirkan Partai Noor.

Aktor Islam politik mengacu pada aktor yang mengadopsi agenda politik. Mereka berwacana dan berfokus pada kegiatan dan isu-isu politik serta sering disebut sebagai gerakan Islamis. Aktor Islam politik menggunakan referensi dan simbol Islam untuk mengartikulasikan agenda politiknya. Aktor yang dapat dikelompokkan di sini adalah Ikhwanul Muslimin, al-Wasat, al-'Amal, Partai Noor, dan beberapa organisasi militan, seperti Al-Jamaah al-Islamiyah dan gerakan al-Jihad.

Aktor Islam akademisi adalah para akademisi yang menggunakan Islam sebagai rujukan mereka. Kategori ini mencakup dua kelompok akademisi, yaitu Wasatiya dan Kritis. kelompok yang dapat dimasukkan ke dalam akademisi Wasatiya adalah pemikir, seperti Yusuf al-Qaradawi, Fahmi Howaydi, dan Tariq al-Bishri. Mereka berusaha mempromosikan konsepsi Islam politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi modern, nasionalisme, dan kewarganegaraan. Akademisi Kritis menggunakan teks-teks Islam untuk menolak gagasan negara Islam dan telah menentang konsepsi Islam sebagai tatanan sosial dan politik yang komprehensif.

Sementara itu, kekuatan politik Islam di Libya yang diwakili oleh *Justice and Construction Party* (JCP) tidak memperoleh suara mayoritas di parlemen. Partai *National Forces Alliance* (NFA) yang berhaluan nasionalis-liberal justru memberikan harapan kebangkitan politik Islam. NFA terdiri atas berbagai golongan, termasuk kalangan Islam. Salah seorang ulama terkenal di Tripoli, Abdullatif Al-Mahelhel, adalah anggota NFA. Di samping itu, tokoh gerakan reformasi Libya, Mahmoud Jibril, selalu mendukung dukungannya terhadap penerapan syariat dan menolak tuduhan sekuler

yang dialamatkan kepadanya. Dalam berbagai kesempatan, Jibril mengatakan:

In all my life, I have never described myself as secular. I never believed in it. I never talked about secularism. I was accused and given this label by some people. Because secularism in the minds of Libyans is tantamount to atheism, the purpose of that accusation was to try to portray me as an atheist.⁶⁰

Hal itu menunjukkan bahwa meskipun program politik Jibril lebih menekankan pembangunan demokrasi dan ekonomi ketimbang menonjolkan identitas dan ideologi, komitmennya terhadap penegakan syariat Islam tidak dapat diragukan. Bersama dengan tokoh Islam lainnya, Jibril mendeklarasikan penetapan syariat Islam sebagai sumber hukum di Libya, sebagaimana yang tertera dalam konstitusi yang menyatakan bahwa Libya adalah negara demokrasi yang berdaulat dan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Tripoli merupakan ibu kota negara. Agama resmi negara adalah Islam dan syariat Islam adalah sumber hukum negara, tetapi negara berhak memberikan kebebasan kepada penganut agama lainnya untuk melaksanakan ajaran sesuai dengan keyakinannya. Bahasa Arab adalah bahasa nasional Libya.⁶¹ Penetapan syariat Islam sebagai sumber hukum di Libya merupakan sinyal kebangkitan politik Islam⁶² yang sempat mengalami kemunduran sejak masa pemerintahan rezim Muammar Qadhafi.

Indikator lain yang menunjukkan kebangkitan politik Islam di Libya adalah semakin kuat dan solidnya posisi partai Islam di par-

⁶⁰ Alison Pargeter, "Libya and Islamism: The Deeper Story," *Open Democracy*, 7 Agustus 2012, diakses pada 7 September 2012 dari <https://www.opendemocracy.net/en/libya-and-islamism-deeper-story/>.

⁶¹ "Draft Constitutional Charter for the Transitional Stage," 7 Februari 2011, diakses pada 7 September 2013 www.al-bab.com/.../libya/Libya-Draft-Constitutional-Charter-for-the-Transitional-stage.pdf (<https://www.refworld.org/pdfid/5b645f5d4.pdf>).

⁶² Secara substansial, politik Islam dimaknai sebagai sikap dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang melahirkan perilaku politik (*political behavior*) dan budaya politik (*political culture*) yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

lemen. Meskipun pada waktu pemilu, *Justice and Contruction Party* hanya menempati posisi kedua perolehan suara, partai ini dapat membangun sebuah koalisi yang solid dengan elemen-elemen lain di parlemen yang kekuatannya sangat diperhitungkan. Keberhasilan sebuah partai di Libya memang tidak hanya dilihat dari tingginya perolehan suara dalam pemilu semata, tetapi juga sangat tergantung pada bagaimana partai tersebut dapat bekerja sama membangun koalisi dengan anggota parlemen lainnya, terutama dari kalangan independen. Sebanyak 120 kursi dikuasai oleh kalangan independen yang terdiri dari para ulama, perwakilan Kabilah, pengusaha, akademisi, dan elemen masyarakat kelas menengah. Ikhwanul Muslimin bahkan menerjunkan para kadernya untuk bersaing dalam pemilu melalui jalur independen ini, dan beberapa di antaranya memperoleh kursi di parlemen. Senussi Beseirki, analis politik Libya, menyatakan bahwa terdapat 80% kursi independen ditempati oleh kalangan Islam yang terkenal dengan religiositasnya.⁶³

Kelompok Ikhwanul Muslimin (IM) Libya sudah ada sejak 1949. IM didirikan oleh sekelompok alumni mahasiswa Universitas Al-Azhar, Mesir. Pada masa kekuasaan Qadhafi, kelompok itu mendapat intimidasi dari rezim sehingga banyak aktivisnya yang dibunuh atau melarikan diri ke luar negeri. Pada 1976, IM dilarang di Libya, tetapi kembali eksis pada 1982. Mereka membangun aliansi dengan gerakan Islam lainnya untuk mengubah sistem politik Libya melalui gerakan perlawanan. IM gagal setelah sebagian besar aktivisnya ditangkap. Pada 1999, rezim Qadhafi memulai dialog untuk mengakhiri kekerasan di Libya. Kegiatan itu dilanjutkan dengan dialog intensif pada 2005 dan 2006 yang bertujuan menetralisasi kelompok oposisi, termasuk gerakan radikal Islam di Libya.

Secara historis, IM Libya gagal membangun basis massa karena kurangnya kesempatan kelompok itu untuk membangun komunikasi politik dengan massa. Perolehan suara *Justice and Contruction Party* dalam pemilu 2012 menunjukkan rendahnya dukungan publik

⁶³ Pargeter, *Libya and*.

terhadap Ikhwanul Muslimin. Kondisi tersebut jelas berbeda jika dibandingkan kekuatan politik IM yang ada di Tunisia dan Mesir. Di dua negara itu, IM sudah membangun jaringan sejak lama.

C. PENUTUP

Pasca-*Arab Spring*, ada dinamika sosial-politik yang berbeda di Tunisia, Mesir, dan Libya. Di Tunisia, ada pemilu parlemen yang diselenggarakan pada 23 Oktober 2011. Pada waktu itu, Partai *An-Nahdah* memenangkan 41% kursi atau 89 dari 217 kursi di Majelis Konstituante Nasional (*National Constituent Assembly-NCA*). Kemudian, *An-Nahdah* membentuk pemerintahan yang berkoalisi dengan partai kiri-tengah *Congress for the Republic* dan *Ettakatol* (*Democratic Forum for Labor and Liberties*). Koalisi itu dikenal dengan sebutan Koalisi Troika.

Tunisia memulai transisi demokrasi. *An-Nahdah* sebagai pemenang pemilu tidak dapat menjalankan amanahnya dengan baik. Ada berbagai demonstrasi yang mendesak pemerintah untuk mundur hingga pembunuhan tokoh oposisi. Akibatnya, posisi *An-Nahdah* sebagai partai pemegang kekuasaan semakin terjepit. Mereka dianggap gagal dalam menjalankan fungsi menjaga keamanan di Tunisia dan mengawal transisi demokrasi di Tunisia. *An-Nahdah* kemudian banyak mendapatkan penentangan. Protes anti-pemerintah pecah di berbagai daerah di Tunisia. Para pemrotes menuntut *An-Nahdah* mundur dari pemerintahan karena dianggap tidak mampu mengatasi berbagai permasalahan di Tunisia.

Menghadapi berbagai persoalan yang cukup rumit itu, pada 28 September 2013, pemerintah koalisi yang dipimpin oleh *An-Nahdah* menyetujui tuntutan untuk mundur dari kekuasaan. Keputusan itu diambil untuk menghindari kekacauan situasi politik di Tunisia. Mundurnya *An-Nahdah* sebagai pimpinan koalisi pemerintahan merupakan tindakan cepat tanggap pada situasi politik di Tunisia pada waktu itu.

Pada 2014, dilakukan pemilu parlemen dan presiden di Tunisia. Pemilu anggota parlemen diselenggarakan pada 26 Oktober 2014.

Hasil pemilu legislatif menunjukkan bahwa Partai Nida Tunis mendapatkan 86 kursi. Partai *An-Nahdah* mengalami penurunan dengan menempati posisi kedua (69 kursi).

Tunisia terus menjalankan program reformasi politiknya. Pada Mei 2018, dilaksanakan pemilihan perwakilan daerah. Kekuatan politik Islam di Tunisia tampaknya masih mendapatkan tempat untuk berkiprah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain *An-Nahdah* yang berpolitik praktis, ada kelompok Salafi yang diwakili oleh Partai *Jabhat Al-Islah (The Reform Front)* dan *Hizb al-Tahrir*. Ada juga gerakan sosial Islam, seperti *Ansar al-Shari'a (Supporters of the Sharia)*, yang menolak berpartisipasi dalam proses politik. Ada juga kelompok-kelompok *violent vigilante* yang mengidentifikasi diri sebagai Salafi.

Sementara itu, Mesir mengalami dinamika politik yang lebih ruwet pasca-*Arab Spring*. Demokratisasi yang diharapkan ada setelah lengsernya Presiden Husni Mubarak, tampaknya tidak begitu terwujud. Kudeta militer Mesir pada 3 Juli 2013 menjadi protret buram demokratisasi di negara piramid itu.

Demokratisasi yang berlangsung di Mesir telah menghantarkan kelompok Islam melaju ke puncak kekuasaan. Mereka berhasil menguasai parlemen dan kursi kepresidenan. Tentunya, keberhasilan kelompok Islam itu telah menghilangkan atau mengurangi kekuasaan militer yang telah berlangsung lama di Mesir.

Pada pemilu parlemen pasca-Mubarak, yang menang adalah Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) yang berafiliasi pada gerakan Ikhwanul Muslimin (IM), disusul oleh kelompok Salafi dengan Partai Nour. Pemilu parlemen itu diselenggarakan dalam tiga tahap, yaitu pada 28 November 2011, 14 Desember 2011, dan 3 Januari 2012 (sekitar enam minggu). Masyarakat Mesir pada waktu itu memilih 498 anggota parlemen. Sepuluh kursi anggota parlemen lainnya ditunjuk oleh penguasa militer. Dari 498 anggota yang dipilih tersebut, dua pertiga dipilih dari daftar calon partai politik, sementara sepertiga dari calon independen.

Ketika diadakan pemilihan presiden, yang menang adalah Muhammad Mursi, seorang tokoh Ikhwan. Kemenangan kelompok Islam tersebut cukup mengagetkan kalangan elite Mesir yang cenderung liberal dan sekuler. Kalangan militer juga mengkhawatirkan kemenangan tersebut.

Presiden Mursi menghadapi masalah politik yang begitu riuh. Selain itu, ekonomi Mesir juga terpuruk. Kondisi itu tentunya membebani kekuasaan Presiden Mursi. Kalangan militer yang menganggap Mursi tidak sanggup lagi untuk menanggung kondisi tersebut kemudian mengambil alih kekuasaan pada 3 Juli 2013 malam. Kudeta militer tak berdarah itu telah mengakhiri kekuasaan Presiden Mursi yang dipilih secara demokrasi. Mursi beserta aparatnya kemudian menjadi tahanan militer.

Setelah kudeta militer, partisipasi masyarakat melalui pemilu diatur sesuai kepentingan militer. Konstitusi Mesir 2014 menguntungkan kelompok militer. Hal itu tidak mengherankan karena mereka memenangkan perpolitikan di Mesir dengan mengambil alih kekuasaan dari Presiden Mursi. Pada pemilihan presiden tahun 2014, yang menang adalah Jenderal Abdul Fattah al-Sisi, tokoh militer yang melakukan kudeta. Dengan terpilihnya Jenderal Al-Sisi menjadi Presiden pada 2014, penguasa Mesir kembali dari kalangan militer.

Kemenangan Al-Sisi telah menandai kembalinya kalangan militer dalam dunia politik Mesir. Artinya, secara politik kenegaraan, posisi militer Mesir masih kuat dan dominan, apalagi pada 2018 Al-Sisi kembali memenangkan pemilu presiden. Pemungutan suara tiga hari yang dimulai pada 26 Maret 2018 itu telah memberikan legitimasi ulang pada petahana Al-Sisi. Kemenangan suaranya cukup telak dengan 92% suara.

Sejak kudeta militer (2013), kekuatan politik Ikhwanul Muslimin diberangus dan dilarang dalam kehidupan bernegara dan berbangsa di Mesir. Namun, ada partai politik Islam, Partai Noor, yang masih diperbolehkan berkiprah dalam perpolitikan Mesir. Partai politik yang berafiliasi ke Salafi itu ikut mendukung kudeta militer

tersebut. Dengan sikap seperti itu, Partai Noor masih bisa eksis. Selain itu, di Mesir ada al-Wasat, al-'Amal, dan beberapa organisasi militan, seperti Al-Jamaah al-Islamiyah dan gerakan al-Jihad.

Hal yang paling unik di Mesir adalah sufisme sangat kuat, dan banyak alirannya. Namun, hal itu tidak memberikan dampak yang kuat bagi perubahan politik. Jika dilihat dari sejarah pendirinya Hasan Al-Banna dan perkembangan IM yang menyebar dari kafe-kafe di kalangan pengikut sufisme/tarekat, gerakan sufisme tersubstitusi dengan gerakan sosial politik yang ada, terutama IM.

Dinamika politik di Libya tidak sama dengan yang terjadi di Tunisia dan Mesir. Pemimpin Libya, Muammar Qadhafi, tidak mudah ditumbangkan ketika bertiup angin *Arab Spring*. Qadhafi yang sudah lama berkuasa di Libya tidak mudah ditaklukkan oleh para demonstran.

Setelah Qadhafi tewas, Dewan Transisi Nasional (NTC) yang didukung PBB membentuk peta jalan demokratisasi dengan meng-agendakan pemilu dan pembentukan konstitusi di Libya. Pada 7 Juli 2012, diselenggarakan pemilu bersejarah dalam politik Libya. Pemilu tersebut merupakan momentum penyerahan kekuasaan dari pemerintah transisi (NTC) ke *General National Congress* (GNC) atau Kongres Nasional Libya.

Sama halnya dengan pemilu di Tunisia dan Mesir, pemilu di Libya melahirkan dua aliran partai politik yang saling bersaing memperebutkan suara mayoritas di parlemen. *Pertama*, partai-partai Islam yang diwakili dua partai besar, yaitu *Justice and Development Party* (JDP) yang merupakan representasi dari gerakan Ikhwanul Muslimin Libya dan Partai Al Wathan. *Kedua*, kubu nasionalis-liberal yang diwakili beberapa partai besar, seperti *National Forces Alliance* (NFA) pimpinan Mahmoud Jibril, *National Centrist Party* (NCP) yang didirikan Ali Tarhouni, serta *National Front Party* (NFP) yang dipimpin Muhammad Yusuf Al Magharif, mantan duta besar Libya untuk India pada era Qadhafi.

Hasil akhir perhitungan suara menunjukkan bahwa partai liberal *National Forces Alliance* (NFA) yang dipimpin Mahmoud

Jibril memperoleh suara mayoritas dengan 39 kursi atau 49% dari total 80 kursi yang diperebutkan. Sementara itu, JDP (sayap politik Ikhwanul Muslimin) hanya mendapat 17 kursi (21% suara). Partai Al Wathan yang didukung Salafi hanya memperoleh 3,45% suara yang berarti tidak memperoleh satu kursi pun di parlemen.

Demokratisasi terus berlangsung di Libya. Pada 2014, dilakukan pemilu anggota Majelis Draf Konstitusi (*Constitutional Drafting Assembly-CDA*) Libya. Pemilihan anggota Majelis itu sesuai dengan Deklarasi Konstitusi GNC pada 9 April 2013; UU 17 tahun 2013 tentang Pemilu; UU 8 tahun 2013 tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum Tinggi (*High National Election Commission-HNEC*); dan peraturan yang disahkan oleh komisionaris HNEC.

Perpolitikan Libya terus bereformasi. Pada akhir 2015, masyarakat Libya berhasil merumuskan “kesepakatan politik.” Pelaksanaan kesepakatan ini untuk mengatasi tantangan memerangi terorisme, mereformasi, dan membangun lembaga-lembaga negara, merangsang pertumbuhan ekonomi, menghadapi fenomena migrasi ilegal, dan mengonsolidasikan supremasi hukum dan hak asasi manusia di seluruh negeri.

Kesepakatan itu menjadi langkah awal dalam perjalanan panjang menuju pemulihan dan kemakmuran Libya. Transisi politik tidaklah mudah. Mengubah otoritarianisme dengan demokrasi sejati memerlukan upaya yang luar biasa dan harus dilakukan terus-menerus serta tidak ada jalan pintas. Namun, kesepakatan ini adalah langkah pertama yang baik yang akan menempatkan Libya di tempat yang kokoh untuk menghadapi tantangan masa depan.

Sejak tahun 2011 sampai tahun 2018, Libya berbenah diri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada tahapan demokrasi di Libya. Tahun 2016–2017 adalah masa cukup sibuk di perpolitikan Libya setelah kesepakatan politik pada 2015.

Pasca-Arab Spring, kekuatan politik Islam di Libya belum mendapatkan kemenangan dalam pemilu. Mereka tetap dapat berkiprah dalam kehidupan berpolitik dan bernegara di Libya, tetapi tidak menjadi mayoritas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Basyar, M. Hamdan. *Pertarungan dalam Berdemokrasi: Politik di Mesir, Turki, dan Israel*. Jakarta: UI Press, 2015.
- Blanchard, Christopher M. "Libya: Transition and U.S. Policy." Congressional Research Service (2 Mei 2018): 5.
- Di-Laurea, Tesi. "Libya Before and After Gaddafi: An International Law Analysis." Tesis Magister di Universita Ca'Foscari, Venezia, 2012.
- Jebnoun, Noureddin. "Salafi Trouble in Tunisia's Transition." *Jadaliyya*, 13 Juni 2012.
- Kartini, Indriana. "Demokrasi dan Kebangkitan Politik Islam di Tunisia." Dalam *Agama dan Demokrasi: Munculnya Kekuatan Politik Islam di Tunisia, Mesir, dan Libya*, diedit oleh Indriana Kartini. Bandung: Pustaka Jaya, 2016.
- Mahjar-Barducci, Anna. "Salafists in Tunisia." *Gatestone Institute, International Policy Council*, 23 Februari, 2012.
- Schraeder, Peter J. "Tunisia's Jasmine Revolution and the Arab Spring: Implications for International Intervention." *Orbis* 56, no. 4 (Autumn 2012): 662–675.
- Stepan, Alfred. "Tunisia's Transition and The Twin Tolerations." *Journal of Democracy* 23, no. 2 (April 2012): 90.
- Tamburaka, Atriadi. *Revolusi Timur Tengah: Kejatuhan Para Penguasa Otoriter di Timur Tengah*. Yogyakarta: Narasi, 2011.

Data

- National Democratic Institute (NDI). Final Report on the 2014 Legislative and Presidential Elections in Tunisia. Washington: National Democratic Institute, 2015.
- The Carter Center. *Final Report of the Carter Center Mission to Witness the 2011–2012 Parliamentary Elections in Egypt*. Atlanta: The Carter Center, 2012.
- The Carter Center. *Legislative and Presidential Elections in Tunisia: Final Report*. Atlanta: The Carter Center, 2014.
- The Carter Center. *National Constituent Assembly Elections in Tunisia*. Atlanta: The Carter Center, 2011.

The Carter Center. *The 2014 Constitutional Drafting Assembly Elections in Libya: Final Report*. Atlanta: The Carter Center, 2014.

Internet

- “Abdel-Fattah al-Sisi Wins a Second Term in Egypt.” *The Economist*, 30 Maret 2018. Diakses pada 26 Oktober 2018 dari <https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2018/03/30/abdel-fattah-al-sisi-wins-a-second-term-in-egypt>.
- Al-Jazairy, Mohammad. “Salafism in Tunisia: A Brief History,” *Asbarq al-Awsat*, 5 Agustus 2012. Diakses pada 7 Agustus 2013 dari <https://eng-archive.aawsat.com/theaawsat/features/salafism-in-tunisia-a-brief-history>.
- Chivvis, Christopher S., Keith Crane, Peter Mandaville, dan Jeffrey Martini. *Libya’s Post-Qaddafi Transition: The Nation-Building Challenge*. Diakses pada 26 Agustus 2013 dari https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR129.html.
- “Draft Constitutional Charter for the Transitional Stage.” 7 Februari 2011. Diakses pada 7 September 2013 dari www.al-bab.com/.../libya/Libya-Draft-Constitutional-Charter-for-the-Transitional-stage.pdf (<https://www.refworld.org/pdfid/5b645f5d4.pdf>).
- “English Text of President Morsi’s New Egypt Constitutional Declaration.” *Abram Online*, 12 Agustus 2012. Diakses pada 25 November 2012 dari <http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/0/50248/Egypt/0/English-text-of-President-Morsis-new-Egypt-Constit.aspx>.
- “English Text of Morsi’s Constitutional Declaration.” *Abram Online*, 12 November 2012. Diakses pada 25 November 2012 dari <http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/0/58947/Egypt/0/English-text-of-Morsis-Constitutional-Declaration-.aspx>.
- El-Gundy, Zeinab. “El-Sisi and Sabahi Speak on Key Issues: A Virtual Debate.” *Abram Online*, 23 Mei 2014. Diakses pada 26 Mei 2014 dari <http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/101501/Egypt/Politics-/ElSisi-and-Sabahi-speak-on-key-issues-A-virtual-de.aspx>.
- “Gunmen Attack Libya’s Interior Ministry in Tripoli Forcing its Closure.” *Al Arabiya*, 3 Juli 2013. Diakses pada 7 Agustus 2013 dari <http://english.alarabiya.net/en/News/africa/2013/07/03/Gunmen-Attack-Libya-s-interior-ministry.html>.
- High National Elections Commission. “Libya Election 2012.” Diakses pada 7 Agustus 2013 dari www.hnec.ly.

- “Libyan Political Agreement as Signed on 17 December 2015.” Diakses pada 9 Oktober 2018 dari <https://unsmil.unmissions.org/sites/default/files/Libyan%20Political%20Agreement%20-%20ENG%20.pdf>.
- Noroyono, Bambang. “Ikhwanul Muslimin Dikebiri Ayat Suci.” *Republika*, 26 Agustus 2013. Diakses pada 28 Agustus 2013 dari <http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/13/08/26/ms50xz-ikhwanul-muslimin-dikebiri-ayat-suci/>.
- Noroyono, Bambang. “Militer Mesir Minta Ulama Moderat Keluarkan Fatwa Haramkan IM.” *Republika*, 26 Agustus 2013. Diakses pada 28 Agustus 2013 dari <http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/13/08/26/ms50ln-militer-mesir-minta-ulama-moderat-keluar-keluar-fatwa-haramkan-im>.
- Pargeter, Alison. “Libya and Islamism, the Deeper Story.” *Open Democracy*, 7 Agustus 2012. Diakses pada 7 September 2013 dari www.opendemocracy.net/alison-pargeter/libya-and-islamism-deeper-story.
- “Pemilu legislative 2011.” Elections 2011. Diakses pada 25 Oktober 2013 dari <http://www.elections2011.eg/index.php/results>.
- “PM Tunisia Bentuk Pemerintahan Baru.” *BBC Indonesia*, 7 Februari 2013. Diakses pada 15 Oktober 2018 dari https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/02/130207_tunisi_belaid_pemerintahan_baru_new_government.shtml.
- Purwadi, Didi. “Mustafa Abu Shagur Terpilih Jadi PM Libya.” *Republika*, 13 September 2012. Diakses pada 7 Juli 2013 dari <https://www.republika.co.id/berita/internasional/global/12/09/13/ma9jvu-mustafa-abu-shagur-terpilih-jadi-pm-libya>.
- “Result of Shura Council Elections.” Diakses pada 12 April 2012 dari <http://egyptelections.carnegieendowment.org/2012/02/29/results-of-shura-council-elections>.
- “Tunisia Election Results: Nida Tunis Wins Most Seats, Sidelining Islamists.” *The Guardian*, 30 Oktober 2014. Diakses pada 17 Oktober 2018 dari <https://www.theguardian.com/world/2014/oct/30/tunisia-election-results-nida-tunis-wins-most-seats-sidelining-islamists>.
- “Tunisia, Ennahda Mundur untuk Akhiri Krisis Politik.” *Kompas*, 30 September 2013, 8.
- “Tunisia: Can Niqabs and Bikinis Live Side-by-side?” *BBC*, 27 Maret 2013. Diakses pada 12 Maret 2019 dari <http://www.bbc.co.uk/news/world-af-rica-21925753>.

- Tozeur, F. T. "Tunisia's Economy Still struggling." *The Economist*, 19 Maret 2013. Diakses pada 12 Maret 2019 dari <http://www.economist.com/blogs/pomegranate/2013/03/tunisias-economy>.
- "Tokoh oposisi Tunisia Ditembak Mati." *BBC Indonesia*, 25 Juli 2013. Diakses pada 15 Oktober 2018 dari https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/07/130725_tunisia_pembunuhan.
- Interview with Rachid Ghannouchi, *France 24*, 13 November 2011. Diakses pada 20 Oktober 2013 dari <http://alhattin.com/2011/11/13/rashid-al-ghannushi-rejects-the-idea-of-khilafah-wants-reforms/>
- "Tunisia's Ennahda Withdraws—But Why?" *Deutsche Welle*, 2 Oktober 2013. Diakses pada 10 Oktober 2013 dari <http://www.dw.de/tunisias-ennahda-withdraws-but-why/a-17130859>.
- "Tunisian Street Vendor Dies Morning After Self-Immolation." *Aljazeera*, 13 Maret 2013. Diakses pada 29 Oktober 2013 dari <https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/03/201331385433367799.html>.
- "Tunisia's Ennahda Says it is 'Natural' for Islamists to Lead the Country." *Al Arabiya*, 26 Oktober 2011. Diakses pada 20 Oktober 2013 dari <https://www.alarabiya.net/articles/2011/10/26/173810.html>.



BAB 5 POLITIK ISLAM DI NEGARA MASIH BERKEMELUT: SURIAH DAN YAMAN

M. Fakhry Ghafur

Gelombang *Arab Spring* sebagai simbol protes terhadap rezim otoriter yang berawal di Tunisia telah berdampak pada pergolakan politik dan konflik sektarianisme di sejumlah negara Timur Tengah, seperti Mesir, Libya, Yaman, Bahrain, Suriah, hingga ke beberapa negara lain dengan intensitas konflik yang berbeda satu dengan lainnya. *Arab Spring* sedari awal dan tanpa disadari telah meluaskan pengaruhnya, baik melalui slogan, metode, maupun *framing* peristiwa, sebagai tuntutan rakyat untuk pergantian rezim yang lambat laun melengserkan sejumlah rezim penguasa.

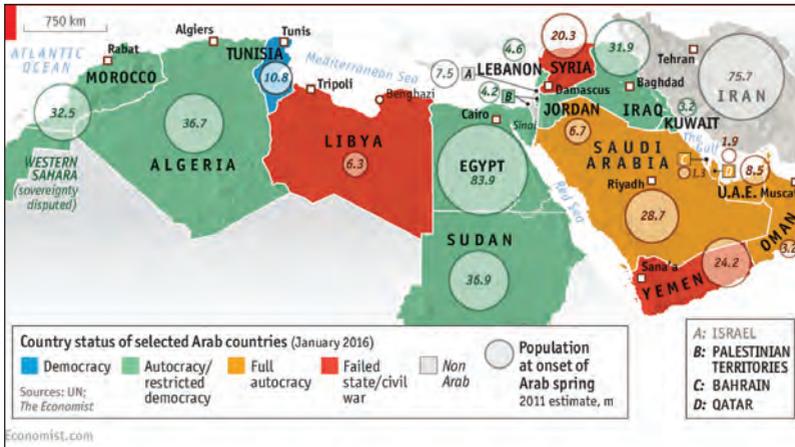
Proses transisi dari sistem otoriter ke sistem demokrasi gagal menciptakan pemerintahan yang demokratis dan mengakibatkan konflik dan perang saudara yang berkelanjutan, menyuburkan aksi ekstremisme, terorisme, dan intervensi militer akibat keterlibatan aktor politik regional maupun global. Pertarungan antara rezim yang mempertahankan status quo dan kelompok oposisi yang menuntut perubahan telah membentuk polarisasi gerakan perlawanan dalam bentuk perlawanan bersenjata untuk memenuhi tujuan politik mereka. Kekuatan dan aktor politik dan gerakan sosial baru muncul sebagai pemain yang berperan signifikan dalam konflik politik di beberapa negara.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Pergolakan di Suriah mengakibatkan sektarian yang kompleks dan perang saudara yang tak berkesudahan. Dengan berbagai cara, setiap kelompok yang bertikai berusaha menguasai sejumlah fasilitas negara, mencoba menyuguhkan wajah pemimpin alternatif, serta mengumandangkan demokratisasi di dalam dan luar negeri melalui media yang dikuasainya. Terdapat beberapa kelompok yang terlibat dalam konflik Suriah, yaitu kalangan sekuler *the National Coordination Committee (NCC) for Democratic Transformation*; *the Syrian National Council (SNC)* yang didukung Ikhwanul Muslimin; *the Free Syrian Army*; serta kelompok Islam lainnya, seperti Anshar Syariah, ISIS. Polarisasi kelompok oposisi rezim membuat konflik Suriah terinternasionalisasikan. Sejumlah kalangan memandang bahwa jika konflik terus berlanjut tanpa ada perubahan kepemimpinan, Suriah diprediksi menjadi negara gagal atau *failed state*. Sejumlah faktor, seperti kesenjangan sosial-ekonomi, diskriminasi, pengangguran di kalangan pemuda yang semakin meningkat, maraknya pelanggaran HAM, serta menguatnya konflik sektarianisme menjadi penyebab kehancuran negara. Berdasarkan laporan *the Economist* pada 2016, Suriah masuk dalam kategori *Failed States* lima tahun setelah terjadinya *Arab Spring*.¹

Sama halnya dengan Suriah, pergolakan politik dan konflik yang berkepanjangan imbas dari *Arab Spring*, mengakibatkan perekonomian Yaman semakin memprihatinkan. Setengah populasi dari penduduk Yaman hidup dalam kondisi yang memprihatinkan dengan penghasilan kurang dari 2US\$ per hari, dan sepertiga penduduknya kelaparan. Beberapa tahun pasca-*Arab Spring*, Yaman masuk negara teratas yang terindeks *Failed States*.

¹ “The *Arab Spring*, Five Years On,” *The Economist*, 11 Januari 2016, diakses pada 3 Maret 2019 dari <https://www.economist.com/graphic-detail/2016/01/11/the-arab-spring-five-years-on>.



Gambar 5.1 Peta Kondisi Suriah dan Yaman Pasca-Arab Spring²

Musim semi Arab atau *Arab Spring* di Yaman pada 23 November 2011 merupakan tuntutan para pemprotes yang meminta Presiden Ali Abdullah Saleh mundur dari jabatannya karena dianggap gagal melaksanakan reformasi ekonomi di Yaman. Atas desakan sejumlah negara yang tergabung dalam Dewan Kerjasama Teluk (GCC), Ali Abdullah Saleh bersedia mundur dari jabatannya dan digantikan oleh Wakil Presiden Abd Rabbuh Mansur Hadi sebagai presiden. Di bawah pimpinan Mansur Hadi, pemerintahan transisi membentuk *National Dialogue Conference* (NDC) yang melibatkan partai besar, seperti *General People's Congress* (GPC) dengan sejumlah kekuatan oposisi yang tergabung dalam *Joint Meeting Parties* (JMP) yang terdiri dari gabungan antara partai Islam, *Al-Islah*, Partai Sosialis Yaman (*al-Hizb al-Ishtiraki al-Yamani*/Yemen Socialist Party/YSP), gerakan *Houthi*, dan sejumlah perwakilan masyarakat dan para pemuda yang ingin membangun konsensus politik Yaman. Dalam perjalanannya, konsensus yang dibentuk mengalami kegagalan setelah pada

² “The Arab Spring.”

2014 gerakan Syiah *Al-Houthi* melakukan pemberontakan dengan menguasai ibu kota Sana'a, istana presiden, dan parlemen.

Bab ini membahas sejauh mana pengaruh *Arab Spring* terhadap dinamika kehidupan sosial-politik keagamaan di Suriah dan Yaman dan mengintegrasikan penelitian yang sudah dikaji. Terdapat beberapa pertanyaan yang berusaha dijawab dalam tulisan ini, yaitu bagaimana peta politik Islam di kedua negara pasca-*Arab Spring* dan bagaimana perkembangan realitas terkini sosio-politik dan kultural di kedua negara kasus.

A. DINAMIKA POLITIK DI SURIAH DAN YAMAN PASCA-ARAB SPRING

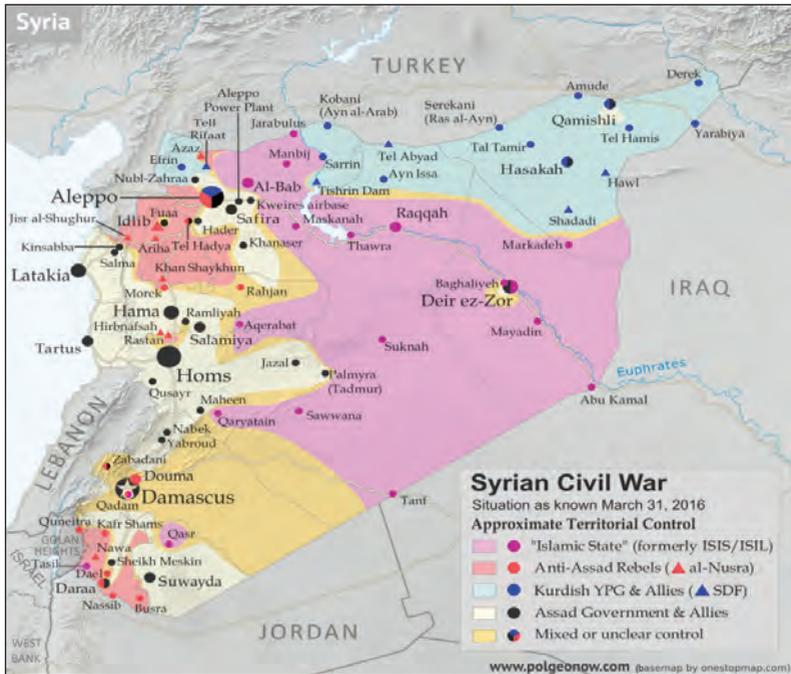
Dinamika politik di Suriah dan Yaman tidak bisa dilepaskan dari sejarah pembentukan negara yang melatarbelakanginya. Di Suriah, ideologi nasionalisme Arab yang dibangun rezim Assad telah mengubah kehidupan sosial-politik negara tersebut. Partai Baath dan institusi militer yang dibentuk menjadi kekuatan politik utama rezim.³

Melalui institusi militer *the Syrian Arab Army* (SAA) dan tentara profesional terlatih dalam *National Defense Force* (NDF) yang didukung kelompok milisi Syiah, pemerintah rezim menyerang basis kelompok oposisi di sejumlah daerah. Sejak berdiri, NDF menjadi institusi militer penting yang dapat mempertahankan kekuasaan rezim Assad hingga saat ini.⁴ NDF tidak sendiri, tetapi juga didukung milisi Syiah *Alawiyah* pro-rezim dan kelompok *Hizbullah* yang datang ke Suriah sejak pertengahan 2012. Adapun gerakan oposisi yang diberangus pemerintah tergabung dalam SNC yang sebagian besar anggotanya dari kalangan Islam. Organisasi ini dibentuk sebagai wadah menggalang kekuatan oposisi di dalam dan

³ Prof. Abdul Rashid Moten, wawancara di Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAQ), Kuala Lumpur Malaysia, pada 23 September 2014.

⁴ Amos Perlmutter, *The Roles of Military and Rules Politis* (London: Frank Cass and Company Limited, 1981).

luar negeri. Selain itu, dibentuk pula *National Coalition for Syrian Revolutionary and Opposition Force* (NCSR) untuk menyatukan negara-negara pendukung kelompok koalisi oposisi Syria.



Gambar 9. Peta Konflik Suriah⁵

Di Yaman, persatuan antara *Yemen Arab Republic* dan *the People Democratic Republic of Yemen* (PDRY) telah melahirkan pemerintahan modern Yaman dengan sistem politik multi-partai. Sejak berdiri, Republik Yaman didominasi oleh tiga kekuatan partai politik besar, yaitu partai pemerintah *General People Congress* (GPC), partai Islam *Al-Islah*, dan Partai Sosialis Yaman. GPC merupakan partai

⁵ “Syrian Civil War Control Map: April 2016,” diakses pada 3 Agustus 2019 dari <https://www.polgeonow.com/2016/03/syrian-civil-war-control-map-april-2016.html>.

bentukan pemerintah yang berisi tokoh agama dan sosial yang terdiri atas para syeikh dan intelektual sebagai representasi kekuatan tradisional dan suku. Pemimpin tertinggi dari partai ini adalah mereka yang mempunyai ikatan personal kesukuan dan kekerabatan dengan presiden. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika GPC mempunyai basis massa yang luas di kalangan tradisional.⁶

Sementara itu, blok oposisi di Yaman tergabung dalam *the Join Meeting Parties* (JMP) yang terdiri atas Partai Islah dan Partai Sosialis Yaman (YSP) yang merupakan partai berkuasa pada masa pemerintahan *the People's Democratic Republic of Yemen* (PDRY). Berdirinya koalisi ini tidak terlepas dari kekhawatiran kelompok oposisi akan dominasi GPC dan keinginan menandingi kekuatan rezim. Perpecahan sebagai akibat dari perbedaan ideologi menjadikan kelompok oposisi belum begitu solid.

Partai *Al-Islah* merupakan partai Islam terbesar dalam koalisi dan menjadi partai pendukung pemerintah rezim Ali Abdullah Saleh yang turut serta dalam kabinet selama periode 1994–1997. Setelah itu, *Al-Islah* malah menjadi kelompok oposisi yang mengambil jarak dengan pemerintah. Partai ini terdiri atas beberapa kelompok, yaitu kelompok suku dan IM. Meskipun ideologi IM sangat mewarnai sepak terjang *Al-Islah*, tribalisme yang kuat di Yaman menjadikan partai lebih memiliki ikatan yang kuat dengan rezim. Kekuatan kedua dalam kubu koalisi adalah YSP yang sebagian besar anggotanya berasal dari gerakan komunis Yaman. Partai ini mengusung ekonomi sosialis dan kebijakan nasionalisasi serta redistribusi lahan bersama dengan rezim di seluruh wilayah Yaman.

Unifikasi Yaman membawa persaingan alot antara YSP dan GPC yang mengakibatkan perang saudara berkepanjangan di Yaman. Berkuasanya GPC pada 1994 mendorong pengembosan kekuatan YSP oleh rezim. Pada waktu itu, banyak aktivis YSP yang ditangkap dan aset partai yang dibekukan. Persaingan antara partai-partai

⁶ A.A.H. Al-Yemeni, *The Dynamics of Democratization: Political Parties in Yemen* (Bonn: Freidrich Ebert Stiftung, 2003), 26.

oposisi dengan kubu rezim pemerintah terus berlangsung, bahkan sampai terjadinya *Arab Spring* dan terbentuknya pemerintahan baru.

Pasca-*Arab Spring*, kelompok oposisi dan rezim penguasa bertarung untuk memperebutkan kekuasaan.⁷ Kelompok-kelompok yang ditekan pada masa kekuasaan rezim muncul ke permukaan untuk menentang diskriminasi dan kesewenang-wenangan. Di kedua negara kajian, kelompok Islam yang berafiliasi dengan IM menjadi penggerak perlawanan terhadap rezim, seperti milisi IM di Suriah dan *Al-Islah* di Yaman. Semula, kedua gerakan dapat tampil sebagai pemain kunci dalam politik dan konflik, tetapi belakangan muncul gerakan yang begitu masif terlibat, seperti ISIS di Suriah dan *Al-Houthi* di Yaman. Pada bagian berikutnya, peta kekuatan politik Islam di dua negara tersebut akan dibahas lebih jauh.



Gambar 10. Peta Konflik Yaman⁸

⁷ Wawancara dengan Prof. Abdel Majid Charfi, Direktur Baitul Hikmah Tunisia pada 20 April 2018.

⁸ “Yemen Control Map & Report - January 2018,” diakses pada 3 November 2019 dari <https://www.polgeonow.com/2019/10/map-who-rules-yemen-southern-separatists.html>.

B. PETA KEKUATAN POLITIK ISLAM DI SURIAH DAN YAMAN PASCA-ARAB SPRING

Konflik yang terjadi sebagai imbas gelombang *Arab Spring* telah mendorong munculnya gerakan perlawanan dari kelompok Islam. Di Suriah, terdapat empat kelompok yang intensif melakukan perlawanan sejak awal pergolakan, yaitu Ikhwanul Muslimin, Salafiyah, Al-Qaeda, dan Sufi.

Di antara keempat kelompok tersebut, IM menjadi kelompok yang dominan dalam perlawanan terhadap rezim—meskipun dalam perjalanannya tergantikan oleh kelompok yang lebih radikal. Munculnya IM sebagai aktor yang dominan dalam konflik di Suriah tidak lepas dari kehadirannya yang sudah cukup lama, bahkan sebelum *Arab Spring*. Jejak langkah perjuangannya dapat ditelusuri sejak rezim Assad berkuasa.⁹ IM Suriah berdiri sebagai bentuk kristalisasi dakwah Islam yang marak sejak pertengahan 1930–1940. Pada saat itu, gerakan dakwah Islam banyak terinspirasi dari ideologi gerakan IM di Mesir. Pemikiran tersebut dibawa oleh para mahasiswa Suriah yang banyak menimba ilmu di sejumlah universitas ternama di Mesir. Pemikiran yang disampaikan tidak jauh dengan apa yang disampaikan oleh para tokoh IM, seperti pentingnya melawan westernisasi, sekularisme, antisipasi maraknya dekadensi moral dan perilaku sosial-politik menyimpang, serta masalah kristenisasi yang sedang marak di Mesir.

Selain itu, para ulama dan aktivis IM Suriah begitu militan serta mempunyai ikatan emosional yang kuat dengan gerakan, seperti Syeikh Mustafa Ash-Shiba'i (Alumnus Universitas Al-Azhar yang menetap di Hama, salah seorang murid Imam Hasan Al-Banna sekaligus pendiri IM Suriah), Syeikh Al-Bayouni, serta Syeikh Said Hawa. Mereka kerap menentang sistem sekularisme di Suriah, bahkan menyerukan jihad melawan rezim sekularis. Karya-karya mereka menjadi rujukan utama para aktivisnya yang tersebar luas

⁹ Lihat Abdurrahman Al-Hajj, *Al-Ikhwan Al-Muslimun fi Suria* (Dubai: Al-Mesbar Studies, 2012).

di sejumlah daerah di Suriah, seperti Halb, Hamma, Hams, dan Damaskus.¹⁰ Rezim Assad begitu intensif menyerang daerah tersebut untuk melemahkan basis perlawanan IM. Pada era 1950-an, daerah Hamma pernah dibombardir rezim pasca-Said Hawa menyampaikan khotbahnya yang terkenal tentang Islam dan dasar negara Suriah.

Selama beberapa dekade gerakan perlawanan terhadap rezim di Suriah, IM memiliki corak dan warna gerakan yang berbeda-beda, sesuai dengan situasi dan kondisi yang tengah berkembang. Pada 1950-an, misalnya, IM Suriah mulai aktif dalam kancah politik dengan masuknya sejumlah aktivis pada institusi dan lembaga pemerintahan. Namun, dominasi partai Baath dan menguatnya nasionalisme Arab menggerus kekuatan IM yang pada akhirnya menimbulkan konflik yang berkelanjutan. Pada saat itu, rezim khawatir dengan kemajuan gerakan IM.

Pada 1990-an, IM mulai melakukan perubahan dengan melakukan reformasi gerakan di bawah pimpinan Ali Sadruddin Al-Bayouni (1996–2010). Gerakan ini mulai membuka diri terhadap kelompok Islam lainnya untuk bergabung menentang rezim. Puncaknya, pada masa rezim Bashar Al-Assad, IM kerap melakukan konfrontasi terhadap rezim seiring munculnya fenomena *Damascus Spring* pada 2000. Sejumlah aktivis IM banyak yang bergabung dengan Front Keselamatan yang didirikan oleh Abdul Halim Khaddam. Inilah fase metamorfosis gerakan IM Suriah dari sebatas gerakan sosial-politik menjadi gerakan *counter-action*.¹¹

Pada 2004, kelompok IM menyepakati *Damascus Accord*—berisikan masa depan Suriah—yang terdiri atas dukungan agar tercapainya demokrasi di Suriah, pergantian kekuasaan, kebebasan sipil, pengakuan terhadap hak-hak minoritas, dan komitmen terhadap perjuangan Islam. Piagam tersebut menunjukkan bahwa kelompok IM mulai berani menantang rezim secara terbuka untuk

¹⁰ Lihat Sheeren T. Hunter, *The Politics of Islamic Revivalism* (Bloomington: Indiana University Press, 2001).

¹¹ Lihat Graham E. Fuller, *The Future of Political Islam* (New York: Palgrave Mcmillan, 2004).

melakukan reformasi. Pasca-*Arab Spring* di Suriah, sejumlah aktivis IM yang tergabung dalam kesepakatan tersebut membuat sebuah gerakan bernama “National Movement” atau Gerakan Nasional yang menjadi cikal bakal lahirnya SNC yang menjadi simbol gerakan perlawanan IM di Suriah pasca-*Arab Spring*.¹² Dari sini dapat dilihat bahwa gerakan IM memanfaatkan momentum *Arab Spring* untuk kembali menjadi sebuah gerakan Islam yang aktif dalam kancah politik praktis dalam menghadapi rezim.

Setelah *Arab Spring*, gerakan IM tidak begitu terlihat dalam konfrontasi bersenjata melawan rezim, seperti halnya *Jabhat An-Nusrah* (JN) maupun ISIS. Namun, gerakan IM sangat aktif melakukan perlawanan melalui politik diplomasi dari luar yang dimotori SNC. Untuk membantu dan memperkuat gerakan perlawanan kelompok Islam, IM membentuk *Comision for Civillian Protection* (CCP) dan sebagian besar anggotanya tersebar di gerakan *Ahrar Asy-Syam* maupun the *Free Syrian Army*. Gerakan ini populer di kalangan aktivis IM yang berada di pengasingan. Sebanyak 70% dari para pengungsi yang berada di luar Suriah terpengaruh oleh pemikiran IM melalui gerakan ini.

Selain IM, *Arab Spring* dan pergolakan politik yang terjadi mendorong munculnya gerakan perlawanan kaum Salafi di Suriah. Salafi di Suriah memiliki corak pergerakan yang berbeda-beda. Abdurrahman Al-Hajj membagi Salafi dalam beberapa kelompok. *Pertama*, kelompok Salafi Jihadi. Kelompok ini dikategorikan dalam jaringan Al-Qaeda, seperti *Jabhat An-Nusrah (Nusra Front)*, *Islamic State in Iraq and Syria* (ISIS), dan gerakan *Al-Muhajirin*. Tujuan kelompok ini adalah melawan rezim Assad, membasmi sekularisme, dan melawan intervensi militer asing. *Kedua*, Salafi tradisional yang bertujuan menegakkan khilafah Islam. Gerakan ini sangat anti-rezim sehingga banyak aktivisnya bergabung dalam *Islamic Front* dan *Harakah Al-Fajr*. *Ketiga*, Salafi yang tergabung dalam

¹² Lihat Mohammad Abu Rumman, *Islamist, Religion, and the Revolution in Syiria* (Jordania: FES Jordan Published, 2013).

Liwa Al-Islam. Gerakan ini berusaha melakukan reformasi di Suriah berdasarkan nilai-nilai Islam.

Faksi Salafi dari *Islamic Front* merupakan gerakan yang paling menonjol dalam gerakan perlawanan terhadap rezim pasca-*Arab Spring*. Gerakan ini didirikan pada Juli 2012 dan terdiri atas sejumlah sayap militer, yaitu *Ahrar Asy-Syam*, *Harakah Fajr Al-Islamiyyah*, *Liwa Al-Haq*, dan *Jama'ah At-Taliah Al-Islamiyyah*. Sama halnya dengan Salafi lainnya, gerakan ini bertujuan membangun masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Basis kekuatan kelompok ini berada di Aleppo, Idlib, dan wilayah utara.¹³

Konflik yang berkelanjutan sebagai imbas fenomena *Arab Spring* telah mendorong munculnya gerakan yang lebih radikal, misalnya ISIS yang lahir dari rahim Al-Qaeda di Iraq. ISIS mempunyai jaringan yang begitu luas di Suriah. Hal itu tidak terlepas dari dukungan finansial dan infrastruktur yang besar, seperti rampasan senjata, penguasaan eksplorasi minyak, dan rekrutmen luas melalui jaringan media sosial yang begitu masif. Faksi militernya yang dominan sampai saat ini adalah *Jabhat An-Nusrah*, meskipun pada beberapa tahun terakhir mulai meredup.

Berbeda dengan Al-Qaeda dan gerakan *Salafiyah*, kelompok Sufi melalui ajaran tasawuf menjadi kelompok yang mapan dan mengakar dalam kehidupan sosial-politik di Suriah. Sufi di Suriah telah menyebarkan Islam yang damai melalui khotbah dan pengajaran para ulamanya di sejumlah masjid dan madrasah.

Di negara-negara Islam, Sufi bukan merupakan bagian partai politik ataupun sekte, melainkan kelompok yang berusaha menegakkan nilai-nilai Islam yang harmonis dalam berbagai segi kehidupan.¹⁴ Tasawuf, yang merupakan landasan berpikir kaum Sufi, pada hakikatnya adalah ilmu untuk membangun kesadaran menuju pribadi-

¹³ *The Encyclopedia of the Islamic Movement in the Arab World* (Beirut: Daar Kutub Ilmiyyah, 2013).

¹⁴ Mohammad Abu Rumman, *As-Salafiyah fi Al-Masyriq Al-Arabi* (Beirut: The Centre for Arabic Studies, 2013).

di yang mulia dan beretika melalui penyucian diri yang simultan. Dalam beberapa dekade, kelompok Sufi di Suriah mulai aktif dalam ranah publik dan aktivitas sosial-politik. Ulamanya yang terlibat aktif di Suriah dan berperan aktif dalam politik melalui dakwah dan fatwa-fatwanya yang terkenal adalah Syekh Ahmad Kuftaro (Mufti Agung Mesir) dan Mohammad Said Ramadhan Al-Buthi (ulama Sunni yang berilmu dan menjadi pijakan kelompok Islam). Al-Buthi tewas akibat serangan bom pada 21 Maret 2013. Berbagai karya Al-Buthi, seperti *Syarah Al-Hikam*, menjadi rujukan kalangan Sufi. Dalam kehidupan sosial-politik di Suriah, peran ulama memang tidak bisa dikesampingkan. Sejak lama, ulama merupakan kekuatan politik yang berpengaruh di Suriah. Ulama kerap menekankan nilai-nilai Islam dalam pemerintahan dan rakyat Suriah serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam hal politisasi Islam di Suriah.

Pada titik ini, dapat disimpulkan bahwa kelompok Islam di Suriah memiliki corak yang beragam sesuai dengan realitas sosial-politik yang terjadi. Hal itu tidak lepas dari beberapa faktor. Pertama, sektarianisme yang muncul akibat kebijakan rezim menyebabkan beragamnya gerakan Islam. Kedua, gerakan Islam, seperti IM, muncul di tengah dominasi politik rezim dan merebaknya sekularisme. IM lahir dari rahim intelektualisme para pelajar dan mahasiswa Suriah yang bersinggungan dengan para aktivis IM di Al-Azhar Mesir. Ketiga, kondisi Suriah yang berdekatan secara geografis dengan Mesir menjadi ladang dakwah bagi para aktivis IM Mesir.

Sementara itu, gelombang *Arab Spring* yang sampai di Yaman, dijadikan momentum oleh kelompok Islam untuk memperkuat pengaruhnya. Secara sosio-geografis, Yaman adalah negara kesukuan yang terdiri atas 168 suku. Meskipun kesukuan sangat dominan di Yaman, masyarakatnya sangat religius. Kebanyakan penduduk Yaman bermazhab Syafi'i dan sebagiannya menganut mazhab Syi'ah *Zaidiyyah*. Dalam konteks politik, terdapat beberapa kelompok politik Islam yang berperan di Yaman, yaitu Ikhwanul Muslimin yang

termanifestasikan melalui Partai *Al-Islah*, Salafiyah, Gerakan Syi'ah *Al-Houthi*, dan *Al-Qaeda in Arabian Peninsula* (AQAP).¹⁵

Ikhwanul Muslimin adalah kelompok yang terkuat dalam politik Yaman. Mereka aktif dalam bidang sosial-politik, pendidikan, ekonomi, dan keamanan. Kelompok ini mempunyai basis dukungan yang kuat di kalangan suku, pebisnis, militer, dan politisi. Tokoh yang mendukung kelompok ini, di antaranya Syeikh Abdullah Husein Al-Ahmar (dan anaknya), Sinan Abu Lahhum (dan anaknya), dan komandan militer Ali Muhsin Al-Ahmar yang didukung setengah dari pasukan Yaman.¹⁶ Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kelompok ini menguasai perpolitikan Yaman. Ada beberapa faktor yang mendorong begitu dominannya IM di Yaman. Pertama, faktor ekonomi dan kemiskinan yang menjadi sebab menguatnya pergerakan IM. Sejak berakhirnya perang saudara dan terbentuknya negara Yaman modern, sebagian besar penduduk Yaman—sekitar 10 juta—hidup dalam kemiskinan dan mayoritasnya berada di wilayah pedesaan (sebesar 45%), sedangkan 31% sisanya berada di wilayah perkotaan. Kedua, lingkungan politik yang tertutup di bawah tekanan rezim otoriter yang diskriminatif. Ketiga, intervensi eksternal Arab Saudi yang berpengaruh terhadap kemunculan gerakan tandingan. Keempat, propaganda religius dan kehadiran pemimpin dalam tubuh IM yang begitu dominan.¹⁷

Kelompok Islam lainnya adalah *Al-Islah* yang merupakan cabang dari gerakan Ikhwanul Muslimin Yaman. Partai Islam ini merupakan gabungan dari pemimpin suku konservatif dan pebisnis terkemuka. Partai ini sangat dominan dalam koalisi JMP. *Al-Islah* mencitrakan diri sebagai partai Islam yang mau berkompromi dan berdialog dengan rezim. Setelah rezim Saleh jatuh, *Al-Islah* mampu memobilisasi

¹⁵ Lihat, Mouna Succarieh, terj. Rani Geha, "Rise of Radical Islam in Yemen Altering Its Tribalism, Book Finds," *Al Monitor*, 23 September 2012, diakses pada 3 November 2019 dari <https://www.al-monitor.com/pulse/ru/politics/2012/09/weekenda-detailed-look-at-islamism-in-yemen.html>.

¹⁶ Succarieh, "Rise of..."

¹⁷ Succarieh, "Rise of..."

massa secara masif dalam pemilu. Melalui kepemimpinan dan sistem kaderisasi yang militan lewat mobilisasi massa di masjid-masjid dan NGO, *Al-Islah* menjadi partai Islam yang mampu merestrukturisasi revolusi secara fisik di Sana'a dan menjadi motor penggerak revolusi, khususnya pada masa transisi.¹⁸

Selain IM, Salafisme merupakan kelompok di Yaman yang berusaha untuk kembali pada ajaran Alquran dan Sunah. *Salafiyyah* Yaman diwakili oleh Salafi Jihadi yang menentang pemerintah dan Salafi tradisional yang mendukung pemerintah dan Salafi aktivis yang membentuk asosiasi yang mengafirkan kelompok lainnya.¹⁹

Gerakan Salafi terbagi ke dalam tiga kelompok besar. *Pertama*, kelompok Salafi arus utama. Kelompok ini dekat dengan pendiri Salafi radikal, Syekh Muqbil Al-Wadi'i. Wadi'i dideportasi dari Arab Saudi karena sikap militansinya yang dipengaruhi oleh gerakan radikal Juhaiman saat menginvasi Masjidil Haram pada 1979. Dia juga dipengaruhi oleh dua orang Syekh Salafi di Arab Saudi, yaitu Mohammad bin Aman Al-Jamii dan Rabi' bin Hadi Al-Madkhi. *Kedua*, *The Wisdom Society Movement* yang dipengaruhi oleh Syekh Abdul Rahman Abdul Khaliq dari Mesir yang tinggal di Kuwait dan dipengaruhi oleh *the Kuwaiti Heritage Revival Association*. *Ketiga*, *The Ihsan Society* (disebut juga *the Syrian Current*), yang dipengaruhi oleh Syekh dari Suriah, Mohammad Sourur.²⁰

Selain itu, terdapat kelompok Islam Salafi non-radikal yang dipimpin oleh Yahya Al-Hajuri dari Institut *Daar al-Hadits* di Dammaj, yang menekankan kembali loyalitas terhadap rezim Saleh. Cabang Salafi ini berupaya keras untuk mendelegitimasi militansi rakyat dengan menstigmatisasi revolusi kaum muda, termasuk Ikhwanul Muslimin untuk mendorong proses yang dalam perspektif mereka dapat menguntungkan para “musuh Islam.” Muncul sebagai

¹⁸ Lihat, Laurent Bonnefoy, “Yemen’s Islamist and the Revolution,” *Foreign Policy*, 9 Februari 2012, diakses pada 3 Agustus 2019 dari <https://foreignpolicy.com/2012/02/09/yemens-islamists-and-the-revolution/>.

¹⁹ Bonnefoy, “Yemen’s Islamist.”

²⁰ Lihat Succarieh, “Rise of.”

pendukung terakhir rezim Saleh dapat membahayakan kelompok Salafi nonradikal ini dalam jangka panjang. Namun, kelompok ini dapat muncul sebagai pendukung stabilitas saat situasi politik kembali memanas pada masa transisi. Meskipun data sulit didapat, tampaknya kelompok Salafi ini kehilangan pendukung dalam beberapa tahun terakhir.²¹

Kelompok Salafi juga mengalami perubahan ketika menghadapi revolusi rakyat. Cabang dari kelompok Salafi ini semakin terlibat dalam aktivitas politik pada beberapa tahun terakhir. Kelompok ini mengabaikan isu loyalitas terhadap rezim Saleh dan bersikap kritis terhadap partai politik. Kelompok Salafi politik ini memandang proses revolusi Yaman sebagai kesempatan baru untuk ikut terlibat dalam ruang politik.

Sementara itu, AQAP pertama kali muncul di Yaman pada 2003 dengan memfokuskan diri pada jihad, khususnya terhadap keluarga kerajaan Saudi. Saat kekerasan terhadap target asing terjadi pada 2004, pemerintah Saudi mulai mengombinasikan metode efektif intelijen dengan jaringan kesukuan untuk mengooptasi dan menekan anggota dan simpatisan AQAP.²²

Strategi ini meliputi program reintegrasi bagi mantan jihadis. Caranya dilakukan dengan mengombinasikan diskusi keagamaan, beragam aktivitas, dan membantu mantan jihadis serta keluarganya. Mayoritas dari mereka yang lulus program tersebut akhirnya berhenti mendukung aktivitas kekerasan. Pemerintah mampu mendelegitimasi ideologi dan taktik gerakan tersebut dibantu para pengkritik pemerintah dari kelompok Islam yang berbalik menentang AQAP.²³

²¹ Lihat J. Schwedler, *Faith in Moderation: Islamist Parties in Jordan and Yemen* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006).

²² Schwedler, "Faith in,"

²³ Ginni Hill dan Gerd Nonneman, "Yemen, Saudi Arabia and the Gulf States: Elite Politics, Street Protests and Regional Diplomacy," *Chatham House Middle East and North Africa Programme Briefing Paper*, no. 01 (Mei 2011), diakses pada 3 Agustus 2019 dari https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Middle%20East/0511yemen_gulfbp.pdf.

Kehadiran Al-Qaeda di Yaman berawal pada 1990-an saat para kolega Osama bin Laden kembali dari Afghanistan. Pemboman kapal USS Cole di Aden pada 2000 termasuk dalam rangkaian serangan terhadap target asing dan pemerintahan; rangkaian ini dimulai dengan serangan terhadap target Amerika di Aden pada 1992. Menyusul kekalahan Taliban di Afghanistan, sejumlah orang Yaman, Saudi, dan tokoh Al-Qaeda lainnya pindah ke Yaman. Alasan mereka memilih Yaman adalah kondisi geografis. Topografi Yaman yang berupa wilayah pegunungan dapat digunakan untuk medan bertempur seperti juga di Afghanistan. Kondisi geografis ini cukup menyulitkan AS dalam memberantas Al-Qaeda di Yaman, meskipun AS bisa saja menggunakan *drone* untuk menyerang target mereka.²⁴

Menguatnya terorisme di Yaman mendorong AS memberikan bantuan militer sebesar 150 juta US\$ pada 2010 dan pembentukan intelijen serta aset mematikan di negara itu. Hingga perubahan kebijakan AS pada April 2011 yang akhirnya meminta Presiden Saleh untuk turun, jumlah bantuan AS ke Yaman meningkat menjadi 250 juta US\$ pada 2011. Bantuan keamanan diberikan kepada unit elite di bawah komando putra Saleh, Ahmed, dan tiga keponakannya (Tariq, Yahya, dan Ammar). Pelatih militer dari Inggris dan AS ditempatkan di Sana'a dan di empat kamp kontra-terorisme baru di tingkat provinsi. Selain itu, *the US Joint Special Operations Command* dibentuk untuk membantu perencanaan operasi bersama dengan pasukan Yaman, hingga perubahan kebijakan AS pada 2011.²⁵

Di kalangan Syiah terdapat kelompok *Houthi* yang dipimpin oleh keluarga Al-*Houthi*. Keluarga ini dituduh menginginkan pergantian republik menjadi sistem keimaman. Namun, tuduhan ini disangkal oleh Al-*Houthi* yang mengkritik rezim Presiden Saleh yang dianggap korup, terlalu dekat dengan AS, dan lebih dekat dengan

²⁴ Prof. Fatih Abdel Salam, dosen di *International Islamic University of Malaysia* (IIUM), wawancara di Kuala Lumpur, pada 22 September 2014.

²⁵ Lihat Christina Hellmich, "Fighting Al Qaeda in Yemen? Rethinking the Nature of the Islamist Threat and the Effectiveness of U.S. Counterterrorism Strategy," *Studies in Conflict & Terrorism* 35 (2012).

kelompok Wahhabi-Salafisme melawan komunitas lokal dan tradisional.

Pertikaian antarkelompok militan dengan pasukan pemerintah dimulai setelah demonstrasi di luar Masjid Agung di Sana'a pada 2004 saat jemaah *Zaidiyyah* meneriakkan slogan anti-Amerika. Upaya pasukan keamanan untuk menahan pemimpin utama Hussein Al-Houthi di Provinsi Sa'dah menandai pertempuran pertama. Konflik skala kecil itu meningkat menjadi konflik besar dan ribuan pendukung Al-Houthi ditahan, sementara sebagian lainnya hilang. Pada 2007, Qatar mulai memediasi perjanjian damai, tetapi gencatan senjata belum berakhir hingga tahun berikutnya.²⁶

Pada akhir 2009, *Houthi* memperluas perlawanannya ke wilayah Saudi dan membunuh penjaga perbatasan. Kelompok ini menjustifikasi aksinya dengan alasan bahwa Saudi membolehkan pasukan Yaman melancarkan serangan dari wilayah Saudi. Pemerintah Arab Saudi meresponsnya dengan menurunkan pasukan darat dan udara di bawah komando Asisten Menteri Pertahanan dan Penerbangan, Pangeran Khaled bin Sultan. Target operasi Angkatan Udara Saudi dilakukan di bawah komite militer *ad-hoc* antara Saudi-Yaman yang dipimpin oleh Pangeran Khaled.²⁷

Pada 2010, Qatar melakukan mediasi antara Al-Houthi dan pemerintah Yaman dan mengupayakan implementasi gencatan senjata. Ratusan tahanan Al-Houthi dibebaskan, tetapi upaya rekonstruksi digagalkan oleh keraguan Presiden Saleh memberikan dana ke Provinsi Sa'dah dan memberikan akses kepada lembaga kemanusiaan ke wilayah-wilayah yang dikuasai kelompok *Houthi*. Kelompok *Houthi* mengklaim bahwa pengaruh mereka meluas meliputi area "seluas Lebanon," yaitu di sepanjang Provinsi Sa'dah, Hajjah, Amran, dan Al-Jawf, tempat kelompok ini menyediakan pelayanan dan keadilan bagi masyarakat. Al-Houthi berargumen

²⁶ Hellmich, "Fighting Al Qaeda,"

²⁷ Hill dan Nonneman, "Yemen, Saudi Arabia."

bahwa mereka mengupayakan pemerintah regional yang substansial di bawah pengawasan negara yang reformis dan sah.²⁸

C. DINAMIKA POLITIK DI YAMAN DAN SURIAH: FAKTOR EKSTERNAL

Konflik yang melanda Suriah dan Yaman dapat dikatakan sebagai konflik terpanjang dalam sejarah politik Timur Tengah kontemporer. Gerakan protes yang menuntut reformasi politik dan ekonomi semula berjalan damai, kemudian berubah menjadi medan pertarungan antarkekuatan politik. Pertarungan ini tidak hanya antara rezim yang berkuasa dengan kelompok oposisi, tetapi pada batasan tertentu juga, telah menjadi konflik yang melibatkan pihak eksternal.²⁹

Adanya kepentingan asing dalam konflik Suriah tecermin dari terbaginya kekuatan politik dalam beberapa poros yang saling bertentangan. Gerakan *Arab Spring* di sejumlah negara tidak semata dapat dikatakan sebagai bagian dari ekspor demokrasi Barat terhadap negara-negara otoritarianisme di Timur Tengah, tetapi juga sarat dengan kepentingan politis dan ekonomi.

Selama ini, Suriah dianggap sebagai salah satu negara yang menjadi ganjalan kepentingan AS di Timur Tengah. Hal tersebut tidak lepas dari sejarah politik sosialis Partai Baath yang lebih condong untuk bekerja sama dengan negara-negara “merah,” seperti Rusia dan Tiongkok. Suriah pun menjadi ancaman besar bagi Israel selain nuklir Iran. Nasionalisme Arab yang dikumandangkan rezim militer Suriah sejak 1967 menjadi ganjalan bagi Israel dalam menancapkan hegemoninya.

Sementara itu, Tiongkok menjadikan Suriah sebagai mitra ekonomi dalam berbagai produknya. Di samping itu, Tiongkok sangat bergantung pada ekspor minyak dari Suriah yang merupakan salah satu negara pengeksport minyak selain Iran. Dukungan Iran

²⁸ Hill dan Nonneman, “Yemen, Saudi Arabia.”

²⁹ Yazid, Staf KBRI Bidang Politik, wawancara di Tunis, Tunisia, pada 13 April 2018.

terhadap rezim Al-Assad pun semakin terlihat dalam setiap kebijakan luar negerinya. Pemerintah Bashar Al-Assad dibangun melalui kekuatan politik Partai Baath yang didominasi oleh kelompok Syi'ah Alawiyyah yang berbeda dengan pemerintahan Syi'ah di Iran. Alasan dukungan Iran terhadap keberlangsungan rezim Al-Assad tidak lepas dari posisi Suriah sebagai aliansi strategis Iran dalam menghadapi Israel. Dengan ideologi nasionalisme Arab, Suriah bersama Mesir dan Yordania melakukan perlawanan menentang penjajahan Israel di Palestina pada 1967. Hal tersebut berbeda dengan Iran yang tidak secara langsung berkonfrontasi dengan Israel. Suriah pun menjadi perpanjangan tangan Iran dalam menyokong milisi *Hizbullah* di Lebanon Selatan sejak 1975.

Selain AS dan negara-negara Barat, negara yang kerap menekankan pergantian rezim di Suriah adalah Turki, Arab Saudi, dan Qatar. Turki menjadi penyokong utama kelompok oposisi di Suriah. Kendati tidak bersinggungan langsung dalam konflik Suriah, Turki menjadi negara tempat pengungsian warga Suriah dan menjadi basis kelompok oposisi SNC. Di samping itu, Turki mempunyai kepentingan dengan kelompok Islam di Suriah dalam memberantas milisi Kurdi di daerah perbatasan. Demikian halnya dengan Arab Saudi dan Qatar yang menjadi pendukung kelompok oposisi Islam. Kedua negara tersebut menjadi aktor penting dalam sejumlah konferensi perdamaian antara rezim Al-Assad dan kelompok oposisi. Dibekukannya keanggotaan Suriah dalam Liga Arab pada 2012 tidak lepas dari peran Arab Saudi dan Qatar. Selain memberikan sumbangan dana besar bagi oposisi, Saudi Arabia dan Qatar menyuplai senjata ke kelompok oposisi untuk melawan rezim Assad yang didukung Syi'ah Alawiyyah. Konflik Suriah pun menjadi peresteruan antarkekuatan Islam Sunni dengan kekuatan politik Syi'ah.

Masuknya berbagai kepentingan regional maupun global dalam konflik Suriah justru semakin memperuncing konflik di Suriah. Serangan senjata kimia yang menewaskan ribuan orang di beberapa wilayah Suriah memaksa dunia internasional untuk lebih bersikap tegas terhadap pemerintah Suriah. AS adalah negara pertama yang

menyatakan secara terbuka akan melakukan intervensi militer untuk menyelesaikan konflik di Suriah. Kebijakan AS menyerang basis-basis kekuatan milisi di Suriah jelas menuai perdebatan tidak hanya di dalam negeri AS saja, tetapi juga di dunia internasional.

Di Yaman, kebijakan politik luar negeri Arab Saudi menjadi begitu dominan. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, persoalan perbatasan yang begitu kompleks karena wilayah perbatasan Yaman mencapai 1800 km. Garis tapal batas antara Saudi dan Yaman menjadi persoalan sejak didemarkasi pada Juni 2000 saat Yaman secara formal menerima kedaulatan Saudi atas provinsi di selatan (‘Asir, Najran dan Jizan) yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Yaman. Meskipun telah ada resolusi untuk isu perbatasan, Saudi terus mengkhawatirkan adanya kontaminasi dari militer Yaman, penyelundupan narkoba, migran ekonomi, serta penyelundupan anak dan orang-orang Afrika yang mencari kerja di Saudi melalui perbatasan.

Mayoritas penduduk Yaman tidak menerima sepenuhnya atas hilangnya tiga provinsi yang diambil alih Arab Saudi. Pengalaman liberalisasi politik di negara tetangganya (adanya pemilu, persaingan partai, dan media yang relatif bebas) menjadi alarm bagi pemerintah monarki Saudi. Semakin kuatnya gerakan *Houthi* di wilayah utara mendorong Saudi terlibat langsung dalam konflik dan mencurigai adanya keterkaitan antara *Al-Houthi*, Iran, dan *Al-Qaeda*. Gerakan *Houthi* yang memiliki latar belakang Syi’ah sangat diperhatikan oleh Saudi. Menurut analisis Zuhair Al-Harithi, anggota Dewan Syuro Arab Saudi, gerakan *Houthi* menjadi ancaman bagi keamanan regional karena disponsori oleh Iran dan terkait dengan kelompok *Al-Qaeda in the Arabian Peninsula* (AQAP).³⁰

Banyak kalangan membantah klaim bahwa AQAP berasal dari bekas kamp di wilayah Selatan pimpinan Syeikh Tariq Al-Fadhil pada 2009. Al-Fadhil merupakan tokoh sentral pada rezim Saleh dan ikut berperang di Afghanistan pada 1980-an. Banyak tokoh

³⁰ Hill dan Nonneman, “Yemen, Saudi Arabia.”

dari wilayah Utara memiliki keterkaitan dengan kelompok ekstremis religius. Klaim adanya keterkaitan antara kelompok *Houthi* dan Iran tampaknya lemah karena sedikitnya bukti keterlibatan Iran dalam konflik.³¹ Sementara itu, Hill dan Nonneman menegaskan bahwa Saudi mengakui kepada pihak AS bahwa pemerintah Saudi telah membesar-besarkan keterlibatan Iran dalam konflik Yaman.³² Posisi ini mendorong keterlibatan Saudi yang begitu kuat dalam konflik Yaman di mana Saudi berupaya mempertahankan pemerintahan pusat di bawah pimpinan Mansour Hadi. Oleh karena itu, Saudi membangun hubungan intensif dengan pemerintah, termasuk dari kalangan Suku Hashid dan Bakil yang memiliki jaringan begitu luas.³³

Kuatnya pengaruh Saudi juga terlihat dalam perannya di the *Gulf Cooperation Council* (GCC) yang berusaha untuk menjadi pemimpin di kawasan.³⁴ GCC adalah organisasi regional yang terdiri atas negara-negara Teluk, seperti Arab Saudi, Oman, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, dan Kuwait. Meskipun beranggotakan negara kaya minyak, aktivitas GCC tanpa penganggaran yang kuat, kecuali di tengah pembentukan sebuah proyek. Meskipun demikian, GCC telah menunjukkan kekuatannya melalui negosiasi perdagangan dengan sejumlah negara Uni Eropa dan mediasi konflik di sejumlah negara Timur Tengah. Pada saat berkecamuknya konflik di Yaman sebagai imbas dari gelombang *Arab Spring*, GCC menjadi mediator dan memberikan solusi bagi krisis dengan meminta rezim Ali Abdullah Saleh mundur dari jabatannya.³⁵

³¹ Stephen Day, "The Political Challenge of Yemen's Southern Movement," *Carnegie Endowment for International Peace Middle East Program Paper*, no. 108 (Maret 2010), diakses pada 3 Agustus 2019 dari https://carnegieendowment.org/files/yemen_south_movement.pdf.

³² Hill dan Nonneman, "Yemen, Saudi Arabia."

³³ Vincent Durac, "Yemen's *Arab Spring*—Democratic Opening or Regime Maintenance?," *Mediterranean Politics* 17, no. 2 (Juli 2012): 161–178.

³⁴ Prof. Abdel Majid Charfi, Direktur Baitul Hikmah Tunisia, wawancara pada 20 April 2018.

³⁵ Hill dan Nonneman, "Yemen, Saudi Arabia."

Pada 23 November 2011, Presiden Saleh menandatangani perjanjian yang difasilitasi GCC di Riyadh. Dalam perjanjian itu, Saleh tetap menjadi presiden hingga pemilu presiden dilaksanakan pada Februari 2012. Saleh dan keluarganya mendapat imunitas dari aksi persekusi dan tetap menjadi ketua Partai GPC. Kekuasaan eksekutifnya dialihkan kepada wakil presiden. Pada awal Desember, seperti yang tertera dalam perjanjian GCC, Muhammad Basindwa dari JMP dipilih menjadi perdana menteri dan pemerintahan kesatuan nasional (*national unity government*) dibagi antara GPC dan JMP. Tak lama kemudian, GPC dan JMP setuju bahwa wakil presiden, Abd Rabbu Mansour Hadi, menjadi satu-satunya kandidat dalam pemilu presiden yang dilaksanakan pada Februari 2012. Namun, penandatanganan perjanjian GCC tidak mampu mengakhiri instabilitas politik Yaman. Protes melawan klausul imunitas bagi Saleh terus terjadi pada 2012. Para pemrotes bahkan semakin kritis tatkala Saleh kembali ke negaranya pada Februari 2012.³⁶

Sementara itu, jatuhnya ibu kota Yaman, Sana'a, ke tangan kelompok militan *Houthi* pada 21 September 2014, menandai babak baru dalam dinamika politik Yaman pasca-*Arab Spring*. Kelompok *Houthi* menguasai beberapa kementerian dan gedung-gedung pemerintahan serta melakukan penandatanganan perdamaian dengan partai-partai politik besar di Yaman. Kelompok *Houthi* bahkan berhasil melemahkan pengaruh elite politik rezim Saleh dan memaksa mereka meninggalkan Yaman, terutama mereka yang berpartisipasi dalam revolusi 2011.³⁷ Kelompok *Houthi* tidak hanya berhasil menguasai ibu kota Sana'a, tetapi juga melemahkan aktor politik utamanya, yakni keluarga Al-Ahmar, dengan menguasai kediaman keluarga tersebut di utara Sana'a.

Melemahnya kekuatan keluarga Al-Ahmar yang selama beberapa dekade menjadi keluarga yang sangat berpengaruh—sheikh ter-

³⁶ Lihat Indriana Kartini, "Problematika Kekuatan Politik Islam di Yaman," dalam Indriana Kartini (ed.). *Problematika Kekuatan Politik Islam di Yaman, Suriah, dan Aljazair* (Bandung: Pustaka Jaya, 2016), hlm 100.

³⁷ Kartini, *Kekuatan Politik*, hlm 102.

tinggi dalam konfederasi Suku Hashid merupakan anggota keluarga Al-Ahmar—memiliki konsekuensi penting bagi Partai Islah. Sejak Desember 2011, Partai Islah menguasai pos-pos kementerian yang dialokasikan untuk koalisi oposisi JMP (Partai Islah merupakan anggota koalisi) dalam kerangka pemerintahan kesatuan nasional (*national unity government*). Dalam hal ini, bisa dikatakan bahwa partai Islah merupakan pemenang besar dalam “revolusi” 2011. Namun, melemahnya politik Ikhwanul Muslimin (IM) di Mesir secara tidak langsung juga melemahkan posisi Ikhwanul Muslimin di Yaman (IM juga bagian dari Partai Islah) pascarevolusi. Selain itu, Arab Saudi, yang menjadi pendukung lama aktor politik Islam di Yaman (termasuk Partai Islah) sebagai alat politik melawan kelompok Syi’ah *Houthi*, juga memasukkan IM ke dalam daftar organisasi teroris untuk membendung perkembangan IM di Arab Saudi.³⁸

Beberapa kalangan, termasuk AS, menyinalir bahwa keberhasilan militan *Al-Houthi* menguasai Sana’a tak lepas dari dukungan mantan Presiden Ali Abdullah Saleh. Oleh karena itu, AS mendorong Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan sanksi kepada Ali Abdullah Saleh dan dua komandan *Al-Houthi*, yaitu Abd Al-Khaliq *Al-Houthi* dan Abdullah Yahya Al-Hakim dengan tuduhan melakukan upaya destabilisasi Yaman. Ketiga tokoh ini dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri dan aset mereka dibekukan.³⁹ Sebagai respons atas sanksi itu, Partai GPC memecat Presiden Abd Rabbuh Mansur Al-Hadi dari kepemimpinan partai karena dianggap bekerja sama dengan AS dan PBB untuk menjatuhkan sanksi kepada Ali Abdullah Saleh.⁴⁰ Pada pilpres 2012, Mansour Hadi terpilih sebagai presiden menggantikan Ali Abdullah Saleh. Meskipun lengser dari

³⁸ Marie Christine Heinze, “The Triumphant Advance of the *Houthi* Rebels,” *Qantara*, 23 September 2014, diakses pada 3 November 2019 dari <http://en.qantara.de/print/18370>.

³⁹ Heinze, “The Triumphant.”

⁴⁰ “Yemen President Sacked from Party Leadership,” *Al Jazeera*, 8 November 2014, diakses 18 November 2019 dari <https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/11/yemen-president-sacked-from-party-leadership-201411893259364727.html>.

jabatan presiden dan digantikan Hadi, Ali Abdullah Saleh diyakini masih memiliki kekuasaan besar dalam politik Yaman.⁴¹ Hal itu terlihat dari sepak terjangnya dalam konflik, terutama dukungannya terhadap gerakan oposisi pemerintah sampai massa akhir hayatnya di tangan para pemberontak yang didukungnya, yakni kelompok Al-Haoti.

D. PENUTUP

Arab Spring yang bermula di Tunisia menjadi katalis pergolakan politik yang terjadi di Suriah dan Yaman. Sejak terjadinya gerakan protes di Damaskus dan beberapa daerah lainnya, Suriah terus terseret dalam pusaran konflik yang tak kunjung usai. Berbagai kekuatan politik (Islam, nasionalis, dan sekuler) saling bertarung memperebutkan pengaruh dan kekuasaan. Setelah *Arab Spring*, di Yaman terjadi perubahan politik cukup signifikan dengan munculnya kekuatan politik Islam yang berpengaruh, seperti Ikhwanul Muslimin dan Salafi. Kelompok politik Islam, baik di Suriah maupun Yaman, menjadi kekuatan yang diperhitungkan dan berperan cukup signifikan.

Dalam konteks politik Suriah, dominasi rezim Assad yang didukung kelompok Syi'ah *Alawiyah* menjadi penghambat sirkulasi kepemimpinan dan berimbas pada munculnya sejumlah gerakan perlawanan yang dimotori Ikhwanul Muslimin, *Salafiyah* dan faksi-faksi bersenjata. Mereka lahir sebagai kelompok yang menentang sistem otoritarianisme Suriah. Namun, fenomena *Arab Spring* dan gerakan perlawanan kelompok Islam harus tercoreng dengan munculnya gerakan lebih radikal ISIS yang sejak kemunculannya pada 2014 menjadi gerakan yang berpengaruh mengalahkan dominasi IM dan kelompok jaringan Al-Qaeda. Munculnya gerakan ISIS dan intervensi kekuatan politik regional dan global menjadikan konflik di Suriah semakin kompleks.

⁴¹ Prof. Fatih Abdelsalam, dosen di *International Islamic University of Malaysia* (IIUM), wawancara di Kuala Lumpur, pada 22 September 2014.

Di Yaman, pemerintah transisi yang dibentuk setelah lengsernya Ali Abdullah Saleh yang melibatkan pemerintah Mansour Hadi, dengan kalangan Islam dan nasionalis-sekuler yang tergabung dalam JMP, harus menerima kenyataan pahit dengan keberhasilan kelompok Syiah *Al-Houthi* menguasai ibu kota Sana'a. Keberhasilan *Al-Houthi* merebut sejumlah fasilitas penting pemerintahan membuat kelompok ini menjadi aktor politik yang diperhitungkan dalam politik Yaman. Namun, keberhasilan *Al-Houthi* merebut kota penting di Yaman tersebut mendorong semakin meningkatnya konflik, terutama dengan terlibatnya Arab Saudi dalam konflik dengan tujuan membendung arus pengaruh Syiah di kawasan. Pada akhirnya, jalan transisi menuju demokrasi pasca-*Arab Spring* di Yaman, seperti halnya di Suriah, mengalami kegagalan karena yang terjadi adalah instabilitas politik dan kekacauan negara. Kekacauan tersebut pun telah mendorong kelompok radikal, seperti AQAP, untuk melaksanakan aksinya menyerang basis-basis kekuatan Syi'ah sehingga menimbulkan konflik yang tak kunjung usai. Solusi penyelesaian konflik di Suriah maupun Yaman adalah dialog antarkelompok dengan pemerintah serta penarikan berbagai kekuatan asing dari pusaran konflik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Abu Rumman, Mohammad. *Islamist, Religion, and the Revolution in Syria*. Jordania: FES Jordan Published, 2013.
- Abu Rumman, Mohammad. *As-Salafiyah fi Al-Masyriq Al-Arabi*. Beirut: The Centre for Arabic Studies, 2013.
- Al-Hajj, Abdurrahman. *Al-Ikhwān Al-Muslimun fi Suria*. Dubai: Al-Mesbar Studies, 2012.
- Al-Yemeni, A. A. H. *The Dynamics of Democratization: Political Parties in Yemen*. Bonn: Freidrich Ebert Stiftung, 2003.
- Durac, Vincent. "Yemen's *Arab Spring*—Democratic Opening or Regime Maintenance?" *Mediterranean Politics* 17, no. 2 (Juli 2012):161–178.
- Fuller, G. E. *The Future of Political Islam*. New York: Palgrave Mcmillan, 2004.

- Hellmich, Christina. "Fighting Al Qaeda in Yemen? Rethinking the Nature of the Islamist Threat and the Effectiveness of U.S. Counterterrorism Strategy." *Studies in Conflict & Terrorism* 35 (2012).
- Hunter, Sheeren T. *The Politics of Islamic Revivalism*. Bloomington: Indiana University Press, 2001.
- Kartini, Indriana. "Problematika Kekuatan Politik Islam di Yaman." Dalam Indriana Kartini (ed.). *Problematika Kekuatan Politik Islam di Yaman, Suriah, dan Aljazair*. Bandung: Pustaka Jaya, 2016.
- Perlmutter, Amos. *The Roles of Military and Rules Politis*. London: Frank Cass and Company Limited, 1981.
- The Encyclopedia of the Islamic Movement in the Arab World*. Beirut: Daar Kutub Ilmiyyah, 2013.
- Schwedler, Jillian. *Faith in Moderation: Islamist Parties in Jordan and Yemen*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

Internet

- Bonnefoy, Laurent. "Yemen's Islamist and the Revolution." *Foreign Policy*, 9 Februari 2012. Diakses pada 3 Agustus 2019 dari <https://foreignpolicy.com/2012/02/09/yemens-islamists-and-the-revolution/>.
- Day, Stephen. "The Political Challenge of Yemen's Southern Movement." *Carnegie Endowment for International Peace Middle East Program Paper*, no. 108 (Maret 2010). Diakses pada 3 Agustus 2019 dari http://carnegieendowment.org/files/yemen_south_movement.pdf.
- Heinze, Marie Christine. "The Triumphant Advance of the *Houthi* Rebels." *Qantara*, 23 September 2014. Diakses pada 3 November 2019 dari <http://en.qantara.de/print/18370>.
- Hill, Ginni, dan Gerd Nonneman. "Yemen, Saudi Arabia and the Gulf States: Elite Politics, Street Protests and Regional Diplomacy." *Chatham House Middle East and North Africa Programme Briefing Paper*, no. 01 (Mei 2011). Diakses pada 3 Agustus 2019 dari https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Middle%20East/0511yemen_gulfbp.pdf.
- Succarieh, Mouna, "Rise of Radical Islam in Yemen Altering Its Tribalism." *Al Monitor*, 23 September 2012. Diakses pada 3 November 2019 dari <https://www.al-monitor.com/pulse/ru/politics/2012/09/weekenda-detailed-look-at-islamism-in-yemen.html>.

“The Arab Spring, Five Years on.” *The Economist*, 11 Januari 2016. Diakses pada 3 Maret 2019 dari <https://www.economist.com/graphic-detail/2016/01/11/the-arab-spring-five-years-on>.

“Yemen President Sacked from Party Leadership.” *Al Jazeera*, 8 November 2014. Diakses pada 18 November 2014 dari <http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/11/yemen-president-sacked-from-party-leadership-201411893259364727.html>.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



BAB 6 ARAH BARU POLITIK ISLAM? SEBUAH REFLEKSI PASCA-ARAB SPRING

Nostalgiaawan Wahyudhi, M. Hamdan Basyar, Dhurorudin
Mashad, dan M. Fakhry Ghafur

Timur Tengah pasca-*Arab Spring* merupakan kawasan yang senantiasa dinamis. Politik Islam di kawasan ini menghadapi tantangan dari lingkungan yang senantiasa berubah, dan tulisan ini mencoba memotret hal itu. Analisis politik Islam yang terjadi di 15 negara, yaitu Tunisia, Maroko, Aljazair, Libya, Mesir, Sudan, Somalia, Suriah, Arab Saudi, Lebanon, Qatar, UEA, Bahrain, Kuwait, dan Yaman merupakan kristalisasi dari studi yang dilakukan sejak 2013 sampai 2017.

Empat klasifikasi negara pasca-*Arab Spring* yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi untuk mempermudah kita memotret dan menganalisis politik Islam di negara-negara tersebut berdasarkan kondisi lingkungan yang hampir serupa. Dalam penelitian ini, meskipun sudah diklasifikasikan dalam empat kondisi negara pasca-*Arab Spring*, politik Islam memunculkan wajah yang berbeda-beda dan perilaku politik yang sangat dinamis. Namun, ada benang merah yang bisa kita ambil dari politik Islam pasca-*Arab Spring*. Pertama, *Arab Spring* merupakan gelombang demokratisasi yang gagal (kecuali di Tunisia) dan pada akhirnya mengalami *backward bending* menuju otoritarianisme baru. Kedua, *Arab Spring* dan IM

merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Di hampir seluruh negara kasus (15 negara), IM selalu terlibat dan bersemangat masuk ke gelanggang politik kekuasaan untuk menggelorakan demokrasi di Timur Tengah melalui *Arab Spring*. Oleh karena itu, wajar jika banyak rezim yang merasa terancam dengan gerakan ini.

A. POLITIK ISLAM DI ALJAZAIR, MAROKO, SOMALIA, SUDAN, DAN LEBANON

Politik Islam di Aljazair dapat dikatakan lebih dahulu tampil ke permukaan dibandingkan beberapa negara Timur Tengah. Fenomena ini terjadi sejak 1967 dan ditandai dengan tren pemakaian hijab yang meluas di berbagai kalangan, terutama kampus, bersamaan dengan realitas kaum pria yang senantiasa pergi ke masjid untuk salat berjamaah.¹

Pemerintah Aljazair sebenarnya berusaha memonopoli paham Islam dengan cara (1) mengangkat penafsiran Islam versi pemerintah sebagai suatu yang paling benar dengan mengadakan seminar pemikiran Islam tahunan (sejak 1969) untuk menghasilkan penafsiran resmi atas Islam dalam rangka mendukung kebijakan rezim; (2) membuat aturan pendaftaran semua masjid sehingga dapat mengawasi orientasi keagamaannya; (3) mendirikan Institut Islam sebagai pusat pelatihan imam, dan tak seorang pun boleh memimpin salat dan ceramah di masjid tanpa ijazah dari institut ini; (4) melabeli para pengkritik kebijakan pemerintah sebagai gerakan Islam yang ingin kembali ke praktik-praktik tradisional, takhayul, atau kekafiran baru untuk meruntuhkan konsensus nasional; (5) Untuk menarik simpati umat, pemerintah mengeksploitasi simbolisme Islam, seperti Jumat dijadikan hari libur, pejabat “tak Islami” (pada masa Benjedid) diganti, sekolah-sekolah Alquran banyak dibangun (di bawah kontrol kementerian pendidikan).

¹ Jean Claude Vatin, “Religious Resistance and State Power in Algeria,” dalam *Islam and Power*, eds. Ali H. Dessauki dan Alexander Cudsi (London: Croom Helm, 1981).

Politik manipulatif ini ternyata tak cukup kuat meredam gerakan Islam sentrifugal. Selain itu, industrialisasi oleh Boumedienne (sejak 1970-an) dianggap sebagai westernisasi dan otak mampu membawa kesejahteraan rakyat. Melihat fakta ketidakpuasan rakyat, Chadli Bendjedid mencanangkan reformasi dengan memperkenalkan sistem multi-partai (1989) setelah 30 tahun berlangsung partai tunggal Front Pembebasan Nasional/National Liberation Front (FLN). Pemilu multi-partai akhirnya dijalankan dan dimenangkan FIS, partai Islam pertama yang diakui di Afrika Utara. FIS semula adalah organisasi sosial yang memiliki jaringan masjid dan program kesejahteraan sosial. Pada pemilu nasional Desember 1991, FIS meraih 300 dari 599 kursi jauh melampaui partai pemerintah (FLN) yang hanya mendapat 16 kursi. Kemenangan FIS tidak lepas karena identitas keislaman yang kental yang bahkan telah berperan penting dalam gerakan kemerdekaan. Rezim sekuler FLN yang tak mampu memperbaiki kondisi ekonomi yang buruk pun menyebabkan FIS menjadi partai Islam yang populer.²

Kemenangan FIS yang merupakan manifestasi Ikhwanul Muslimin (IM) dalam konteks Aljazair ini³ oleh kelompok sekuler (militer, Berber, kelompok organisasi perempuan, dan FLN) dilihat sebagai ancaman terkait restrukturisasi kehidupan sosial budaya Aljazair. Kaum nasionalis sekuler akhirnya melakukan kudeta terhadap hasil pemilu (membubarkan parlemen), diikuti oleh pembekuan FIS pada 1992, dan para aktivisnya ditahan. Sejak saat itu Aljazair tenggelam dalam pusaran konflik tak kunjung padam. Oleh sebab itu, ketika *Arab Spring* berembus di kawasan Timur Tengah, rezim militer sekuler Aljazair waspada dalam meredam gerakan kaum Islamis (dan atau IM) untuk menggelorakan demokratisasi yang telah dipangkas sejak awal 1990-an itu.

Sebagaimana Aljazair, pengaruh IM juga telah lama menggejala dalam politik Sudan. Namun, IM di Sudan memiliki karakteristik

² Riza Sihbudi, *Menyandera Timur Tengah* (Bandung: Mizan, 2007).

³ Azzedine Layachi, "Political Liberation and the Islamist Movement in Algeria," *The Journal of North African Studies* 9, no. 2 (2004): hlm 46–67.

yang khas, yakni terkadang tampil dinamis sebagai oposan, namun pada saat lain, berkolaborasi dengan pemerintah, tergantung realitas politik yang sedang terjadi.⁴ Ada dua faktor yang menyebabkan IM tumbuh di Sudan. *Pertama*, secara geografis Sudan-Mesir memang berbatasan langsung sehingga kader IM kedua negara dapat berhubungan secara intensif. *Kedua*, Khartoum-Kairo memang memiliki hubungan erat di bidang ekonomi dan pendidikan. Universitas Khartoum sebagian besar masih berkiblat pada Universitas al-Azhar, baik secara akademis maupun aktivisme.

Berkembangnya IM dimulai di Universitas Khartoum sejak 1952. IM kian eksis dalam perpolitikan seiring bergabungnya Hassan Turabi pada 1960, yang lantas membentuk *The Islamic Charter Front* (ICF) dan ikut pemilu 1965, kemudian bertransformasi menjadi *al-Jabhab al-Islāmiyah al-Qawmiyyah/The National Islamic Front* (NIF) pada 1985–1989. Partai ini akhirnya menjadi partai ketiga terbesar di parlemen.⁵

Basis ICF-NIF lebih pada kalangan modernis perkotaan (*urban-centred modernist movements*) dibandingkan kaum sufisme tradisional (*tradition-bound Sufi order*).⁶ Partai ini dipandang sebagai gerakan kelas menengah dan kaum profesional yang tak memiliki basis di masyarakat Sudan yang mayoritas penganut Tarekat/Sufisme.⁷ Partai yang tak lain dari manifestasi IM Sudan ini hanya bisa eksis dalam masyarakat yang dominan sufisme karena tiga hal. *Pertama*, fondasi ekonomi yang didukung bank-bank Islam, teruta-

⁴ Carolyn Fluehr-Lobban, *Islamic Law and Society in the Sudan* (New York: Routledge, 1987), 269–274.

⁵ Abdel Ghaffar M. Ahmed, *One Against All: The National Islamic Front (NIF) and Sudanese Sectarian and Secular Parties* (Bergen: CMI, 2008), 2.

⁶ R. Hrair Dekmejian, *Islam in Revolution: Fundamentalism in the Arab World. 2nd ed.* (New York: Syracuse University Press, 1995), 187.

⁷ John O. Voll, “The Evolution of Islamic Fundamentalism in Twentieth-Century Sudan,” dalam *Islam, Nationalism, and Radicalism in Egypt and Sudan*, eds. Gabriel R. Warburg dan Uri M. Kupferschmidt (New York: Praeger, 1983), 129. Lihat juga A.A. Sikainga, “Northern Sudanese political parties,” dalam *Civil War in the Sudan*, eds. M.W. Daly dan A.A. Sikainga (London dan New York: British Academic Press, 1993), 86.

ma yang memiliki jaringan ke Saudi. *Kedua*, latar belakang akademis dan pengalaman menjadi menteri pendidikan memudahkannya mendekati kaum intelektual kampus. *Ketiga*, Turabi—tokoh IM Sudan—sering melakukan pendekatan pada rezim kudeta militer Sudan melalui koalisi dan asistensi program-program kebijakan negara.⁸ Turabi bahkan sempat bekerja sama dengan Presiden Omar Bashir yang juga punya latar belakang politik gerakan Islam.

Pada era Turabi-Bashir, ideologi IM memang sangat mewarnai negara. Namun, setelah Turabi meninggalkan Bashir dan koalisi pecah, ideologi IM relatif mencair. IM masih cukup kuat, tetapi sisi tarbiyah (pembinaan) menurun dan kemampuan menampilkan diri sebagai tokoh politik juga tumpul. Bashir pasca-Turabi dapat dikatakan menjadi “sempalan” terhadap IM, terutama dalam menyikapi konflik Sudan vs. Sudan Selatan di mana tangan-tangan asing (Barat) ikut mencengkeram, baik itu dalam konteks ideologi kultural (Kristen) maupun ekonomi (Sudan Selatan adalah sumber minyak). Dengan adanya realitas politik semacam ini, gelombang *Arab Spring* yang berembus di Timur Tengah akhirnya tidak berpengaruh (tidak menarik perhatian masyarakat) di Sudan. Pada kenyataannya, masyarakat Sudan memang tetap lebih nyaman pada era Bashir, dan tak ingin kembali seperti di era otoritarianisme Jafar Numeri.

Jika Aljazair dan Sudan pengaruh IM berkembang luas, eksistensi politik Islam yang dibangun IM di Maroko kurang berkembang. Terdapat beberapa alasan politik Islam kurang mendapat sambutan di Maroko. *Pertama*, tarekat masih sangat kuat pengaruhnya di Maroko karena negara ini merupakan negara asal para mursyid sufisme di Afrika utara. *Kedua*, Raja Maroko mempunyai karisma sangat kuat karena statusnya sebagai *ahlul bait* dari garis Hasan (Syarif). Eksistensi monarki Maroko diwarisi dari Al Wahidun yang tak lain adalah keturunan nabi dari garis Hasan bin Ali. Sebagai seorang Syarif, Raja Maroko memerintah dengan relatif terbuka

⁸ Graham E. Fuller, *The Future of Political Islam* (New York: Palgrave Macmillan, 2004), 108.

dengan sistem monarki konstitusional seperti di Inggris. Hal ini tidak lepas dari pengaruh budaya Barat yang sangat kuat mengingat posisi Maroko memang berdampingan dengan Eropa. Hal yang lebih penting lagi, raja Maroko memberi perhatian kepada kaum sufi. Kebijakan ini menyebabkan kaum sufi yang memiliki basis massa dominan menjadi sangat menghargai raja. Berbagai kebijakan itu tampaknya membuat Maroko terhindar dari guncangan politik yang melanda Afrika Utara (seperti Aljazair, Tunisia, Libya, dan Mesir). Sufisme telah menjadi pilar bagi monarki Maroko sehingga militanisme tidak akan muncul.

Namun, politik Islam tetap mendapat tempat di Maroko melalui kampus-kampus. Sebagai kelompok terdidik, gerakan politik Islam tak jarang mengkritisi pemerintah Maroko. Mereka menyerukan untuk kembali ke tradisi, yakni sistem yudisial yang didasarkan pada hukum syariat dan Islamisasi pemerintahan serta lembaga keuangan. Uniknyanya, meskipun kelompok sekuler dan Islam berbeda haluan politik, adakalanya mereka bekerja sama menuntut kebebasan pers dan pembebasan tahanan politik. *Jama'at al-Adwal-Ihsan/Justice and Charity* (JC) sebagai manifestasi IM Maroko sangat sering mengkritik raja serta menyerukan pembentukan republik Islam yang menghargai nilai-nilai demokrasi dan HAM. Meskipun JC berkonflik dengan pemerintah dan dalam beberapa situasi menjadi subjek represi, melalui ajaran Sufisme—sebagai basis terkuat dalam masyarakat Maroko—organisasi ini tetap saja memproklamasikan keinginan mengislamisasi masyarakat dengan cara non-kekerasan melalui pendidikan. Dengan berpijak pada karakteristik politiko-kultural ini, *Arab Spring* yang berembus di regional Timur Tengah tidak terjadi di Maroko.

Pengaruh IM bahkan tergolong lebih kecil terjadi di Somalia, meskipun politik Islam sudah muncul ke permukaan pasca-ke-merdekaan. Kala itu beberapa alumni Universitas Al-Azhar mempromosikan ide-ide keislaman dan membentuk sejumlah gerakan Islam modern yang terinspirasi oleh IM Mesir dan sebagian lain

terpengaruh Salafiyah-Wahhabi Arab Saudi.⁹ *Al-Islah* adalah gerakan Islam modernis pertama di Somalia yang didirikan sejumlah aktivis IM lokal yang mempunyai jaringan dengan IM Sudan dan Arab Saudi.

Al-Islah dapat dikatakan sulit berkembang karena beberapa hal.¹⁰ *Pertama*, sosialisme-komunisme awal 1960-an sangat kuat di Somalia sehingga *black-campaign* terhadap IM sangat merasuki pemikiran orang-orang Somalia. *Kedua*, sejak berkuasanya rezim militer Siad Barri yang mengusung ide sosialisme-marxisme, gerakan Islam diberangus, aktivisnya ditangkap, dan sebagian mengasingkan diri ke Sudan, Mesir, Yaman, serta Arab Saudi. Pada era Siad Barri (1969–1991), kelompok Islam menjadi gerakan bawah tanah. *Ketiga*, realitas berbagai konflik klan-kesukuan yang terjadi di Somalia menghambat pembangunan di berbagai aspek, termasuk pendidikan. Akibatnya, universitas di Somalia tidak berkembang padahal universitas biasanya menjadi pintu masuk pemikiran IM.

Faktor lain yang juga menentukan adalah dominannya Sufisme dalam masyarakat Somalia. Kaum Sufi merupakan kelompok Islam tradisional terbesar di Somalia yang dimulai pada abad ke-19 di bawah pimpinan ulama Sufi terkemuka, seperti Syaikh Muhyiddin bin Syaikh Uwais dan beberapa muridnya. Terdapat beberapa aliran Sufi yang berkembang di Somalia, misalnya Qadariyyah, Ahmadiyyah, dan Salihyyah. Pada 1952, sejumlah tokoh Islam Sufi Somalia mendirikan organisasi Islam bernama *the Somali Islamic League*/Liga Islam Somalia sebagai reaksi terhadap maraknya gerakan misionaris Kristen di Somalia. Dalam konteks sosio-kultural, sufisme di Somalia terlihat dinamis, tetapi apolitis. Sementara itu, tujuan politik Islam yang dibawa IM selalu bermotif politik dan memandang Islam sebagai sesuatu yang *kamil-kaffah*; hal ini “tidak” diyakini kaum sufisme.

⁹ “The Failed State Index 2011,” The Fund for Peace, diakses pada 4 September 2019 dari https://www.pucsp.br/ecopolitica/downloads/failed_states_index_2011.pdf.

¹⁰ Dr. Engkos Kosasih, FGD Tim Dunia Islam di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, pada 26 Mei 2015.

Meskipun tergolong gerakan bawah tanah, IM yang termanifestasi dalam *Al-Islah* masih bisa membangun jaringan dengan kekuatan politik Islam transnasional. Hal yang sama dilakukan kelompok Salafiyah, Jama'ah Tabligh, Jama'ah Takfir, dan Jama'ah Jihad. Pengaruh aktivisme politik gerakan tersebut telah menginspirasi lahirnya gerakan-gerakan Islam militan, seperti *Al-Ittihad Al-Islamiyyah*, *Ash-Shabab*, dan *Hizb al-Islam* yang menjadi motor gerakan perlawanan Islam terhadap pemerintahan despotik dan pendudukan militer asing di Somalia. Setelah runtuhnya kekuasaan rezim Siad Barri, barulah banyak alumni universitas Timur Tengah yang mengajar dan mendirikan sekolah serta lembaga pendidikan Islam. Mereka mengisi kekosongan hampir di semua lini, termasuk bisnis dan aktivitas sosial.

Pada era rezim komunis, dapat dikatakan ada kevakuman kepemimpinan. Oleh karena itu, pantas jika gerakan Islam tidak terlalu menonjol. Satu-satunya manifestasi IM di Somalia adalah *Harakatul Islam* pada 1978 yang menampilkan wajah sangat moderat. Langkah ini dilakukan untuk mengikuti perkembangan regional dan sangat mengharamkan ikut dalam konflik perang saudara di Somalia. Artinya, tidak ada kader IM yang boleh ikut dalam perang saudara.

Di bawah pimpinan Syaikh Mohammed Ahmed Nur, *Al-Islah* menjadi gerakan Islam yang inklusif dan anti-kekerasan. Hal ini adalah realitas yang sengaja dibangun di tengah Somalia yang terkoyak akibat politik berbasis klanisme-etnisitas. Kelompok ini dalam aktivitasnya mengadopsi ideologi IM dan metodologi islamisasi pendidikan modern gaya Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afgani di Mesir yang banyak terlibat dalam pelayanan sosial serta reformasi masyarakat dan negara sesuai dengan prinsip Islam.¹¹ Jadi, tidak mengherankan jika *Al-Islah* menjadikan prinsip-prinsip moderasi Islam sebagai sistem nilai. Pendukung gerakan ini mengklaim

¹¹ Abdurrahman M. Abdullahi, "The Islah Movement: Islamic Moderation in War-torn Somalia," diakses pada 3 November 2019 dari <https://www.hiiraan.com/oct2008/ISLAH.pdf>.

bahwa metode *Al-Islah* dapat menjadi metode alternatif untuk memecahkan persoalan intoleransi di Somalia. Oleh karena itu, dapat dipahami jika ketika terjadi *Arab Spring*, Somalia tidak merasakan angin perubahan itu.

Saat *Arab Spring* menggejala di sejumlah negara Timur Tengah dan negara-negara itu berusaha keluar dari krisis sosial-politik dan ekonomi, Somalia masih berada dalam fase perang saudara sehingga fenomena regional itu tak berpengaruh dalam konteks Somalia. Berdasarkan laporan *the Failed State Index* 2011, Somalia bahkan disebut sebagai negara terburuk dalam stabilitas sosial, politik, ekonomi, dan penegakan HAM, sekaligus dikategorikan sebagai negara gagal (*the failed state*) dengan persentase tertinggi di dunia.

Sebagaimana di Somalia, pengaruh IM di Lebanon—termasuk manifestasi dalam Jamaah al-Islamiyah—juga sangat kecil. Lebanon menganut demokrasi konfesional yang artinya negara membagikan jatah perwakilan berdasarkan primordialisme-sektarianisme. Karena sektarianisme pula terjadi pembagian kekuasaan berdasarkan *al-Mitsaq al-Wathani* (Pakta Nasional) pasca-kemerdekaan 1943. Mereka menyepakati pembagian kekuasaan politik berdasarkan jumlah penduduk, yaitu Presiden dijabat orang Kristen Maronit, perdana menteri dijabat kelompok Sunni, dan kepala parlemen dijabat kelompok Syi'ah. Namun, kesepakatan itu ternyata tak mampu menetralisasi ancaman akibat isu sektarian seiring dengan perkembangan jumlah penduduk. Kelompok Muslim (Sunni dan Syi'ah) menginginkan perubahan sistem politik dengan melakukan sensus ulang untuk dijadikan landasan baru bagi pembagian kekuasaan. Namun, hal ini ditolak pihak Kristen sehingga meletuplah perang saudara yang berkepanjangan. Perang tersebut pada akhirnya memang berhasil diredam.

Dinamika sosial, politik, dan budaya yang cenderung dinamis berdasarkan sistem konfesional tadi sampai kini masih tetap berlangsung. Berdasarkan politik konfesional, JI hanya mendapat jatah 1 dari 27 kursi yang diberikan kepada Sunni. Kelompok politik Islam yang besar di kalangan Sunni adalah *Tayar Mustaqbal* (Gerakan

Mustaqbal), sementara di kelompok Syiah adalah *Hizbullah*. Realitas sosio-kultural dan politik yang tersita oleh persoalan politik konfesional di Lebanon, membuat politik Islam, termasuk IM, tidak terpengaruh *Arab Spring*.

B. POLITIK ISLAM DI ARAB SAUDI, QATAR, UNI EMIRAT ARAB, BAHRAIN, DAN KUWAIT

Perkembangan IM di Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Kuwait memiliki pola yang berbeda-beda tergantung pada sistem politik dan karakter rezim yang berkuasa. Di kelima negara tersebut, IM menempati posisi yang paling unik. *Pertama*, IM menyebar ke lima negara kasus hampir dalam momentum yang sama, yakni saat terjadi eksekusi yang dipimpin Jamal Abd Nasser pada medio 1950-an di Mesir terhadap para pengikut dan pemimpin IM. IM sebagai organisasi sosial-keagamaan telah melakukan mobilisasi politik yang mengancam rezim. *Kedua*, IM masuk di masing-masing negara melalui saluran pendidikan. Kader-kader IM menyediakan SDM yang dibutuhkan negara-negara Teluk yang sedang mengembangkan kurikulum pendidikan.

Di Arab Saudi, IM tidak bisa bergerak banyak karena kuatnya relasi ulama-ulama Wahhabi dengan dinasti Saud. IM bermetamorfosis menjadi gerakan non-politis di bidang pendidikan yang melahirkan generasi baru Saudi yang lekat dengan ajaran Wahhabi, tetapi memiliki embrio gerakan sosial-politik untuk bersikap kritis terhadap pemerintah.¹² Raja Abdullah mengatakan IM sebagai *a "Masonic cult run by wolves in sheep's clothing."*¹³ Kelompok ini me-

¹² Masami Nishino, "Muhammad Qutb's Islamist Thought: A Missing Link Between Sayyid Qutb and al-Qaeda?" *NIDS Journal of Defense and Security*, no. 16 (Desember 2015): 113–145.

¹³ Setelah *Arab Spring* 2011, Raja Abdullah mengambil kebijakan baru untuk bersikap keras terhadap IM. Lebih lengkap wawancara Jeffrey Goldberg dengan Raja Abdullah, lihat Jeffrey Goldberg "The Modern King in the *Arab Spring*," *the Atlantic*, April 2013, diakses pada 29 Oktober 2018 dari <https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2013/04/monarch-in-the-middle/309270/>. Lihat juga Mohamed Mokhtar Qandil, "The Muslim Brotherhood and Saudi Arabia: From

lakukan *taghayur* (metamorfosis) mempertemukan ajaran Wahhabi dan IM yang inspirasi bagi berdirinya *al-Shahwah al-Islamiyah* (kebangkitan Islam) di Arab Saudi.¹⁴

Gerakan Shahwah yang dipimpin oleh Safar al-Hawali dan Salman al-Awdah melakukan protes keras terhadap pemerintah Saudi pada kasus perang Irak-Kuwait dengan melayangkan surat permintaan pada 1991 agar pemerintah Saudi kembali kepada pijakan Islam yang benar¹⁵ dan tidak turut menghancurkan sesama pemerintahan Muslim yang dipilih oleh rakyatnya.¹⁶ Kemudian, Saudi mengeluarkan dekrit yang menyatakan IM dan afliasinya menjadi organisasi terlarang hingga saat ini.

Di UEA, kelompok IM bekerja di sektor publik dan swasta, termasuk sektor peradilan dan pendidikan.¹⁷ Keberadaan IM menguat setelah mereka menguasai majalah *Al-Islah* dan membuka cabang di beberapa emirat. Pada perkembangannya, dewan mahasiswa dan asosiasi profesional, seperti serikat ahli hukum dan guru, berubah menjadi pos terdepan bagi kepentingan IM¹⁸ menyebabkan IM di UEA menjadi “negara” dalam negara. Setelah terjadi serangan World Trade Centre 9/11 di AS yang melibatkan dua warga negara Emirat,

Then to Now,” The Washington Institute, 18 Mei 2018, diakses pada 29 Oktober 2018 dari <https://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/the-muslim-brotherhood-and-saudi-arabia-from-then-to-now>.

¹⁴ Stéphane Lacroix, *Awakening Islam: The Politics of Religious Dissent in Contemporary Saudi Arabia*, terj. oleh George Holoch (Cambridge: Harvard University Press, 2011), 43. Lihat juga Nishino, “Muhammad Qutb’s,” 113–145.

¹⁵ David Commins, *The Wahhabi Mission and Saudi Arabia* (London dan New York: I.B. Tauris, 2006), 179–180. Lihat juga David Commins, *Islam in Saudi Arabia* (London dan New York: I.B. Tauris, 2015), 144–145.

¹⁶ Stéphane Lacroix, “Saudi Arabia’s Muslim Brotherhood Predicament,” *The Washington Post*, 20 Maret 2014, diakses pada 3 November 2019 dari https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2014/03/20/saudi-arabias-muslim-brotherhood-predicament/?utm_term=.f3b04fe78fe2.

¹⁷ Sultan al-Qassemi, “The Brothers and the Gulf,” *Foreign Policy*, 14 Desember 2012, diakses pada 18 Oktober 2017 dari <http://foreignpolicy.com/2012/12/14/the-brothers-and-the-gulf/>.

¹⁸ Sultan al-Qassemi, “The Brothers and the Gulf.”

UEA memutuskan untuk mereformasi sistem pendidikan, kurikulum sekolah, dan membatasi gerak IM. Pasca-*Arab Spring*, UEA, Arab Saudi, dan Bahrain resmi menyatakan IM sebagai organisasi terlarang.

IM di Qatar tidak mengalami friksi dengan pemerintah. Relasi antara IM dan Qatar merupakan anomali di kawasan teluk. Dalam konflik Suriah, hampir semua negara Teluk dipimpin Saudi Arabia mendukung gerakan Wahhabi, Qatar justru konsisten mendukung gerakan berbasis IM di Suriah.¹⁹ Keluarga al-Thani melihat perkembangan IM di Qatar bukan sebagai ancaman. Populasi masyarakat Qatar yang kecil dengan kemakmuran yang tinggi membuat masyarakatnya imun terhadap infiltrasi ideologi. Secara internal, Qatar memanfaatkan aktivis IM untuk memajukan pendidikan. Secara politik, Qatar memanfaatkan pengaruh IM untuk membentuk karakter politik luar negerinya sebagai mediator yang dekat dengan semua gerakan Islam.

Kepemimpinan Qatar tidak memberikan ruang bagi terbentuknya *civil society*. Pemilu lokal yang dibentuk, seperti *Central Municipal Council* (CMC), tidak lebih sebagai upaya untuk melokalisasi isu dan menginventarisasi pelanggaran-pelanggaran di daerah karena CMC tidak memiliki wewenang sebagai badan legislatif yang melakukan *check and balance* terhadap pemerintah.

Terpisahnya IM Kuwait dari organisasi induknya (di Mesir) menjadikan IM lebih leluasa menyesuaikan diri dengan konteks lingkungan politik yang ada. IM mendirikan *the Islamic Constitutional Movement* (ICM) yang merupakan organisasi Islam yang kuat, berpengaruh, dan menjadi oposisi yang kritis kepada pemerintah.²⁰ ICM diuntungkan dengan lingkungan masyarakat yang memiliki identitas keislaman kuat dalam aktivitas sosial kemasyarakatan. Suku-suku yang kritis terhadap pemerintah tidak ragu

¹⁹ Eugenio Dacrema, "New Emerging Balances in the Post-*Arab Spring*: the Muslim Brotherhood and the Gulf Monarchies," *ISPI Analysis*, no. 155 (Januari 2013).

²⁰ Chatam House. *Kuwait Study Group: The Experience of Parliamentary Politics in the GCC* (London: Chatham House, 2012), hlm. 4–14.

untuk mendukung kelompok Islam, baik dari Salafi maupun ICM selama dapat memperjuangkan kepentingan mereka.²¹ IM di Kuwait menggambarkan gerakan Islam yang memiliki kontribusi yang kuat bagi demokratisasi.

IM di Bahrain merupakan faksi kecil, tetapi reaktif menghadapi kelompok Syiah yang mayoritas di Bahrain. IM tergabung dalam faksi *al-Minbar Islamic Society* yang memiliki dua anggota saja dalam parlemen. Namun, sayap IM non-politik, *Jamiyyat Al-Islah al-Islamiyyah*, memiliki kekuatan yang besar dan dekat dengan keluarga al-Khalifa.²²

Dalam negara yang otoriter, organisasi sosial keagamaan yang tidak memiliki misi perubahan sosial akan dekat dengan rezim, seperti Salafi/Wahhabi, terlebih jika mereka bersifat apolitis dan taat pada pemimpin (*ulil amri*). Di Arab Saudi, relasi mutualisme antara keluarga Ibn Saud dan ulama Wahhabi selama hampir dua ratus tahun penting untuk mendapatkan legitimasi yang kuat di dalam negeri dan kawasan. Ulama Wahhabi mewarnai karakter kebijakan dan politik luar negeri Arab Saudi yang sangat keras terhadap penyebaran pengaruh Syiah di kawasan Timur Tengah. Pemerintah Saudi mendirikan *Hai'ah Kibar al-Ulama Lil-Buhuts wal-Ifta'* (Lembaga Ulama Senior untuk Riset dan Fatwa) sebagai wadah bagi ulama Wahhabi untuk memperkuat relasinya dengan pemerintah Arab Saudi.²³

Wahhabi di Bahrain yang tergabung dalam faksi *Al-Ashalah* intens menghadapi pertarungan keras di tengah mayoritas pengikut Syiah. Wahhabi diuntungkan oleh keberadaan keluarga al-Khalifa yang Sunni. Selain itu, penguasa Bahrain memarginalkan kelompok

²¹ Yagoub Al-Kandari, *Tribalism, Sectarianisme, and Democracy in Kuwaiti Culture* (Kuwait : Kuwait Universty Press, 2014).

²² Toby Matthiesen, *Al Khalij Ath Thaiifi wa Ar Rabi' Al Arabi* (Beirut: Arab Network for Research and Publishing, 2014).

²³ Christopher Boucek, "Saudi Fatwa Restrictions and the State-Clerical Relationship," *Carnegie Endowment*, 27 Oktober 2010, diakses pada 15 Oktober 2018 dari <https://carnegieendowment.org/sada/41824>.

Syiah secara sosial, politik, dan ekonomi. Dalam parlemen Bahrain, pengikut Syiah mendapatkan porsi minoritas karena 50% anggotanya ditunjuk oleh keluarga al-Khalifa. Itulah yang menyebabkan upaya mengubah konstitusi Bahrain agar lebih ramah terhadap kepentingan Syiah sering berujung gagal.²⁴ Uniknya, *Al-Ashalah* yang berafiliasi dengan Wahhabi justru tidak mendapatkan dukungan suara yang signifikan dalam pemilu.²⁵

Ajaran Wahhabi merupakan aliran keagamaan yang paling dominan bagi masyarakat Qatar, tetapi bersifat inklusif dan memberi ruang bagi gerakan Islam lain, seperti IM. Perbedaan yang mencolok antara gerakan IM di negara-negara Teluk dan IM di negara asalnya di Mesir (juga Afrika Utara) adalah hilangnya karakter sufisme. Metamorfosis karakter IM di Teluk lebih mengutamakan upaya penyesuaian diri dengan ajaran Wahhabi dalam aspek teologinya. Perpaduan teologi Wahhabi dengan karakter sosial-politis IM ini tidak menjadi gerakan sosial yang aktif. Namun, perpaduan ini lebih diimplementasikan melalui gerakan filantropi, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke atas Qatar.

Di tengah masyarakat kosmopolitan UAE, Wahhabi memiliki karakter yang lebih dekat dengan Wahhabi pesisir (*Wahhabi of the sea*) yang memiliki ekonomi lebih stabil.²⁶ Dibandingkan dengan Saudi, Wahhabi di UEA lebih dekat karakternya dengan Qatar. Penolakan UEA terhadap IM bersifat elitis dan politis karena

²⁴ Fakhry Ghafur, "Kekuatan Politik Islam di Bahrain: Politik Diskriminasi Monarki," dalam *Kekuatan Politik Islam di Bahrain, Qatar, dan Lebanon* (Jakarta: UI Press, 2017), 53–59.

²⁵ "Bahrain Election Report," National Democratic Institute for International Affairs, 2002, diakses pada 17 Oktober 2018 dari https://www.ndi.org/sites/default/files/2392_bh_electionsreport_engpdf_09252008.pdf.

²⁶ Istilah *Wahhabi of the land* dan *Wahhabi of the sea* merupakan konsep yang digunakan penulis untuk mengklasifikasikan karakter Wahhabi berdasarkan letak geografisnya. Konsep ini dipinjam dari tulisan James M. Dorsey dengan definisi yang berbeda. Baca James M. Dorsey, "Wahhabism vs. Wahhabism: Qatar Challenges Saudi Arabia," *RSIS Working Paper series*, no. 262 (September 2013): hlm. 2.

mengancam kekuasaan para emir dan karena tekanan politik dari Arab Saudi. Namun, di level masyarakat, keterbukaan terhadap IM masih sangat tinggi, bahkan sel-sel gerakan IM secara sosial masih aktif di tengah masyarakat UEA.

Wahhabi di Kuwait memiliki hubungan historis dengan Wahhabi yang lahir di Arab Saudi.²⁷ Politik Kuwait yang demokratis menyebabkan Wahhabi tidak dapat tiket merapatkan diri dengan keluarga as-Sabah yang justru dekat dengan kelompok Syiah. Wahhabi di Kuwait kemudian bergabung dengan IM dan menjadi kelompok oposisi yang vokal terhadap pemerintahan.²⁸

Wahhabi di Kuwait merupakan pengecualian. Mereka masuk dalam politik dan menjadi oposisi pemerintah sebagai respons terhadap keberpihakan rezim pada kelompok Syiah. Sikap politis Wahhabi di Kuwait merupakan bukti bahwa dalam iklim yang demokratis gerakan Wahhabi yang anti-politik sekalipun dapat berkontestasi dalam proses demokratisasi.

Ketegangan antara Arab Saudi dan Iran tidak terlepas dari sejarah berdarah pada masa lampau.²⁹ Di Saudi, kelompok Syiah menjadi kelompok oposisi dan minoritas. Kelompok ini menguat sejak Revolusi Iran meletus dengan mendirikan *Organization of Islamic Revolution* (OIR). Pasca-*Arab Spring*, Syiah di Saudi aktif melakukan kritik dan menggelar demonstrasi di wilayah timur Saudi sepanjang tahun 2011 hingga tahun 2016. Banyak anggotanya ditangkap, bahkan dihukum gantung oleh aparat Saudi.³⁰ Namun, hal tersebut tidak menghentikan protes kelompok Syiah. Kelompok militan Syiah justru mege bom kantor intelijen Saudi di Qatif.³¹

²⁷ Michael S. Casey, *The History of Kuwait* (Westport: Greenwood Press, 2007), 37–38. Lihat juga Commins, *The Wahhabi Mission*, 71.

²⁸ Shafeeq N. Ghabra, “Balancing State and Society: The Islamic Movement in Kuwait,” *Middle East Policy* no. 5/2 (Mei 1997).

²⁹ Commins, *Islam in Saudi Arabia*, 3

³⁰ Commins, *Islam in Saudi Arabia*, 141.

³¹ Bethan McKernan, “Inside the Saudi Town That’s Been under Siege for Three Months by Its Own Government,” *Independent*, 4 Agustus 2017, diakses pada 3 November 2019 dari <http://www.independent.co.uk/news/world/middle->

Di UEA, calon legislatif yang duduk di FNC tidak boleh memiliki afiliasi dengan gerakan sosial/Islam mana pun—UEA tidak memperbolehkan terbentuknya partai politik. Dalam kondisi seperti ini, kelompok Syiah tidak memiliki posisi tawar politik apa pun terhadap rezim sehingga terjadi pengusiran terhadap pengikut Syiah di UEA.³²

Sebagai penduduk mayoritas di Bahrain, Syiah memenangkan suara mayoritas dalam pemilu. Namun, pemerintahan dinasti al-Khalifa membatasi jumlah perolehan kursi bagi Syiah di parlemen. Marginalisasi ini memunculkan perlawanan terhadap rezim al-Khalifa yang memuncak dalam peristiwa *Arab Spring*. Rezim al-Khalifa kemudian mengundang pasukan militer Arab Saudi (1.200 tentara) dan UEA (800 tentara) untuk menekan perlawanan kelompok Syiah.³³

Di Kuwait, kelompok Syiah bukanlah faksi politik yang paling kuat. Namun, artikulasi politik mereka disalurkan melalui kontestasi perebutan suara di parlemen. Berbeda dengan di Bahrain, kelompok Syiah justru menjadi pendukung utama rezim as-Sabah di tengah mayoritas kelompok Sunni, ICM (IM), dan Salafi yang menjadi kelompok oposisi.

Konflik sektarianisme dan agama di Qatar nyaris mendekati titik nol. Sejak 1971, konflik sektarianisme berbasis agama tidak

east/saudi-arabia-siege-town-own-citizens-government-kingdom-military-government-awamiyah-qatif-a7877676.html. Lihat juga “Saudi Protesters Fire-Bomb Intelligence Building in Qatif,” *Middle East Eye*, 11 Januari 2016, diakses pada 3 November 2019 dari <http://www.middleeasteye.net/news/saudi-protesters-fire-bomb-intelligence-building-qatif-843608836>.

³² “Lebanese Families Given 48 Hours to Leave the UAE,” *The New Arab*, 18 Maret 2015, diakses pada 3 November 2019 dari <https://www.alaraby.co.uk/english/news/2015/3/18/lebanese-families-given-48-hours-to-leave-the-uae>.

³³ Ethan Bronner dan Michael Slackman, “Saudi Troops Enter Bahrain to Help Put Down Unrest,” *The New York Times*, 14 Maret 2011, diakses pada 3 November 2019 dari <https://www.nytimes.com/2011/03/15/world/middleeast/15bahrain.html.xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700201>.

muncul ke permukaan. Di satu sisi, Syiah di Qatar mendapatkan posisi yang nyaman di tengah penganut Wahhabi yang toleran. Di sisi lain, Syiah di Qatar juga bukan pengikut yang fanatik karena kebanyakan dari mereka memiliki latar belakang sebagai pengusaha dan dekat dengan keluarga Emir.³⁴

Melihat hal tersebut, politik Islam di Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Kuwait sulit berperan dalam menegakkan demokrasi karena beberapa hal. *Pertama*, rezim penguasa tidak menyediakan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya *civil society*, termasuk politik Islam, sehingga gerakan politik Islam tidak bisa menjalankan fungsinya untuk mengkritisi kerja pemerintah, seperti di Arab Saudi dan UEA. *Kedua*, mekanisme pemilihan politik kekuasaan tidak menyediakan ruang bagi keterlibatan rakyat. Dalam kasus Arab Saudi dan UEA, semua akses politik dimonopoli sedemikian rupa sehingga menjadi hak absolut kerajaan. Pembatasan ruang gerak dan wewenang oleh keluarga kerajaan membuat demokrasi tidak bisa tumbuh dan berkembang. *Ketiga*, kemapanan ekonomi dan sosial membuat politik Islam menjadi pasif. Dalam kasus Qatar, hal ini didukung oleh rezim yang akomodatif dengan gerakan Islam. Akibatnya, apatisisme membuat gerakan politik Islam tidak mendorong terbentuknya demokrasi. *Keempat*, manipulasi politik yang dilakukan oleh rezim untuk mempertahankan kekuasaan mengakibatkan gerakan politik Islam mengalami restriksi politik. Upaya mereka untuk berkontribusi dalam memajukan demokrasi terhalang tembok kekuasaan, seperti yang terjadi di Bahrain. Namun, geliat politik Islam di Bahrain jauh lebih maju dibandingkan Arab Saudi, UEA dan Qatar. Dari keempat poin tersebut, Kuwait menjadi satu-satunya contoh sukses negara yang memberikan ruang bagi politik Islam agar mendorong terbentuknya iklim yang demokratis. Sebagian besar dari mereka menjadi kelompok oposisi yang kuat terhadap rezim.

³⁴ Dedy Saiful Hadi, Mantan Dubes RI untuk Qatar, FGD pada 2 Juni 2016.

Perubahan lingkungan politik membuat politik Islam melakukan *taghoyyur* atau beradaptasi dengan lingkungan tempat dia berada. *Pertama*, pada lingkungan rezim diktator yang tidak memberikan ruang bagi tumbuhnya *civil society*, politik Islam tidak bisa secara leluasa tumbuh dan berkontribusi membangun lingkungan yang demokratis. Rezim di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain cenderung menggunakan cara-cara keras, termasuk menetapkan politik Islam (seperti IM) sebagai organisasi teroris terlarang. Pada akhirnya, gerakan ini melakukan *taghoyyur* atau menyesuaikan diri dengan kondisi politik yang ada. Mereka akan berkecimpung dalam sektor non-politik, organisasi profesi, pendidikan, dan filantropi seperti di Qatar.

Kedua, di negara yang memiliki kondisi ekonomi yang kurang kondusif, kesenjangan ekonomi yang lebar, dan korupsi yang merajalela, politik Islam akan tumbuh subur dan reaktif terhadap kondisi yang ada. Dalam kasus Arab Saudi, gerakan ini semakin aktif ketika ekonomi Saudi semakin melemah dan ketimpangan sosial ekonomi semakin lebar. Dalam kondisi ekonomi yang cukup baik, seperti di Qatar dan UEA, gerakan politik Islam akan mengalami stagnasi.

Ketiga, di negara yang tidak ramah terhadap gerakan Islam, politik Islam cenderung melakukan *counter-action* terhadap kebijakan pemerintah. Dalam kasus Kuwait dan Bahrain, gerakan Islam menjadi kelompok oposisi yang paling reaktif. Sebaliknya, di Qatar, ketika negara ramah dengan gerakan Islam, gerakan Islam akan fokus pada aspek religiusitas saja dan tidak masuk ke ranah politik.

C. POLITIK ISLAM DI TUNISIA, MESIR, DAN LIBYA

Pasca-*Arab Spring*, ada dinamika sosial-politik yang berbeda di Tunisia, Mesir, dan Libya. Di Tunisia, ada pemilu parlemen yang diselenggarakan pada 23 Oktober 2011. Partai *An-Nahdah*, manifestasi IM di Tunisia, memenangkan 41% kursi atau 89 dari 217 kursi di Majelis Konstituante Nasional (*National Constituent Assembly-NCA*), sedangkan *Congress for The Republic* (CPR) berada

di posisi kedua dengan memenangkan 29 kursi.³⁵ Kemudian, *An-Nahdah* membentuk pemerintahan yang berkoalisi dengan partai kiri-tengah *Congress for the Republic* dan *Ettakatol (Democratic Forum for Labor and Liberties)*. Koalisi itu dikenal dengan sebutan Koalisi Troika. Koalisi tersebut menunjukkan bagaimana IM bisa berkolaborasi dengan partai sekuler lainnya. Racheed Ghanouchi sebagai pimpinan *An-Nahdah* secara ideologi sangat dipengaruhi oleh pemikiran IM.³⁶

Pascapemilu parlemen, Tunisia memulai transisi demokrasi. Pemerintah hasil pemilu tidak stabil. Berbagai permasalahan politik domestik Tunisia harus dihadapi pemerintahan di bawah Partai *An-Nahdah*, misalnya demonstrasi dan pembunuhan tokoh politik. Ketika Chokri Belaid, politisi yang anti dengan kelompok Islam, terbunuh pada Februari 2013, ribuan orang menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah tempat. Dalam aksinya itu, para pengunjuk rasa mendesak pemerintah untuk mundur dan menyerukan dilakukannya revolusi. Tokoh oposisi Tunisia kembali terbunuh pada 25 Juli 2013. Pemimpin Partai Gerakan Rakyat dan anggota Majelis Nasional, Mohamed Brahmi, ditembak mati di luar rumahnya di ibu kota Tunis, pada 25 Juli 2013.³⁷ Namun, pengaruh politik Brahmi tidak sebesar Belaid.

Pembunuhan dua tokoh oposisi itu telah melemahkan posisi Partai *An-Nahdah* sebagai pemegang kekuasaan. Mereka dianggap gagal menjaga keamanan dan mengawal transisi demokrasi di Tunisia. Polarisasi politik di Tunisia terus terjadi. Hal itu menjadi kendala bagi konsolidasi politik di Tunisia. Selain itu, janji perbaikan ekonomi oleh *An-Nahdah* belum terwujud. Pertumbuhan ekonomi

³⁵ The Carter Center, *National Constituent Assembly Elections in Tunisia* (Atlanta: The Carter Center, 2011), 52–54.

³⁶ Anne Wolf, *Political Islam in Tunisia: The History of Ennahda* (New York: Oxford University Press, 2017), 51 dan 212.

³⁷ Lihat “Tokoh Oposisi Tunisia Ditembak Mati,” *BBC Indonesia*, 25 Juli 2013, diakses pada 15 Oktober 2018 dari https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/07/130725_tunisia_pembunuhan.

Tunisia berjalan dengan lambat. Sektor pariwisata yang menjadi andalan Tunisia belum pulih. Tingkat pengangguran masih berada di level 17%.³⁸

Menghadapi berbagai persoalan yang cukup rumit itu, akhirnya, pemerintah koalisi yang dipimpin oleh *An-Nahdah* menyetujui tuntutan untuk mundur dari kekuasaan pada 28 September 2013. Keputusan itu diambil untuk menghindari kekacauan situasi politik di Tunisia dan sesuai dengan “usulan jalan tengah” dari Uni Serikat Buruh Tunisia (UGTT), *employer’s federation*, liga HAM, dan organisasi advokat untuk mengakhiri krisis politik di Tunisia.³⁹

Mundurinya *An-Nahdah* dari pemerintahan bisa dikatakan sebagai upaya mencegah terjadinya kekerasan seperti di Mesir. Para pemimpin *An-Nahdah* memiliki kekhawatiran akan mengalami nasib yang sama dengan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Penggulingan Presiden Mursi dijadikan pelajaran oleh mereka. Kekerasan yang diikuti oleh pelarangan Ikhwanul Muslimin oleh pengadilan Mesir menjadi peringatan bagi pemimpin *An-Nahdah*. Pemimpin *An-Nahdah*, Rachid Ghannouchi, dalam pidatonya memperingatkan bahwa “peristiwa yang sama” dapat saja terjadi di Tunisia.⁴⁰

Rachid Ghanouchi sebenarnya tidak ingin menjadikan Tunisia sebagai negara Islam. Ghanouchi ingin mengembangkan negara Tunisia yang demokratis. Dia menjelaskan hal itu ketika kami mewawancarainya. Menurut Ghanouchi:⁴¹

Pada saat 2011, saya sangat percaya bahwasanya Tunisia memasuki era baru dan zaman yang baru. Seluruh negara Arab pun ke depannya

³⁸ F. T. Tozeur. “Tunisia’s Economy Still Struggling,” *The Economist*, 19 Maret 2013, diakses pada 3 November 2019 dari <http://www.economist.com/blogs/pomegranate/2013/03/tunisi-as-economy>.

³⁹ Lihat “Tunisia, Ennahda Mundur untuk Akhiri Krisis Politik,” *Kompas*, 30 September 2013, 8.

⁴⁰ Cornelia Wegerhof, “Tunisia’s Ennahda Withdraws-but Why?” *Deutsche Welle*, 2 Oktober 2013, diakses pada 10 Oktober 2013 dari <https://www.dw.com/en/tunisi-as-ennahda-withdraws-but-why/a-17130859>.

⁴¹ Rachid Ghanouchi, wawancara di Tunis, pada 19 April 2018.

nanti pasti akan memakai sistem demokrasi hanya tinggal menunggu waktunya saja yang tepat, karena situasinya yang sangat komplikasi. Kita mungkin ke depannya butuh banyak waktu dan mungkin akan lebih banyak memakan korban. Semuanya hanyalah masalah waktu, semua negara Arab akan menganut paham demokrasi sebagaimana kami di Tunisia. Demokrasi ini terus bergerak ke seluruh penjuru dunia dari Eropa ke Asia, Afrika dan sampai ke negara-negara Arab.

Pada 2014, dilakukan pemilu parlemen dan presiden di Tunisia. Pemilu anggota parlemen diselenggarakan pada 26 Oktober 2014. Hasil pemilu legislatif menunjukkan Partai Nida Tunis yang sekuler memperoleh kursi tertinggi di parlemen dengan 86 kursi. Partai *An-Nahdah* mengalami penurunan dengan menempati posisi kedua (69 kursi).⁴² Hal ini disebabkan oleh ketidakberhasilan Ghanouchi pada periode sebelumnya dan dia dinilai terlalu pro terhadap kelompok Islamis.⁴³ Pemilu legislatif 2014 menunjukkan bahwa masyarakat Tunisia cenderung memilih partai yang tidak berbasis agama. Hal yang sama terjadi pada pemilu presiden yang dilaksanakan dalam dua putaran (November–Desember 2014) yang dimenangkan Beji Caid Essebsi dari Partai Nida Tunis dengan 55,68% suara sah.⁴⁴ Dengan hasil itu, Essebsi menjadi Presiden Tunisia pertama yang dipilih secara langsung pasca-*Arab Spring*.

Berhasilnya pemilu parlemen dan presiden serta dinamika naik turunnya suara masing-masing partai menunjukkan bah-

⁴² NDI, *Final Report on the 2014 Legislative and Presidential Elections in Tunisia*, 53. Lihat juga “Tunisia Election Results: Nida Tunis Wins Most Seats, Sidelineing Islamists,” *The Guardian*, 30 Oktober 2014, diakses pada 17 Oktober 2018 dari <https://www.theguardian.com/world/2014/oct/30/tunisia-election-results-nida-tunis-wins-most-seats-sidelining-islamists>.

⁴³ Pemimpin *An-Nahdah*, Rachid Ghanouchi, mengakui bahwa memperjuangkan Islam dalam dunia politik itu tidak mudah. Ada risiko dan penentangan dari kalangan lain. Menurut Ghanouchi, “...terlalu berisiko apabila kami menggunakan identitas asli kami di sini sebagai partai politik ... terlalu banyak yang meminggirkan Islam dalam dunia politik.” Wawancara dengan Rachid Ghanouchi di Tunis pada 19 April 2018.

⁴⁴ Lihat The Carter Center, *Legislative and Presidential Elections in Tunisia: Final Report* (Atlanta: The Carter Center, 2014), 164.

wa demokrasi mulai berjalan mapan. Tunisia terus menjalankan program reformasi politiknya dengan menjalankan pemilu lokal pada Mei 2018.⁴⁵

Mesir mengalami dinamika politik yang lebih rumit pasca-*Arab Spring*. Demokratisasi yang diharapkan setelah lengsernya Presiden Husni Mubarak tidak terwujud. Kudeta militer Mesir pada 3 Juli 2013 menjadi potret buram demokratisasi di negara piramida itu.

Semula, pemilu 2011 telah menghantarkan kelompok Islam melaju ke puncak kekuasaan. Mereka berhasil menguasai parlemen dan kursi kepresidenan. Pada pemilu parlemen (*Majelis as-Sa'ab* dan *Majelis as-Syura*) setelah Mubarak tumbang, yang berhasil menang adalah Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) yang berafiliasi pada gerakan Ikhwanul Muslimin (IM), disusul oleh kelompok Salafi dengan Partai Nour. Pemilu parlemen sendiri diselenggarakan dalam tiga tahap, yaitu pada 28 November 2011, 14 Desember 2011, dan 3 Januari 2012 (sekitar enam minggu).

Ketika diadakan pemilihan presiden, yang menang adalah Muhammad Mursi, seorang tokoh IM. Kemenangan kelompok Islam tersebut cukup mengagetkan kalangan elite Mesir yang cenderung liberal dan sekuler. Kalangan militer juga mengkhawatirkan kemenangan tersebut. Tampaknya kalangan militer Mesir tidak rela bila peran politik mereka disingkirkan dari kehidupan sehari-hari. Keberhasilan kelompok Islam telah menghilangkan atau mengurangi kekuasaan militer yang telah berlangsung lama di Mesir. Kalangan elite militer mempunyai kedudukan yang tinggi dan terhormat dalam strata kehidupan politik Mesir. Hal itu, misalnya, tecermin dengan adanya Dewan Agung Militer (*Supreme Council of the Armed Forces-SCAF*).

Presiden Mursi menghadapi masalah politik yang begitu pelik. Selain itu, ekonomi Mesir juga terpuruk. Kalangan militer

⁴⁵ Ketika melakukan penelitian di Tunisia (April 2018), penulis melihat langsung kampanye Partai Nida Tunis di Kota Tunis. Penulis juga sempat melihat arak-arakan mobil kampanye di wilayah Provinsi Sousse dan Zaghuan.

menganggap Mursi tidak sanggup sehingga akhirnya dikudeta pada 3 Juli 2013 malam. Kudeta militer⁴⁶ telah mengakhiri kekuasaan Presiden Mursi yang dipilih secara demokratis dan mengembalikan Mesir pada pemerintahan di bawah pimpinan militer.

Setelah kudeta militer, partisipasi masyarakat melalui pemilu diatur sesuai kepentingan militer. Konstitusi Mesir 2014 menguntungkan kelompok militer. Hal itu tak mengherankan karena merekalah yang mengambil alih kekuasaan dari Presiden Mursi. Kemudian, dalam pemilihan Presiden tahun 2014, yang menang adalah Jenderal Abdul Fattah al-Sisi, tokoh militer yang melakukan kudeta. Dengan terpilihnya Jenderal Al-Sisi menjadi Presiden pada tahun 2014, penguasa Mesir kembali dari kalangan militer.⁴⁷

Kemenangan Al-Sisi menandai kembalinya kalangan militer dalam dunia politik Mesir. Artinya, secara politik kenegaraan, posisi militer Mesir masih kuat dan dominan, terlebih Al-Sisi kembali memenangkan pemilu presiden Mesir pada 2018. Pemungutan suara tiga hari yang dimulai pada 26 Maret 2018 telah memberikan legitimasi ulang pada petahana Al-Sisi. Kemenangan suaranya cukup telak dengan 92% suara. Sementara itu, sejak kudeta militer (2013), kekuatan politik Ikhwanul Muslimin diberangus dan dilarang dalam kehidupan bernegara dan berbangsa di Mesir.

Dinamika politik di Libya tidak sama dengan yang terjadi di Tunisia dan Mesir. Pemimpin Libya, Muammar Qadhafi, tidak mudah ditumbangkan ketika bertiup angin *Arab Spring*. Qadhafi yang sudah lama berkuasa di Libya tidak mudah ditaklukkan oleh para demonstran. Hanya dengan campur tangan NATO, rezim Qadhafi akhirnya berhasil ditumbangkan.

Setelah Qadhafi tewas, Dewan Transisi Nasional (NTC) yang didukung PBB membentuk peta jalan demokratisasi dengan meng-

⁴⁶ Peristiwa ini tidak tergolong kudeta berdarah, tetapi perlawanan terhadap kudeta tersebut menimbulkan banyak korban. Peristiwa ini disebut Tragedi Rab'ah.

⁴⁷ Lihat M. Hamdan Basyar, *Pertarungan dalam Berdemokrasi: Politik di Mesir, Turki, dan Israel* (Jakarta: UI Press, 2015), 11.

agendakan pelaksanaan pemilu dan pembentukan konstitusi di Libya. Konstitusi memang sangat diperlukan mengingat pada masa Qadhafi, konstitusi dibentuk hanya untuk mendukung kekuasaannya sehingga peraturan yang muncul adalah larangan berdirinya partai politik serta pemberangusan gerakan oposisi dan media massa. Perbedaan pendapat di antara anggota NTC dalam perumusan konstitusi menghambat laju transisi, terutama terkait pelaksanaan pemilu, hingga otoritas Libya terpaksa menyepakati konstitusi sementara sampai terbentuknya keanggotaan Kongres Nasional Libya (GNC).

Pada 7 Juli 2012, diselenggarakan pemilu bersejarah dalam politik Libya. Pemilu tersebut merupakan momentum penyerahan kekuasaan dari pemerintah transisi (NTC) ke *General National Congress* (GNC) atau Kongres Nasional Libya. Pemilu yang melibatkan 60% pemilih dan memperebutkan 200 kursi⁴⁸ parlemen serta diikuti sedikitnya 160 partai politik tersebut berlangsung transparan.⁴⁹ Sama halnya dengan pemilu di Tunisia dan Mesir, pemilu di Libya melahirkan dua aliran partai politik yang saling bersaing. *Pertama*, partai-partai Islam yang diwakili dua partai besar, yaitu *Justice and Development Party* (JDP) sebagai representasi dari gerakan Ikhwanul Muslimin Libya dan partai Al-Wathan. *Kedua*, kubu nasionalis-liberal yang diwakili beberapa partai besar, seperti *National Forces Alliance* (NFA) pimpinan Mahmoud Jibril, *National Centrist Party* (NCP) yang didirikan Ali Tarhouni, serta partai *National Front Party* (NFP) yang dipimpin Muhammad Yusuf Al Magharif, mantan duta besar Libya untuk India pada era Qadhafi.

Hasil akhir perhitungan suara menunjukkan bahwa NFA memperoleh 39 kursi atau 49% dari total 80 kursi yang diperebutkan.

⁴⁸ Dari jumlah kursi parlemen tersebut, sebanyak 120 kursi untuk calon independen dan 80 kursi untuk calon dari partai politik.

⁴⁹ Christopher S. Chivvis, Keith Crane, Peter Mandaville, dan Jeffrey Martini, *Libya's Post-Qaddafi Transition: The Nation-Building Challenge* (Santa Monica, CA: RAND Corporation), diakses pada 26 Agustus 2013 dari https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR129.html.

Sementara itu, JDP hanya mendapat 17 kursi (21% suara). Partai Islam lainnya, Al Wathan, yang didukung Salafi, tidak memperoleh satu kursi pun di parlemen.⁵⁰ Walaupun NFA partai berbasis liberal, Mahmoud Jibril sebagai pimpinan pernah mempromosikan ide syariat Islam. Namun, sampai saat ini ide tersebut belum berhasil.

Demokratisasi terus berlangsung di Libya. Pada 2014, diselenggarakan pemilu untuk memilih anggota Majelis Draft Konstitusi (*Constitutional Drafting Assembly-CDA*) Libya. Pemilihan anggota Majelis itu telah sesuai dengan Deklarasi Konstitusi GNC pada 9 April 2013; UU 17 tahun 2013 tentang Pemilu; UU 8 tahun 2013 tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum Tinggi (*High National Election Commission-HNEC*); dan peraturan yang disahkan oleh komisionaris HNEC.

Pemilu diselenggarakan dalam tiga tahap pada 1 Desember 2013–23 Januari 2014. Ada 649 kandidat yang terdaftar untuk memperebutkan 60 kursi anggota Majelis Draft Konstitusi. Dari jumlah kandidat tersebut, terdapat 64 orang perempuan. Komisi Pemilihan Umum Tinggi (HNEC) Libya sukses menyelenggarakan pemilu tersebut, tetapi gagal mencapai inklusivitas yang diinginkan untuk mewujudkan CDA sebagai badan yang benar-benar mewakili seluruh masyarakat Libya.⁵¹

Perpolitikan Libya terus bereformasi. Pada akhir 2015, masyarakat Libya berhasil merumuskan Kesepakatan Politik Libya (*Libyan Political Agreement*). Kesepakatan itu bertumpu pada empat prinsip utama. Pertama, menjamin hak-hak demokratis rakyat Libya. Kedua, adanya kebutuhan pemerintahan konsensus berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan. Ketiga, pengawasan dan keseimbangan di antara institusi kekuasaan untuk memberdayakan lembaga-lembaga negara. Keempat, menghormati pengadilan Libya dan kemerdekaannya.⁵²

⁵⁰ High National Elections Commission, “Libya Election 2012,” diakses pada 7 Agustus 2013 dari www.hnec.ly.

⁵¹ Lihat The Carter Center, *The 2014 Constitutional Drafting Assembly Elections in Libya: Final Report* (Atlanta: The Center Canter, 2014).

⁵² Lihat United Nations Support Mission in Libya, “Libyan Political Agreement As

Kesepakatan ini dilakukan untuk mengatasi tantangan memerangi terorisme, mereformasi dan membangun lembaga-lembaga negara, merangsang pertumbuhan ekonomi, menghadapi fenomena migrasi ilegal, serta mengonsolidasikan supremasi hukum dan hak asasi manusia di seluruh negeri.

Kesepakatan itu menjadi langkah awal dalam perjalanan panjang menuju pemulihan dan kemakmuran Libya. Mengubah otoritarianisme dengan demokrasi sejati adalah usaha yang luar biasa sulit dan harus diusahakan terus-menerus. Namun, kesepakatan ini adalah langkah pertama yang baik yang menempatkan Libya di tempat kokoh untuk menghadapi tantangan masa depan.

Sejak tahun 2011 sampai tahun 2018, Libya berbenah diri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tahun 2016–2017 adalah masa cukup sibuk dalam perpolitikan Libya setelah ada kesepakatan politik pada 2015. Pasca-*Arab Spring*, kekuatan politik Islam di Libya belum mendapatkan kemenangan dalam pemilu, tetapi mereka memiliki basis yang signifikan di berbagai wilayah serta berkontribusi besar dalam perkembangan demokrasi di Libya.

D. POLITIK ISLAM DI SURIAH DAN YAMAN

Arab Spring sebagai simbol gerakan perlawanan terhadap rezim otoriter yang berawal di Tunisia telah berdampak pada pergolakan politik dan konflik di sejumlah negara Timur Tengah, termasuk di Suriah dan Yaman. Namun, tuntutan perubahan yang diserukan rakyat tidak mampu memaksa rezim di Suriah lengser, dan dalam derajat tertentu, belum bisa menciptakan negara yang demokratis di Yaman. Realitas yang terjadi di dua negara tersebut justru menghasilkan konflik yang berkelanjutan, menguatnya ekstremisme dan terorisme, serta intervensi militer sebagai imbas dari keterlibatan aktor politik regional maupun global. Pertarungan antara rezim

Signed on 17 December 2015,” diakses pada 9 Oktober 2018 dari <https://unsmil.unmissions.org/sites/default/files/Libyan%20Political%20Agreement%20-%20ENG%20.pdf>.

penguasa yang mempertahankan status quo dan kelompok oposisi yang menuntut perubahan telah membentuk polarisasi gerakan perlawanan, baik dalam bentuk perlawanan bersenjata kelompok radikal maupun pertarungan politik formal yang dipimpin kelompok Islam moderat. Kekuatan politik dan gerakan sosial baru muncul sebagai aktor yang berperan sangat signifikan dalam konflik politik di Suriah dan Yaman.

Dalam kasus Suriah, setiap kelompok yang bertikai berusaha menguasai sejumlah fasilitas penting dan mencoba menyuguhkan wajah pemimpin alternatif. Ada dua kelompok yang terlibat dalam pergulatan politik praktis di Suriah. *Pertama*, kalangan sekuler yang membentuk *the National Coordination Committee for Democratic Transformation* (NCC), *the Free Syrian Army* (FSA). *Kedua*, kalangan Islam moderat dari Ikhwanul Muslimin yang tergabung dalam *the Syrian National Council* (SNC) yang mendapat dukungan dari sejumlah negara, baik regional maupun global. Kemelut tanpa kunjung akhir, kesenjangan sosial-ekonomi yang terus meningkat, diskriminasi, pengangguran, dan maraknya pelanggaran HAM menyebabkan Suriah terancam menjadi negara gagal.

Sama halnya dengan Suriah, pergolakan politik yang berkepanjangan sebagai dampak dari *Arab Spring*, mengakibatkan perekonomian Yaman semakin memprihatinkan. Setengah populasi penduduk Yaman hidup dalam garis kemiskinan dengan penghasilan di bawah 2 US\$ per hari, dan sepertiga penduduknya mengalami kelaparan. Beberapa tahun pasca-*Arab Spring*, Yaman tergolong dalam daftar negara dengan *Failed States Index* tertinggi.

Arab Spring yang terjadi di Yaman sejak 23 November 2011 menuntut Presiden Ali Abdullah Saleh mundur dari jabatannya karena dianggap gagal memulihkan stabilitas perekonomian Yaman. Atas desakan sejumlah negara yang tergabung dalam Dewan Kerjasama Teluk (*the Gulf Cooperation Council*/GCC), Ali Abdullah Saleh bersedia mundur dari jabatannya dan digantikan Wakil Presiden Abd Rabbuh Mansour Hadi. Pemerintah transisi pun membentuk *National Dialogue Conference* (NDC) yang melibatkan partai besar,

seperti *General People Congress* (GPC) dan sejumlah kekuatan oposisi yang tergabung dalam *Joint Meeting Parties* (JMP) terdiri dari gabungan antara Partai *Al-Islah* sebagai representasi dari Ikhwanul Muslimin, Partai Sosialis Yaman (*Yemen Socialist Party/YSPP*), gerakan *Houthi*, serta sejumlah perwakilan masyarakat dari kalangan pemuda dan perempuan yang berkomitmen membangun konsensus politik Yaman. Namun, konsensus ini mengalami kegagalan setelah pada 2014 Syiah *Al-Houthi* melakukan pemberontakan, menguasai ibu kota Sana'a, mengambil alih istana presiden, serta membubarkan parlemen. Pada Desember 2017, kelompok *Houthi* bahkan membunuh mantan presiden sekaligus tokoh GPC, Ali Abdullah Saleh, saat hendak melarikan diri ke Ma'rib.⁵³

Dinamika politik di Suriah dan Yaman pasca-*Arab Spring* kerap diwarnai konflik politik antara rezim yang masih bertahan dan kelompok oposisi dan gerakan pemberontakan. Di Suriah, Institusi militer yang tergabung dalam *the Syrian Arab Army* (SSA) dan tentara profesional terlatih dalam *National Defense Force* (NDF) dengan dukungan kelompok milisi Syiah menjadi benteng pertahanan rezim dalam menghadapi kelompok oposisi. Menurut Perlmutter, tanpa dukungan dari NDF, milisi Syiah *Alawiyah* yang pro-rezim, dan kelompok *Hizbullah* yang didukung Iran dan Rusia, mustahil rezim Assad dapat bertahan.⁵⁴

Pada awal perlawanan terhadap rezim Asad, kelompok Islam yang berperan cukup signifikan sebelum dan sesudah *Arab Spring* adalah Ikhwanul Muslimin. *The Arab Centre for Research and Policy Studies* menyebutkan IM sebagai aktor kunci dalam setiap pergolakan politik karena merupakan gerakan yang memiliki akar yang cukup kuat di Suriah.⁵⁵ Pasca-*Arab Spring*, kelompok IM membentuk *the Commission for Civilian Protection* (CCP) sebagai wadah gerakan

⁵³ Lihat Vincent Durac, "Yemen's *Arab Spring*—Democratic Opening or Regime Maintenance?" *Mediterranean Politics*, 17, no. 2 (Juli 2012):161–178.

⁵⁴ Amos Perlmutter, *The Roles of Military and Rules Politis* (London: Frank Cass and Company Limited, 1981).

⁵⁵ Mohammad Abu Rumman, *Islamists, Religion, and The Revolution in Syria* (Jordania: FES Jordan Published, 2013).

perlawanan untuk memperkuat jaringan kelompok milisi Islam bersenjata di Suriah. Sebagian besar anggotanya tersebar di kelompok *Ahrar Asy Syam* yang terpecah dan *Free Syrian Army* (FSA) yang sekuler. Untuk menyatukan kembali anggotanya, IM lebih memilih membentuk milisinya sendiri dengan nama *the Armed of Muslim Brotherhood* (Milisi Ikhwanul Muslimin). Meskipun tidak terlalu muncul dalam konfrontasi senjata dengan loyalis rezim, kelompok IM lebih mendominasi Dewan Nasional Suriah (*the Syrian National Council/SNC*), yakni organisasi politik yang dibentuk para aktivis IM di luar negeri. Tampaknya IM melalui SNC lebih populer dan mendapat dukungan jaringan aktivis luar dibandingkan kelompok bersenjata di Suriah. Sebanyak 70% penduduk Suriah yang berafiliasi dengan IM berada di pengasingan dengan pengaruh ideologi IM yang cukup kuat. Sejumlah ulama berpengaruh di Suriah memiliki ikatan emosional dengan IM, seperti Mustafa Ash-Shiba'i, Syeikh Al-Bayouni serta Syeikh Said Hawa yang karyanya banyak menjadi rujukan para aktivis IM di seluruh dunia. Selain IM, kehadiran kelompok *Salafiyah* di Suriah mendorong munculnya faksi milisi bersenjata.

Selain IM, kelompok perlawanan terhadap rezim Asad juga dilakukan oleh kaum Salafi. Tokoh yang menjadi penggerak perjuangannya, antara lain Jamal Al Qasimi, Muhammad Rasyid Ridha dan Muhammad Nasiruddin Al Albani. Pasca-*Arab Spring* dan munculnya semangat perlawanan terhadap rezim, Salafi terbagi dalam beberapa sayap militer, antara lain Salafi Jihadi (seperti Jabhah *An-Nushrah*, yang secara langsung terkait erat dengan Al-Qaeda) dan gerakan *Al-Muhajirin*. Sementara itu, kelompok yang dekat dengan Salafi tradisional adalah *Islamic Front* dan *Harakah Al-Fajr*. Di dalam faksi *Islamic Front* tergabung *Ahrar Asy Syam*, *Fajr Al Islamiyyah*, *Liwa Al Haq*, serta *Jamaah At Taliyah Al Islamiyyah*.

Gerakan Islam yang juga sangat aktif dalam konflik bersenjata di Suriah adalah Al-Qaeda. Jaringan Al-Qaeda yang begitu luas dalam konflik Suriah pasca-*Arab Spring* menjadikannya sebagai gerakan transnasional yang paling aktif mendapat dukungan pihak eksternal

maupun internal. Kemunculan ISIS sebagai gerakan yang paling radikal di tengah pengaruh luas *Arab Spring* tidak lepas dari peran Al-Qaeda, termasuk faksi militernya, seperti *Jabhab An-Nushrah*. ISIS kemudian menjadi bagian dari faksi yang melawan Asad, bahkan sempat menjadi kekuatan yang relatif dominan, meskipun kini mulai meredup.

Di Yaman, persaingan politik telah terjadi sejak terbentuknya Yaman modern dengan sistem politik satu partai. Hal ini terlihat dari munculnya tiga kekuatan politik utama yang saling bersaing, yaitu partai pemerintah *General People Congress* (GPC), partai Islam dari kelompok IM yang termanifestasi dalam *Al-Islah*, dan Partai Sosialis Yaman (*Yemen Socialist Party*/YSP). GPC anggotanya terdiri dari ulama, tokoh sosial, dan intelektual sebagai representasi kekuatan tradisional dan suku. Pemimpin dari kelompok ini adalah mereka yang mempunyai ikatan kesukuan dan kekerabatan dengan presiden. Karenanya tidak mengherankan jika GPC mempunyai basis massa luas di kalangan tradisional.

Kelompok oposisi Yaman yang terdiri dari Partai *Al-Islah* dan YSP tergabung dalam *the Joint Meeting Parties* (JMP). Berdirinya koalisi ini tidak terlepas dari kekhawatiran kelompok oposisi akan dominasi GPC dalam tubuh pemerintahan. Partai *Al-Islah* terdiri atas kelompok suku dan Ikhwanul Muslimin. Meskipun ideologi IM sangat mewarnai sepak terjang *Al-Islah* yang menjadikan karakter oposan, tribalisme politik yang kuat di Yaman menjadikan IM dalam *Al-Islah* membangun komunikasi dengan rezim berdasarkan basis kesukuan. Adapun YSP sebagian besar anggotanya berasal dari gerakan komunis Yaman. Partai ini mengusung isu ekonomi sosialis dan kebijakan nasionalisasi di seluruh wilayah Yaman.

Sama halnya dengan kemunculan gerakan Islam baru yang lebih radikal di Suriah, gelombang *Arab Spring* yang menerpa Yaman dijadikan momentum oleh *Al-Houthi* untuk ikut bergabung dalam gerakan perlawanan melawan rezim Saleh. Mereka memanfaatkan kekacauan politik dan kelemahan kepemimpinan Presiden Mansour Al-Hadi, untuk memperluas dukungan dari warga Syiah di Yaman

dan masuk dalam ranah politik serta mengklaim diri sejajar dengan kelompok politik arus utama. Kelompok yang oleh rezim senantiasa didiskriminasi ini akhirnya berhasil menguasai ibu kota Sana'a setelah tewasnya mantan presiden, Ali Abdullah Saleh. Dikuasainya Sana'a yang merupakan basis kekuatan rezim merupakan kemajuan signifikan bagi kelompok Syiah *Al-Houthi* sejak awal pergerakan mereka pada 1990-an. Ketidakstabilan ekonomi dan ketergantungan rezim terhadap Barat pun dijadikan *Al-Houthi* sebagai sarana untuk memperluas pengaruh di kalangan mayoritas penduduk miskin Yaman.

Minimnya operasi militer akibat ketidakstabilan ekonomi-politik rezim Al-Hadi menjadikan Yaman sebagai rumah yang aman bagi kelompok AQAP. Hal ini mendorong aktor regional, baik Arab Saudi maupun Iran, turut dalam pusaran konflik di Yaman. Sama halnya dengan Suriah, konflik Yaman semakin terinternasionalisasikan. Untuk meredam kekuatan *Al-Houthi*, Arab Saudi melakukan intervensi militer terhadap pemerintah Mansour Hadi dengan melakukan serangan militer langsung ke basis pertahanan *Al-Houthi* di Sana'a. Namun, aksi Saudi di Sana'a mendapat ganjalan dari Iran sebagai pendukung utama kekuatan *Al-Houthi* di Yaman. Realitas politik yang terjadi di Yaman mengakibatkan konflik yang berlarut-larut.

E. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan tersebut, ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. *Pertama*, pada tiga dekade belakangan sebenarnya telah muncul realitas hubungan positif antara politik Islam dan demokrasi. Muslim demokratis melihat Islam memiliki dasar ajaran yang ternyata seiring dengan nilai-nilai demokrasi, baik dalam teks (Alqur'an dan Sunah) maupun dalam konteks (historis) sebagaimana era pemerintahan Khulafaurrasyidin (632–668 M) yang memberi penghormatan luar biasa pada suara umat, baik dilakukan secara langsung maupun dalam wujud sistem perwakilan. Prinsip dan akar politik demokrasi bahkan dapat dikatakan sebagai yang pertama di dunia ketika Barat masih berada dalam kubangan monarki otoritarian

yang biasa disebut era skolastik. Hanya saja, berbeda dari demokrasi sekuler, formulasi demokrasi di dunia Islam implementasinya memiliki norma-norma tersendiri, yang pijakan dasarnya (dalam khazanah klasik hingga modern) adalah pada prinsip *ijtihad*, *shura*, dan *ijma*, yang esensi dasarnya (secara filosofis) tidak bertentangan dengan demokrasi.

Kaum politik Islam memperjuangkan aspirasi politiknya berdasarkan konteks tempat dan waktu. Sistem politik dan karakter rezim yang berkuasa di masing-masing negara akan membentuk formasi gerakan sosial yang sesuai untuk mengartikulasikan aspirasi politiknya. Iklim demokrasi yang terbentuk di masing-masing negara kasus dalam kajian ini telah mendorong politik Islam berkontestasi secara *taghoyyur* sesuai dengan konteks tantangan masing-masing.

Di negara-negara yang relatif telah menerapkan sistem politik demokrasi (seperti Maroko, Tunisia, dan Kuwait), politik Islam dan negara bisa berkolaborasi secara harmonis. Hal ini berbeda dengan negara-negara tidak demokratis yang tidak memberikan ruang bagi tumbuhnya *civil society* dan menyumbat saluran-saluran politik sehingga gejolak politik sering terjadi, seperti Libya, Mesir, Suriah, dan Yaman. Politik Islam akan cenderung mengeras dan menjadi radikal, seperti yang terjadi di Arab Saudi, Bahrain, dan UEA. Sebaliknya, di Qatar, meskipun tidak demokratis, rezim al-Thani tidak secara langsung memusuhi gerakan-gerakan Islam, tetapi menggunakan “politik filantropi” untuk mendorong gerakan Islam pada aktivitas-aktivitas non-politik.

Kedua, melihat berbagai peristiwa yang terjadi di negara-negara kasus di Timur Tengah, Ikhwanul Muslimin tampaknya merupakan manifestasi politik Islam yang ikut aktif berkontestasi dalam ranah politik melalui jalur demokrasi. Sebagian di antaranya dapat tampil secara signifikan dalam pemilu, seperti tampak pada kemenangan partai Islam *An-Nahdah* di Tunisia (2011) dan kemenangan Partai Ikhwanul Muslimin di Mesir (2011–2012), serta peralihan kekuasaan di Libya yang juga didominasi orang-orang yang terafiliasi Ikhwanul Muslimin, seperti Partai JDP (2012).

Ketiga, gerakan politik Islam pada umumnya akan semakin subur di negara yang memiliki kondisi ekonomi yang kurang kondusif, termasuk di negara yang memiliki kesenjangan ekonomi yang lebar dan korupsi yang merajalela. Dalam kasus Arab Saudi, gerakan ini semakin aktif ketika ekonomi Saudi semakin melemah dan ketimpangan sosial ekonomi semakin lebar. Hal ini juga terjadi di Kuwait saat perputaran keuangan terlalu besar dan terkonsentrasi di lingkungan rezim yang berkuasa. Di Bahrain, kelompok Syiah merasa tidak mendapatkan perhatian, subsidi, dan bantuan dari rezim al-Khalifa. Dalam kondisi ekonomi yang cukup baik (seperti di Qatar dan UEA), dan distribusi ekonomi lebih merata, politik Islam mengalami stagnasi. Di Aljazair, ketimpangan dan kegagalan pembangunan di bidang ekonomi juga menjadi isu penting bagi kelompok politik Islam untuk tampil sebagai oposan penting bagi pemerintah. Di Tunisia, kondisi ekonomi yang tidak menggembirakan dengan kesenjangan yang besar, pengangguran yang tinggi, serta kemiskinan yang luas menumbuhkan kekecewaan. Kekecewaan ini dimanfaatkan oleh kelompok politik Islam sehingga mendapatkan suara signifikan seiring dengan demokrasi sejak *Arab Spring*.

Kebijakan pemerintah yang tidak ramah terhadap gerakan Islam akan mendorong kecenderungan politik Islam untuk melakukan *counter-action* terhadap kebijakan pemerintah. Dalam kasus Kuwait, gerakan Islam menjadi kelompok oposisi yang paling reaktif karena keberpihakan rezim pada minoritas Syiah untuk mendapatkan dukungan. Penguasa Bahrain mendapat tekanan dari mayoritas Syiah karena melakukan pembatasan-pembatasan politik di parlemen. Arab Saudi menjadi sasaran pengeboman kelompok Syiah dan ISIS karena kebijakannya yang sangat condong ke Wahhabi dan melakukan intimidasi terhadap gerakan Islam non-Wahhabi. Gerakan Islam, seperti Shahwah, sebenarnya menumbuhkan sikap kritis terhadap penguasa otoriter di Saudi, tetapi belum mampu berkontribusi bagi pertumbuhan demokrasi di Saudi. Sebaliknya, di Qatar, ketika negara ramah dengan gerakan Islam, gerakan Islam akan fokus pada aspek religiositas saja dan tidak akan masuk ke ran-

ah politik. Hal yang sama terjadi di Aljazair, di mana pemerintah bersikap menerapkan politik represif terhadap politik Islam yang justru menimbulkan instabilitas berkepanjangan akibat munculnya perlawanan, baik secara politik maupun gerakan bersenjata sebagaimana yang dilakukan FIS. Penguasa Mesir pascakudeta 2013 menerapkan kebijakan represif terhadap IM sehingga kelompok politik Islam ini tidak bisa berkibrah lagi secara politik formal.

Keempat, realitas politik di kawasan Timur Tengah, terutama di 15 negara kasus, memperlihatkan bahwa stigmatisasi *Islamic exceptionalism* atau tidak selarasnya Islam dan demokrasi kenyataannya tidak terjadi. Dalam konteks politik Timur Tengah, yang terjadi ternyata adalah ekspresi *Arab exceptionalism* atau tak demokratisnya sebagian besar negara-negara Arab⁵⁶ dan bukan dunia Islam. Artinya, ketiadaan demokrasi di dunia Arab selama berabad-abad ternyata bukan akibat dari tak kompatibelnya demokrasi dengan Islam, melainkan karena fenomena kesejarahan Arab yang memang tak demokratis— secara substantif bahkan banyak yang bertentangan dengan ajaran Islam tentang musyawarah, “...*wa syawwirhum fil amri faidzaa azamta fa tawakkal ‘alallaah*” (bermusyawarahlah mereka dalam urusan, maka apabila telah tercapai kesepakatan lalu berserah dirilah pada Allah).

Pengalaman munculnya politik Islam Aljazair dan Turki pada awal 1990-an dengan segala plus minusnya telah menjadi inspirasi bagi bangkitnya politik Islam lain di negara Timur Tengah. Ketika mendapatkan momentum yang tepat, gerakan-gerakan serupa bermunculan pula di sejumlah negara. Tidak mengherankan jika *The Economist* (April 2011) melihat bahwa agama Islam tampaknya menjadi pendorong kebangkitan dunia Arab (*Religion is a growing force in the Arab awakening*) dewasa ini.⁵⁷

⁵⁶ *Arab exceptionalism* ialah anggapan bahwa budaya Arab menyebabkan iklim demokrasi sulit tumbuh. Alfred Stepan dan Graeme B. Robertson, “Arab, not Muslim, Exceptionalism,” *Journal of Democracy*, 15, no.4 (Oktober 2004): 140–146.

⁵⁷ “Islam and the Arab revolutions,” *The Economist*, 31 Maret 2011 diakses pada 3

F. REKOMENDASI

Berdasarkan kristalisasi dari kajian kasus di 15 negara di Timur Tengah, terdapat beberapa saran yang bisa dijadikan *lesson learnt* bagi Indonesia. *Pertama*, keterkaitan agama dan politik merupakan realitas yang tidak bisa dinafikan. Bahkan di negara yang mendeklarasikan demokrasi liberal pun, isu tentang primordialisme (termasuk agama, etnis, dan suku) tetap saja akan muncul. *Kedua*, realitas keterkaitan agama dan politik tidak serta-merta membunuh demokrasi, kelompok Islam di Timur Tengah justru ikut mendorong tumbuhnya demokrasi. Sebaliknya, rezim otoriter Arab yang justru selama ini menghambat demokrasi, baik dengan cara memberangus kekuatan politik Islam (seperti Arab Saudi, Bahrain, UEA, Mesir, Aljazair), maupun dengan jalan membubarkan pemerintahan hasil pemilu yang dimenangkan oleh partai politik Islam (seperti kasus Aljazair tahun 1990, Turki tahun 1997, dan Mesir tahun 2013). *Ketiga*, konflik politik di berbagai negara kasus justru terjadi dan bahkan berkelanjutan, terutama akibat politik represif yang dilakukan rezim otoriter terhadap politik Islam, seperti di Aljazair. *Keempat*, berdasarkan realitas yang terjadi, Indonesia perlu mengambil sikap dengan tidak membenturkan agama dan politik, tetapi bagaimana nilai-nilai agama bisa dijadikan semangat membangun politik berbangsa dan bernegara (Pancasila). *Kelima*, kelompok politik agama perlu juga bersikap inklusif dengan mengakomodasi kepentingan kelompok lain. Pengalaman politik yang kaku, seperti yang diterapkan Mursi di Mesir, adalah kegagalan memahami konteks (waktu dan tempat) politik yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Ahmed, Abdel Ghaffar M. *One Against All: The National Islamic Front (NIF) and Sudanese Sectarian and Secular Parties*. Bergen: CMI, 2008.

November 2019 dari <https://www.economist.com/leaders/2011/03/31/islam-and-the-arab-revolutions>.

- al-Kandari, Yagoub. *Tribalism, Sectarianisme, and Democracy in Kuwaiti Culture*. Kuwait : Kuwait Universty Press, 2014.
- Basyar, M. Hamdan. *Pertarungan dalam Berdemokrasi: Politik di Mesir, Turki, dan Israel*. Jakarta: UI Press, 2015.
- Beck, Martin, dan Simone Huser. "Political Change in the Middle East: An Attempt to Analyze the Arab Spring." *German Institute of Global and Area Studies Working Paper*, no. 203 (Agustus 2012).
- Casey, Michael S. *The History of Kuwait*. Westport: Greenwood Press, 2007.
- Chatam House. *Kuwait Study Group: The Experience of Parliamentary Politics in the GCC*. London: Chatham House, 2012.
- Commins, David. *Islam in Saudi Arabia*. London dan New York: I.B. Tauris, 2015.
- Commins, David. *The Wahhabi Mission and Saudi Arabia*. London dan New York: I.B. Tauris, 2006.
- Dacrema, Eugenio. "New Emerging Balances in the Post-Arab Spring: the Muslim Brotherhood and the Gulf monarchies." *ISPI Analysis*, no. 155 (Januari 2013).
- Dahl, Robert. *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992.
- Dekmejian, R. Hrair. *Islam in Revolution: Fundamentalism in the Arab World. 2nd ed.* New York: Syracuse University Press, 1995.
- Denoeux, Guilain. "The Forgotten Swamp: Navigating Political Islam." *Middle East Policy* IX, no. 2 (2002).
- Dorsey, James M. "Wahhabism vs. Wahhabism: Qatar Challenges Saudi Arabia." *RSIS Working Paper series*, no. 262 (September 2013).
- Durac, Vincent. "Yemen's Arab Spring—Democratic Opening or Regime Maintenance?" *Mediterranean Politics* 17, no. 2 (Juli 2012): 161–178.
- Fluehr-Lobban, Carolyn. *Islamic Law and Society in the Sudan*. New York: Routledge, 1987.
- Fuller, Graham E. *The Future of Political Islam*. New York: Palgrave Macmillan, 2004.
- Ghabra, Shafeeq N. "Balancing State and Society: The Islamic Movement in Kuwait." *Middle East Policy* no. 5/2 (Mei 1997).

- Ghafur, Fakhry. "Kekuatan Politik Islam di Bahrain: Politik Diskriminasi Monarki." Dalam *Kekuatan Politik Islam di Bahrain, Qatar, dan Lebanon*. Jakarta: UI Press, 2017.
- Karagiannis, Emmanuel. "Political Islam and Sosial Movement Theory: The Case of Hizb ut-Tahrir in Kyrgyzstan." *Religion, State & Society* 33, no. 2 (Juni 2005).
- Lacroix, Stephane. *Awakening Islam: The Politics of Religious Dissent in Contemporary Saudi Arabia*, diterjemahkan oleh George Holoch. Cambridge: Harvard University Press, 2011.
- Layachi, Azzedine. "Political Liberation and The Islamist Movement in Algeria." *The Journal of North African Studies* 9 no. 2 (2004): 46–67.
- Mashad, Dhuroruddin. "Demokrasi dan Munculnya Kekuatan Politik Islam di Tunisia, Mesir dan Libya." Dalam *Agama dan Demokrasi Munculnya Kekuatan Politik Islam di Tunisia, Mesir dan Libya*. Bandung: Pustaka Jaya, 2016.
- Matthiesen, Toby. *Al Khalij Ath Thai fi wa Ar Rabi' Al Arabi*. Beirut: Arab Network for Research and Publishing, 2014.
- Nishino, Masami. "Muhammad Qutb's Islamist Thought: A Missing Link between Sayyid Qutb and al-Qaeda?" *NIDS Journal of Defense and Security*, no. 16 (Desember 2015): 113–15.
- Perlmutter, Amos. *The Roles of Military and Rules Politis*. London: Frank Cass and Company Limited, 1981.
- Rumman, Mohammad Abu. *Islamists, Religion, and the Revolution in Syiria*. Jordania: FES Jordan Published, 2013.
- Sihbudi, Riza. *Menyandera Timur Tengah*. Bandung: Mizan, 2007.
- Sikainga, A. A. "Northern Sudanese Political Parties." Dalam *Civil War in the Sudan*, diedit oleh M.W. Daly dan A.A. Sikainga. London dan New York: British Academic Press, 1993.
- Stepan, Alfred, dan Graeme B. Robertson, "Arab, not Muslim, Exceptionalism." *Journal of Democracy* 15, no. 4 (Oktober 2004): 140–146.
- Tessler, M. "The Origins of Popular Support for Islamist Movements: A Political Economy Analysis." Dalam *Islam, Democracy, and the State in North Africa*, diedit oleh J. P. Entelis. Bloomington: Indiana University Press, 1997.
- Tibi, Bassam. *The Challenge of Fundamentalism: Political Islam and the World Disorder*. London: University of California Press, 1998.

- Vatin, Jean Claude. "Religious Resistance and State Power in Algeria." Dalam *Islam and Power*, diedit oleh Ali H. Dessauki dan Alexander Cudsi. London: Croom Helm, 1981.
- Voll, John O. "The Evolution of Islamic Fundamentalism in Twentieth-Century Sudan." Dalam *Islam, Nationalism, and Radicalism in Egypt and Sudan*, diedit oleh Gabriel R. Warburg dan Uri M. Kupferschmidt, 129. New York: Praeger, 1983.
- Wolf, Anne. *Political Islam in Tunisia: The History of Ennahda*. New York: Oxford University Press, 2017.

Data

- "Bahrain Election Report," National Democratic Institute for International Affairs, 2002. Diakses pada 17 Oktober 2018 dari https://www.ndi.org/sites/default/files/2392_bh_electionsreport_engpdf_09252008.pdf.
- High National Elections Commission. "Libya Election 2012." Diakses pada 7 Agustus 2013 dari www.hnec.ly.
- NDI. *Final Report on the 2014 Legislative and Presidential Elections in Tunisia*.
- The Carter Center. *Legislative and Presidential Elections in Tunisia: Final Report*. Atlanta: The Carter Center, 2014.
- The Carter Center. *National Constituent Assembly Elections in Tunisia*. Atlanta: The Carter Center, 2011.
- The Carter Center. *The 2014 Constitutional Drafting Assembly Elections in Libya: Final Report*. Atlanta: The Center Canter, 2014.
- "The Failed State Index 2011." The Fund for Peace. Diakses pada 4 September 2195 dai https://www.pucsp.br/ecopolitica/downloads/failed_states_index_2011.pdf.

Internet

- Abdullahi, Abdurrahman M. "The Islah Movement: Islamic Moderation in War-torn Somalia." Diakses pada 3 November 2019 dari <http://www.hiiraan.com/oct2008/ISLAH.pdf>.
- al-Qassemi, Sultan. "The Brothers and the Gulf." *Foreign Policy*, 14 Desember 2012. Diakses pada 18 Oktober 2017 dari <http://foreignpolicy.com/2012/12/14/the-brothers-and-the-gulf/>.

- Boucek, Christopher. "Saudi Fatwa Restrictions and the State-Clerical Relationship." *Carnegie Endowment*, 27 Oktober 2010. Diakses pada 15 Oktober 2018. <https://carnegieendowment.org/sada/41824>
- Bronner, Ethan, dan Michael Slackman. "Saudi Troops Enter Bahrain to Help Put Down Unrest." *The New York Times*, 14 Maret 2011. Diakses pada 3 November 2019 dari <https://www.nytimes.com/2011/03/15/world/middleeast/15bahrain.html>.
- Chivvis, Christopher S., Keith Crane, Peter Mandaville, dan Jeffrey Martini. *Libya's Post-Qaddafi Transition: The Nation-Building Challenge*. Santa Monica, CA: Rand Corporation). Diakses pada 26 Agustus 2013 dari https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR129.html.
- Goldberg, Jeffrey. "The Modern King in the Arab Spring." *The Atlantic*, April 2013. Diakses pada 29 Oktober 2018 dari <https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2013/04/monarch-in-the-middle/309270>.
- "Islam and the Arab revolutions." *The Economist*, 31 Maret 2011. Diakses pada 3 November 2019 dari <https://www.economist.com/leaders/2011/03/31/islam-and-the-arab-revolutions>.
- Lacroix, Stéphane. "Saudi Arabia's Muslim Brotherhood Predicament." *The Washington Post*, 20 Maret 2014. Diakses pada 3 November 2019 dari https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2014/03/20/saudi-arabias-muslim-brotherhood-predicament/?utm_term=.f3b-04fe78fc2.
- "Lebanese Families Given 48 hours to leave the UAE." *The New Arab*, 18 Maret 2015. Diakses pada ... dari <https://www.alaraby.co.uk/english/news/2015/3/18/lebanese-families-given-48hours-to-leave-the-uae>.
- McKernan, Bethan. "Inside the Saudi Town That's been under Siege for Three Months by Its Own Government." *Independent*, 4 Agustus 2017. Diakses pada 3 November 2019 dari <http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/saudi-arabia-siege-town-own-citizens-government-kingdom-military-government-awamiyah-qatif-a7877676.html>.
- Qandil, Mohamed Mokhtar. "The Muslim Brotherhood and Saudi Arabia: From Then to Now." *The Washington Institute*, 18 Mei 2018. Diakses pada 29 Oktober 2018 dari <https://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/the-muslim-brotherhood-and-saudi-arabia-from-then-to-nw>.
- "Saudi Protesters Fire-Bomb Intelligence Building in Qatif." *Middle East Eye*, 11 Januari 2016. Diakses pada 3 November 2019 dari <http://www.middleeasteye.net/news/saudi-protesters-fire-bomb-intelligence-building-qatif-84360886l?>

- “Tokoh Oposisi Tunisia Ditembak Mati.” *BBC Indonesia*, 25 Juli 2013. Diakses pada 15 Oktober 2018 dari https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/07/130725_tunisia_pembunuhan.
- Tozeur, F. T. “Tunisia’s Economy Still Struggling.” *The Economist*, 19 Maret 2013. Diakses pada 3 November 2019 dari <http://www.economist.com/blogs/pomegranate/2013/03/tunisias-economy>.
- “Tunisia Election Results: Nida Tunis Wins Most Seats, Sidelining Islamists.” *The Guardian*, 30 Oktober 2015. Diakses pada 17 Oktober 2018 dari dalam <https://www.theguardian.com/world/2014/oct/30/tunisia-election-results-nida-tunis-wins-most-seats-sidelining-islamist>.
- “Tunisia, Ennahda Mundur untuk Akhiri Krisis Politik.” *Kompas*, 30 September 2013, 8.
- United Nations Support Mission in Libya. “Libyan Political Agreement As Signed on 17 December 2015. Diakses pada 9 Oktober 2018 dari <https://unsmil.unmissions.org/sites/default/files/Libyan%20Political%20Agreement%20-%20ENG%20.pdf>.
- Wegerhof, Cornelia. “Tunisia’s Ennahda Withdraws—But Why?” *Deutsche Welle*, 2 Oktober 2013. Diakses pada 10 Oktober 2013 <https://www.dw.de/tunisia-ennahda-withdraw-but-why/a-17130859>.

**NORTH AFRICA
AND THE MIDDLE EAST**



LAMPIRAN

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Lampiran 1. Tipologi Rezim dan Gerakan Politik Islam di Timur Tengah

NEGARA	TIPE REZIM		GERAKAN ISLAM			
	Berdasarkan elektoral & konstitusi*	Berdasarkan faktor yang menonjol	ORGANISASI	AFILIASI	KARAKTER	SAVAP MILITER
Aljazair	Elektoral Otokratik	Otoriter- Militaristik	<i>Front Islamique du Salut</i> (FIS)	Ikhwanul Muslimin (IM)	Partai Terlarang	<ul style="list-style-type: none"> GIA (<i>Groupements Islamiques Armés</i>)-(1992–Sekarang) MIA (<i>Mouvement Islamique Armé</i>)-(1992) AIS (<i>Armée Islamique du Salut</i>) - (1994–Sekarang)
Maroko	Konstitusional oligarki	Monarki Konstitusional	<i>Harakat Mujtama As-Silm</i> (MSP)-(1997)	IM	Partai Oposisi	-
			<i>Harakat An-Nahdah Al-Islamiyyah</i> (IRM)-(1989)	IM	Partai Oposisi	-
			<i>Hisb Al-Adalah wa Tamiyah</i> (PID)	IM	Partai politik pro Monarki	-
			<i>Movement Unity and Reform</i> (MUR)	IM	Ormas, kritis terhadap pemerintah	-
		<i>Jamaat Al-Adl wa Al-Ihsan</i> (<i>Justice and Charity</i>)	IM	Ormas, sangat kritis terhadap pemerintah	-	
		<i>Salafi Jihadiyah</i>	Salafi (<i>Al-Qaeda in Maghreb</i> (AQIM))	Salafi (<i>Al-Qaeda in Maghreb</i> (AQIM))	Bentukan Saudi dan Maroko, Tahun 1991 (perang Teluk melawan pemerintah.	<i>The Moroccan Islamic Combat Group</i> (GICM)

Buku ini tidak diperjualbelikan.

NEGARA	TIPE REZIM		GERAKAN ISLAM			
	Berdasarkan elektoral & konstitusi*	Berdasarkan faktor yang menonjol	ORGANISASI	AFILIASI	KARAKTER	SAVAP MILITER
Somalia	Elektoral	Sektarian (Kesukuan)	<i>Al-Ittihad Al-Islamy</i> (1982) dan Pecahannya (<i>Al-I'tishom, Hizb Al-Islam, As-Salafiyah Jadidah</i>)	Salafi	Ormas, oposisi pemerintah	-
	Otokratik		<i>As-Sabab</i>	Al-Qaeda (Salafi)	Oposisi Garis Keras	-
Sudan			<i>Al-Islah</i>	IM	Ormas non politis	-
	Elektoral	Islamis-	ICF (<i>Islamic Charter Front</i>)-(1965)	IM	Partai Oposisi (Hasan Turabi)	-
	Otokratik	Militaristik	NIF (<i>National Islamic Front</i>)-(1985)	IM	Kelanjutan ICP, Partai pemerintah (koalisi Hasan Turabi dengan Omar Bashir)	-
			NCP (<i>National Congress Party</i>)-(1998)	IM	Partai Pemerintah (Omar Bashir)	-
			NUP/DUP (<i>National/Democratic Unionist Party</i>)	-	Partai Politik	-
			UP (<i>Umma Party</i>)	Sufi (Mahdi)	Partai Politik	-
		<i>Ansār al-Sunna</i>	Salafi	Ormas	-	
		<i>The Republican Brothers</i>	Sufi	Ormas	-	

Buku ini tidak diperjualbelikan.

NEGARA	TIPE REZIM		GERAKAN ISLAM			
	Berdasarkan elektoral & konstitusi*	Berdasarkan faktor yang menonjol	ORGANISASI	AFILIASI	KARAKTER	SAYAP MILITER
Lebanon	Konstitusional oligarki	Konfesional-Sektarian (Agama)	<i>Harakah al-Ahbas</i>	Sunni-Salafi	Ormas Garis Keras	-
			<i>Harakat At-Tauhid/ Islamic Unification Movement (IUM)</i>	Suni-Salafi	Ormas	-
			<i>Jamaah Al-Islamiyyah</i>	Sunni-IM	Parpol	-
			<i>Tayar Al-Mustaqbal (Future Movement)</i>	Sunni	Parpol Suni Terbesar	-
Arab Saudi	Otoritarian	Monarki-Otoriter	Hizbullah	Syah	Parpol Garis Keras	<i>Hizbullah Army</i>
			Wahabi	Wahabi	Terkooptasi oleh lembaga otoritas pemerintah	-
			<i>Sahwa Al-Islamiyyah</i>	IM-Wahabi	Kritis terhadap Pemerintah	-
Qatar	Konstitusional oligarki	Monarki Semi-Otoriter	<i>Al-Qaeda Arabian Peninsula (QAP)</i>	Salafi Jihadi	Melawan Pemerintah	-
			ISIS	Salafi Jihadi	Melawan Pemerintah	-
Uni Emirat Arab (UEA)	Konstitusional oligarki	Monarki-Semi Otoriter	<i>Ikhwanul Muslimin</i>	IM	Ormas-filantropi	-
			<i>Al-Islah</i>	IM	Ormas-Media oposisi	-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

NEGARA	TIPE REZIM		GERAKAN ISLAM			
	Berdasarkan elektoral & konstitusi*	Berdasarkan faktor yang menonjol	ORGANISASI	AFLIASI	KARAKTER	SAYAP MILITER
Bahrain	Konstitusional	Monarki-Otoriter	<i>Al-Minbar Islamic Society</i>	IM	Partai Politik pro-monarki	-
			<i>Jamiyyat al-Islah al-Islamiyyah</i>	IM	Ormas pro-monarki	-
			<i>Al-Ashalah</i>	Wahhabi-Sunni	Partai politik pro-monarki	-
			<i>Al-Wafaq National Islamic Society</i>	Syiah	Partai Politik oposisi	-
Kuwait	Elektoral	Monarki	<i>Jamiyyah Al-Irsyad Al-Islami (1952) / Jamiyyah Al-Islah Al-Ijtimai (para-ICM)</i>	IM (Sunni)	Faksi oposisi	-
	Otokratik	Konstitusional	<i>The Islamic Constitutional Movement (ICM)</i>	IM (Sunni)	Faksi Sunni oposisi	-
			<i>Social Reformation Society (SRS)</i>	IM (Sunni)	Faksi Sunni oposisi	-
			<i>The Society for the Islamic Heritage (RISH)</i>	Salafl-Sunni	Faksi Sunni oposisi	-
			<i>At-Tajammu' Al-Islami As-Salafl</i>	Salafl-Sunni	Faksi Sunni oposisi	-
			<i>Hizb Al-Ummah National Islamic Alliance</i>	Salafl-Sunni	Faksi Sunni oposisi	-
			<i>Justice and Peace Alliance</i>	Syiah	Faksi pro-Monarki	-
				Syiah-Moderat	Faksi pro-Monarki	-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

NEGARA	TIPE REZIM		GERAKAN ISLAM			
	Berdasarkan elektoral & konstitusi*	Berdasarkan faktor yang menonjol	ORGANISASI	AFILIASI	KARAKTER	SAYAP MILITER
Tunisia	Demokrasi	Demokratis	<i>An-Nahdah</i>	IM	Partai Politik Oposisi	-
			<i>Jabhat al-Islah (The Reform Front)</i>	Salafi	Partai Politik Oposisi	-
			<i>Hizb al-Tahrir</i>	<i>Hizb al-Tahrir</i>	Partai Politik yang dilarang	-
			<i>Ansar al-Shari'a Tunisia (AST)</i>	Salafi	Ormas apolitik (pernah mendukung al-Qaeda (2013) dan ISIS (2014))	-
Mesir	Elektoral Otokratik	Semi Otoriter-Militaristik	<i>Freedom and Justice Party – FJP</i>	IM	Partai Politik yang dilarang	-
			<i>Al-Nour</i>	Salafi	Partai Politik pro-pemerintah	-
			<i>Al-Wasat</i>	Islam Moderat (sempalan IM)	Partai Politik oposisi	-
Libya			<i>Al-Jamaah al-Islamiyah</i>	Salafi	Anti-pemerintah	-
			<i>Gerakan al-Jihad</i>	Salafi	Anti-pemerintah	-
	Elektoral Otokratik	Militeristik-sektarian (Agama & Kesukuan)	<i>Hizb Al-Adalah wa Al-Bina (Justice and Construction Party (JCP))</i>	IM	Partai Politik	
			<i>Hizb Al-Wathan</i>	Salafi	Partai Politik	-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

NEGARA	TIPE REZIM		GERAKAN ISLAM			
	Berdasarkan elektoral & konstitusi*	Berdasarkan faktor yang menonjol	ORGANISASI	AFILIASI	KARAKTER	SAYAP MILITER
Suriah	Otoritarian	Otoriter	<i>The Syrian National Coalition (SNC)</i>	IM	Organisasi Sosial Politik oposisi	-
		-Militaristik-Sektarian (Agama)	<i>The Armed of Muslim Brotherhood</i>	IM	Kelompok militia	<i>The Armed of Muslim Brotherhood</i>
			<i>Jabhah An Nushrah (JN)</i>	Salafi Jihadis	Kelompok militia berafiliasi dengan Al-Qaeda	-
			ISIS	Salafi Jihadis	Kelompok militia sempalan Al-Qaeda	-
			<i>Al-Muhajirin</i>		Kelompok militia berafiliasi dengan Al-Qaeda	-
			Islamic Front	Salafi Jihadis	Kelompok militia	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Ahrar</i> • <i>Asy-Syam</i> • <i>Harakah Fajr Al-Islamiyyah</i> • <i>Liwa</i> • <i>Al-Haq</i> • <i>Jama'ah At-Talibah Al-Islamiyyah</i>

Buku ini tidak diperjualbelikan.

NEGARA	TIPE REZIM		GERAKAN ISLAM			
	Berdasarkan elektoral & konstitusi*	Berdasarkan faktor yang menonjol	ORGANISASI	AFILIASI	KARAKTER	SAYAP MILITER
Yaman	Otoritarian	Sektarian (Agama dan Kesukuan)	Al-Islah (At- <i>Tajammu'ur Al-Yamani</i> ii <i>lil-Islah</i>)	IM	Partai Politik yang merupakan gabungan tiga elemen IM (Muhammad al-Qatan, Suku (Abdullah al-Ahmar) dan Gerakan Salafi (Abdul Majid al-Zindani)	Ali Muhsin Al-Ahmar (Faksi Al- <i>Ahmar</i>)
			<i>Salafiyah</i>	Salafi	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Wadi'i</i> (Syeikh Muqbil Al-Wadi'i) • <i>The Wisdom Society Movement</i> (Syeikh Abdul Rahman Abdul Khaliq) • <i>The Ihsan Society</i> (Mohammad Strour) 	-
			<i>Al-Houti</i>	Syah	Kelompok militia Syiah	Al-Houti
			Al-Qaeda in Arabian Peninsula (AQAP)	Salafi Jihadis	Kelompok militia berafiliasi dengan Al-Qaeda	AQAP

* Dalam menyematkan tipe rezim di negara-negara Timur Tengah, kami menggunakan studi Mikael Wigell yang melakukan pemetaan jenis rezim berdasarkan sistem elektoral dan penerapan konstitusionalitasnya dalam empat terminologi, yaitu otoritarian (elektoral dan konstitusi tidak bekerja), elektoral otoritatif (minimum elektoral dan konstitusi tidak bekerja), konstitusional oligarki (elektoral tidak bekerja dan minimal konstitusi), demokrasi (Elektoral dan Konstitusi bekerja secara efektif).¹

¹ Wigell, Mikael. "Mapping 'Hybrid Regimes': Regime Types and Concepts in Comparative Politics," *Democratization* vol. 15/2, (2008).

Buku ini tidak diperjualbelikan.



DAFTAR SINGKATAN

UEA	Uni Emirat Arab
GCC	<i>Gulf Cooperation Council</i>
IM	<i>Ikhwanul Muslimin</i>
ISIS	<i>Islamic State in Iraq and Syria</i>
FJP	Partai Kebebasan dan Keadilan/ <i>Freedom and Justice Party</i>
GNC	<i>General National Congress</i>
FLN	Front Pembebasan Nasional / <i>National Liberation Front</i>
FIS	Front Penyelamatan Islam/ <i>Front Islamique du Salut</i>
ICF	<i>The Islamic Charter Front</i>
NIF	<i>al-Jabhab al-Islamiyah al-Qawmiyyah / The National Islamic Front</i>
JC	<i>Jama'at al-Adl wal-Ihsan / Justice and Charity</i>
AIS	<i>Islamic Army of Salvation</i>
GIA	<i>Armed Islamic Group</i>
FIDA	<i>Islamic Front for Armed</i>
MSP	<i>Harokat Mujtama' As-Silm</i>
SSP	<i>Sudan Socialist Party</i>
NCP	<i>The National Congress Party, Sudan</i>
PCP	<i>The Popular Congress Party</i>
NUP	<i>National Umma Party/ Hizb al-Umma al-qawmmy</i>

DUP	<i>Democratic Unionist Party/ al-Hizb al-Ittihad al-Dimuqrati</i>
NGO	<i>Non-Government Organization</i>
AIAI	<i>Al-Ittihad Al-Mahakim Al-Islamiyyah</i>
TFG	<i>Transition Federal Government, Somalia</i>
PDP	<i>Peace and Development Party</i>
PJD	<i>The Party for Justice and Development</i>
MUR	<i>the Movement for Unity and Reform</i>
MPDC	<i>The Constitutional and Democratic Popular Movement</i>
JC	<i>Justice and Charity/Jama'at al-Adl wal-Ihsan!</i>
SJ	<i>Salafiya Jihadiya</i>
RNI	<i>The National Rally for Independents</i>
PAM	<i>The Authenticity and Modernity Party</i>
IUF	<i>Islamic Unification Movement/Harakah aT-Tauhid.</i>
PSP	<i>Progressive Socialist Party</i>
FPM	<i>Free Patriotic Movement</i>
NCP	<i>National Centrist Party, Libya</i>
GCC	<i>Gulf Cooperation Council</i>
CMC	<i>Central Municipal Council</i>
FSC	<i>Federal Supreme Council</i>
FNC	<i>Federal National Council</i>
ICM	<i>The Islamic Constitutional Movement, Kuwait</i>
OIR	<i>Organization of Islamic Revolution, Arab Saudi</i>
NCA	<i>National Constituent Assembly, Tunisia</i>
CPR	<i>Congress for The Republic, Tunisia</i>
UGTT	<i>Kuartet Uni Serikat Buruh Tunisia</i>
SCAF	<i>Supreme Council of the Armed Forces, Mesir</i>
NTC	<i>National Transitional Council, Libya</i>
UNSMIL	<i>United Nation Support Mission in Libya, Libya</i>
GNC	<i>General National Congress, Libya</i>
JCP	<i>Justice and Construction Party, Libya</i>
LIFG	<i>Libyan Islamic Fighting Group, Libya</i>
NFA	<i>National Forces Alliance, Libya</i>

NCP	<i>Natonal Centrist Party, Libya</i>
JCP	<i>Justice and Construction Party, Libya</i>
CDA	<i>Constitutional Drafting Assembly, Libya</i>
HNEC	<i>High National Election Commission, Libya</i>
NCC	<i>The National Coordination Committee, Suriah</i>
SNC	<i>The Syirian National Council, Suriah</i>
NDC	<i>National Dialogue Conference, Yaman</i>
GPC	<i>General People's Congress, Yaman</i>
JMP	<i>Joint Meeting Parties, Yaman</i>
YSP	<i>Yemen Sosialist Party, Yaman</i>
SAA	<i>The Syrian Arab Army, Suriah</i>
NDF	<i>National Defense Force, Suriah</i>
NCSR	<i>National Coalition for Syrian Revolutionary and Oposition Force, Suriah</i>
PDRY	<i>The People Democratic Republic of Yemen, Yaman</i>
CCP	<i>Comission for Civillian Protection, Suriah</i>
ISIS	<i>Islamic State in Iraq and Syria, Suriah</i>
JN	<i>Jabhat An-Nusrah, Suriah</i>
AQAP	<i>Al-Qaeda in Arabian Peninsula</i>
FSA	<i>Free Syrian Army, Suriah</i>

Buku ini tidak diperjualbelikan.



- (Hasan) Turabi, 247
- (Husni) Mubarak, 247
- Abu Dhabi, 94
- Al-Ashalah*, 103, 207, 208, 239, 247
- Al-Houthi*, 11, 59, 170, 173, 179, 182, 183, 186, 189, 191, 222, 224, 225, 247
- Al-Islah*, 239
- Al-Ittihad Al-Islami*, 52, 247
- Al-Minbar Islamic Society*, 239
- al-Mitsaq al-Wathani*, 39, 65, 203, 247
- Al-Nour Party, 129, 130, 247
- Al-Qaeda, 6, 54, 55, 58, 174, 176, 177, 179, 182, 186, 190, 223, 224, 236, 237, 238, 241, 242, 245, 247
- Al-Qaeda in the Arabian Peninsula (AQAP), 186, 247
- al-Shahwah al-Islamiyah*, 98, 205, 247
- Al-Wafaq*, 94, 95, 239, 247
- Al-Wafaq Party*, 247
- An-Nahdah*, 8, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 148, 149, 150, 151, 158, 159, 212, 213, 214, 215, 226, 236, 240, 247
- Arab exceptionalism*, 16, 228, 247
- Armed Islamic Group (GIA)*, 40, 243, 247
- As-Sisi, 7, 10, 247
- Ayatollah Khamenei, 62, 247
- Basic Law of Government (Nizām al-Asāsī li al-Ḥukm)*, 88, 247
- Beji Caid Essebsi, 126, 215, 247
- Bouazizi, 117, 247
- Cedar Revolution, 59, 60, 247

- Central Municipal Council* (CMC), 90, 101, 206, 247
- democracy deficite*, 87, 247
- Democratic Alliance for Egypt, 129, 130, 247
- dimuqratiyyat al-khubz*, 87, 247
- Federal National Council (FNC), 92, 244, 247
- Front Islamique du Salut (FIS), 30, 236, 248
- General National Congress* (GNC), 11, 142, 161, 218, 248
- Gulf Cooperation Council* (GCC), 3, 87, 187, 248
- Hai'ah Kibar al-Ulama Lil-Bubuts wal-Ifia'*, 102, 207, 247, 248
- Harakah Islamiah, 68, 247
- Harokat Mujtama' As-Silm* (MSP), 41, 248
- Hasan Al-Banna, 21, 161, 174, 248
- Hasan Nasrallah, 61, 248
- Hay'at al-Bay'ah*, 87, 248
- Hizb al-Tahrir*, 151, 159, 240, 248
- Hizbullah*, 5, 59, 61, 62, 64, 65, 71, 170, 185, 204, 222, 238, 248
- Islamic Army of Salvation* (AIS), 40, 248
- Islamic Charter Front* (ICF), 32, 198, 248
- Islamic Constitutional Movement* (ICM), 96, 101, 110, 206, 239, 248
- Islamic exceptionalism*, 16, 228, 248
- Islamic State in Iraq and Syiria* (ISIS), 6, 11, 168, 173, 176, 177, 190, 224, 227, 238, 241, 243, 245, 248
- Jami'ah Al-Zaitunah*, 23, 248
- Juhaiman al-Utaibi, 103, 248
- Justice and Charity* (JC), 35, 200, 248
- Justice and Construction Party* (JCP), 140, 141, 155, 240, 248
- Koalisi Troika, 119, 158, 213
- Kuwait, 95, 96, 101, 105, 111, 115, 206, 209, 230
- Majlis as-Sa'ab*, 128, 129, 248
- Moammar Qaddafi, 248
- Mubarak, 7, 9, 10, 247
- National Constituent Assembly* – NCA, 119, 158, 163, 212, 213, 232, 244, 248
- National Coordination Committee* (NCC), 168, 248
- National Forces Alliance* (NFA), 140, 155, 161, 218, 248
- National Liberation Front* (FLN), 30, 248
- National Transitional Council* (NTC), 137, 248
- Nida Tunis, 124, 126, 127, 150, 159, 165, 215, 216, 234, 248

- Omar Bashir, 33, 42, 43, 46, 199, 237, 248
- Organization of Islamic Revolution* (OIR), 106, 209, 248
- Osama bin Laden, 50, 55, 103, 182, 248
- Rachid Ghannouchi, 124, 126, 127, 148, 149, 166, 214, 248
- Revolusi Jasmine*, 117, 248
- Salafi, 101, 207
- Sayyid Abbas al-Mussawi, 62, 248
- Sayyid Qutb, 17, 18, 21, 50, 98, 112, 204, 231, 248
- Siad Barri, 37, 38, 52, 53, 54, 56, 201, 202, 248
- Sudairi, 87, 115, 248
- Syirian National Council* (SNC), 168, 248
- taghoyyur*, 110, 212, 226, 248
- Thaif Accord*, 70, 71
- The Failed State, 36, 39, 69, 75, 201 203, 232
- The National Islamic Front* (NIF), 32, 72, 198, 229, 248
- Turabi, 32, 33, 43, 44, 45, 46, 47, 198, 199, 237, 247
- Uni Serikat Buruh Tunisia* (UGTT), 123, 214, 248
- United Nation Support Mission in Libya* (UNSMIL), 139, 248
- Wahhabi of the land*, 104, 208
- Wahhabi of the sea*, 104, 208, 248
- Yemen Socialist Party*/YSP, 169, 222, 224, 248
- Zine El Abidine Ben Ali, 117, 248

Buku ini tidak diperjualbelikan.



BIOGRAFI PENULIS

Nostalgiawan Wahyudhi

Peneliti pada Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI sejak 2014 hingga sekarang. Penulis memperoleh gelar S1 dari Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pada 2003 dan S2 (Master) di Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, International Islamic University of Malaysia (IIUM) pada 2011. Penulis juga aktif sebagai staf pengajar di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Penulis aktif di berbagai penelitian di bidang kajian politik Islam, gerakan Islam transnasional, dan studi Timur Tengah.

M. Hamdan Basyar

Peneliti pada Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI sejak 1984 hingga sekarang dan Dosen Pascasarjana UI Program Kajian Timur Tengah dan Islam. Gelar sarjana diperoleh dari Fakultas Sastra Arab UI dan S2 (M.Si.) dari Program Kajian Strategik Ketahanan Nasional UI. Penulis juga menjabat sebagai Penasehat Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES).

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Dhurorudin Mashad

Peneliti pada Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI sejak 1992 hingga sekarang. Gelar sarjana (S1) diperoleh dari Jurusan Ilmu Politik FISIP UI, gelar S2 (M.Si.) diperoleh dari Program Kajian Strategik Ketahanan Nasional UI, sedangkan gelar S3 diperoleh dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.

Muhammad Fakhry Ghafur

Peneliti pada Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI sejak 2010 hingga sekarang. Memperoleh gelar Sarjana Sastra Arab dan Studi Islam dari The Faculty of Islamic Call Tripoli-Libya pada 2006. Magister Ilmu Al-Qur'an dan Studi Islam diperoleh dari Institut PTIQ Jakarta tahun 2009.

“Many Faces of Political Islam in the Middle East is a fine piece of work that deals with the dynamics of Islamic political movements in the Middle East and North Africa. It is an important reference for scholars and students who are trying to make sense of the resurgence of these Islamist movements and how they dominated the political scene and shaped its horizons before and after the outbreak of the Arab spring in the second decade of the twenty-one century.”

—**Ahmed Ibrahim Abushouk**

Professor of Modern
and Contemporary History,
Qatar University

Many Faces of Political Islam in the Middle East

Arah Baru Gerakan Politik Islam
Pasca-Arab Spring

Buku ini merupakan hasil penelitian panjang mengenai Politik Islam di Timur Tengah yang dilakukan oleh peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI sejak 2013-2018.

Buku ini mengupas secara komprehensif dan mencoba menjawab berbagai hal, seperti bagaimana pengaruh gelombang pasca Arab Spring terhadap negara-negara di Timur Tengah? Bagaimana wajah politik Islam di kawasan Timur Tengah? dan Bagaimana sikap negara-negara di kawasan Timur Tengah dalam menghadapi tantangan dari perilaku politik yang sangat dinamis pasca Arab Spring?

Simak selengkapnya dalam buku ini. Selamat membaca.

“Buku ini sangat penting dalam beberapa hal: pertama, membahas dinamika dan kompleksitas politik Islam di Timur Tengah kontemporer; kedua, menggambarkan gejala transisi dari otoritarianisme ke demokrasi di beberapa negara Arab; ketiga, mendorong kajian komparatif tentang politik Islam dan transisi menuju demokrasi dengan Indonesia yang sama-sama berpenduduk mayoritas Muslim. Dengan cakupannya yang luas, karya ini menjadi bacaan wajib bagi setiap dan seluruh pengkaji dan peminat kajian Timur Tengah atau Dunia Arab, politik Islam dan demokrasi.”

—Prof. Azyumardi Azra, CBE

Guru Besar Sejarah Komparatif Masyarakat-Masyarakat Muslim

“Timur Tengah (dan juga Afrika Utara) menjadi kawasan yg paling dinamis bahkan membara, terutama sejak Arab Spring yg telah berkembang menjadi "Arab Summer" yg masih membawa hawa panas konflik di Suriah dan Yaman. Begitu juga, bagian dunia ini menjadi kawasan "perang perwakilan" (proxy war) khususnya antara Arab Saudi dan Iran, yg menampilkan "Perang Dingin" antara dua blok teologis, Sunni dan Syiah, juga antara kekuatan-kekuatan bipolar dan multipolar dunia. Semuanya membawa resonansi ke Dunia Islam dan dunia pada umumnya, dan mempengaruhi perubahan geopolitik dan geoekonomi global. Maka buku yg menganalisa perkembangan Kawasan TimTeng ini menjadi penting dan perlu dibaca.”

—Prof. M. Din Syamsuddin

Guru Besar Politik Islam Global FISIP UIN Jakarta
Ketua Umum PP Muhammadiyah (2005–2015)



Diterbitkan oleh:
LIPI Press, anggota Ikapi
Gedung PDDI LIPI Lt. 6
Jln. Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta Selatan 12710
Telp.: (021) 573 3465 | Whatsapp 0812 2228 485
E-mail: press@mail.lipi.go.id
Website: lipipress.lipi.go.id | penerbit.lipi.go.id

ISBN 978-602-496-151-0



9 786024 961510